No. 51 Mei 1988

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

MEMBUDAYAKAN PENGAWASAN MELEKAT

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT**.
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI**.
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA**.
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.

Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Anono Poernomo
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noenjathy
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA
Subyanto SP
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu

STT NO 823 SK DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Pengawasan & Pikiran Masyarakat.

FOKUS

Penataran Pengawasan Melekat Menggugat Kepanutan Aparatur. Wawancara dengan Menpan Sarwono Kusumaatmadja.

LAPORAN UTAMA

Membudayakan Pengawasan Melekat. Suara tentang pengawasan melekat kian nyaring. Ada keharusan kita mulai memperhatikan fungsi manajemen yang satu ini dengan sungguh-sungguh. Dia belum bisa berjalan dengan baik karena belum menjadi kultur kita. Benarkah? Ikuti wawancara dengan Albert Hasibuan, Leo Utama, Bintoro Tjokroamidjojo, dan Prof drs Pamoedji MPA serta Soeprapto SH.

LAPORAN KHUSUS

Safari Ramadhan, Perjalanan Yang Menggugah Rasa Kebersamaan, serta apa kata Harmoko sendiri tentang perjalanan yang meletihkan itu?

NASIONAL

Harkitnas Hendaknya Memperkokoh Wawasan Kebangsaan Indonesia; Memperbaiki Pendidikan Nasional Tanpa Gebrakan; Industri Kecil Dan Kerajinan Memiliki Posisi Strategis; Makin Mencuat Prestasi Kedokteran Kita; Akhirnya Disepakati Perlindungan Hak Cipta Indonesia-MEE; Idul Fitri Dalam Semangat Kesederhanaan Tantangan AMPI dan Mengapa Harus Mudik?

KOMENTAR

ORGANISASI

Dari Bawah Ke Atas Dengan Merit System; Pemilihan Pengurus DPD Golkar Gunakan Sistim Formatur; Penyegaran Komisaris Kecamatan/Desa; Susunan Panitia Munas IV Golkar dan Golkar Dari Atas Ke Bawah Dari Bawah Ke Atas.

SPEKTRUM

Koperasi Sebagai Pemegang Saham, oleh Widjanarko Poespoyo; Catatan Kecil Di Sekitar Ramadhan Dan Idul Fitri oleh Syamsul Mu'arif; Syafaat Habib menulis Memasuki Industrialisasi Dengan Kepribadian Dan Kewaspadaan, Saleh Afiff tentang Kebijaksanaan Pokok Pemeriksaan Dalam pembangunan Nasional serta Soekarno D membahas Astek Sebagai Salah Satu Bentuk Jaminan Sosial.

INTERNASIONAL

Yusuf Wanandi menulis tentang Perkembangan Strategis Kawasan Pasifik-Asia Menjelang Abad 21.

SENI & BUDAYA

De Man Van Lebak oleh Maria Sugiharto

RESENSI

Menyimak Teori Pers Secara Jeli

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

Drs Soedarmadji

Digitized by Google

Pengawasan & Pikiran Masyarakat

Salah satu tekad penting yang menjadi bekal Kabinet-Pembangunan V yang kini telah berusia dua bulan lebih, adalah masalah pengawasan internal yang tak terlepas dari komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Presiden Soeharto sendiri yang menggarisbawahi masalah pengawasan tersebut, tatkala mengumumkan susunan personalia kabinet baru. Penggarisbawahan itu kali ini lebih tebal dari masa yang lampau, juga terasa lebih bergema dan lebih memasyarakat. Adalah Wakil Presiden yang diminta untuk mengkoordinasi peningkatan pengawasan tersebut di masa mendatang ini. Dan secara bersungguh-sungguh pula, Wakil Presiden telah melakukan langkah-langkah persiapan awal, termasuk dibukanya Kotak Pos 5000 Jakarta 10000 untuk menampung keluhan, laporan dan indikasi dari masyarakat mengenai lah-hal yang menyangkut penyalahgunaan dan penyimpangan oleh aparat. Langkah awal lainnya ialah penyelenggaraan penataran pengawasan di lingkungan para pimpinan departemen dan instansi yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa sejak mula bagi pemerintah Orde Baru pengawasan merupakan fungsi tak terpisahkan dari komitmen penegakan keadilan dan kebenaran. Dalam prinsip, pemerintah tidak pernah mentolerir adanya penyelewengan dan korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Maka adalah pada tempatnya bila masalah pengawasan digarisbawahi.

Dalam hal pengawasan ini, pejabat yang diawasi mestinya berterima kasih, karena dengan pengawasan yang lebih dini dan tepat waktu, penyelewengan bisa dihindarkan di lingkungannya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi negara dan abdi rakyat dengan demikian dapat diharapkan lebih lancar. Sebaliknya, yang mengawasi tentu tidak bermaksud hanya mencari-cari kesalahan saja. Apalagi memanfaatkan kesalahan orang lain itu untuk tujuan yang tak kalah jeleknya, katakanlah menjurus shantagne. Tujuan pokoknya memang bukan mencari kesalahan, tetapi justru mencegah terjadinya kesalahan, sehingga manajemen pemerintahan dan pengaturan negara ini berjalan dengan baik dan selamat. Pengawasan harus menjadi fungsi integral dan melekat. Merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi pemerintah.

Akan tetapi suatu mekanisme pengawasan, bukan hanya kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hasrat akan keadilan dan kebenaran. Masyarakat menginginkan negara yang merupakan milik bersama ini diatur dengan baik oleh suatu pemerintahan yang bertanggungjawab. Maka sudut pandang masyarakat dalam hal pengawasan dan pemberantasan korupsi dan sejenisnya, perlu diperhatikan. Bila kita coba membaca apa yang kira-kira ada di benak masyarakat, kurang lebih adalah — sepanjang apa yang mampu kita simpulkan sebagai berikut ini.

Pemerintah, sebagaimana yang diakui masyarakat, selama ini memang telah melakukan pengawasan, antara lain dan terutama untuk mencegah korupsi, ketidakadilan dan segala ketidakbenaran lainnya. Tetapi pengawasan itu belumlah mencapai titik optimal sehingga masih terjadi kasus. Pemberantasan korupsi dan penindakan atas berbagai penyalahgunaan pun telah dilakukan, tetapi laju pemberantasan masih kalah oleh laju tindak korupsi dan penyalahgunaan. Banyak yang telah ditindak, tetapi masyarakat percaya bahwa masih ada diantaranya tak tersentuh. Masyarakat berprasangka, yang tak tersentuh ini bukan karena kealpaan para penindak, tetapi karena yang bersangkutan cukup berkekuatan. Sumber kekuatan itu tidak selalu terkait dengan jabatan yang tinggi atau posisi kunci dalam pemerintahan, melainkan karena korupsi yang dilakukan adalah besar. Dan dana yang besar itulah menjadi kunci kekuatan. Masyarakat percaya kepada mitos 'uang bisa membeli segalanya' — yang dalam kenyataan dan praktek hidup sehari-hari kerap kali ditemui. Dalam hal ini, seorang koruptor bisa lolos, bukan karena ia sebenarnya memang bersih, tetapi karena ia mengeluarkan biaya untuk menghapus jejak. Termasuk, 'membeli' pihak-pihak yang harus menindak. Maka lahirlah pemeo, maling ayam akan lebih berat hukumannya daripada pelaku korupsi besar-besaran. Maling ayam tidak mampu mengatur pemerataan, sebab berapalah harga ayam. Karenanya, ia mudah terjerat, gampang ditindak.

Pemikiran seperti di atas, yang 'hidup' di benak masyarakat, dengan semangat mawas diri demi kebaikan bersama, harus diakui di sana-sini cukup berlogika dan di sana-sini mengandung kebenaran dalam kadar tertentu. Meskipun sebaliknya harus diakui pula terdapat kekeliruan umum dari masyarakat, yang berupa kecenderungan menggeneralisir. Sehingga, dengan mudah seorang anggota birokrasi pemerintahan dianggap begitu saja 'pasti korupsi' bilamana kehidupan ekonomisnya 'longgar' dalam arti agak berlebih-lebihan. Tetapi masyarakat juga tidak terlalu ketat. Mereka yang berbuat sekedar untuk memperpanjang kemampuan gaji yang kecil agar cukup untuk kebutuhan makan minum sebulan, cenderung dimaafkan. Hanya yang cukup menyolok kehidupan ekonomisnya — apalagi demonstratif — yang jadi sorotan dan cemoohan, walaupun sekedar dalam 'gerutu berbisik'. Apalagi terhadap mereka yang kentara 'tidak satunya kata dengan perbuatan'.

Tentu kita semua bisa 'bersyukur' bahwa masyarakat punya 'tepo seliro' mendalam sehingga senantiasa mampu membatasi rasa 'marah' mereka terhadap masih adanya kenyataan praktek ketidakbenaran dan ketidakadilan oleh 'segelintir' di antara sesama bangsa yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Tetapi segala sesuatu memiliki batas. Tak ada yang tak berujung dalam kehidupan fana ini. Pastilah hal ini disadari dengan baik oleh para penentu kebijaksanaan dalam pemerintahan, sehingga dari waktu ke waktu semangat mawas diri makin ditingkatkan. Cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selangkah demi selangkah lebih didekati.

Dalam konteks ini menjadi amat menarik betapa — melebihi waktu yang lampau — untuk periode lima tahun mendatang ini diniatkan bahwa masalah pengawasan akan mendapat penggarisbawahan pelaksanaan yang lebih tebal. Penataran pengawasan pun telah dimulai. Bersama dengan itu, laporan masyarakat mengenai penyelewengan dan ketidakbenaran lainnya telah dibukakan pintu lebar-lebar oleh kantor Wakil Presiden melalui Kotak Pos 5000 Jakarta 10000. Dan ternyata, laporan-laporan yang masuk betul-betul diolah dan mendapat tidak lanjut sebagaiman mestinya. Tidak sekedar proforma. Semoga ini merupakan awal yang sejati bagi terciptanya partisipasi masyarakat yang melekat dalam masalah pengawasan.

Terhadap penampilan tekad pemerintah dalam masalah pengawasan sebagai bagian dari penegakan kebenaran dan keadilan ini, memang di sana sini masih disambut skeptis oleh sebagian anggota masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula — untuk tidak mengatakannya lebih banyak — yang percaya bahwa kali ini semuanya serba bersungguh-sungguh. Banyak yang yakin bahwa Pak Harto akan mengoptimalkan pencapaian cita-cita pemerintahan yang bersih dalam masa jabatan lima tahun beliau yang kelima ini!

Digitized by Google

Wawancara Dengan Menpan Sarwono Kusumaatmadja

Penataran Pengawasan Melekat Menggugat Kepanutan Aparatur

Pengawasan melekat belakangan ini menjadi buah bibir. Seminar dan diskusi menyorotnya dengan intensitas yang semakin mengemuka. Dibutuhkan semacam terobosan agar pengawasan melekat ini mejadi kultur manajemen kita. Untuk itu jalan penataran ditempuh. Ampuh kah cara ini?

Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, yang belum genap empat bulan menduduki jabatan itu, yakin bahwa penataran pengawasan melekat bagi pejabat eselon I, II dan III yang dilaksanakan nanti cukup ampuh untuk menumbuhkan budaya pengawasan di kalangan aparatur pemerintah. Keyakinan ini bukannya tanpa dasar.

Menurut Sarwono, suara-suara skeptis yang meragukan kemempanan penataran sebagai instrumen yang mampu menumbuhkan pembudayaan pengawasan, memang sering terdengar. Tapi penataran pengawasan melekat ini, dalam bentuk fisiknya tidak seperti penataran-penataran yang umumnya berlaku sekarang ini. ''Penataran itu built-in dengan tugas sehari-hari, sehingga tidak diperlukan waktu khusus, biaya khusus, tempat khusus dan seremoni khusus. Jadi tidak ada pemborosan,'' ujarnya.

Selain itu metode yang dianut pun beda, yaitu dengan cara diskusi dan studi kasus. Dan mengenai modul ini, Sarwono sebagai penanggungjawab penataran pengawasan melekat bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang sekaligus bertindak sebagai penyelenggara penataran, dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga pengawasan lain yang terkait. LAN dengan demikian ditugaskan pula mempersiapkan kerangka acuan, buku panduan dan organisasi penataran itu sendiri.

Bahwa penataran sebagai instrumen

tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya pengawasan, ya! Tapi itu tidak berarti penataran menjadi pilihan yang haram disentuh. ''Bila dilaksanakan dengan cermat, maka penataran bisa menjadi pilihan efektif dalam proses pembudayaan,'' ujarnya lagi. ''Dengan penataran kita berharap bisa menemukan kesistiman yang handal sekaligus pembentukan sikap mental.'' Jadi, skeptis terhadap penataran boleh-boleh saja, asal tidak lantas apriori mencap penataran sebagai pilihan yang tidak bermakna. Karena itu Sarwono merasa ditantang. Ditambah dengan dukungan positif dari koleganya dalam kabinet, dia yakin penataran pengawasan melekat ini bisa mencapai sasaran.

Di seluruh Indonesia (pegawai negeri) terdapat sekitar 2000 pejabat eselon I. Dari jumlah ini hanya sekitar 500 (eselon I) yang mempunyai fungsi memimpin. Mereka inilah yang akan ditatar tentang pengawasan melekat, dengan pengelompokan 100 orang setiap angkatan. Dari mereka (yang 500 tadi) diwajibkan melakukan penataran bagi eselon II, dan eselon II ini pada gilirannya akan menjadi penatar bagi pejabat-pejabat eselon III. Sedangkan para pejabat eselon I selain menatar pejabat eselon II, juga diharuskan menatar pejabat eselon I yang tidak berada dalam fungsi memimpin.

Dengan model diskusi dan pembahasan per kasus, menurut Sarwono, penataran ini akan sangat rawan bagi mereka yang melakukan penyelewengan. Namun andaikata dalam penataran nanti ditemukan hal-hal janggal dengan bobot pelanggaran cukup berat, tidak berarti nanti ada pemutihan. ''Kita tidak ingin nanti habis penataran orang baru merasa harus bekerja baik,'' ujarnya.

Sangat Besar

Presiden Soeharto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan pengawasan. Dalam tahun ini saja beberapa kali Presiden mengingatkan tentang pentingnya pengawasan, antara lain, dalam pidato pengantar APBN bulan Januari, ia mengatakan pengawasan sama pentingnya dengan dukungan. Ketika dilantik sebagai Presiden, pada bulan Maret, ia mengatakan bahwa pengawasan dan pelaksanaan pembangunan sama pentingnya. Dan ketika mengumumkan nama-nama menteri kabinet, Pak Harto mencanangkan bahwa akan diadakan penataran pelaksanaan pengawasan melekat bagi pejabat eselon I, II dan III. Dan pada 31 Maret yang lalu, diadakan rapat koordinasi pengawasan oleh Wapres. Dalam rapat itu diputuskan bahwa penataran ini menjadi tanggung jawab Menpan dan unsur pelaksananya adalah LAN.

Berdasarkan rapat itu, diadakan langkah-langkah persiapan. Setelah hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip persiapan selesai, Menpan dan Ketua LAN Bintoro Tjokroamidjojo menghadap Presiden untuk minta petunjuk. Presiden menyetujui prinsip-prinsip penyelenggaraan yang dipersiapkan dan akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pengawasan melekat ini.

Pengawasan melekat menurut Sarwono ialah salah satu dari 4 jenis pengawasan yang ada, yaitu pengawasan

Digitized by Google

fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan mengadakan pengawasan seperti Irjen, di departemen dan BPKP dan Irjenbang. **Pengawasan politik** oleh DPR; **Pengawasan oleh BPK**, lembaga tinggi negara yang melakukan pengawasan eksternal seperti DPR; **Pengawasan sosial** yang dilakukan oleh mass media, ormas, seperti Lembaga Konsumen, LSM, juga individu seperti orang yang menulis di surat kabar, bentuk-bentuk kotak pos dan sebagainya. Di samping itu ada **pengawasan melekat**, yaitu pengawasan oleh atas kepada bawahan.

Menurut Presiden pengawasan melekat ini belum berjalan semestinya. Ia mengkonstatir atasan bersikap *ewuh pekeweuh* (enggan) untuk melakukan pengawasan.

Dari hasil pengamatan Sarwono lemahnya pengawasan melekat bukan hanya soal keengganan. Ada alasan lain yang dinamakan kolusi atau persekongkolan atasan dan bawahan sehingga pengawasan tidak jalan. Dalam hal ini pengawasan sangat dibatasi oleh pemanfaatan masalah-masalah kepentingan. Sebab lain mungkin tugasnya tidak dihayati. Dan karena tidak dihayati maka tugas pengawasan tidak jalan. "Karena kalau kita tidak mengetahui bagaimana melaksanakan tugas, tentu tidak akan dapat menjalankannya," tegas Sarwono.

Padahal pengawasan adalah kunci manajemen yang harus dilakukan. Kunci manajemen itu ada 3 yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Ketika Orde Baru lahir, yang menjadi titik perhatian adalah perencanaan. Untuk itu Bappenas didirikan. Fase berikutnya adalah pelaksanaan yang menjadi titik tumpuan pembangunan. Dan rupanya supaya pengawasan ini dapat dijadikan titik perhatian, maka perlu upaya khusus.

Karena belum semua pejabat memahami bahwa manajemen mengandung tiga unsur itu, maka *extra effort* yang dipilih adalah penataran.

Karena terkait dengan kedinasan, maka biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan penataran eselon I, mencetak kerangka acuan, buku panduan dan menjalankan sistem monitoring atau evaluasi, tidak makan biaya.

Dengan pengawasan melekat ini dicapai suatu suasana bahwa pengawasan melekat ini adalah hal yang wajar, dan sangat diperlukan, dan nantinya berjalan dengan sendirinya, efisien dan tertib.

Bagaimana mengetahui bahwa pengawasan melekat ini berjalan baik?

Ada beberapa indikasi: (a) kalau aparat fungsional pengawasan sudah berubah fungsi menjadi unsur pengawasan yang menunjang, sedangkan unsur pengawasan paling pokok adalah pengawasan melekat. Sekarang terkesan, pengawasan yang pokok itu dilakukan oleh pengawasan fungsional tadi. "Itu tidak ideal. Karena kalau bicara pengawasan asosiasi kita adalah Irjen. Yang ideal ialah apabila sistem pengawasan melekat sudah berjalan sebagai unsur pengawasan preventif, sedangkan yang fungsional itu hanya sebagai penunjang. Nanti kalau tugas Irjen dan BPKP itu makin ringan, itu berhasil. Tetapi tentu lembaga pengawasan fungsional ini tidak dihilangkan. Keberadaannya adalah untuk menunjang pengawasan," katanya.

(b) Bahwa masyarakat sudah merasa aparatur sebagai unsur pelayanan makin baik performance-nya, dan dapat terlihat dari kurangnya pengaduan dan keluhan.

(c) Disiplin aparatur meningkat. Kalau pegawai suka bolos atau masuk kantor terlambat, dan setelah masuk kantor kerjanya baca koran, hal itu karena mereka tidak mendapat job yang jelas, bukan karena gajinya kecil. Atasannya tidak memberikan job, karena atasan tersebut mungkin juga tidak mempunyai job. Perincian tugas ke bawah tidak dilaksanakan dengan baik, dan orang itu tidak diawasi. Karena tidak diawasi, tidak diberi job yang memadai, maka seseorang akan malas masuk kantor.

Pengawasan tidak berjalan juga karena tugas tidak dimengerti. Kalau atasan tidak mengerti tugasnya, ia juga malas masuk kantor karena tidak tahu untuk apa. Maka kalau atasannya juga demikian, akan merembet ke bawah. Dengan sendirinya bawahan masa bodoh. Jadi untuk dapat menghayati pekerjaan seseorang sehingga pengawasan melekat berjalan baik, perlu ditinjau kembali keseluruhan fungsi manajemen, yaitu unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

"Kalau unsur perencanaan dan pelaksanaan tidak dipahami, dengan sendirinya yang ketiga juga tidak jalan."

Penataran ini mengarah pada penegakan sistem atau sikap mental? Kedua-duanya. Kita menempuh cara praktis, yaitu dengan mengadakan studi kasus. Misalnya bagaimana pencegah karyawan agar tidak bolos. Ada absensi, ada atasan yang harus memeriksa absensi. Hanya banyak yang tidak melaksanakan ketentuan itu. Dan itu harus diingatkan. Banyak aturan yang harus disegarkan melalui penataran itu. Walaupun itu menyangkut sistem tidak perlu kita terlalu teoritis, praktis saja, memanfaatkan sarana yang ada, berupa peraturan, disamping motivasi dalam manajemen. Itu juga sangat penting.

Dan tidak kalah penting adalah motivasi yang harus dibangun. Kesulitan ekonomi dan keadaan keuangan yang belum membaik menyebabkan belum ada prospek dalam waktu dekat yang memberi harapan gaji akan naik. Dalam keadaan seperti ini wajar bila pegawai negeri dihadapkan pada dua (2) pilihan: keluar atau bertahan. Kalau keluar berarti menemukan keadaan yang lebih baik di swasta. Tetapi kalau bertahan, pilihannya mau rajin atau bermalas-malasan. Menurutnya, bermalas-malasan tidak ada gunanya, karena akan menjadi manusia yang menurun kualitasnya.

Namun kalau pegawai rajin, tapi tugas tidak ada untuk apa? "Itu urusan atasan untuk membagi habis tugas kepada bawahannya," tegas Sarwono.

Pegawai negeri harus tahu bahwa mereka mengemban dua fungsi penting: (1) panutan, (2) unsur pelayanan, abdi masyarakat dan abdi negara. Pegawai negeri harus mempunyai rasa kehormatan mengemban itu, walaupun tidak menikmati materi berlebihan. Sebab kalau hanya mengeluh karena gaji kecil, itu artinya hanya bicara dalam lingkaran setan, karena keluhan dan kemalasan kerja, tidak menyebabkan gaji naik. "Kalau ia jadi panutan dan menjadi unsur pelayanan yang baik, maka sikap demikian pada gilirannya akan menaikkan mutu pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional naik, maka gaji akan naik," tegasnya.

Seseorang yang rajin dan tekun akan mempunyai pilihan hidup yang baik. Pada saatnya ia dapat saja ke swasta, dan akan dicari orang, karena swasta tidak cari orang yang malas. Maka dari segi apapun, sikap bermalas-malasan tidak ada gunanya. Gaji kecil bukan alasan untuk itu.

Penampungan Kerabat

Dari segi manajemen, kepegawaian itu unsur yang menunjang. Artinya ada pekerjaan dan pekerjaan itu membutuhkan orang. Namun dalam praktek pegawai negeri itu tidak semata-mata dipandang secara lugas sebagai sumber *manpower* untuk melaksanakan tugas

Digitized by Google

pemerintahan. Pegawai negeri juga dipandang sebagai sumber penampungan kerabat. Jadi ada fungsi sosialnya. Pemikiran bahwa pegawai negeri sebagai sumber penampungan kerabat dan konco harus dihilangkan. Ada yang melihat kepegawaian negeri sebagai kawasan kekuasaan pribadi yang harus diperkuat dan diperbesar dengan rekrutmen. "Nah pemikiran semacam itu harus dihilangkan". Banyak yang beranggapan mereka menjadi orang besar kalau dapat merekrut orang, dikelilingi oleh banyak orang, walaupun tidak jelas pekerjaannya.

Dalam paham tradisional, banyaknya orang yang mengelilingi seseorang, menjadi atribut kekuasaan. Makin banyak makin bergengsi. Celakanya dalam praktek, orang-orang tersebut adalah pegawai di luar formasi yang gajinya disiasati lewat belanja barang. "Ini hal-hal yang harus saya benahi," janji Sarwono.

Menpan menurutnya mengurusi 2 tugas besar, yaitu yang menyangkut sistem pemerintahan, dan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem pemerintahan itu. Keduanya harus didayagunakan. Karena itu keliru bila ada yang beranggapan kantor Menpan adalah tempat penertiban, karena penertiban hanya salah satu fungsi pendayagunaan.

Penataran memang *special effort* untuk menegakkan pengawasan melekat. Tetapi yang menjadi persoalan barangkali, setelah penataran selesai bagaimana *enforcement* pengawasan melekat ini. Menurut Sarwono caranya adalah dengan menggugah disiplin lewat penerapan aturan dan sanksi yang ketat. Dan karena sistem kita adalah hirarkis, maka harus dimulai oleh pejabat atau pegawai yang memiliki legitimasi sebagai atasan.

Dia memberi contoh, bahwa banyak pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat. Dari data yang masuk di Badan Administrasi Kepegawaian Negara, pelanggaran disiplin di lingkungan pegawai negeri umumnya menyangkut kemangkiran dan pelanggaran PP 10, seperti kawin lagi.

Bila sanksi dan penegakan disiplin menjadi bagian yang melekat dalam pengawasan melekat, maka muncul pertanyaan lain lagi yaitu sejauh mana penegakan hukum bisa diterapkan bagi pegawai yang ketahuan nakal? Pengawasan melekat menurut Sarwono adalah yang menyangkut wewenang atasan terhadap bawahan seperti diatur dalam ketentuan wewenang itu sendiri, misalnya hak mengeluarkan putusan tentang tindakan administratif. Tetapi untuk kasus tertentu — seperti menyangkut tindakan kriminal misalnya — dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Bila ada kasus seperti itu, maka menjadi tugas Irjen untuk mengusutnya. Lalu dikaji bobot pelanggaran. Bila menyangkut disiplin misalnya, dikenakan tindakan administratif. Tetapi kalau bersifat kriminal, harus dilaporkan ke polisi.

Soal Manajemen

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, kita berpegang pada pameo bahwa tidak ada prajurit yang salah, tetapi jenderal. Itu artinya kalau ada bawahan yang bersalah, pimpinannya yang bertanggungjawab. Singkatnya, kesalahan bawahan adalah kesalahan pimpinan.

Sarwono mengakui banyak kendala dalam menghidupkan pengawasan melekat ini. Pameo diatas memang bukan barang baru. Hampir setiap pimpinan mengenalnya. Dalam khasanah budaya hampir setiap bangsa, kebenaran itu dianut. Masalahnya, bila sampai seorang atasan tidak melakukan pengawasan, itu berarti sang atasan mungkin terlibat dalam kolusi (persekongkolan) dengan bawahannya. Seandainya atasan itu bersih, dia pasti punya keberanian menindak bawahan yang nakal.

Dalam kultur kita, ada rasa enggan untuk menegur atau mengawasi orang lain, kendati kita tahu bahwa yang dilakukan orang itu tidak benar. Kalau sering diawasi, dengan gaya memberontak orang kita akan mengatakan "kok nggak percaya benar sama saya sih." Pengawasan melekat ingin menyingkirkan *barrier* itu, karena masalahnya bukan pada percaya atau tidak percaya, tapi soal manajemen.

Kini pengawasan melekat mulai kita canangkan. Tujuan yang paling ideal adalah menjadikan pengawasan melekat, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan *built-in control* itu, perilaku manajerial kita dalam berbagai segmen kehidupan dan aktivitas. Bila hal ini telah menjadi kultur kita, maka menurut Sarwono, atasan yang tidak melakukan pengawasan akan kegerahan sendiri. Bawahan pun nantinya akan memberitahu atasan, "kok kami sudah lama tidak diperiksa". Ini tentu saja kondisi ideal.

Sarwono menunjuk soal lain lagi yang menjadi kendala pengawasan melekat ini, yaitu fakta bahwa dalam strata kepegawaian negara, jabatan-jabatan fungsional masih sangat terbatas dan belum tertata baik. Sebagai contoh dia menunjuk bagaimana komposisi pegawai pada tingkat eselon I yang masih timpang. Dari sekitar 2000 eselon I dewasa ini, hanya 500 yang mempunyai fungsi memimpin. Selebihnya tidak.

Kepincangan ini menyebabkan, orang ramai-ramai menjejali jabatan struktural. Kita belum punya penjenjangan yang memadai di bidang fungsional. Yang agak tertata baik adalah untuk profesi guru, dokter dan peneliti. Tetapi adakah jenjang yang tertata dan berprospek di kepegawaian negara untuk seorang ahli teknik misalnya? Padahal untuk suatu masyarakat yang semakin maju, penjenjangan dan penghargaan terhadap posisi-posisi fungsional harus semakin tertata. Kalau jabatan struktural mentok, misalnya, orang harus mendapat penghargaan yang layak di jenjang fungsional.

Selain itu, Sarwono menunjuk lemahnya apa yang ia sebut sebagai *policy audit*. Seorang Irjen harus memiliki kemampuan itu. Selama ini kalau orang berbicara tentang pengawasan, maka asosiasinya adalah pengawasan keuangan atau *financial audit*. Yang masih kurang (dan mungkin lemah) adalah penilaian atas kebijakan. Karena itu tidak mengherankan bila sebuah kebijakan dari pusat bisa ditafsir macam-macam setelah sampai di daerah. Juga dalam rangka pengawasan melekat ini adalah *performance audit* yang menyangkut prestasi, kerajinan, ketaatan. *Performance audit* perlu karena bisa saja kita dianggap taat, tetapi ketaatan yang diperlihatkan mungkin keliru. Jadi kemampuan audit dalam dimensi yang agak luas diperlukan dalam konteks pengawasan melekat ini.

Dengan demikian bila pengawasan melekat telah menjadi perilaku yang melekat dalam tata kerja, maka pada tahap itu kita boleh mengatakan dia telah menjadi kultur kita. Kesistiman dengan demikian bakal tumbuh membuntuti. Dan bila manajemen kita telah demikian canggih, maka tidak perlu lagi yang namanya sidak dan bentuk-bentuk pengawasan mendadak lainnya.

Pengawasan melekat kini menjadi prioritas dari sekian banyak pilihan utama pembangunan bangsa. Untuk itu banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satu adalah soal motivasi. Bila swasta motivasi eksistensinya adalah mati atau hidup, maka pegawai negeri motivasinya adalah kepanutan. Dan penataran pengawasan melekat antara lain menggugat kepanutan itu.□

(LT/RMS/SB/SG)

Digitized by Google

Membudayakan Pengawasan Melekat

Masalah pengawasan kini bergema kian nyaring, seakan menuntut porsi pengutamaan. Para pejabat eselon (I, II dan III) harus ditatar tentang esensi pengawasan melekat, yang disingkat dengan akronim waskat. Tujuannya adalah agar pengawasan melekat diterima secara wajar, bukan jadi momok. Ia harus jadi kebutuhan yang melekat pada tata kerja. Pertanyaan kita: "Apakah pengawasan melekat ini adalah barang baru yang asing dalam budaya kerja kita?"

Tentu tidak. Sejumlah pakar dan praktisi pengawasan berargumentasi bahwa pengawasan bukan hal yang begitu asing dalam tata kerja kita. Kalau belakangan ini pengawasan melekat tampil begitu mengemuka sehingga perlu semacam *special effort* untuk menghidupkannya (*Baca Fokus*), bukan berarti pengawasan terabaikan secara substansial, tapi bobot penekanannya yang agak enteng. Maklum sebagai bangsa yang sedang dan baru membangun, tidak mungkin menempatkan segala daftar kebutuhan pada peringkat prioritas pertama.

Bahwa sekarang pengawasan melekat menjadi begitu aktual, kata Irjen Departemen Dalam Negeri, Prof Drs Pamoedji MPA, bukan karena di masa lalu pengawasan dianaktirikan. Dia menjadi aktual dengan relevansi yang meninggi, sejalan dengan tekad kita lebih meningkatkan lagi prestasi dan manajemen pembangunan itu sendiri. "Bila kita ingin lebih sempurna, maka beberapa hal dalam totalitas upaya pembangunan mesti mendapat bobot perhatian dan penanganan secara khusus," ujarnya. Ini keharusan yang wajar.

Prof Drs Pamoedji MPA

Jadi menurut bekas Dirjen Agraria ini, pengawasan melekat yang belakangan ini muncul ke permukaan sebagai kebutuhan sebenarnya memantulkan keinginan kita melakukan koreksi terhadap apa saja kelemahan dan kekurangan peranan pengawasan sebelum ini. "Jadi sekali lagi, bukan karena di masa lalu pengawasan tidak dijalankan," ujarnya lagi.

Pemikiran gradual-positif seperti ini juga terungkap dari Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof Bintoro Tjokroamidjojo. Mengacu pada petunjuk Presiden Soeharto tatkala dia dan Menpan Sarwono Kusumaatmadja menghadap di Bina Graha dalam rangka melapor tentang program

Prof Bintoro Tjokroamidjojo

penataran pengawasan melekat bagi pejabat Eselon I belum lama ini, Bintoro mengungkapkan bahwa pengawasan melekat yang kini menjadi kebutuhan itu, memang muncul karena memang sekarang lah fase bagi fungsi manajemen yang satu itu.

Pada Pelita I dan II, katanya, sejalan dengan tekad kita memulai debut pembangunan, maka wajar apabila unsur perencanaan diprioritaskan kala itu. Untuk itu

Albert Hasibuan

maka badan-badan perencanaan, seperti Bappenas, dibentuk. Setelah perencanaan mulai berjalan dan berfungsi dengan baik, maka pada Pelita III dan IV, fungsi pelaksanaan dipentingkan dalam proses manajemen pembangunan. Dan setelah dua fungsi pertama terlaksana maka diperlukan pengawasan yang lebih meningkat. "Untuk itu lah maka sekarang ini, pada Pelita V, kita menggiatkan fungsi pengawasan," katanya.

Kepala Negara agaknya sangat menyadari betapa pentingnya pengawasan diberi bobot perhatian secara istimewa dalam periode kini dan mendatang. Dalam pidato pelantikan tanggal 11 Maret lalu, Presiden Soeharto bermohon agar pengawasan dilakukan sebaik-baiknya. "Pengawasan saya anggap sama pentingnya dengan dukungan, karena dengan pengawasan saya dapat terhindar dari kesalahan, dan bangsa kita akan terhindar juga dari kesulitan yang tidak perlu," kata Kepala Negara waktu itu.

Tidak hanya itu. Salah satu butir dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V (krida kedua) mencantumkan secara eksplisit tentang peningkatan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Secara implisit, krida kedua tersebut menghendaki pengawasan yang lebih tertata baik.

Prakondisi

Tetapi di mata Albert Hasibuan, cendekiawan Golkar yang juga pengacara, pengawasan melekat baginya, bukan hanya mempersoalkan asing atau tidaknya, tetapi lebih pada masalah persepsi. Pengawasan sebagai fungsi manajemen, hampir umum dikenal dalam tata kerja. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah persepsi yang terkadang berbeda atau rancu. Pengawasan, katanya, tidak atau belum

Digitized by Google

dilihat sebagai kebutuhan manajerial dalam rangka mengamankan target, tetapi lebih banyak dicurigai. Orang curiga kalau terus-terusan diawasi. Sang pengawas terkadang dibenci karena "mau tahu saja urusan orang lain".

Untuk membalikkan persepsi rancu seperti ini, menurutnya diperlukan beberapa prakondisi. Salah satu syarat awal adalah kesadaran di kalangan aparat pemerintahan bahwa pengawasan melekat akan membuat pelayanan terhadap publik akan semakin tertib dan cekatan. "Artinya seorang aparat (pemerintah) harus memahami dulu, pengawasan melekat itu untuk apa," ujarnya.

Keluhan Albert ini didukung oleh Bintoro. Dalam pengamatan Kepala LAN ini, ia melihat bahwa ada semacam salah kaprah terhadap tugas pengawasan yang sesungguhnya. "Ada suasana budaya yang mencurigai pengawasan seolah-olah fungsi manajemen yang cukup vital ini hanya diarahkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain saja. Di dalam lingkungan birokrasi (aparatur pemerintah), pengawasan melekat tidak atau kurang dijalankan karena banyak pejabat beranggapan fungsi mengawasi sudah dilaksanakan oleh pihak lain, yaitu lembaga-lembaga pengawasan fungsional, seperti BPKP, Irjen, Irwilprop dan sebagainya.

Dengan bekal keengganan seperti ini, maka para pejabat umumnya menilai pengawasan adalah pekerjaan tambahan yang merepotkan. "Kan sudah ada institusi pengawasan yang telah dibentuk untuk itu". Padahal dalam gaya manajemen yang baik, pengawasan adalah sesuatu yang wajar — bahkan mutlak — baik bagi yang mengawasi maupun yang diawasi.

Kematangan persepsi seperti inilah yang agaknya dibutuhkan. "Sebab kalau tidak ada pengawasan melekat, maka apa gunanya kita membuat rencana," kata Direktur Institut Manajemen Prasetya Mulya, Leo Utama. Dalam setiap pekerjaan, apapun jenisnya, pengawasan itu perlu. Bahwa orang tidak suka selalu diawasi, itu adalah sifat yang universal dari manusia. "Namun hal itu tidak berarti pengawasan tidak perlu," ujarnya.

Prakondisi lain — akibat logis dari syarat pertama — adalah kedekatan hubungan antara aparat pelayanan dengan publik yang dilayani.

Kematangan dan kesadaran agaknya penting bagi Albert, karena belajar dari pengalaman di masa lampau, semua upaya korektif yang berbobot gebrakan dan terobosan, pada umumnya hilang ditelan perjalanan waktu, sehingga lama-kelamaan orang lupa pada gebrakan itu sendiri. Gejala seperti ini terjadi, karena gebrakan-gebrakan yang dilontarkan lazimnya bersifat reaktif serta diperburuk oleh konsepsi yang rancu. "Agar pengawasan melekat tidak mengalami nasib yang sama, maka sangat diperlukan konsistensi dalam gebrakan. Ini baru mungkin kalau gebrakan itu didukung oleh konsep-konsep yang tidak rancu," ujarnya.

Kematangan presepsi tentang pengawasan, seperti yang dikemukakan Albert, tentu tidak dengan sendirinya akan membuat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan terhapus 100 persen. Bagaimana pun juga, kata cendekiawan ini, tidak mungkin menghilangkan kekurangan-kekurangan dalam kualitas pelayanan aparat birokrasi sampai setuntas-tuntasnya.

Ada syarat lain yang dikemukakan Albert. Selain kematangan persepsi dan kedekatan masyarakat dengan aparat birokrasi lewat kualitas pelayanan yang lincah dan bermakna, harus ada

Leo Utama

keterbukaan agar pengawasan melekat ini bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Kesediaan kantor Wakil Presiden membuka tromolpos 5000 untuk menampung keluhan dan saran dari masyarakat, disebutnya sebagai contoh yang patut dihargai. Masalahnya sekarang adalah bagaimana informasi dan keluhan serta saran dari masyarakat dihargai secara memadai. "Ini selain dibutuhkan keterbukaan tetapi juga semangat demokratis," ujarnya.

Agar pengawasan tidak dicurigai, karena bisa saja diboncengi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, maka harus ada kesadaran bahwa pengawasan bukan ditujukan ke arah mencari tahu kesalahan orang, tetapi dia adalah sebuah proses yang dibutuhkan. Dalam konteks kita dimana pengawasan terasa masih kurang, maka pengawasan melekat yang dijalankan adalah sebuah proses pendidikan untuk pendewasaan diri. Caranya? "Dalam masyarakat yang paternalistik seperti kita, maka proses pendewasaan diri sehingga pengawasan diterima sebagai kebutuhan yang wajar, harus dimulai dari atas, dari para pemimpin," ujar Albert.

Bukan Baru

Tatkala pengawasan melekat mulai dibicarakan, terasa seolah-olah ia adalah sesuatu yang baru. Padahal pengawasan itu sendiri adalah fungsi yang telah lama dikenal dalam dunia atau ilmu manajemen. Yang membuat hal ini seolah-olah baru, mungkin karena istilah pengawasan melekat itu sendiri, yang dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan built-in control.

Berbagai istilah dan penafsiran bermunculan di sekitar kata pengawasan melekat. Menurut Bintoro, terdapat banyak perbedaan di kalangan para ahli tentang hal ini. Ada yang mengartikan pengawasan melekat sebagai pengawasan oleh atasan langsung karena ia melekat langsung pada sebuah pribadi dan wewenang.

Tetapi ada juga yang mengartikan pengawasan melekat sebagai kontrol yang dilakukan oleh pejabat dengan menciptakan alat bantu yang disebut pengawasan manajemen. Bintoro mengakui kedua pengertian di atas, sangat rumit.

Dia lebih setuju dengan pengertian yang diungkapkan Presiden Soeharto bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen selain perencanaan dan pelaksanaan.

Kalau Sarwono mengartikan pengawasan melekat sebagai pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, maka Prof. Pamoedji agaknya memberi definisi yang lebih lengkap. Menurutnya, pengawasan melekat adalah pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh seorang pimpinan secara otomatis, ada atau tidak ada sentilan dari luar. "Inilah pengawasan melekat, karena dia melekat pada diri seorang kepala atau pimpinan, ada atau tidak ada dorongan atau perintah dari luar," katanya. Seorang Menteri, Kepala Dinas atau Kepala Biro, ada atau tidak ada sentilan dari luar, dia harus mengawasi bawahannya. Sedangkan menurut Leo Utama, pengawasan melekat adalah pengawasan yang di-

Digitized by Google

lakukan oleh diri sendiri. Artinya bila seseorang diberi kepercayaan atau tugas mengerjakan sesuatu, maka tugas kontrol sudah termasuk di dalamnya. Dengan demikian, tidak perlu atau riskan bila menyerahkan fungsi kontrol kepada orang lain.

Bila demikian hakekatnya, maka sebenarnya pengawasan melekat ini bukan hal baru. Sebagai konsep manajemen, dia sudah dikenal sejak lama. Dan sebagai unsur dalam tata kerja, dia adalah kultur hampir semua bangsa, walaupun ada perbedaan bobot dan dimensi dalam penerapannya.

Selain itu masih ada landasan formal bidang pengawasan yaitu Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 yang berisi Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Juga ada Pokok-Pokok Pengawasan Sekretariat Wakil Presiden.

Kalau Leo Utama menganggap riskan pengawasan yang diserahkan kepada orang lain, maka tidak demikian halnya dengan Pamoedji. menurut Irjen Depdagri ini, pengawasan melekat adalah pekerjaan mengontrol yang melekat pada jabatan seseorang sampai dengan unit terbawah. Namun salah satu prinsip dalam manajemen juga adalah pendelegasian wewenang.

Atas dasar ini, maka dalam organisasi yang namanya negara, tidak semua wewenang kontrol dipusatkan pada pejabat yang berfungsi memimpin negara adalah Presiden. Karena tugas seorang Presiden demikian luas dan berat, maka fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada pihak atau lembaga yang ditugaskan untuk itu. Di bidang pelaksanaan dan perencanaan ada para Menteri yang tidak lain adalah pembantu Presiden. Sedangkan untuk bidang pengawasan ini, yang khusus membantu Presiden adalah BPKP dan Irjenbang. Di tingkat Menteri ada Irjen, sedangkan di tingkat propinsi ada Inspektur Wilayah Propinsi (Irwilprop) dan untuk tingkat kabupaten ada Irwilkab.

Lembaga atau badan yang ditugaskan khusus di bidang pengawasan inilah yang disebut pengawasan fungsional. Mereka berfungsi membantu Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati di bidang pengawasan. Menurut Pamoedji, lembaga-lembaga pengawasan fungsional ini ibarat kepanjangan mata dan telinga para pimpinan. Dengan demikian menurutnya, tugas pengawasan yang paling pokok dan terpenting adalah pengawasan melekat. Lembaga-lembaga pengawasan fungsional, sifatnya hanya membantu. "Jadi bila ada ketidakberesan, siapa yang bertanggung jawab? Pengawas fungsional kah atau yang melekat? Tentu saja yang melekat," kata Pamoedji.

Dengan demikian fungsi pengawasan yang terpenting dalam setiap organisasi adalah pengawasan melekat. Mengapa? Karena menurut Pamoedji, pengawasan melekat lah yang secara efektif bisa dilakukan setiap saat, karena pimpinan berada di tempat kerja itu sendiri. Dia tidak perlu ke daerah lain dalam rangka pengawasan melekat. Sedangkan bila seorang Irjen melakukan fungsi pengawasan (fungsional) maka dia harus pergi ke tempat lain. Pengawasan yang begini memang tidak bisa jadi andalan.

Pengawasan melekat sebaliknya bisa lebih cekatan, karena seorang kepala biro, kanwil, kepala dinas misalnya setiap saat (diharapkan) berada di tempat melihat dan mengawasi anak buahnya. Dengan demikian setiap penyelewengan, mestinya bisa diindera lebih dini, sehingga pencegahan atau koreksi bisa dilakukan saat itu juga. Sedangkan kalau tugas-tugas begini diserahkan kepada pengawas fungsional, "maka pencegahan mungkin tidak bisa dilakukan seketika karena harus laporan dulu ke pimpinan. Kalau pun bisa dilakukan tindakan maka harus disusul dengan laporan tertulis," katanya. Ini sesuai dengan fungsi lembaga pengawasan fungsional yang hanya membantu fungsi pengawasan melekat. Untuk penindakan pun lembaga-lembaga pengawasan fungsional hanya memberi rekomendasi, tidak memutuskan. Mungkin karena fungsi yang demikian itu, maka ada kesan dalam masyarakat seolah-olah inspektorat jenderal kurang aktif. "Kita bekerja keras. Banyak temuan yang tidak dipublikasikan. Mungkin karena kurang publikasi itu maka timbul kesan seperti itu," ujar Pamoedji.

Alat Bantu

Agar pengawasan melekat bisa berjalan, diperlukan alat bantu atau sarana mendukung. Dia bisa berasal dari manusia-manusia yang cekatan dalam pelayanan, tetapi juga bisa melalui aturan main yang jelas. Alat bantu itu oleh Bintoro disebut dengan sarana manajemen, sedangkan Pamoedji menamakannya sistim pengendalian manajemen. Caranya?

Dari Inpres No 15/1983, sebenarnya jelas terlihat sarana atau alat bantu itu. Sebuah pengawasan melekat akan berfungsi dengan baik bila dalam sebuah organisasi - entah swasta atau birokrasi pemerintahan mempunyai struktur yang jelas yang membagi secara pas kerja masing-masing unit, kebijaksanaan tertulis, prosedur, laporan yang teratur dan pembinaan personil.

Yang menjadi persoalan di masa depan mungkin, masih perlukah lembaga-lembaga pengawasan fungsional, bila fungsi pengawasan melekat telah berjalan demikian tertibnya? Secara teoritis, kata Pamoedji, lembaga pengawasan fungsional mungkin tidak perlu lagi pada kondisi seperti itu. Namun ini adalah kondisi yang sangat ideal, yang mungkin belum bisa dicapai dalam 10 tahun mendatang. Dan bila mengingat bahwa lembaga pengawasan fungsional merupakan partner bagi pengawasan melekat, maka kon disi ideal tersebut mungkin tidak pernah akan ada.

Seperti dikatakan Leo Utama, lembaga pengawasan fungsional sebenarnya badan yang melakukan pengawasan eksternal, dia tidak built-in. Dan karena tidak built-in, maka lembaga-lembaga pengawas eksternal cenderung mahal, karena dia harus mempunyai institusi sendiri, pegawai tersendiri dan tentu saja biaya tersendiri.

Namun menurut Pamoedji, alasan kemahalan tidak berarti harus menghilangkan peranan lembaga pengawasan fungsional. Dalam prinsip manajemen, katanya, bila kita mengeluarkan biaya sebesar X, maka kita berharap menghasilkan X plus. Dan karena para pimpinan mempunyai tugas begitu luas, maka perlu pengawas fungsional yang membantu selain pengawasan melekat. Walaupun pengawasan melekat nanti berhasil mengurangi kebocoran misalnya, tetap saja ada keharusan untuk meningkatkan pencegahannya. Dalam kebutuhan seperti ini pengawas fungsional diperlukan. Dan kalau sebuah lembaga pengawasan fungsional yang didirikan dengan biaya Rp 1 milyar misalnya, tetapi kalau lembaga tersebut kemudian mampu menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 2 milyar, apa ini tidak untung?

Tambahan lagi, seperti kata Soeprapto SH, Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Agraria, lembaga-lembaga pengawas fungsional mempekerjakan tenaga-tenaga spesialis (seperti ahli

Digitized by Google

akuntan, ahli analisa konstruksi) yang mungkin tidak dimiliki oleh jajaran pengawasan melekat. Oleh karena itu dia beranggapan bagaimana pun juga lembaga-lembaga pengawasan fungsional ini tetap vital.

Dalam praktek, sebenarnya cukup banyak lembaga pengawasan fungsional yang kita miliki. Kita punyai Irjenbang, BPKP, Inspektorat yang ada di setiap departemen, dengan jaringan struktural sampai ke kabupaten. Selain itu masih ada lembaga Opstib yang dalam banyak hal juga bekerja mengawasi. Tetapi mengapa pengawasan kok terasa kurang berjalan semestinya? Bahkan sejak awal Pelita IV sampai dengan Pelita V nanti, seorang Wakil Presiden harus ditugaskan khusus untuk membudayakan pengawasan ini?

Pamoedji mengakui memang ada kekurangan kerja pengawasan di masa lalu, tetapi itu tidak berarti lembaga-lembaga pengawasan fungsional melempem, atau pengawasan itu sendiri tidak berjalan sama sekali. Inspektorat Jenderal banyak membantu temuan-temuan yang diumumkan ke masyarakat lewat media masa. Dan ia minta agar perlu diketahui bahwa banyak juga temuan yang tidak diumumkan ke media masa.

Sesuai dengan prosedur, tugas dan kewajiban inspektorat, maka setiap temuan di lapangan dilaporkan kepada atasannya. Bila kemudian yang keluar di media masa disampaikan oleh aparat yang tugasnya berhubungan dengan media masa, maka peranan inspektorat dalam hal ini kadang-kadang dilupakan. Tentu wajar bila orang beranggapan inspektorat kurang aktif dalam fungsi pengawasan.

Lalu yang menjadi keluhan juga bahwa sering terjadi tumpang tidih pemeriksaan di lapangan. Terkadang sebuah obyek sudah diperiksa oleh aparat inspektorat, diperiksa lagi oleh BPKP, lalu mungkin oleh BPK dan bahkan bisa juga disusul dengan Opstib. Belum lagi setelah diperiksa oleh inspektorat departemen yang satu ada inspektorat departemen lain yang memeriksa lagi karena ada kewenangan yang terselip di dalamnya.

Soeprapto

Pamoedji/mengakui, tumpang tindih seperti itu bukannya tidak ada, tetapi tidak separah seperti yang diomongkan di luaran. Dia memberi contoh dalam kasus guru SD. Di sana ada kepentingan Departemen Dalam Negeri dan Departemen P & K. Depdagri pun bersilang kepentingan dengan PU, Kesehatan dan Departemen Kehutanan. Tetapi hal itu semakin jarang, setelah ada koordinasi lintas sektoral yang semakin diperjelas.

Dengan koordinasi yang lebih baik, maka bila terhadap sebuah sekolah di desa X yang didatangi aparat inspektorat Depdagri dan kemudian didatangi lagi oleh P & K, "jarang cepat-cepat menuduh tumpang tindih. Sebab yang diperiksa Depdagri adalah gedung sekolahnya, sedangkan P & K kurikulumnya," jelas Pamoedji.

Demikian di sektor kesehatan. Depdagri berurusan dengan rumah sakitnya, sedangkan teknis kesehatan oleh wewenang Depkes. Untuk mencegah tumpang tindih seperti itu, maka diadakan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan). Atas dasar program ini, maka dicegah kemungkinan pemeriksaan dobel oleh aparat pengawas fungsional terhadap obyek yang sama.

Transformasi Kultural

Dari segi institusi sebenarnya sudah cukup lembaga pengawasan yang kita punyai. Hanya seperti yang dikhawatirkan Albert Hasibuan, kita terkadang cenderung menambah institusi, setiap kali melakukan gebrakan. Dan dalam konteks pengawasan melekat, menurutnya, yang diperlukan sekarang ini adalah suatu transformasi kultural. Karena built-in control yang kita terjemahkan dengan pengawasan melekat adalah karakter tata kerja modern. Dan bagi masyarakat kita dimana nilai dan semangat modernis masih bergelut alot dengan kekuatan-kekuatan spesifik tradisi, tranformasi kultural itu perlu. Untuk itu, fungsi-fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pers, DPR dan masyarakat perlu semakin diberi tempat.

Transformasi kultural, tentu saja tidak diarahkan agar kita menerapkan gaya manajemen Jepang secara bulat misalnya, tetapi agar menemukan manajemen yang sesuai dengan karakter ke-Indonesiaan kita. Dan masih dalam rangka ini, Albert melihat pengawasan melekat yang kini kita jagokan, harus merupakan proses pendidikan untuk mendewasakan diri. Orang harus melihat pengawasan sebagai bagian yang mutlak dari kerja, bukan mencari-cari kesalahan.

Sebab yang menyebabkan pengawasan melekat belum melekat dalam tata kerja aparatur pemerintahan kita lebih banyak karena faktor suasana budaya ketimbang aturan main. Setiap pejabat yang berfungsi memimpin sebenarnya telah dibekali wewenang untuk mengawasi bahkan memecat bawahannya yang nakal atau menyeleweng. "Tetapi ada suasana budaya yang menyebabkan orang enggan melakukan pengawasan," kata Bintoro.

Dalam budaya kita orang enggan menegur atasan yang keliru atau bawahan yang menyeleweng. Selain karena banyak pejabat kita salah kaprah terhadap fungsi pengawasan melekat karena menganggap telah diserahkan kepada lembaga fungsional, juga tidak ingin repot mengawasi, apalagi diawasi.

Tidak kalah pentingnya adalah apa yang oleh Leo Utama disebut dengan law enforecment. Bila ingin pengawasan melihat membudaya maka penerapan hukum menjadi penting. Kesalahan diganjar secara pas, dan kebenaran dihargai semestinya. Dan Albert menambahkan dalam rangka ini yang kita butuhkan adalah pemindahan yang bernafaskan keadilan.

Seorang atasan yang enggan berlebihan menegur bawahan yang nakal, menurut Bintoro, karena atasan itu mungkin sekali kecipratan rejeki dari permainan si bawahan. Sarwono menyebut gejala ini dengan persekongkolan.

Bila demikian, maka kualitas diri dan akhlak akhirnya dipersoalkan. Dan sangat tepat apa yang dikatakan Menteri Kehakiman Ismail Saleh bahwa hanya "air bersih yang mampu membersihkan." Gampangnya, bagaimana atasan berani menegur bawahan kalau dia sendiri tidak bersih.

Dan pada akhirnya, masalah pengawasan melekat ini adalah prsoalan disiplin kerja dan tanggungjawab terhadap kepentingan bersama. Dia butuh sarana untuk menjadi bagian dari kultur kerja dan cara berpikir kita. Oleh karena itu, pengawasan melekat ini tidak bisa hanya didekati dari kebutuhan teknis belaka. Dia harus menjadi konsepsi manajemen Indonesia yang utuh. □ (LT BM DT)

Digitized by Google

Safari Ramadhan, Perjalanan Yang Menggugah Rasa Kebersamaan

Diawali dengan doa bersama di Departemen Penerangan, H. Achmad Harmoko yang didampingi beberapa pejabat eselon I dan II, Dirjen dan Irjen, menjelaskan kepada sekitar 15 wartawan dari berbagai mass media ibukota dan daerah serta salah seorang pimpinan Komisi I DPR.RI, Sabar Kumbino, bahwa hari itu Menteri Penerangan akan memimpin sendiri sebuah perjalanan yang memakan waktu sembilan hari, (21 sampai 29 April yang lalu). Perjalanan menyusur pantai utara dan selatan Jawa dan Madura ini, diberi nama keren: Safari Ramadhan. Ini sebenarnya bukan perjalanan istimewa, tapi kunjungan dinas yang rutin dilakukan Menpen dalam dua tahun terakhir. Hanya karena tahun ini perjalanan keliling itu bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, maka gemanya terasa agak merdu.

Tepat sehabis sholat dhohor berjamaah, Safari Ramadhan yang dipimpin Harmoko meninggalkan langit-langit Jakarta untuk suatu tujuan pertama di daerah Supra Insus kabupaten Indramayu. Sembilan hari rombongan safari Menteri Penerangan Harmoko mengitari jalur pantai utara dan jalur pantai selatan, bertemu, berdialog, berwawancara, bertatap muka, berkomunikasi, dan tak kalah pentingnya bersilaturakhmi dengan berbagai lapisan anggota masyarakat. Tak kenal tempat dan padatnya acara yang telah dipersiapkan, Harmoko harus meluangkan waktu khusus bila di perjalanan secara tiba-tiba didaulat oleh anggota masyarakat. Semua ini harus diladeni, karena sebuah safari di bulan Ramadhan, katanya, harus memberi arti bagi semua pihak. "Saya pribadi dan rombongan tentu tidak bermaksud menggurui rakyat tapi ingin saling mengisi, saling terbuka, saling berdialog, saling bicara dan saling mendengar. Karena di dalam bersilaturakhmi, terkandung kesadaran luhur, bahwa kita semua umat manusia diwajibkan saling membangun hubungan kasih dan sayang dan karena itulah, pantas jika Safari Ramadhan saya kali ini juga dalam hubungan membangun tali kasih sayang antara rakyat dan pemimpinnya," ujarnya.

Dalam kesempatan seperti ini, maka akan terbuka suatu pengertian komunikasi timbal balik, yang mengalirkan kesadaran dan pengertian bagaimana memberikan jawaban bagi kehidupan selaku warga negara yang cinta akan tanah airnya.

Selain itu, selaku Menteri Penerangan yang kerjanya sebagai juru pene-

Harmoko diantara alim ulama

Digitized by Google

Kunjungan rutin setiap bulan Ramadhan

rang, berkewajiban mengapresiasikan atau memasyarakatkan hasil-hasil sidang umum MPR dan Garis-garis Besar Haluan Negara sekaligus memasyarakatkan Panca Krida Kabinet Pembangunan V serta menyerap aspirasi yang selalu tumbuh dan bergelora dalam masyarakat.

Walaupun hanya sembilan hari, namun rombongan ingin memberi arti kehangatan dan keakraban dengan warga yang ditemui. Walau singkat, tapi bila tepat, semua pasti jadi memikat, seperti terlihat lewat dialog-dialog yang segar, lugu, jujur serta hangat. Karena, lanjut Harmoko, pemimpin bukan hanya dilayani tetapi juga harus melayani rakyat, pemimpin yang kerjanya hanya minta dilayani itu bukan pemimpin, karena fungsi pemimpin adalah pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. "Demikianlah saudara-saudara tindakan dan perilaku nabi besar kita Muhammad SAW dalam memimpin umatnya".

Tidak hanya dengan para petani, pengurus KUD, Kelompencapir, tapi juga dengan generasi muda, Harmoko membuka kesempatan untuk berdialog, berdiskusi baik kesempatan di siang hari atau sesudah sholat tarwih. Setiap dialog rata-rata berlangsung dua jam. Dengan dialog, akan terungkap suka duka yang muncul seiring dengan laju pembangunan. Dan dengan dialog bisa terpecahkan kesulitan yang dihadapi bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Cintailah Koperasi

"Kita semua bersyukur dan gembira karena lambat laun kehidupan petani kita semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya," kata Harmoko hampir pada setiap kesempatan bertatap muka dengan petani. Namun jangan lantas berbangga sehingga lupa kerja keras, karena di hadapan kita tantangan akan selalu datang mengiringi keberhasilan di berbagai sektor.

Baik di Desa Bugel, Kecamatan Perwakilan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan di semua tempat kunjungan safari kali ini, di mesjid, di pondok pesantren, di hadapan generasi muda, pengurus KUD, pengrajin, nelayan, Harmoko selalu menekankan, pentingnya kerja keras dan hidup yang wajar, dan ia juga minta cintailah koperasi, karena koperasi adalah soko guru perekonomian kita. Koperasi ada karena anggota. Ia berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. "Maka salah besar kalau ada pengurus KUD yang kerjanya hanya minta dilayani." Bila pengurus KUD benar-benar bekerja melayani, maka akan lahir KUD-KUD teladan yang memberikan harapan kepada anggotanya.

Bersafari menempuh jalan darat sambil menjalankan ibadah puasa, bukan hal mudah. Tapi setiap ditanya wartawan, Harmoko yang murah senyum itu selalu menjawab, "Perjalanan yang seperti ini di bulan suci akan selalu membawa berkah dan hikmah, sehingga dahaga serta yang lain-lain toh tak dirasa, perjalanan ini adalah perjalanan silaturakhmi, yang datang Insya Allah adalah berkah dan rakhmat dari yang Maha Kuasa." Karena menurut ahli kesehatan, demikian Harmoko, puasa mempunyai manfaat karena melalui puasa dapat dicegah kelebihan kolesterol.

Puasa juga dapat mencegah jenis-jenis penyakit dalam, seperti diabetes, darah tinggi, ginjal dan penyakit jantung karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda "Puasalah kamu supaya sehat". Jadi bagi Harmoko berpuasa sambil memberikan penerangan untuk membuahkan pengertian timbal balik, akan banyak faedahnya apalagi hal ini dijalankan di bulan yang penuh rakhmat itu.

Digitized by Google

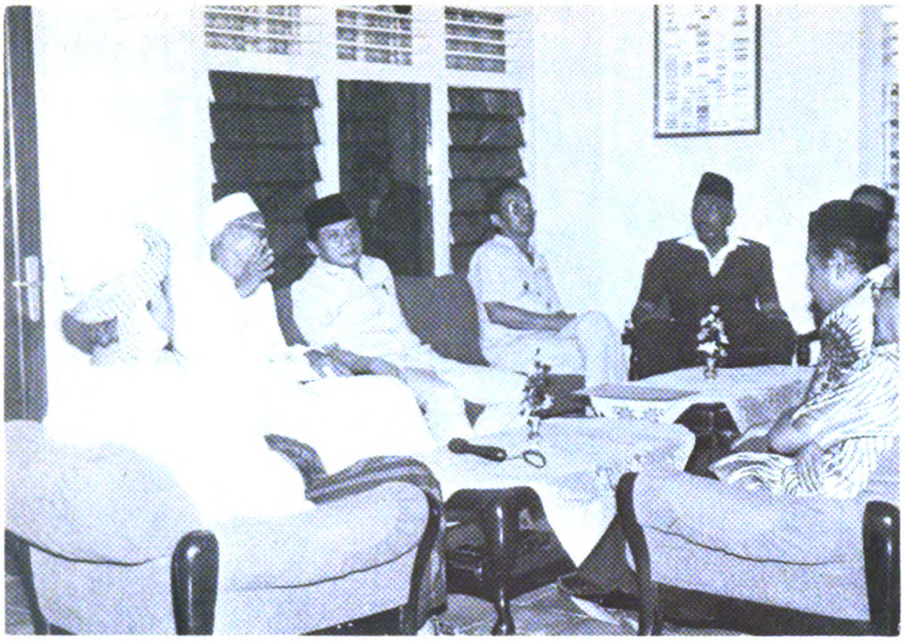

Memberi kesempatan untuk berdialog

Rombongan Safari terus menyusuri perbukitan, tepian pantai serta kaki dan puncak gunung yang berkelok siang dan malam, dari terbitnya matahari sampai terbitnya cahaya bulan, dari pondoknya para santri sampai ke pemukiman para kyai dan ulama-ulama besar, bertemu, berdialog dan bahkan berbuka puasa bersama dan bertarawih, disusul dengan dialog, dari masalah pertanian, pendidikan sampai dengan soal-soal pembangunan di berbagai bidang tentu termasuk bidang yang dipimpinnya, penerangan.

Ketika rombongan tiba di Jepara dan meninjau lokasi pengrajin ukir, Menaker Cosmas Batubara telah menanti untuk bersama-sama bersafari. Dalam kata sambutannya Cosmas Batubara mengungkapkan, "Saya mengikuti perjalanan Pak Harmoko walaupun tak akan sampai selesai." Terkesan akrab, kedua menteri itu ternyata adalah juga komunikator yang cukup kreatif dalam memberikan pandangan-pandangan. Yang satu berbicara tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, yang satu lagi bagaimana hubungan penciptaan lapangan kerja dengan pusat-pusat informasi pengrajin yang perlu dibangun untuk saling memahami keperluan masing-masing.

Menjelang sore, meninggalkan petani Indramayu, Harmoko dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kodya Cirebon. Di rumah dinas Walikota, menteri dan rombongan diterima oleh pejabat setempat, berbuka puasa bersama, sholat berjamaah dan kemudian ketika tanda waktu sholat Tarawih tiba, rombongan menuju pondok pesantren Jagasatru Cirebon. Usai Tarawih di hadapan generasi muda para alim ulama pejabat setempat serta kelompencapir, dialog berlangsung hingga larut malam. Kedua belah pihak tampak memiliki kesan dan kerinduan yang dalam. "Sebuah kebahagiaan bagi kami warga santri dapat bertatap muka langsung dengan Menteri Penerangan," kata seorang santri.

Berbagai pertanyaan yang menyangkut kebijakan Departemen Penerangan dilontarkan, antara lain tentang siaran TVRI yang diharapkan lebih ditingkatkan mutunya dan kalau mungkin ada siaran bahasa Arab atau pelajaran bahasa Arab. Harmoko yang selalu mengawali jawaban dengan ungkapan "pertanyaan yang bagus", sambil senyum mengatakan, "semua saya

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jln. Manyar Kertoarjo No. I Tlp. 45982, 42307 — S U R A B A Y A

M E N G U C A P K A N

SELAMAT IDUL FITRI 1408 H
MOHON MA'AF LAHIR BATHIN

Digitized by Google

Bersilaturahmi dengan berbagai lapisan masyarakat

tampung dan akan saya bicarakan dengan staf saya setelah safari ini berakhir."

Harmoko mengungkapkan bahwa di pondok pesantren inilah sesungguhnya bisa lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang berbobot. "Karena di pondok pesantren kita semua dapat belajar bagaimana disiplin, bagaimana gotong royong atau kesetiakawanan sosial, bagaimana hidup sederhana, karena itu tidak menutup kemungkinan kelak dari pondok pesantren akan lahir menteri-menteri pembangunan. Lain halnya dengan saya yang jadi santri setelah jadi menteri, sedangkan Pak Munawir, Menteri Agama kita, jadi santri dulu baru kemudian jadi Menteri".

Perjalanan Safari Ramadhan tahun ini memang lebih banyak menyinggahi pondok-pondok pesantren. Selain bertemu dengan para santri dengan berbagai latar belakang budaya, karena asal para santri dari berbagai pelosok tanah air, Harmoko mengaku banyak belajar dari para santri, termasuk bagaimana cara berdialog.

Setelah malam larut, dan dialogpun berakhir, rombongan istirahat di komplek pondok di kediaman pemimpin pondok pesantren Jagasatru. Pagi hari pukul tiga semua anggota harus bangun makan sahur, sholat subuh, dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi, begitu seterusnya selama sembilan hari. Pondok pesantren Jagasatru memperoleh keistimewaan karena rombongan Safari Ramadhan menginap untuk pertama kalinya.

Rindu dikunjungi

Etape kedua meninggalkan pondok pesantren Jagasatru Cirebon menuju Kabupaten Brebes untuk sebuah pertemuan dengan petani bawang merah dan wawancara dengan petani udang windu serta meninjau KUD teladan tingkat nasional yang dipimpin oleh orang-orang muda dengan investasi yang semula dua juta kini telah mencapai dua setengah milyar. Hal itu dapat dicapai karena KUD melayani petani, mendatangi dan memenuhi kebutuhan para petani.

Di tiap-tiap kunjungan tak kurang dari seribu anggota masyarakat dari berbagai kelompok profesi organisasi dan lapisan mendengar dan berdialog dengan rombongan. Ini suatu pertanda, kata Harmoko, bahwa rakyat rindu pertemuan, rindu dikunjungi para pembantu Presiden, hal ini diungkapkan dihadapan kelompok tani Supra Insus, nelayan dan kelompencapir di Kabupaten Pemalang dengan mengambil tempat di tengah sawah dengan latar belakang padi yang subur serta wajah kaum tani yang nampak ceria walau sedang menjalani ibadah puasa.

Meninggalkan Pemalang menuju Kabupaten Kendal untuk sholat Jum'at di Mesjid Agung Kendal, sesudah itu rombongan Safari Ramadhan menuju Jepara untuk bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara yang sekaligus dimanfaatkan meninjau kerajinan ukir kayu monel dan lurik torso.

Hari mulai sore ketika rombongan meninggalkan Jepara menuju Kabupaten Rembang, bermalam di Rembang setelah sholat Tarawih dan sarasehan dengan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda, serta tidak ketinggalan kelompencapir.

Di Margasatwa Baluran, Menteri Penerangan sudah ditunggu oleh Pak Hasjrul Harahap, Menteri Kehutanan, untuk melihat dan memotret hutan yang sangat potensial. Di Asem Bagus, Menpen juga bertemu Kyai Asaad Arifin, dimana dalam kesempatan tersebut Harmoko berdialog tentang pondok pesantren. Dan oleh Kyai besar itu

Digitized by Google

dikemukakan bahwa dengan tidak masuknya Pondok Pesantren dalam GBHN bukan jadi masalah bagi Kyai, yang penting eksistensi Pondok Pesantren tetap ada dan dihargai oleh Pemerintah. Di Jember, Harmoko juga bersilaturakhmi dengan Kyai Achmad Sidik, beramah tamah dan saling mendoakan, bahkan Kyai mendoakan semoga rombongan Safari Ramadhan mendapat bimbingan dan lindungan dari Yang Maha Kuasa.

Di Trenggalek dalam rangka panen cengkeh, Menteri Pertanian Wardoyo telah menunggu di lokasi dan bersama-sama malam harinya di Mesjid Agung Trenggalek diadakan sarasehan dengan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda untuk berdialog tentang berbagai masalah pembangunan, keberhasilannya maupun kekurangannya.

Di Garut, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Ir Akbar Tanjung bertemu dengan rombongan Safari Ramadhan dan berdialog bersama dengan generasi muda serta tokoh-tokoh masyarakat setempat di pendopo Kabupaten Garut. Suasananya akrab, hidup dan demokratis. Kedua Menteri benar-benar telah siap untuk menjawab segala persoalan yang dilontarkan oleh peserta yang hadir, malam itu.

Dari perjalanan terekam berbagai hal yang menyangkut aspirasi masyarakat, dari soal batu akik di Pacitan sampai dengan tambang emas di Cikotok-Banten-Jabar yang merupakan lokasi terakhir kunjungan Safari Ramadhan, di mana ditutup dengan doa di Pondok Pesantren Saketi Al Ichlas.

safari pada salah satu kabupaten di Jawa Tengah

Kesimpulannya, adalah Safari Ramadhan sepanjang pulau Jawa dan Madura memberikan masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah melalui Departemen Penerangan. Karena di dalam perjalanan Safari Ramadhan memperoleh sebuah kesan, bahwa masyarakat semakin kritis dan berkualitas, dan betapa sangat dibutuhkannya dialog-dialog semacam itu. Berbagai masalah dilontarkan, berbagai soal ditanyakan dengan keluguan dan keterbukaan. Dengan demikian akan terdengar secara langsung apa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat kepada Pemerintah. Semakin dirasakan perlunya informasi yang dinamis serta komunikasi aktif yang terus menerus.

Keterbukaan kelihatannya semakin dirasakan untuk dikembangkan agar menggugah kesadaran warga negara untuk melanjutkan pembangunan tanah airnya. Keterbukaan dari rakyat untuk pemimpin-pemimpinnya dan dari Pemerintah kepada Rakyat.

Safari Ramadhan adalah sebuah awal yang sebaiknya tidak akan berakhir dalam safari informasi, safari dialog terbuka, yang akhirnya akan menjadi safari kesadaran dari berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai modal suksesnya pembangunan. Dan Pak Harmoko merasa belum selesai, karena diakuinya safari ini adalah pintu untuk safari yang lain, dimana segala permasalahan yang selama safari terserap akan dikoordinasikan dengan departemen yang terkait. □ **Rendy MS**

Civitas Akademika IKIP Surabaya

Menyambut Gembira Atas Terpilihnya **Bapak Soeharto** Sebagai **Presiden** Dan **Bapak Sudharmono, SH** Sebagai **Wakil Presiden Republik Indonesia** Dalam **Sidang Umum MPR 1988.**

Selamat Mengemban Tugas-Tugas Mulia Demi Kejayaan Dan Kesejahteraan Bangsa Dan Negara Tercinta Republik Indonesia

Digitized by Google

Apa Dan Mengapa Safari Ramadhan?

Harmoko

Tujuan Safari Ramadhan tahun ini, seperti dijelaskan Harmoko setelah tiba di Jakarta, 29 April, antara lain, memasyarakatkan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1988, termasuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memasyarakatkan Panca Krida Kabinet Pembangunan V. Di samping itu juga memantau langsung perkembangan kemajuan masyarakat, sekaligus menyerap dan menangkap aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Mengadakan pengecekan setempat terhadap pelbagai keberhasilan pembangunan dan kegairahan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pelbagai permasalahan yang timbul dan atau dihadapi di wilayah yang dikunjungi.

Melihat kesiapan dan daya dukung aparat penerangan setempat dalam menggerakkan motivasi dan partisipasi masyarakat serta upaya yang dilakukan dalam penyebarluasan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1988 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan V.

Mengembangkan sistem Komunikasi Sosial yang konstruktif sekaligus mengadakan *check* dan *recheck* pendayagunaan dan kegiatan operasional penerangan di daerah-daerah, baik yang menyangkut perangkat kerasnya maupun yang menyangkut perangkat lunaknya.

Meningkatkan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan di kalangan masyarakat.

Sasaran adalah: Masyarakat kota dan khususnya masyarakat desa; Masyarakat pondok pesantren pada umumnya dan kalangan pondok pesantren yang mengelola Pusat Informasi Pesantren (PIP) serta mesjid sebagai kegiatan ibadah Ramadhan; Kelompok-kelompok masyarakat khusus yang secara aktif bertindak sebagai kerabat kerja penerangan dalam rangka pengembangan komunikasi timbal-balik/sambung rasa, seperti Kelompencapir, LKMD, PKK, dan Organisasi Kemasyarakatan dan kelompok yang mengelola kegiatan ekonomi, seperti: KUD; Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin/ Industri Kecil.

Sektor-sektor pembangunan yang mendapat pengamatan secara khusus antara lain: Sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, ketenagakerjaan dengan pelbagai permasalahan dan sarana pendukungnya; Sektor sarana perhubungan darat yang merupakan urat nadi perekonomian dan pariwisata di wilayah yang bersangkutan; Sektor Kehidupan sosial-budaya dalam kaitannya dengan sikap mental masyarakat dan kehidupan antar umat beragama dalam mengisi pembangunan di bidang mental-spiritual; Sektor politik, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam pengamalan Demokrasi Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, terutama dalam penyebarluasan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1988 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan V.

Hasil pengamatan yang bisa diserap perjalanan Safari Ramadhan antara lain: (a) Bidang Ekonomi, dalam meningkatkan produksi nonmigas, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil diperoleh kesan adanya dinamika, kegairahan dan semangat masyarakat untuk meningkatkan produksinya.

Hal tersebut tergambar dalam beberapa aspek seperti perkembangan industri-industri kecil semakin meningkat dengan banyaknya hasil-hasil industri yang diekspor ke luar negeri; Kesadaran membayar pajak semakin tinggi karena adanya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan; Kesadaran menabung dalam rangka memobilisasi dana masyarakat semakin berkembang berkat meningkatnya kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam partisipasi menunjang pembangunan; Upaya meningkatkan produksi pangan yang bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa; Adanya kegairahan petani sebagai akibat dari meningkatnya penghasilan yang mereka peroleh.

Di samping itu, juga tampak sikap optimisme masyarakat dalam mengolah lahannya sehingga dapat menumbuhkan dampak yang positif untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan produksi ekspor nonmigas. Sementara itu kendala/masalah yang dihadapi di lapangan sesuai dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat antara lain: masalah pemasaran yang perlu mendapat perhatian, dan kepada petani tambak

Digitized by Google

udang hendaknya Pemerintah sudah memikirkan perlunya irigasi teknis untuk itu.

(b) Bidang Sosial-Budaya, terekam antara lain bahwa kehidupan kegotong-royongan dan kebersamaan sangat nampak dan memiliki nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang semakin tinggi dan tetap dijunjung serta dipertahankan terus, seperti yang nampak dalam membuka jalan baru di Jawa Tengah, Jawa Barat, masyarakat menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi; Kerukunan antar umat beragama tetap terasa toleransi keagamaan yang cukup tinggi; Kehidupan beragama semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda, sehingga mesjid dan surau yang ada tidak mampu untuk menampung umat Islam yang beribadah; Pertunjukan rakyat tradisional sebagai sarana Komunikasi Sosial disamping sebagai wahana tontonan yang menghibur masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan pesan-pesan pembangunan di segala bidang kepada masyarakat luas dan mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.

Peningkatan Bobot

(c) Bidang Politik, khususnya di dalam pembinaan dan pengamalan Pancasila, terdapat kecenderungan kuat: "semakin meningkatnya" kesadaran rakyat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut dapat dinilai berkat upaya penerangan, masyarakat telah memahami Garis-garis Besar Haluan Negara, demikian juga dengan Panca Krida Kabinet Pembangunan V.

Pembangunan politik yang berhasil dicapai dalam Pelita IV dengan dikukuhkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, semakin mengembangkan Demokrasi Pancasila dan dampak positifnya semakin dirasakan. Hal tersebut dapat dinilai dari berbagai kesempatan berdialog dengan kalangan masyarakat yang kami adakan selama perjalanan Safari Ramadhan.

(d) Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, pada umumnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang dikunjungi cukup mantap dan terkendali. Peranserta masyarakat dalam menumbuhkan swakarsa di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat cukup menunjang stabilitas, sehingga semakin mendorong peningkatan Pembangunan Nasional.

(e) Khusus Masalah Tata Informasi Pedesaan, dalam rangka memantapkan Komunikasi Sosial, diperlukan adanya tata informasi pedesaan mengingat makin berkembang dan makin bergairahnya masyarakat akan sadar informasi. Tata informasi pedesaan merupakan suatu sistem Komunikasi Sosial timbal balik yang dikembangkan dengan memperhatikan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, disamping mendorong berkembangnya forum-forum komunikasi yang berdasarkan swakarsa dan swadaya masyarakat.

Sebagai forum komunikasi pedesaan maka kini telah berkembang kelompok-kelompok informasi yang mampu menerima dan menyebarluaskan informasi pembangunan kepada anggota masyarakat dilingkungannya, seperti Kelompencapir, Pusat Informasi Pesantren, Kelompok-kelompok Tani, Paguyuban KB, dan lain-lain.

Dalam kenyataan di lapangan, telah ditemukan bahwa terutama Kelompencapir disamping sebagai wahana dan sarana komunikasi sosial, juga mampu mengembangkan usaha di bidang ekspor nonmigas, sehingga penyerapan informasi mempunyai nilai tambah. Misalnya terdapat Kelompencapir yang sudah dapat mengekspor 70 ton kapulaga dan mengembangkan minyak atsiri, anyam-anyaman, batu mulia, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat adanya kenyataan bahwa mereka tidak semata-mata menanam sejenis komoditi, melainkan juga melakukan diversifikasi tanaman pada lahannya masing-masing serta meningkatkan mutu dan bentuk (desain dan motif) bagi barang kerajinan/industri kecil.

Berdasarkan hasil peninjauan dan pengamatan di seluruh wilayah pantai utara dan selatan Pulau Jawa dan Madura, dapat disimpulkan, bahwa perjalanan Safari Ramadhan tahun 1988 telah berjalan dengan lancar berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah serta jajaran Instansi-instansi, baik vertikal maupun horisontal, serta masyarakat umumnya.

Dari dialog-dialog yang diadakan sepanjang perjalanan Safari Ramadhan di seluruh wilayah pantai utara dan selatan Pulau Jawa dan Madura, diperoleh kesan adanya keterbukaan, keberanian dan kualitas (bobot) dari anggota masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing secara lugas mengenai masalah-masalah yang masing-masing mereka hadapi. Pada umumnya mereka mendambakan dapatnya sering dilakukan kunjungan kerja oleh Pimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah agar mereka memperoleh kesempatan berkomunikasi secara langsung untuk dapat mengemukakan permasalahan/aspirasinya secara langsung. Kadang-kadang masalah-masalah yang dikemukakan oleh mereka mendapat tanggapan yang positif, bahkan dapat diputuskan di tempat. Dengan demikian, hal-hal tersebut akan lebih menggairahkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Di lain pihak hal-hal yang dikemukakan oleh masyarakat dapat ditampung sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan.

Kelompencapir dalam peranan dan fungsinya tidak semata-mata merupakan forum komunikasi sosial yang mengolah dan menyebarluaskan informasi pembangunan, melainkan juga telah mampu mengembangkan informasi pembangunan itu menjadi wujud kegiatan produktif yang memberikan nilai tambah serta berdampak positif di bidang ekonomi. Hal tersebut menimbulkan terobosan-terobosan dalam meningkatkan produksi ekspor nonmigas, yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan telah meningkatkan kecerdasan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas operasional penerangan, baik melalui penerangan lisan, media tradisional maupun media massa.

Berhasilnya pembangunan yang dibarengi oleh berkembangnya upaya swadaya dan swakarsa masyarakat dalam pembangunan di bidang ekonomi telah mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

Upaya pemerintah untuk memasyarakatkan pengawasan sebagaimana diungkapkan Presiden pada rapat I berlangsung. Pada rapat Kabinet Pembangunan V telah mendapat sambutan positif dari tokoh masyarakat, khususnya alim ulama.

Dalam rangka peningkatan disiplin nasional dan pendapatan masyarakat sebagai hasil Pembangunan Nasional telah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak, khususnya PBB, dan juga Simpedes. □

Digitized by Google

Harkitnas Hendaknya Memperkokoh Wawasan Kebangsaan Indonesia

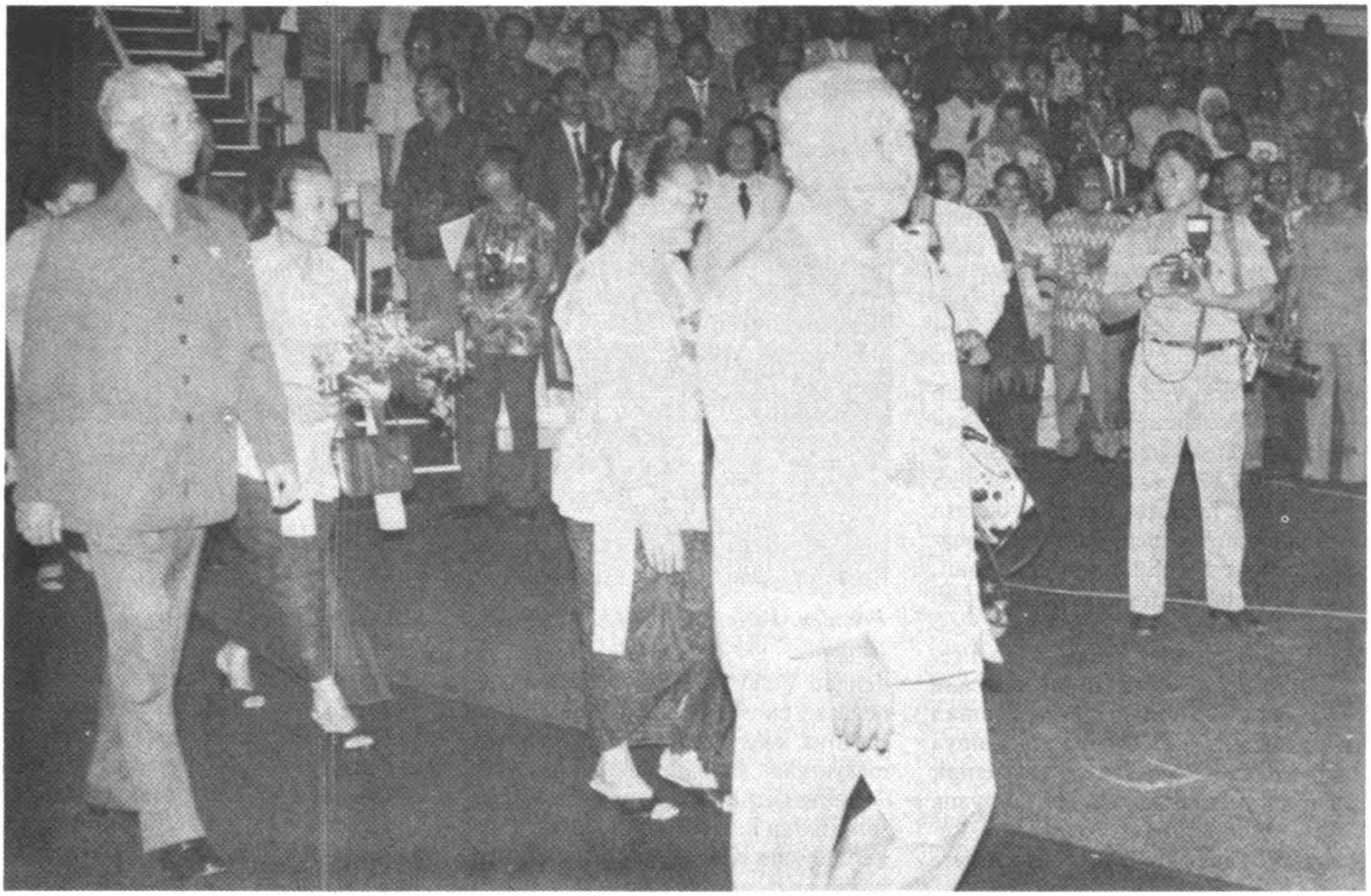

Presiden dan Wakil Presiden pada perayaan Harkitnas

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari yang bersejarah, Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Kini, hari yang penuh makna bagi bangsa Indonesia itu telah berusia 80 tahun. Di desa, di kota, cara memperingati tonggak berdirinya republik ini berlainan ciri dan coraknya. Di Jakarta peringatan yang dipusatkan di Balai Sidang Senayan ini menyuguhkan pagelaran musik dan tari perjuangan yang diberi judul ''Gema Juang Putra Pertiwi''.

Pagelaran yang ditampilkan oleh para artis ibu kota ini mengisahkan serentetan perjuangan bangsa Indonesia mulai dari pergerakan Budi Utomo sampai penumpasan peristiwa G 30 S/ PKI. Gedung yang berkapasitas sekitar lima ribu orang itu seolah larut dalam lintasan perjalanan sejarah yang ditampilkan. Suasana semakin haru, tatkala pagelaran tentang pengusiran penjajah dan penumpasan G-30-S PKI. Pasal, para pelaku dari babak sejarah terbaru tampak banyak yang hadir dalam perayaan tersebut.

Peringatan yang dipusatkan di Balai Sidang Senayan itu tidak hanya menyuguhkan sebuah pagelaran, namun juga sambutan-sambutan. Misalnya saja Presiden Soeharto, Menteri Penerangan Harmoko selaku Ketua Umum Panitia Harkitnas dan Gubernur DKI, Wijogo Atmodarminto sebagai Ketua Pelaksana.

Dalam kata sambutannya, Presiden Soeharto mengatakan, peringatan hari-hari bersejarah seperti Harkitnas ini adalah untuk menyegarkan kembali makna yang tersirat dari peristiwa tersebut, dan sama sekali bukan untuk mengagung-agungkan masa lampau. Melalui peringatan ini,' lanjut Presiden, aspirasi yang terkandung di dalamnya untuk terus dapat digali agar disegarkan kembali guna membangun masyarakat yang lebih baik. Dan Presiden juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pendahulu yang telah merintis dan memperjuangkan kemerdekaan yang sekarang ini dinikmati.

Sementara itu, Menteri Penerangan Harmoko, ketika menyinggung masalah peringatan Harkitnas itu mengatakan, jejak langkah perjuangan bangsa dilukiskan sebagai altar yang indah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peringatan-peringatan yang dilakukan untuk mengenang perjuangan bangsa, tidak hanya sekedar kenangan indah, tetapi harus dapat diambil hikmahnya serta dihayati untuk dijadikan bekal dalam menyongsong masa depan.

Sedangkan Wijogo, dalam uraiannya juga mengatakan, peringatan ini

Digitized by Google

(Harkitnas) dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional sebagai modal untuk menciptakan ketahanan nasional. Disamping itu, lanjut Wijogo peringatan ini juga dimaksudkan untuk mengisi kemerdekaan terutama di kalangan generasi muda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa.

Memperkuat Persatuan

Menyinggung tentang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan kebangsaan, menurut Presiden Soeharto harus dilaksanakan secara terus menerus. "Kita menyadari sedalam dalamnya, bahwa persatuan dan kesatuan bukan merupakan hasil yang sekali jadi. Persatuan dan kesatuan bangsa harus kita peluk dan kita perkuat tanpa mengenal henti" ujar Presiden.

Mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden mengilustrasikan dengan saat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah momen itu, menurut Presiden bangsa kita tidak jarang mengalami rongrongan terhadap kesatuan dan persatuan, baik ancaman yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri. Sejarah telah menunjukkan, kata Presiden, bahwa wawasan kebangsaan kita juga pernah mengalami ancaman mara bahaya, baik berupa munculnya lagi semangat kedaerahan yang sempit maupun tarikan-tarikan dari luar yang akan membelokkan wawasan kebangsaan agar berkiblat kepada negara asing.

"Kita bersyukur bahwa dengan semangat persatuan yang kukuh kuat dan dengan setia kepada wawasan kebangsaan, maka pada saat yang sulit dan suram itu dapat kita atasi dengan selamat. Dengan prihatin kita masih menyaksikan sejumlah bangsa-bangsa lain mengalami pergolakan yang berkepanjangan, karena mereka masih mengalami kesulitan dalam memelihara persatuan dan kesatuan nasional, serta lemah wawasan kebangsaannya. Kita tidak bisa membayangkan, apa jadinya bangsa ini jika kita terpecah menjadi negara-negara kecil yang kerdil dan lemah. Kita juga tidak dapat membayangkan, apa jadinya bangsa kita ini apabila wawasan kebangsaan itu kita tinggalkan dan kita berkiblat pada wawasan yang asing bagi kita sendiri".

Menurut Presiden, persatuan dan kesatuan nasional, serta wawasan kebangsaan tadi telah dirampungkan dengan bulat dan tuntas dengan penegasan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Presiden. Peringatan hari-hari bersejarah bukan untuk mengagung-agungkan masa lampau

Lebih lanjut dikatakan, dengan persatuan dan kesatuan dengan wawasan kebangsaan dan dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, tidak berarti bahwa kita menghilangkan ciri-ciri khas yang ada diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Juga tidak berarti kita menghilangkan ciri-ciri khas yang secara tradisionil telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat daerah kita. Daerah-daerah kita sangat kaya dengan kebudayaan dan tradisi-tradisi yang luhur nilainya. Kebudayaan dan tradisi-tradisi itu secara bersama-sama kita sumbangkan sebaik-baiknya bagi berkembangnya kebudayaan dan tradisi-tradisi nasional kita. Dalam arti kita memperkaya secara dinamis semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan wawasan kebangsaan tidak berarti kita menutup diri dari luar. Ada nilai-nilai dari kebudayaan lain, ada nilai dari luar, yang dengan sadar harus kita serap agar kita mampu berkembang menjadi bagian yang bertanggung jawab dari kebudayaan umat manusia di zaman ini dan zaman-zaman yang akan datang. Diantara nilai-nilai dari luar itu ialah asas-asas organisasi modern serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mampu menyerap nilai-nilai dari luar. Bukan untuk menghilangkan nilai-nilai kita sendiri yang luhur, bukan untuk menghilangkan kepribadian kita, melainkan untuk memperkaya nilai-nilai luhur kita sendiri dan menjadikan kita bangsa yang sanggup mengejar kemajuan.

Persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan kita, juga kita perkuat dengan melaksanakan pembangunan. Kita telah menegaskan bahwa dengan pembangunan kita bertekad untuk menjadi bangsa yang maju dan modern. Akan tetapi kemajuan dan kemoderenan itu tetap berkepribadian sendiri. Itulah sebabnya kita menegaskan pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Nilai-nilai baru dari luar, seperti asas-asas organisasi modern serta ilmu pengetahuan dan teknologi justru kita gunakan untuk makin mewujudkan pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. ☐ (BM)

Digitized by Google

Memperbaiki Pendidikan Nasional Tak Perlu Ada Istilah Gebrakan

Pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan yang tidak berlangsung bebas nilai. Apalagi setelah mantapnya Pancasila sebagai asas ideologi dan falsafah kehidupan kebangsaan, sehingga pendidikan nasional menegaskan orientasinya pada Pancasila sebagai nilai dasar dan tujuan. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses pembudayaan jelas landasan serta sasarannya.

Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan usai membuka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kepada wartawan menegaskan, bahwa dalam dunia pendidikan nasional tidak ada istilah gebrakan, terobosan dan kejutan. Adapun cara yang terbaik untuk memperbaiki pendidikan nasional adalah secara gradualistik atau bertahap. Sedang kunci sukses dalam peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pendidikan dasar. Upaya ini ditempuh dengan jalan meningkatkan kualitas tenaga pengajarnya.

Untuk menciptakan gebrakan, terobosan atau kejutan tentu akan membuat orang menjadi pingsan semua. Karena pendidikan bukan sekedar upaya mengiringi berlangsungnya pertumbuhan individu, melainkan perkembangannya menuju kedewasaan dengan memasyarakatkan sebaik-baiknya. Juga, pendidikan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi harus diandalkan pada peran aktif serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

''Pada prinsipnya, saya tidak keberatan bila tamatan IKIP ingin mengajar di SD. Namun, saya belum tahu apakah mereka mau atau tidak. Itu sedang kita pikirkan,'' tutur Menteri Fuad Hassan menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya keinginan tamatan sarjana untuk mengajar di SD.

Tidak Seimbang

Pada kesempatan yang sama Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo menjelaskan, kualitas pendidikan di Indonesia memang tidak merata. Ada yang baik dan buruk, misalnya lulusan universitas di Kalimantan dan Sumatera Utara menunggu tiga tahun untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ini juga dihadapi para lulusan ITB, dimana mereka itu tidak mendapat pekerjaan setelah di wisuda pada tahun yang sama.

Problema semacam ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian. Demikian pula di bidang pertanian sedikit merisaukan, karena di satu pihak Departemen Pertanian dalam mengadakan penataran untuk PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) sementara lulusan S-1 tidak memperoleh lapangan pekerjaan. Padahal tenaga PPL itu tingkat pendidikannya lebih rendah daripada S-1, sehingga hal ini tidak seimbang.

Atas dasar ini, Departemen Pertanian perlu melaksanakan program khusus untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga lulusan S-1 di bidang penyuluh lapangan itu.

Sementara tanggapan positif tentang pendidikan nasional pun bermunculan di setiap suratkabar ibukota. Antara lain tanggapan itu dari pengamat pendidikan seperti Krissantono anggota Komisi IX DPR yang mengatakan, bahwa pendidikan nasional kita memang belum memiliki satu sistem yang mantap. Dalam Tap II MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bagian pendidikan nasional perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang. Begitu juga rakyat melalui MPR sudah melihat bahwa sistem pendidikan nasional kita masih belum sempurna. Dengan kata lain, kehadiran Undang-undang Pendidikan Nasional memang mutlak. Karena tanpa undang-undang, pelaksanaan pendidikan lebih bersifat hasil penafsiran para pejabat yang memimpin Departemen Pendidikan. Untuk itu, tidak salah bila muncul anggapan bahwa setiap ganti menteri, tentu ganti pula kebijaksanaan.

''Undang-undang No. 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Kemudian muncul Undang-undang No. 12/1954 tentang berlakunya Undang-undang No. 4/1950, sehingga secara praktis kedua undang-undang itu sama dalam mengatur masalah pendidikan dasar. Sedangkan yang mengatur pendidikan tinggi, adalah Undang-undang No. 22/1961. Oleh karena itu, Undang-undang Pendidikan sekarang sudah kadaluwarsa dan peraturan perundangan itu sudah sangat tidak sesuai dengan

Pendidikan, proses pembudayaan yang berlangsung bebas nilai

Digitized by Google

keadaan yang makin berkembang. Kalau ada pertanyaan, apakah pembangunan pendidikan bisa diharapkan tinggal landas tanpa Undang-undang Pendidikan secara nasional, jelas itu tidak mungkin," katanya.

Revolusi Pikir

Ki Suratman sebagai tokoh Taman Siswa berpendapat, bahwa kondisi pendidikan di Indonesia secara kuantitatif mengalami kemajuan dibandingkan negara-negara yang berkembang lainnya. Namun, secara kualitatif kita harus lebih meningkatkan lagi. Bahkan, dalam mendukung pembangunan nasional sangat dibutuhkan tenaga trampil yang potensial. Untuk itu, agar orang tua mau menjadi pelopor dalam 'revolusi pikir' bahwa setiap tamatan SLA (Sekolah Lanjutan Atas) harus memasuki perguruan tinggi serta mau masuk ke sekolah kejuruan, dimana sekolah kejuruan ini bisa memberikan ketrampilan tertentu.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata

Menyinggung Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Nasional, baik Krissantono maupun Ki Suratman mengakui, bahwasanya RUU itu masih dalam proses untuk menjadi Undang-undang Pendidikan Nasional sejak jaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb. Yang kemudian diteruskan oleh Daoed Joesoef dengan membentuk Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional (KPPN) termasuk di dalamnya ada Prof. Slamet Iman Santoso dan RUU ini belum selesai pada jamannya Menteri Nugroho Notosusanto hingga Fuad Hassan.

"Saya yakin dan optimistis, Menteri Fuad Hassan mampu menyelesaikan masalah Undang-undang Pendidikan ini," tegas Ki Suratman.

Sedangkan Krissantono mengakui, masalah ini sudah diperintahkan dalam GBHN maka paling lambat pada Repelita V, undang-undang itu sudah harus ada dan dilaksanakan. Tentunya, ini tidak otomatis semua masalah pendidikan akan terjawab. Karena banyak persoalan masih harus dibenahi terutama menyangkut manusia. Kendati demikian, dengan adanya undang-undang itu kita sudah memiliki dasar dan pandangan yang sama serta terintegrasi, sehingga tidak muncul tafsiran-tafsiran yang berbeda. ☐ DT

Yayasan Pendidikan Nasional Penunjang Pelita (Y.3P) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangku Çeçwara d/h STKM/ABM

Mengucapkan

Selamat atas Terpilihnya Bapak Soeharto Sebagai Presiden Dan Bapak Sudharmono, SH Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sidang Umum MPR 1988.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Menyertai Bapak Dalam Memimpin Bangsa Indonesia Mencapai Masyarakat Adil Makmur Dan Sejahtera Berdasarkan Pancasila

Digitized by Google

Industri Kecil Dan Kerajinan Memiliki Posisi Strategis

Pertumbuhan dan perkembangan dunia industri kerajinan Indonesia makin menunjukkan kemajuan yang pesat sekali. Secara kuantitas maupun kualitas telah mampu mengadakan terobosan di pasaran internasional, sehingga produksi industri kerajinan ini secara tidak langsung menambah penghasilan devisa yang kita perlukan untuk memelihara kesinambungan gerak pembangunan nasional.

Penilaian ini bisa kita lontarkan setelah menyaksikan Pameran Industri Kerajinan Indonesia 1988 di Jakarta, yang diresmikan Presiden Soeharto beberapa waktu yang lalu.

Kepala Negara pada kesempatan itu mengemukakan, menyaksikan seluruh pertumbuhan dan perkembangan industri kerajinan kita ini maka mempertebal keyakinan serta sikap optimis kita, bahwa segala upaya pembangunan kita memang terus mencapai kemajuan dan peningkatan. Ini akan membangkitkan diri kita supaya lebih mencintai produksi dalam negeri, hasil kerja serta karya bangsa sendiri. Apalagi berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sebagai bangsa pejuang kita memang memiliki banyak peristiwa bersejarah di masa lampau yang membanggakan. Peringatan hari bersejarah itu bukan sekedar untuk membangga-banggakan masa lampau saja, melainkan kita mengambil semangatnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam perjuangan kita membangun masa depan. Karena, tantangan terbesar kita itu adalah pembangunan ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga semangat Kebangkitan Nasional 1908 itu kita jadikan sebagai kekuatan untuk kebangkitan nasional kita di bidang ekonomi, terutama untuk menyongsong tahap tinggal landas pembangunan yang kita mulai dalam Repelita VI mendatang.

Dari Repelita I sampai mendekati akhir Repelita IV kita telah mencapai sukses dalam melaksanakan pembangunan, meskipun demikian kita tidak lepas dari berbagai rintangan, hambatan dan masalah. Akan tetapi, kita selalu tetap mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan terus memperluas pemerataan pembangunan. Di bidang pertanian misalnya, kita sudah mencapai kemajuan besar dengan keberhasilan swasembada beras. Begitupun di tahun-tahun mendatang, kita tetap berusaha sekuat tenaga supaya swasembada beras itu makin mantap. Bahkan, kita harus memperluas landasan yang kuat bagi pembangunan pertanian itu dengan meningkatkan produksi pertanian secara keseluruhan. Sehingga hal ini benar-benar tangguh untuk mendukung gerak pembangunan nasional.

Dengan demikian, kata Presiden Soeharto, kita dapat membuat seimbang struktur ekonomi kita dengan memiliki daya tahan yang tumbuh kuat. Juga adanya industri hulu dan hilir merupakan gerak membangun industri-industri strategis, sebagai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang makin bertambah besar. "Memang, dalam bidang ekonomi, masa depan kita tergantung pada kemampuan kita untuk membangun in-

Membuat Seimbang Struktur Ekonomi

Digitized by Google

Memperluas Kemampuan Kewiraswastaan Masyarakat

dustri secara besar-besaran. Namun, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa kita mengabaikan pembangunan industri kecil dan industri kerajinan," tambahnya.

Bapak Angkat

Pembangunan industri kita beri makna yang dalam, agar landasan pembangunan industri itu benar-benar kuat. Dan tidak berarti hanya membangun industri besar saja, melainkan juga harus berarti membangun masyarakat industri. Salah satu yang penting dalam membangun masyarakat industri itu, adalah memperluas kemampuan kewiraswastaan di kalangan masyarakat kita. Yakni industri kecil dan kerajinan merupakan bidang yang memberi peluang yang seluas-luasnya bagi bangkitnya wiraswasta-wiraswasta dalam jumlah yang besar. Di samping itu industri kecil dan kerajinan akan memperluas kesempatan kerja, berusaha dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil, pengrajin serta masyarakat pada umumnya. Karenanya, pembangunan industri kecil dan kerajinan menduduki tempat strategis dalam keseluruhan pembangunan industri dan pembangunan ekonomi nasional.

Adapun industri kecil, sedang, besar dan industri kerajinan harus merupakan kekuatan-kekuatan yang saling berkaitan dan menunjang sebagai kesatuan yang kuat dari seluruh kekuatan industri nasional, dengan mempunyai kaitan erat serta saling menunjang antara industri hulu dan hilir. Yang tidak kalah penting, menurut Kepala Negara, adalah seluruh pembangunan industri kita harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan ekonomi nasional. Ini berarti pembangunan industri juga harus memperhatikan arah yang ditunjukkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bahkan, pasal ini memberi petunjuk yang jelas bahwa kita harus membangun koperasi, dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran kita supaya koperasi dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang berkembang pesat.

Apalagi, kini koperasi makin berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya di KUD (bidang pertanian) di samping juga berkembang di kalangan dunia industri, terutama koperasi yang bergerak dalam industri kecil dan kerajinan. Perkembangan koperasi di kalangan ini paling tidak, perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang supaya lebih memperkuat pelaksanaan perekonomian nasional yang kita citacitakan. Sedang wujud lain dari perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, adalah tumbuhnya Bapak Angkat bagi industri kecil dan kerajinan. Artinya, hubungan ini tidak berarti hubungan antara yang kuat dan yang lemah. Karena, hal ini tidak sejalan dengan semangat kekeluargaan dalam perekonomian kita. Hubungan itu harus mempunyai semangat sebagai hubungan antara kekuatan-kekuatan yang saling memerlukan, menghormati dan mengisi agar landasan perekonomian nasional kita sangat luas dan kukuh.

"Kehadiran Bapak Angkat bagi kalangan industri kecil dan kerajinan telah menunjukkan penambahan, baik dari kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kalangan swasta. Pengalaman tahun-tahun terakhir, telah menyadarkan kita bahwa kerjasama yang sehat antara yang besar dengan kecil ternyata telah memberi manfaat yang besar kepada semua pihak. Dalam kerangka yang lebih luas, kerjasama itu telah membuat ekonomi kita memiliki daya tahan terhadap gejolak-gejolak ekonomi dari luar. Tapi, dalam beberapa hal telah menghasilkan terobosan-terobosan baru," tegas Presiden.

Selain itu, dengan terus-menerus mengembangkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan mempertebal semangat kekeluargaan, akan melahirkan gagasan-gagasan baru yang segar dalam rangka melaksanakan tugas nasional kita bersama yaitu melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Juga peluang kita untuk membuat terobosan tetap terbuka luas, asalkan kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun mencari setiap peluang yang memang terbuka - untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin maju dan kebutuhan ekspor. Ini bisa dibuktikan dengan mengamati kualitas hasil produksi kerajinan bangsa kita seperti barang-barang untuk interior perumahan, barang-barang yang menarik wisatawan dan barang-barang untuk ekspor. Upaya ini adalah untuk menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat terhadap produksi dalam negeri dan menambah semangat industri kecil serta kerajinan untuk terus mengembangkan diri di masa mendatang. □ (DT)

Digitized by Google

Makin Mencuat Prestasi Kedokteran Kita

Dunia ilmu kedokteran Indonesia mengukir kembali puncak prestasi. Catatan prestasi ini bisa kita buka dengan melihat perjalanan atas keberhasilan Tim Dokter Indonesia yang mampu memisahkan bayi kembar siam bertempelan di kepala asal Tanjung Pinang, bayi kembar siam dempet asal Kisaran dan berhasil menyambung tangan yang putus akibat tebasan golok seperti semula, beberapa bulan yang lalu.

Kini, daftar prestasi itu ditambah lagi melalui tangan-tangan terampil Tim Dokter dari Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita Jakarta, yang sukses melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia. Di samping itu sukses demi sukses Tim Dokter Indonesia ini merupakan satu bukti bahwa tenaga dokter Indonesia sanggup memberikan yang terbaik bagi kesehatan masyarakat. Dan dalam lingkup internasional, dunia kedokteran kita telah membuktikan bahwa kemampuan kita tidak kalah dari bangsa lain.

Awal Mei lalu, Tim Dokter persalinan/operasi RSAB Harapan Kita yang dipimpin Prof. dr. Sudraji Sumapraja dengan dibantu dr. A. Daurie Mochran, dr. Hartini Soemantri (keduanya selaku operator), dr. Hasmoro (anestesiologis), dr. Titut Pusponegoro (perinatalogis) dan sejumlah tenaga ahli paramedik serta penunjang medik lainnya menjalankan operasi (seksio sesarea) dan dalam waktu lima menit berhasil mengeluarkan bayi tabung sebagaimana bayi yang lainnya, yaitu lahir dengan keadaan sehat wal afiat.

Bayi tabung laki-laki yang panjangnya 50 cm dan berat badannya sekitar 4000 gram itu, selain menggembirakan Tim Dokter yang bersangkutan, juga membuat bahagia pihak keluarga Markus selaku orang tua, yang telah mendambakan seorang anak hampir selama 14 tahun.

Dr. Muchsin Jaffar yang mendampingi dr Daurie Mochran dalam konperensi pers mengatakan, prosedur bayi tabung berbeda dengan prosedur inseminasi buatan. Pada prosedur inseminasi, sel telur dan sperma dimasukkan dan berkembang di dalam indung telur. Sedang pada bayi tabung, pertemuan sel telur dan sperma sepenuhnya dilakukan di luar saluran indung telur. Prosedur ini pertama kali dikembangkan oleh dr Patrick Steptoe dan dr. Robert Edwards, yang membangun laboratorium risetnya di Oldham, Inggris Utara, seusai Perang Dunia II.

Mereka ini, menurutnya, mengembangkan tehnik bayi tabung ini karena mendapat tantangan dari pejabat kesehatan Inggris. Tapi mereka berdua akhirnya diakui oleh dunia setelah kelahiran bayi tabung yang pertama di dunia, yaitu *Louise Brown* tahun 1978. Sementara bangsa Indonesia sendiri sudah mempunyai bayi tabung sebelum kelahiran bayi tabung keluarga Markus, yaitu Yuki Fithriyah Prawiranegara, anak Ny. Kadarsih Sarudji yang lahir di Australia 22 Juli 1982.

Hanya, kelahiran bayi tabung keluarga Markus ini mempunyai nilai tersendiri dibandingkan kelahiran bayi tabung Ny. Kadarsih Sarudji itu. Karena, bayi keluarga Markus kelahirannya langsung ditangani oleh tim medik putera-putera bangsa Indonesia sendiri, dan berlangsung di Indonesia.

"Bangsa Indonesia pasti mampu mengejar ketinggalannya asalkan diberi kesempatan dan kebebasan sepenuhnya, dengan ditunjang peralatan medis

Bayi tabung dalam gendongan suster RS Harapan Kita

Digitized by Google

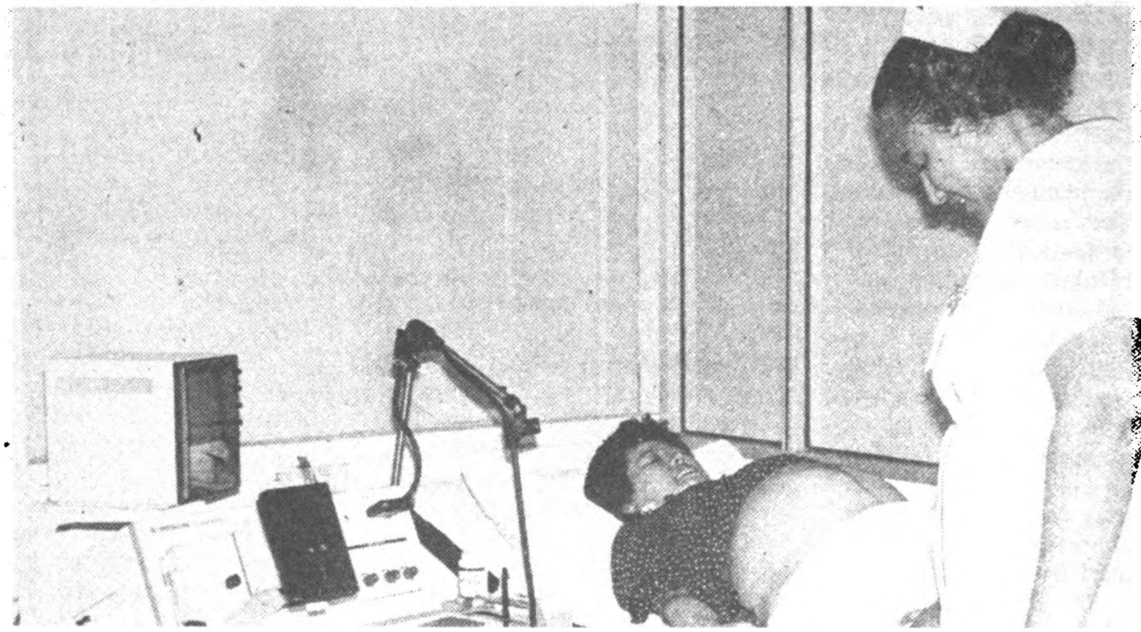

Ny. Markus melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia

yang memadai," tegas dr Daurie Muchran.

Ke berbagai dokter

Keluarga Markus seperti halnya keluarga yang lain, selama mengisi dan menjalani kehidupan rumah tangga, sangat mengharapkan kehadiran seorang anak di tengah kehidupannya. Namun, harapan itu hampir tidak terwujud meskipun telah dilakukan pemeriksaan ke berbagai dokter. Walau demikian pasangan Markus tetap berusaha untuk pergi ke dokter guna memperoleh kepastian apakah ia bisa dikaruniai seorang bocah pendamping dalam kehidupannya.

Sekitar tahun 1979, pasangan ini memeriksakan diri ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan diketahui, bahwa saluran telur Ny. Markus yang sebelah kiri tertutup, sedangkan sebelah kanan rusak karena adanya pengumpulan air dalam saluran telur (hidrosalping). Ini disampaikan juga dokter Taiwan ketika Ny. Markus pergi berobat ke negara itu pada tahun 1980.

Dr. AC Chen yang menangani Ny. Markus sewaktu berada di Taiwan, telah melakukan operasi untuk membuat kedua saluran telur yang tertutup itu terbuka kembali. Akan tetapi, hasil operasi ini pun belum membuahkan hasil. Ketidakberhasilan dr AC Chen ini menyebabkan Ny. Markus pergi berobat ke Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura pada tahun 1984. Kali ini pun tidak membawa perubahan dalam diri Ny. Markus. Kehamilan tak kunjung datang.

Kemudian pasangan suami istri ini mengambil inisiatif — dengan penuh optimistis — berobat ke RSAB Harapan Kita. Dalam pemeriksaan pertama, mereka sepakat mengikuti program 'bayi tabung' dan pada hari keempat haid berikutnya, Ny. Markus disuntik hormon setiap hari guna merangsang tumbuhnya folikel, yaitu gelembung yang mengandung sel telur di dalamnya pada kedua indung telurnya. Dengan peralatan USG (ultrasonografi yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi) pemeriksaan memperlihatkan folikel dengan garis tengah 17 milimeter telah tumbuh.

Selanjutnya, Ny. Markus mendapatkan suntikan hormon lain untuk merangsang pematangan folikel yang ada itu. Proses ini dilakukan terhadap Ny. Markus pada hari haid kesepuluh dan sel telur Ny. Markus diambil dari folikel yang sudah matang (13 Agustus 1987). Pengambilan sel telur ini dengan mempergunakan jarum panjang dan ditusukkan lewat vagina, dimana enam telur bisa dikeluarkan saat itu. Yang kemudian, suaminya diminta untuk mengeluarkan sendiri air maninya.

Pada proses pemeriksaan berikutnya, keenam sel telur itu dipertemukan dengan sperma yang diambil dari air mani suami dan campuran itu disimpan dalam lemari pembiakan (inkubator). Tidak lama, diketahui bahwa lima sel telur telah dibuahi serta empat embrio yang telah berkembang menjadi enam sel dipindahkan dari tabung pembiakan ke rahim Ny. Markus, sehingga hal ini sedikit membuat gembira pasangan ini karena pengobatan melalui RSAB telah mampu memberikan kepastian atas tanda-tanda kehamilan pada diri Ny. Markus.

Berselang beberapa bulan, kebahagiaan makin mewarnai kehidupan keluarga Markus. Apalagi, setelah diketahui hasil pemeriksaannya positif dan tidak urung, keluarga ini makin rajin memeriksakan diri ke RSAB Harapan Kita secara terus menerus. Namun, proses menuju kebahagiaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak cobaan yang harus diterima keluarga Markus. Cobaan itu seperti terjadinya perdarahan pada Ny. Markus akibat minum obat tradisional, buang air besar terus-menerus karena kebanyakan makan durian dan sempat jatuh.

Itu semua dihadapi keluarga Markus penuh dengan ketabahan diri. Juga, Ny. Markus yang mengalami musibah seperti ini tidak lama kemudian menjadi pasien tim dokter yang akan membantu proses kelahiran bayinya. Di sini, akhirnya bayi tabung itu telah berhasil lahir dengan selamat.

Atas dasar sukses dan prestasi yang sudah dicapai tenaga-tenaga kedokteran kita ini, jelas akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia. Bahkan, bisa menjadi cambuk bagi kalangan dokter itu sendiri untuk memacu prestasi yang lebih gemilang. Sehingga adanya prestasi itu, bangsa Indonesia akan lebih dikenal oleh dunia internasional dalam bidang ilmu kedokteran. Semoga bayi tabung yang lain akan lahir di bumi Indonesia.☐ DT

Digitized by Google

Akhirnya Disepakati Perlindungan Hak Cipta Indonesia - MEE

Pihak produser kaset rekaman-musik atau lagu Barat di Indonesia, yaitu Assosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dan Assosiasi Perekam Nasional Indonesia (APNI) telah sepakat untuk bergabung dalam Tim Koordinasi Perekam Indonesia (TKPI), untuk melakukan perundingan intensif yang menyangkut penandatanganan Keppres No.17 oleh Presiden Soeharto tentang perlindungan hak cipta atas rekaman suara antara RI dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sekaligus disusul penandatanganan persetujuan timbal balik mengenai hal itu antara delegasi RI dan MEE di Brussel.

Sementara Mensesneg RI Drs. Moerdiono bersama Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH, Jaksa Agung Soekarton Marmosudjono, SH, Kapolri Jenderal Pol. M. Sanusi dan Waseskab Drs. Attamimi telah menyelenggarakan rapat untuk membahas pelaksanaan tindakan hukum sehubungan dengan persetujuan itu.

Berkaitan dengan masalah ini Mensesneg Drs. Moerdiono mengatakan kepada wartawan, bahwa pelaksanaan persetujuan antara Indonesia dan MEE berlaku efektif mulai 1 Juni 1988. Artinya, seluruh kaset rekaman lagu-lagu yang diproduksi negara-negara MEE yang tidak mempunyai lisensi dari produser bersangkutan, dimana diganda, rekam ulang dan diedarkan di Indonesia dianggap sebagai kaset bajakan yang melanggar hukum. Kendati demikian, MEE juga dituntut untuk berbuat hal yang sama terhadap barang sejenis produksi Indonesia.

Sedangkan Menteri Kehakiman Ismail Saleh manegaskan, dengan adanya ketentuan itu penarikan terhadap seluruh kaset rekaman suara dan lagu barat tanpa lisensi dari peredaran, sudah harus selesai dilakukan oleh perusahaan yang menggandakannya di Indonesia pada 1 Juni 1988. Bilamana masih beredar, maka akan ada penindakan secara hukum. Karena, masalah ini menyangkut martabat bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Sehingga adanya penandatanganan persetujuan di Brussel itu, produser mengganda ulang di Indonesia harus bertanggung jawab dalam melaksanakan isi persetujuan itu. Juga, pasti ada sanksi hukum bila tidak melaksanakan persetujuan. Tapi tindakan hukum itu tidak akan meresahkan dan petugas hukum pun tentunya tidak sekaligus bergerak.

Penarikan kaset lagu-lagu barat, harus selesai 1 Juni 1988

Demikian pula Mensesneg Drs. Moerdiono selaku Ketua Tim Keppres No. 34 mengenai masalah-masalah *intellectual property rights* mengakui, pihak ASIRI dan APNI sudah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan anggota kedua assosiasi itu supaya mentaati persetujuan yang telah dibuat dan melakukan penarikan sesegera mungkin atas kaset-kaset yang masih beredar di pasaran.

Bahkan , surat-surat dari kedua assosiasi perusahaan rekaman itu meminta dihentikannya kegiatan memproduksi dan mengedarkan kaset lagu-lagu barat yang tanpa memiliki izin pemegang hak cipta serta menarik kaset-kaset yang ada dari peredaran.

Kepentingan Nasional

Adapun persetujuan yang telah dicapai Indonesia dan MEE dalam perlindungan hak cipta atas rekaman suara, yang diproduksi negara-negara MEE di Indonesia, diproduksi Indonesia dan diedarkan atau dipasarkan di MEE merupakan momentum yang baik bagi pelaksanaan UU Hak Cipta. Apalagi, menurut Moerdiono, dalam hal ini kita tidak pernah didesak dan dipaksa oleh pihak manapun termasuk dalam soal hak cipta rekaman gambar video dan rekaman suara. Karena, pelaksanaan persetujuan UU Hak Cipta ini menyangkut kepentingan nasional.

Persetujuan serupa dengan pemerintah AS yang dijadwalkan 6 Juli 1988 terpaksa ditangguhkan sementara penandatangannya, karena kesibukan Presiden Ronald Reagan. Kemungkinan, baru dapat dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama. Sedang surat Ketua Hubungan Luar Negeri dan Kebijaksanaan Komersial MEE Willy De Clercq yang ditujukan kepada Duta Besar Perwakilan RI di MEE, Atmono Suryo menyebutkan negara-negara MEE yang sudah meratifikasi persetujuan itu adalah Belgia, Denmark, Perancis dan Belanda. Sementara Italia, Spanyol serta Inggris sudah menandatanganinya dan Irlandia baru 30 Juni 1988 mendatang.

Willy De Clercq sependapat dengan isi surat Atmono Suryo, bahwa perlindungan serupa harus diberikan kepada negara-negara MEE terhadap rekaman suara, yang diproduksi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Digitized by Google

Kesepakatan Harga Kaset

Kini persoalannya adalah kesepakatan harga kaset. Terbukti dengan melihat TKPI dalam negosiasinya dengan Persatuan Produksi Rekaman Internasional (IFPI), yang mewakili agen pemilik hak cipta lagu barat guna mengupaya dan memperjuangkan kesepakatan harga kaset musik barat berlisensi di dalam negeri tidak lebih dari Rp 3.500 per kaset.

Harga itu dinilai Johny Tjondrokusumo dari Tim Record yang juga anggota TKPI kepada terbitan ibukota, sesuai dengan anjuran Mensesneg Drs. Moerdiono karena dengan harga ini diharapkan konsumen di Indonesia mampu untuk membelinya. Bila perjuangan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak pemilik hak cipta lagu barat itu, khususnya dalam menentukan besarnya royalti menemui jalan buntu, maka akan berpengaruh nyata terhadap situasi jual-beli kaset lagu Barat di Indonesia. Sebab, peredaran kaset lagu Barat ini di kota-kota besar bisa mencapai 70 persen dan sisanya (30 persen) adalah peredaran lagu-lagu non Barat.

"Sesuai dengan permintaan Menteri Kehakiman Ismail Saleh, bahwa sejak 1 Juni 1988 kaset-kaset lagu Barat bajakan dilarang beredar di pasaran dalam negeri, maka pihaknya telah memerintahkan kepada para distributor atau penyalur Tim Record di seluruh Indonesia, agar jangan menjual lagi kaset-kaset itu. Namun, penarikan kaset-kaset itu dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu perkembangan selanjutnya," tegas Johny Tjondrokusumo.

Ternyata Keppres No. 17 ini mengundang berbagai komentar dari pihak yang mempunyai kepentingan di bidang UU Hak Cipta, termasuk Rinto Harahap yang mengatakan, seluruh perusahaan rekaman yang tergabung dalam ASIRI dan APNI telah mengambil posisi dan sikap untuk mematuhi sepenuhnya kewajiban-kewajiban hukum dalam rangka pendukung kesepakatan timbal balik antara Pemerintah RI dan MEE serta antara Pemerintah RI dan AS, terutama karya cipta rekaman musik. Akan tetapi, mengingat jumlah peredaran kaset di seluruh Indonesia sebanyak 3 juta buah senilai Rp 5 miliar dan peredaran ekspor sebanyak 2 juta buah senilai Rp 3 miliar, maka pihak ASIRI dan APNI menghadapi berbagai persoalan terutama sempitnya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban untuk menarik kembali peredaran kaset itu.

Keterbatasan waktu itu menjadi pangkal tolak kekhawatiran terhadap kemungkinan tuntutan dan penyitaan serta status kaset, yang mulai 1 Juni sudah menjadi barang illegal sekaligus produksi serta pemasaran kaset-kaset Barat dan asing telah dikelola cukup lama secara profesional, dimana menempati posisi yang mapan dalam salah satu jaringan produksi maupun perdagangan yang melibatkan investasi, pengusaha, tenaga kerja yang besar dan sudah menjangkau pemasaran ekspor terutama ke nagara-negara Timur Tengah. "Pertimbangan-pertimbangan selayaknya dikaitkan dengan segi hukum khususnya UU Hak Cipta. Ini disadari oleh seluruh anggota ASIRI dan APNI, dimana kesadaran itu hendaknya dihargai sebagai sikap jujur dan terbuka. Untuk itu, perlu dicari jalan keluar dengan tetap sesuai hukum dengan jalan memikirkan usaha mengatasi permasalahan yang timbul," katanya.

Oleh karena itu, untuk lebih membekali para aparatur hukum dalam melaksanakan tindakan hukum — dalam waktu dekat akan diselenggarakan penataran mengenai perlindungan hak cipta bagi para hakim, jaksa dan polisi. Bahkan, akan dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat termasuk pengusaha, supaya dalam lebih memahami isi Undang-Undang No.7 tahun 1987 dengan Hak Cipta itu.

Realisasi penataran ini sudah menjadi program kerja pihak yang bersangkutan. Seperti pihak Kepolisian sendiri menurut Kapolri Jenderal Pol. M. Sanusi, sudah sejak awal siap untuk mengamankan palaksanaan UU Hak Cipta itu. Tapi, masih diperlukan penataran bagi para polisi terutama untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya hambatan-hambatan sekaligus untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaannya. (DT)

PIMPINAN/DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN
P.T. GRAHA PURNA YUDHA

MENYAMBUT GEMBIRA ATAS TERPILIHNYA BAPAK SOEHARTO SEBAGAI PRESIDEN DAN BAPAK SUDHARMONO, SH SEBAGAI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM SIDANG UMUM MPR 1988.

SELAMAT MENGEMBAN TUGAS-TUGAS MULIA DEMI KEJAYAAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA DAN NEGARA TERCINTA REPUBLIK INDONESIA

Digitized by Google

Idul Fitri, Dalam Semangat Kesederhanaan

Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir bathin. Selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya. Suasana Lebaran kembali mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia di bulan Mei lalu, saat setelah umat Islam menyelesaikan ibadah puasa sesuai dengan ajaran dan perintah agamanya, selama bulan Ramadhan.

Idul Fitri berarti hari kesucian. Setelah menunaikan ibadah puasa dengan tulus dan penuh keikhlasan sesuai dengan imannya, umat Islam akan kembali pada fitrahnya yang tanpa dosa. Idul Fitri memberikan makna suatu proses membentuk ketakwaan yang terwujudkan dalam kemampuan mengendalikan diri, mengekang hawa nafsu, serta mengakui kesalahan jika memang telah berbuat khilaf. Itulah makna idul Fitri sebagaimana dikemukakan sejumlah tokoh dan ulama KH AR Fachruddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, KH Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ali Darokah, Ketua MUI Surakarta, dan Dr Syafii Maarif, cendekiawan yang juga tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta.

KH Hasan Basri mengemukakan, perayaan Idul Fitri merupakan ungkapan tanda syukur umat Islam kepada Allah SWT karena upayanya mengendalikan hawa nafsu dan mengerjakan perbuatan baik selama menunaikan ibadah puasa. Masa berpuasa dapat dilambangkan sebagai kancah peperangan. Dalam puasa, manusia berperang melawan nafsu-nafsu yang ada pada dirinya. Menurut Nabi Muhammad SAW, perang melawan hawa nafsu lebih berat daripada perang fisik biasa. Karena itu, perayaan Idul Fitri juga dilambangkan sebagai perayaan orang-orang yang pulang dari perang dengan membawa kemenangan.

Meski Idul Fitri merupakan hari kesucian, tapi menurut KH AR Fachruddin, tidak menjanjikan pengampunan seluruh dosa meski seseorang umat telah melakukan puasa sebulan tanpa lowong, bertakbir, berjamaah maupun mengeluarkan zakat. Dosa-dosa yang mendasar tidak akan terhapuskan tanpa adanya pertobatan.

Fitrah manusia memang sesekali tergoda berbuat dosa. Namun dosa manusia sebagai akibat kesengajaan untuk minta digoda seperti tindak korupsi, menggelapkan harta rakyat, zinah, musyrik dan berani kepada orang tua, merupakan dosa-dosa tanpa ampunan.

Cendekiawan Islam, Dr Syafii Maarif menyatakan, makna substansial Idul Fitri belum banyak dipahami oleh kalangan Islam. Masih banyak ditemui tindakan-tindakan hipokrit atau munafik di kalangan umat Islam. Antara cita-cita moral Islam dan kenyataan hidup belum mampu didekat dan masih terdapat jurang pemisah yang jauh. Ia berharap umat Islam selalu takwa dan tidak terjebak dalam perbuatan hipokrit. Dengan moral dan iman, seharusnya perbuatan-perbuatan korupsi dapat di tangkal.

Ia menyadari, masih dibutuhkan proses panjang untuk mendidik moral masyarakat. Untuk keperluan itu tidak saja dibutuhkan syiar ulama, tetapi juga reaktualisasi konsepsi Islam yang terasa mandek sejak sepeninggalan Ibnu Qaldun dan Iqbal pada abad XVII.

Disiplin

Selaras dengan hikmah bulan puasa, — bulan bagi umat Islam menempa diri —, Menteri Agama Munawir Sjadzali, dalam pesannya menjelang Idul Fitri mengingatkan agar umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan, kesetiakawanan yang dilandasi semangat keimanan. Hari Raya Idul Fitri dapat dimanfaatkan bagi umat untuk memawas diri, serta meningkatkan semangat kedisiplinan yang sangat diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menteri mengajak umat untuk merayakan Idul Fitri dengan kehangatan. "Marilah kita semarakkan hari raya Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan, menghindarkan diri dari segala bentuk kegiatan yang bersifat tabzir atau pemborosan, tetapi tetap penuh kekhidmatan bersama ke-

Presiden, Wakil Presiden dan warga Ibukota sembahyang Ied bersama di Masjid Istiqlal Jakarta

Digitized by Google

luarga, tetangga dan handai taulan," katanya.

Ditambahkan, ibadah puasa memberikan hikmah tiga macam, *pertama*, mempersegar kembali keimanan dan ketakwaan, *kedua*, membina semangat kesetiakawanan antar umat, dan *ketiga* melatih segenap umat untuk hidup tertib dan disiplin.

Ketiga hikmah itu menjadi penting bagi umat Muslim di tengah masyarakat bangsa yang sedang menghadapi tuntutan pembangunan yang makin meningkat. Dengan keimanan yang kokoh, dan dengan ketakwaan yang mantap, Umat Islam akan selalu tegar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, baik pribadi maupun persoalan kemasyarakatan dan bangsa. Dengan kesetiakawanan yang tinggi seperti diajarkan melalui zakat, dan sadazah, kesenjangan yang ada di masyarakat, antara yang berpunya dan yang kurang beruntung dapat diperkecil. Sikap hidup tertib dan disiplin sebagaimana diperagakan oleh umat Islam akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kehidupan bangsa.

Kesederhanaan dan Khidmat

Lebaran hari pertama, berbondong-bondong umat Islam memenuhi tempat-tempat terbuka serta mesjid-mesjid berikut halamannya untuk melakukan ibadah sholat Ied. Tak ketinggalan, Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono SH serta sejumlah Menteri yang beragama Islam bersama ribuan umat Islam memenuhi mesjid Istiqlal hinga meluap sampai halaman, untuk sholat jamaah. Demikian pula di mesjid-mesjid lain seperti Sunda Kelapa, Mesjid Agung Al Azhar, mesjid Arif Rahman, Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta, Taman Surya di Surabaya, Alun-alun Bandung serta di berbagai tempat termasuk kota-kota besar lainnya dipenuhi umat yang khusus beribadah, mengucapkan syukur kepada Allah SWT sembahannya. KH AR Fachruddin yang bertindak sebagai khotib di Mesjid Istiqlal mengajak umat Islam untuk bersyukur atas keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia, yang dapat dilihat, dinikmati dan dihayati.

Selaras dengan suasana pembangunan, Fachruddin mengajak pula umat Islam untuk meningkatkan mental kebangsaan, yakni mental Pancasila. Menurut Fachruddin, mental Pancasila adalah mental yang berakhlak dan bukan mental materialistis, bukan mental yang berfalsafah serba benda. Pancasila adalah religius. Mental Pancasila adalah mental yang mensyukuri pelaksanaan dan kegembiraan mengamalkan ajaran agama Islam khususnya dan agama-agama lain pada umumnya. "Ketahanan mental yang berakhlak demikian itulah yang Insya Allah dapat mengantarkan kita kepada kesejahteraan masyarakat, nusa dan bangsa," katanya.

Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Prof Dr H Rachmat Djatnika yang tampil sebagai khotib di Masjid Agung Sunda Kelapa mengajak umat Islam untuk memetik hikmah Idul Fitri untuk menatap hari depan. Untuk menghadapi masa depan diperlukan penyusunan program kerja. Berdasarkan pengalaman dan pertimbangan masa lampau dan keadaan kini, kemungkinan pada masa mendatang dapat diperhitungkan dan dapat dipersiapkan langkah untuk menghadapinya. Umat Islam perlu memikirkan masa depan tidak saja dirinya, tetapi juga keluarga, masyarakat dan bahkan bangsanya.

KH Kosim Nurseha anggota Dinas Pembinaan Mental TNI AD dalam khotbahnya di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta mengingatkan bahwa kekukuhan dan kesejahteraan bangsa dipengaruhi oleh kekukuhan akhlak warga masyarakatnya. Umat Islam dimintanya mengambil Hikmah Ramadhan yang merupakan saat ujian bagi kekukuhan akhlak tiap muslim.

Dr Ir HM Amin Azis dalam khotbahnya di kampus Universitas Indonesia Salemba mengingatkan umat bahwa ribuan kali takbir tidak ada faedahnya apabila diucapkan secara verbal. Takbir harus dilakukan dengan rasa penyesalan yang mendalam atas kegagalan umat menerima anugerahNya, di samping karena rasa gentar dan pujian kepadaNya.

KH Hasan Basri, Ketua MUI dalam khotbah di Masjid Agung Al Azhar Jakarta mengingatkan agar Umat Islam berupaya mewujudkan keadilan. "Agama Islam mengajarkan agar umat manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan serta melarang umat berbuat keji, mungkar dan permusuhan," katanya.

Para tokoh ulama yang terjun selaku khotib itu merupakan contoh betapa sibuknya para ulama dan pimpinan agama pada hari itu. Mereka, para ulama atau para khotib hari itu memberikan uraian hikmah Idul Fitri, memberikan dorongan kepada umat Islam untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanannya, tidak saja di dalam hati tetapi hendaknya tercermin dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Itulah makna Idul Fitri.

Pesta

Tak ayal lagi. Meski Idul Fitri merupakan hari raya keagamaan, aspek pestanya juga tidak ketinggalan. Sejak malam harinya, malam takbiran, suasana pesta ria tergambar di seluruh wajah umat Islam. Bukan pesta materi tetapi pesta kegembiraan rohani. Jalan-jalan raya di kota-kota besar dipenuhi pemuda dan pemudi, bahkan orang tua, pria dan wanita, ikut hanyut dalam suasana gembira disertai dengan puji-pujian kepada Allah SWT, *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walilla Ilham*.

Pagi harinya, seusai Sholat Ied, di seluruh nusantara umat Islam, bahkan yang tidak beragama Islam pun, tenggelam dalam suasana silaturahmi, saling ucapan selamat seraya mohon maaf lahir batin.

Demi silaturahmi itu pula lalu lintas angkutan umum, baik laut, darat dan udara mengalami lonjakan yang amat sangat. Jakarta merasakan sedikit lengang karena ratusan ribu, bahkan mungkin mencapai jutaan warganya pulang ke daerah-daerah untuk bersilaturahmi. Akibatnya, jalan raya menuju ke Jawa Tengah mengalami kemacetan berpuluh-puluh kilometer menjelang lebaran. Stasiun bus antar kota Pulo Gadung, stasiun Kereta api Gambir berubah menjadi lautan manusia yang berjejalan ingin menggunakan jasa angkutan untuk ke daerah. Konon angkutan pesawat terbang pun merupakan sarana angkutan yang harus diperebutkan karena keterbatasan tempat duduk untuk menampung arus penumpang.

Meski Lebaran merupakan suasana pesta, pemerintah pagi-pagi sudah waspada, agar mereka yang berpesta dan bersilaturahmi tidak melalaikan kewajibannya. Menjelang Lebaran telah diadakan himbauan agar pegawai negeri melaksanakan kewajibannya sesudah hari libur Lebaran usai. Memang tidak dapat dihindari, suasana sepi setelah Lebaran tetap menyelimuti kantor-kantor pemerintah, namun kemauan para pegawai negeri untuk melakukan kewajibannya kelihatan meningkat.☐ Sugyanto/SK

Digitized by Google

Tantangan AMPI, Bagaimana Agar Dikenal Dan Disayang

Keberadaan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) di tengah dunia kepemudaan Indonesia, tiada lain adalah untuk memberi motivasi atau mendorong masyarakat khususnya kalangan generasi muda, agar mengisi kemerdekaan ini dengan berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pembangunan nasional. Orientasi partisipasi itu, apakah yang terorganisir atau tidak dari jajaran kepemudaan, ditujukan pada pembangunan dan kekaryaan. Ini merupakan salah satu tugas pokok AMPI yang disebut dengan Tugas Pembaharuan. Sehingga tidak ada penekanan pada hal-hal yang semata-mata untuk kegiatan politik saja, karena kegiatan atau partisipasi dalam pembangunan itu tercermin di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, olahraga, sikap mental, agama dan lain-lainnya.

Partisipasi yang demikian rupa itu, kata Ketua Umum DPP AMPI Agung Laksono, disasarkan pada generasi muda supaya selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu. Baik generasi yang berada di pusat maupun di daerah dan seluruh pelosok nusantara. Peranan AMPI ini adalah salah satu perwujudan daripada arti pembaharuan di segala bidang sebagaimana dalam bentuk program kegiatan.

Apalagi karena ini merupakan hal baru — dari kepemimpinan AMPI periode lama sampai sekarang — tentu dalam jangka waktu sepuluh tahun ini AMPI belum banyak memenuhi harapan sebagaimana yang diminta oleh semua pihak termasuk Golkar sebagai pendiri AMPI. "Organisasi kepemudaan AMPI ini dasar pijakannya adalah kebangsaan, bukan lagi kesukuan, kedaerahan, agama atau hal-hal yang bersifat SARA. Juga tidak ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan primodial, dimana sifat ini dihilangkan sama sekali dalam tubuh AMPI," tambah Agung Laksono. Dia diwawancarai *Media Karya* sehubungan dengan HUT AMPI ke-X yang jatuh pada bulan Juni ini.

Adapun sikap AMPI ini sejalan dengan garis politik dan pembangunan politik Orde Baru. Artinya, AMPI dalam melaksanakan program-program

AMPI dikenal merata di setiap individu

betul-betul 'Apa dan Siapa' AMPI ini. Apalagi jajaran kepemudaan itu mempunyai orientasi pada karya dan kekaryaan dan di luar orientasi itu pun, AMPI pasti dikenal sebagaimana wadah pembinaan generasi muda.

Bahkan perlu diketahui, bahwa banyak pemuda yang aktif serta hidup di dunia kepemudaan, tapi tidak terorganisir dalam organisasi kepemudaan apapun dimana mereka berada di lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan hidup dalam kegiatan perorangan, terutama pemuda-pemuda yang berprofesi. Sehingga ini menjadi tantangan agar tidak saja dikenal, tapi juga disayang dan ikut sama-sama membangun negeri ini. "Demikian pula dari 31 ormas pemuda dan KNPI dikenal secara konkret oleh 60 juta pemuda itu. Ini tentu tergantung pada banyak hal seperti latar belakang pendidikan yang sangat heterogen, kadar intelektualitas, dan perhatian pada masalah-masalah kepemudaan itu sendiri. Juga tergantung pada kadar rasa kebangsaan," katanya menjawab pertanyaan kegiatan seperti di bidang kemasyarakatan dan kepemudaan selalu dilaksanakan secara bertahap serta dimulai dulu dengan konsolidasi organisasi yang berlangsung secara terus menerus. Sementara itu, program-program yang menyentuh kehidupan orang banyak ditonjolkan terutama yang menyentuh kepentingan kepemudaan. Misalnya, di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Tentu saja program AMPI ini bersifat mendorong motivasi.

Tantangan

Namun mengingat jumlah generasi muda begitu besar, sekitar 60 juta di negeri kita ini, katanya, tentu saja dengan usia AMPI yang relatif masih muda ini, maka tidak mengherankan bila AMPI belum dikenal secara merata oleh setiap individu generasi muda. Kendati demikian, masih ada keyakinan bahwa sebagian besar, terutama generasi muda yang berada dalam jajaran ormas-ormas kepemudaan apapun di negeri ini, tentu sudah mengenal

Digitized by Google

mengapa AMPI terasa kurang populer di kalangan pemuda.

Hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi AMPI yang menyandang predikat 'pembaharuan'. Juga, KNPI misalnya, belum mampu menjangkau pemuda secara keseluruhan. Sehingga organisasi-organisasi yang sifatnya swadaya perlu lebih ditingkatkan terus.

Visi dan Persepsi

Sementara itu program-program AMPI yang sudah dicanangkan dalam Munas, menurut Agung Laksono, tidak ada permasalahan. Hanya persoalannya adalah bagaimana cara mewujudkan program-program itu. Yang menjadi soal, — karena banyak hal yang menjadi kendala — antara lain masalah kemampuan manajerial, pembiayaan dan palng penting adalah visi dan persepsi AMPI itu sendiri. Baik dari kalangan anggota maupun pengurus dari tingkat pusat sampai daerah termasuk para pembina AMPI.

Karenanya, Ketua Umum DPP AMPI ini merasa yakin dan percaya bahwa Golkar akan merasa beruntung serta bahagia sekali bila AMPI dapat maju berkembang dengan program-programnya. Sebab, aspirasi AMPI adalah Golkar. Juga AMPI sangat *concern* untuk menjaga nama dan hubungan baik ini, dimana AMPI selalu membuat nilai tambah bagi kepentingan Golkar sebagai sumber kader. Karena, AMPI sendiri merupakan sumber insani Golkar. Jadi, kader-kader AMPI harus mempunyai kualitas yang tinggi lewat usaha kaderisasi yang terencana, baik dari segi wawasan kebangsaan, kepemudaan maupun masalah-masalah profesi. Ini merupakan sumbangsih yang besar bagi kepentingan Golkar terutama dalam menjawab mekanisme rekrutmen kepengurusan kepemimpinan Golkar di masa-masa mendatang. Karena, bagaimanapun tokoh-tokoh Golkar semuanya pernah melalui proses kepemudaan. Ini perlu di isi oleh AMPI.

Sekarang konsolidasi Golkar sendiri maju pesat, terencana, terarah dan jelas. Sehingga, kondisi yang sedemikian rupa ini merupakan peluang emas untuk memantapkan posisi AMPI menjadi sumber insani Golkar. Namun, kita melihat ini harus penuh kesadaran diri yang tinggi bahwa dalam rekrutmen nanti tidak ada istilah otomatis bisa mengisi komposisi struktur Golkar begitu saja, karena semua ini kita memperoleh dari suatu perjuangan. Meskipun dia itu aktivis atau tokoh AMPI sekalipun, kalau tidak berbuat dan tidak mempunyai prestasi, "jangan mengharapkan sesuatu yang lebih dari Golkar".

Untuk mengisi komposisi strutkur Golkar itu, menurutnya, jatah untuk generasi muda sekitar 60 persen. Ini berarti dalam tubuh Golkar sudah mencerminkan regenerasi. Dengan demikian, diharapkan kader-kader AMPI untuk mengisi komposisi struktur Golkar itu, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang ditunjang oleh prestasi masing-masing individu yang bersangkutan. Namun, tidak tertutup kemungkinan ini akan diisi pula oleh unsur generasi muda dari jajaran organisasi kepemudaan lainnya sepanjang dia mempunyai prestasi, karena Golkar adalah milik keluarga besar Golkar. Tentunya, mereka itu telah memenuhi persyaratan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan Golkar sendiri.

Adapun AMPI sendiri tidak mempersoalkan kriteria tersebut. Itu sudah merupakan hak dan wewenang Golkar dalam menentukan siapa-siapa yang pantas mengisi komposisi struktur Golkar periode masa mendatang, asalkan, katanya, yang terpilih itu selama ini telah menunjukkan atau memperlihatkan kemampuannya dalam berorganisasi.

Sedang hal-hal yang berkembang di luar organisasi, misalnya bila ada yang tidak terpilih menjadi anggota DPR, jangan membuat asumsi atau pikiran yang direka sendiri. Karena AMPI sebagai organisasi kepemudaan yang mempunyai predikat 'pembaharuan', sekarang dan yang akan datang, tidak berniat untuk menganut falsafah 'habis manis sepah dibuang' meskipun kini hubungan antara AMPI dengan Golkar tidak secara struktural. Akan tetapi, secara mekanisme yang ada yaitu dewan pembina dan penasehat, maka AMPI mencoba untuk mewujudkan AMPI sebagai sumber insani Golkar. Artinya, kalau seorang kader itu baik dan mempunyai prestasi, AMPI akan mempromosikannya supaya tetap dipergunakan atau dimanfaatkan tenaga dan pikirannya oleh Golkar. Karena adanya keterbatasan tempat di Golkar, maka tidak semua kader AMPI yang terbaik itu akan berada pada jajaran struktur formal.

Prinsip-prinsip ini meskipun belum seluruhnya berlaku di AMPI, tapi lambat laun sejalan dengan makin dewasanya AMPI maka AMPI akan menuju ke arah sana dan diharapkan pula, Golkar sudah sedemikian rupa dalam melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, di masa mendatang apakah itu pemilu atau kehidupan lainnya di bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan misalnya, orientasinya harus pada kualitas. Sehingga kemenangan pemilu terakhir yang kita raih sekitar 73 persen dan sebelumnya lebih dari 60 persen, di masa mendatang tidak hanya dipikirkan kita sebagai mayoritas. Tapi, bagaimana kualitas kemenangan itu. Demikian juga eksistensi AMPI sebagai ormas pemuda akan ditentukan oleh kualitas, bobot serta perilaku AMPI sendiri.

"Ini tentunya membutuhkan pelaksana-pelaksana yang mempunyai prestasi dan kualitas. Jangan harap kita dapat melakukan sesuatu nantinya tanpa ditunjang prestasi dan kualitas," tegasnya.

Atas dasar pemikiran seperti ini, maka penilaian ini harus disadari oleh pengurus AMPI dari tingkat pusat sampai daerah dan seluruh ormas pemuda jajaran keluarga besar Golkar, agar kecenderungan ini betul-betul dipergunakan serta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi, kita harapkan AMPI di masa mendatang tetap konsisten terhadap pola dasar perjuangannya, yaitu pada Tri Dharma AMPI (Pembaharuan, Kekaryaan, Kerakyatan yang manusiawi). Ini paling penting dan kiranya di dalam suasana kehidupan berorganisasi, agar makin tumbuh serta dewasa suasana demokrasi sehingga sampai kapanpun kader-kader AMPI tetap sebagai kader Golkar, yang mempunyai ciri tersendiri sebagai alumnus AMPI. Juga, diharapkan bagi AMPI pada masa mendatang mampu melaksanakan program-programnya sedemikian rupa sehingga menjadikan AMPI benar-benar AMPI. Dengan demikian, AMPI secara tidak langsung akan menghilangkan unsur-unsur primodial. Sehingga, bilamana sudah di AMPI, hendaknya jangan disebut-sebut dia unsur ini atau itu. Karenanya, dalam komposisi struktur kepengurusan AMPI periode mendatang, AMPI telah mempersiapkan diri dengan batasan usia sekitar 35 tahun sekaligus mampu memberikan cerminan, agar pemuda sebagai alat pacu yang dibina untuk menjadi kader AMPI benar-benar menonjol dan mempunyai prestasi. □ DT

Digitized by Google

Mengapa Harus Mudik Lebaran?

Lima hari sebelum Lebaran tiba, hari yang diagungkan oleh umat Islam di seluruh dunia dengan nama Idul Fitri, tiap terminal, dimanapun, dijejali orang-orang yang ingin mudik dari tanah rantau. Jakarta, kota impian para pedagang kaki lima, sopir, pembantu rumah tangga, penjual jamu gendong, dan tukang bakso pada hari-hari tersebut ibarat kebanjiran manusia. Terminal Pulo Gadung diserbu mereka yang akan pulang ke kampungnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan bagi mereka yang akan mudik ke daerah Jawa Barat tentu memilih terminal Cililitan dengan rute perjalanan melewati Sukabumi-Cianjur-Bandung dan seterusnya.

Ternyata mudik juga bukan hanya milik mereka yang disebut di atas. Para pejabat, pegawai negeri yang mendapat giliran cuti, berhamburan meninggalkan Ibukota Negara untuk beberapa hari kembali menengok kerabat, tanah kelahiran atau bahkan mungkin saja untuk datang kepada orang tuanya, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi atau juga menggunakan angkutan kereta api seperti pemudik-pemudik yang lain.

Itulah yang membuat Jakarta menjadi sepi lima hari sebelum hari raya dan dua hari setelah hari raya. Yang pasti sepanjang jalan Jawa sampai dengan Madura — bahkan Bali — jalan darat dipenuhi oleh berbagai kendaraan.

Mudik atau pulang kampung dalam menyambut hari raya, sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, tak hanya milik "Saripah" penjual rokok kaki lima tapi juga milik "Den Bey" yang punya pangkat tinggi.

Hari Raya benar-benar dijadikan hari yang mampu mempertemukan kedamaian. Bahkan beribu-ribu orang lainnya mudik atau pulang Lebaran adalah sesuatu yang mutlak. Karena di dalam Lebaran terjadi pertemuan yang mengandung nilai besar dan luhur.

Peristiwa mudik melahirkan keharuan, melahirkan kekuatan baru yang tumbuh dari dalam. Rasanya dalam mudik akan terlepas kelelahan, kejenuhan dan datanglah kebahagiaan yang berlimpah. Ini terungkap dari Darno, seorang Guru SD asal Brebes yang bertugas di Cianjur, juga Kosim seorang penarik becak di Jakarta asal Indramayu dan masih banyak lagi yang lain yang dengan cara yang tidak sama mereka semua berusaha untuk dapat mudik di hari Lebaran.

Menjelang Lebaran, tiap terminal dijejali orang yang akan mudik

Lima hari sebelum hari raya dan lima hari sesudah hari raya di semua stasiun, Jatinegara, Tanah Abang, Gambir, Pulo Gadung, terminal Cililitan, penuh dengan orang-orang semuanya akan dan baru pulang mudik. Mereka merasa harus pulang mudik meski sesudah itu mereka juga harus kembali bergelut dengan kehidupan Jakarta yang tegang, keras, dan angkuh, ungkap seorang penyair. Jadi mudik benar-benar menjadi milik semua orang dengan berbagai latar belakang dan status sosial.

Mudik bukan hanya milik pembantu saja rupanya. Dalam perjalanan bisa ditemui orang-orang dari berbagai profesi. Ada wartawan yang nekad bermobil ke Banyuwangi kendati mobil tersebut hasil pinjaman. Ia merasa harus pulang dalam hari Lebaran. Baginya suasana Lebaran di kampung lebih jujur, harmonis dan penuh persaudaraan. Jakarta tidak menawarkan semacam itu lagi. Dalam pulang mudik tak ada lagi perbedaan, tak ada lagi perdebatan di jalan-jalan antara kolonel dan hansip penjaga malam di gudang-gudang Tanjung Priok. Semua mempunyai tujuan yang sama yaitu mudik, dengan cara, gaya dan model berbeda. Menengok kampung yang barangkali telah satu tahun tak dijumpai, makam orang tua atau sanak famili yang pasti mudik di hari Lebaran mengandung arti mensyukuri kebesaran Tuhan dalam satu malam dan pagi menyambut fajar dengan takbir berkumandang di seluruh dunia.

Memang rasanya tak ada arti lain kecuali kita bersukur dan berzakat fitrah di hari raya Idul Fitri dengan menyebut Allah Maha Besar berulang-ulang. Mudik tetap ada bagi yang pergi meninggalkan kampungnya, karena mudik adalah tempat menampung segala keletihan sehabis bergelut dengan kelelahan dan kegelisahan di tanah rantau. Dengan mudik rasanya kembali bathin ini disiram oleh air telaga yang mengandung wewangian, ungkap seorang dosen IAIN Ciputat, Siti Rohayah. Beramal bisa dilaksanakan dimana dan kapan saja, tapi lain nilainya berzakat fitrah di hari yang penuh maaf dan ampunan bagi umat Islam yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena datangnya bagaikan cahaya dan hanya setahun satu kali, maka mudik sesungguhnya bukan hanya berarti pulang tanpa arti, mudik mengandung makna, tak hanya sekedar melepas rindu pada sanak keluarga, tapi lebih dari itu mudik adalah bagian akhir perjalanan seorang pengembara Muslim terlebih yang dengan tabah dan tawakal menjalankan ibadah Puasa dalam bulan suci Ramadhan. Bagi mereka mudik penuh arti. Naik pesawat, naik kereta api, naik bus, naik kendaraan pribadi,

Digitized by Google

Pegawai yang mendapat cuti, berhamburan meninggalkan Ibukota

mudik tetap mengandung arti pulang, istirahat, bertakbir, dan berzakat fitrah, tanpa membedakan latar belakang pekerjaan dan profesi, ungkap beberapa rekan.

Perasaan Bahagia

Juga Hesti, seorang hostes dari sebuah klub malam, mengaku, (di sebuah rumah makan di kawasan Puncak menjelang hari Lebaran), baginya mudik adalah saat yang paling mulia, ''karena di kampung saya bisa menangis dan bisa sendiri dalam kamar selama berjam-jam, mengenang dosa dan kebohongan yang saya buat selama di Jakarta, saya merasa seolah dosa saya terampuni, saya memandang orang-orang di kampung saya yang hidup apa adanya tapi dengan jerih payah yang sah, saya benar-benar merasa bahagia''. Barangkali perasaan seperti itu juga menjadi milik setiap orang yang mudik, kata rekan yang duduk di sebelahnya.

Karena di malam Takbir yang bergema dimana-mana Tuhan seakan datang memberi maaf kepada semua umatnya. Khususnya umat Islam di dunia. Dan desa bagi kami, ungkap kopral Tohir dan sersan Tedi, adalah sumber keindahan dan kedamaian. ''Karena itu sekali dalam setahun kami harus pulang, kecuali kalau ada piket, sebagai prajurit tak bisa ditolak walaupun hati sebenarnya sedih.''

Mungkin orang bertanya, kenapa harus mudik walau uang hanya sedikit, cuti sangat pendek, naik bus atau kereta ekonomi? Kenapa?

Karena mudik bukan hanya sekedar pulang kampung, kata budayawan Umar Khayam karena di dalam mudik akan didapatkan sesuatu yang paling berharga yang akan mengusir segala keletihan dan kegelisahan. Kampung bagi pemudik artinya bertemu dengan kenangan masa lalu, bertemu desa yang mungkin telah lama ditinggalkan, bertemu saudara dan nyekar di makam, mungkin orang tua, kakek nenek, keponakan, cucu yang telah dipanggil lebih dulu dan bersilaturakhmi dengan para guru, tetangga, serta siapa saja yang kita kenal dan kita kenang.

Tapi dari semua peristiwa mudik menyambut hari Lebaran yang berhamburan di jalan-jalan dengan berbagai jenis kendaraan, yang dipenuhi oleh berbagai manusia dengan berbagai latar belakang, adalah sebuah peristiwa yang maha dahsyat dan bermakna. Yaitu menyambut malam Takbir dan di pagi fajar akan muncul shalat Ied menanti umat Islam untuk datang ke hadapan Tuhan.

Di muka bumi di seluruh dunia pada saat shalat Ied berlangsung, tak ada seorang pun manusia yang perkasa, yang besar, yang pangkat, yang kuasa, yang kaya. Semua menjadi tak berdaya. Karena pada saat itulah sesungguhnya arti mudik atau pulang bagi setiap umat Islam. Karena pada saat itulah hanya Tuhan Yang Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betapa kecil dan tak berdayanya manusia. Saat itu di hadapan Tuhan, kita semua berserah mohon ampunan setelah melaksanakan perjalanan pensucian diri, evaluasi di dalam Ramadhan selama satu bulan.

Kita menjadi sangat kecil, dan mudik dalam arti yang lebih luas adalah pulang dalam hari raya atau hari pesta umat Islam, tapi lebih dari itu walau bergembira adalah fitrah manusia, namun kita tetap kecil dan menjadi tergetar ketika ber-Ied, karena hanya Allah Yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang mudik pada dasarnya datang kepada Tuhan, sesudah itu seakan bertemu dengan dunia dan alam yang serba baru, ramah dan penuh rasa maaf satu sama lain. Pemudik Lebaran memang menyumbat jalan-jalan. Tapi mudik Lebaran juga adalah kebahagiaan.□ **(Rendy MS)**

Digitized by Google

Empat RUU Ke DPR

Persoalan kebocoran anggaran, penyalahgunaan wewenang di kalangan aparatur negara, disiplin nasional dan pembudayaan demokrasi Pancasila, bahkan ideologi Pancasila dan P4 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kembali disinggung dalam sidang paripurna mengawali masa sidang IV DPR-RI, awal Juni lalu.

Mengetengahkan persoalan itu maksudnya, menurut Ketua DPR-RI M. Kharis Suhud, agar semua pihak lebih meningkatkan diri untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Sehingga, sikap dan peningkatan disiplin nasional, pembudayaan demokrasi Pancasila, ideologi Pancasila serta P4, akan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sekaligus memperbaiki taraf hidup rakyat banyak. Ini tentu dipelopori oleh aparat negara, karena tanpa sikap yang sedemikian rupa, maka tidak mustahil pembangunan nasional tidak akan mencapai sasaran.

Dalam masa persidangan ini dewan diharap merampungkan pembahasan empat RUU, yaitu RUU tentang Tambahan dan perubahan APBN 1987-1988, RUU Perhitungan Anggaran Negara atas APBN 1985-1986, RUU tentang Pengesahan 'Protocol Amending the Treaty of Amity and Corporation in South East Asia' dan RUU mengenai Pendidikan Nasional. □

Gagal Di Kualalumpur

Kegagalan Tim Piala Thomas Cup dan Uber Indonesia maju ke babak final untuk meraih gelar 'juara' bukan sebuah mimpi buruk. Itu kenyataan yang harus kita terima sebagai 'pendekar' bulutangkis di masa lalu.

Dulu, memang kita menikmati jaman keemasan di percaturan bulutangkis dan hampir seluruh kejuaraan bulutangkis internasional kita mampu menjuarainya. Namun, Tim Piala Thomas Indonesia sampai kalah 2-3 dari Tim Thomas Malaysia dalam pertarungan yang mencekam di Stadion Negara Kualalumpur baru-baru ini, adalah suatu pengalaman terburuk selama 30 tahun terakhir. Karena, sebelumnya, Tim Piala Thomas Indonesia paling tidak mampu maju ke babak final dan kalah atau menang bila melawan pemain-pemain RRC.

Kini, semuanya sudah berubah. Pemain Malaysia yang agak diremehkan telah berhasil menggulingkan pemain-pemain Indonesia. Bahkan, Aburizal Bakrie selaku manajer tim bulutangkis nasional sempat mengatakan, bahwa bilamana tim Thomas kita hanya mampu duduk pada urutan nomor dua saja, maka kita merasa gagal. Apalagi kenyataannya Tim Thomas Indonesia memang gagal maju ke babak final.

Sedangkan Tim Uber Indonesia harus puas kalah atas pemain-pemain 'tirai bambu' RRC dengan skor 5-0, karena dari pemain Uber ini tidak terlalu banyak diharapkan seperti pemain-pemain Thomas Cup. Kekalahan memang sudah kita terima. Tapi tentu, jangan sampai kekalahan itu menghancurkan rasa percaya diri dunia perbulutangkisan kita. □

Widya Karya Gizi

Dewasa ini terobosan teknologi komunikasi untuk penyuluhan dan pendidikan gizi sangat penting, agar masyarakat mempunyai wawasan pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis sumber pangan.

Oleh karenanya, Presiden Soeharto ketika membuka Widya Karya Pangan dan Gizi IV mengingatkan bahwa masalah ini harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, tidak dari sudut gizi saja. Tapi, juga harus dilihat dari segi pengolahan dan unsur ekonominya bagi peningkatan pendapatan keluarga. Untuk itu, upaya perbaikan gizi keluarga yang sudah dikenal di pedesaan di seluruh Indonesia perlu ditingkatkan supaya dapat menampung hasil terobosan teknologi komunikasi itu.

Widya Karya yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta ini, diikuti sekitar 327 orang peserta dari berbagai instansi, organisasi profesi dan swasta. □

Digitized by Google

Kolam Renang Dan Monumen

SEBUAH kolam renang di Bandung direncanakan dibongkar. Dan lokasi itu kemudian akan dijadikan kawasan monumen Bandung Lautan Api.

Lalu sejumlah anggota masyarakat, terutama yang merasa membutuhkan sarana olahraga itu, merasa resah. Apalagi selama dua belas tahun ini kolam renang yang termasuk paling memadai untuk Bandung tersebut telah mencetak atlit-atlit andalan.

Kolam renang itu dibangun dua belas tahun lalu dengan biaya lebih dari enam ratus juta rupiah. Tidak murah.

Barangkali, dua belas tahun yang lalu, kolam renang itu dibangun tanpa memperhitungkan bahwa suatu ketika sebuah monumen disebelahnya bisa menjadi 'gerah'.

Terhadap keresahan yang ada mengenai nasib kolam renang tersebut, pemerintah kota menjawab bahwa kolam renang itu takkan 'dikubur' sebelum ada penggantinya di lokasi lain. Yang resah tentu bisa lega.

Tapi ada sedikit 'hal kecil' yang tersisa di sini. Seolah-olah tidak dipikirkan bahwa sesuatu yang berharga lebih dari enam ratus juta rupiah itu bukanlah sesuatu yang murah. Dan bila dibangun sarana baru sebagai pengganti akan dibutuhkan lagi beberapa biaya. Kalau dua belas tahun lalu enam ratus juta, sekarang berapa ratus juta rupiah? Sungguh mubazir rasanya untuk keadaan kemampuan ekonomi negara yang tak terlalu meggembirakan seperti saat ini.

Memang, suatu monumen adalah tak ternilai secara material. Tapi rasanya para pahlawan pejuang era Bandung Lautan Api juga takkan mengharapkan bahwa suatu ketika kenangan peristiwa sejarah harus dibayar dengan memubazirkan uang pemerintah yang adalah uang rakyat juga.

Agaknya para pihak yang terkait dengan urusan ini perlu mengendalikan diri seraya mencari pemecahan lebih baik dan pantas. Setidak-tidaknya menunggu beberapa tahun lagi, sampai secara teknis kolam renang yang 'salah tempat' itu memang tak memenuhi syarat lagi menurut usianya. Penghargaan akan sebuah peristiwa sejarah tak terikat oleh waktu dan tak terlalu harus dikaitkan dengan sesuatu yang monumental. Yang lebih penting adalah penghayatan batiniah kita semua!

Soal Sisa-sisa PKI

DI BULAN-BULAN terakhir ini, masalah bahaya penyusupan sisa-sisa PKI atau unsur komunis mendadak 'diramaikan'. Satu dua pers ibukota misalnya gencar memuat tulisan dan wawancara mengenai topik tersebut. Bahkan diantara pernyataan yang ada, tersirat semacam tuduhan atau penggambaran bahwa terdapat penyusup yang berhasil menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Dan ini semua memaksa Menko Polkam untuk mengingatkan agar jangan sembarangan melontarkan hal seperti itu secara terbuka di masyarakat. Adalah lebih baik melaporkan kepada yang berwenang.

Adalah betul, bahwa kendati peristiwa G30S telah lampau 22 tahun lamanya, kewaspadaan tidak boleh kendor. Rasanya, kita semua tidak keberatan bila hal itu selalu diingatingatkan. Tetapi kita lebih sepakat terhadap teguran Menko Polkam.

Begitu saja melontarkan tuduhan terbuka tentang penyusupan di tubuh pemerintahan akan lebih merupakan bermain dengan api. Dari sudut sekuriti dan penanggulangan, kalau memang benar, pun menyulitkan. Kesan yang timbul dari pelontaran masalah penyusupan itu, lebih mengarah kepada tujuan pendiskreditan politis.

Pelontaran penggambaran itu, tentu dapat menggelisahkan masyarakat. Akan timbul pertanyaan, apakah aparat keamanan kita tidak setangguh yang kita sangka, sehingga sisa-sisa PKI bisa sampai menyusup ke posisi penting pemerintahan? Kalau pertanyaan seperti ini meluas, itu berarti rasa aman masyarakat mengalami pengurangan. Selama itu, kita juga perlu belajar dari pengalaman lampau bahwa antusiasme kita dalam perjuangan memberantas PKI dan sisasisanya untuk menegakkan Orde Baru, juga sempat terselipi ekses berupa fitnah kepada orang-orang yang justru bukan PKI.

Komentar ini - yang dijamin dibuat oleh orang yang bukan PKI sekedar mau mengingatkan tidak mudahnya dan entengnya melontarkan isu penyusupan seperti yang terjadi belakangan ini. Sekali lagi, kewaspadaan jangan sampai kendor, tetapi overacting juga bisa berdampak negatif. Yang terbaik adalah membantu aparat keamanan, dengan cara seperti yang disarankan Menko Polkam.

Gubernur Dan Bangunan

GUBERNUR DKI yang sekarang, dalam tempo singkat pada masa-masa awal jabatannya tampil mengesankan di mata masyarakat. Penampilannya khas dan sepertinya memiliki secara lengkap apa yang pernah dimiliki oleh pendahulu-pendahulunya. Lembut tapi tegas.

Banyak gebrakannya yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Salah satu diantaranya ialah dalam masalah penertiban gedung-gedung. Dua gedung pasar bertingkat, di Tanah Abang dan di Pulogadung, kena gebrak harus mengalami pemenggalan pada bagian-bagian yang dianggap melanggar ketentuan. Kemudian, sebuah hotel berbintang di Kebayoran Baru terancam dipenggal pula karena pada perluasannya ada bagian-bagian yang dianggap menyalahi ketentuan.

Kendati akan ada kerugian meterial, tapi apa boleh buat, begitulah bila peraturan mau ditegakkan. Tentu ada yang rugi, seperti misalnya yang akan dialami oleh pemilik hotel tersebut, bila sanksi memang akan dijalankan.

Baik. Tapi di masa depan, kiranya lebih baik bila segala sesuatunya ditangkal secara dini. Pihak pemerintah daerah tentu juga perlu mawas diri, terutama pihak yang harus mengeluarkan ijin dan melakukan pengawasan bangunan: Apakah mereka telah juga bekerja dengan baik dan benar. Khusus mengenai masalah hotel di Kebayoran itu misalnya, ada baiknya Gubernur juga menelusuri kenapa sang pemilik berani melangkahi dan melanggar peraturan begitu saja. Apa boleh buat barangkali, pengalaman empiris di masa-masa yang lalu perlu juga dikorek-korek untuk memperoleh jawaban tuntas kenapa 'kebiasaan' meremehkan ketentuan dalam masalah bangunan bisa sampai ada.

Digitized by Google

Dari Bawah Ke Atas Dengan Merit System

Golkar akan menguji dirinya dalam pelaksanaan langkah baru pembaharuan dalam tubuhnya. Langkah-langkah awal mekanisme baru 'dari bawah ke atas' — bottom up system —dalam rangka peningkatan demokratisasi dalam tubuh Golkar segera terjadi di bulan Juni ini. Rangkaian Musyawarah Daerah tingkat II Golkar mulai diselenggarakan yang kemudian akan berlanjut dengan Musda I dan pada akhirnya berpuncak pada Munas bulan Oktober 1988.

Adalah suatu kewajaran yang manusiawi bahwa di sela-sela kesibukan kegiatan persiapan teknis organisasi, sejak beberapa waktu terasa pula meningkatnya kegiatan perorangan — sendiri-sendiri ataupun bersama-sama — untuk mengantisipasi prospek dari rangkaian Musda tersebut dan bahkan Munas. Termasuk antisipasi dalam kaitan positioning. Akan tetapi ini semua tidak perlu dianggap aneh bagi suatu oraganisasi yang demokratis. Memang dibukakan kesempatan kompetisi secara sehat dan dinamis. Pokoknya tidak sampai menggunakan cara-cara tidak wajar. Maka kalau ada cerita tentang adanya persiapan dan pengelompokan tidak wajar dalam rangka positioning tersebut, sepatutnya dimasukkan katagori isu. Kalaupun toh memang ada yang mencoba tidak wajar, kiranya mekanisme internal yang dimiliki Golkar yang dari waktu ke waktu senantiasa disempurnakan, akan mampu menangkal.

Aturan Main

Dalam Golkar, memang telah tersusun aturan main yang jelas dan secara relatif cukup kuat. Kendati di sana sini masih bisa ditunjukkan satu dua titik lemah, tetapi tampaknya cenderung kasuistis saja. Dari pengalaman penyusunan daftar calon untuk Pemilihan Umum 1987 yang lalu misalnya, memang ada juga *complain* tentang belum dipatuhinya secara optimal kriteria-kriteria yang ada. Tetapi sepanjang *complain* itu diutarakan melalui forum organisasi yang tersedia, secara umum, permasalahannya berhasil dijernihkan. Hanya memang perlu disayangkan kalau ada complain yang semestinya diajukan ternyata tidak diajukan karena satu dan lain hal. Mengajukannya di forum organisasi tentunya adalah lebih baik daripada sekedar membicarakannya di balik dinding.

Dalam Golkar telah tersusun aturan main yang jelas

Salah satu kriteria yang pada waktu yang lalu belum dijalankan cukup ketat adalah mengenai jangka waktu pengabdian. Sehingga, secara terbatas masih ada asosiasi terhadap semacam trauma dari peroide sebelumnya — yang dilahirkan dalam pengistilahan 'loncat pagar'. Kriteria tentang jangka waktu pengabdian ini mensyaratkan "telah aktif berjuang dalam jajaran Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir secara terus menerus". Namun dalam segi tertentu, ketidakketatan ini masih bisa difahami. Terutama, bila dikaitkan dengan program sistim keanggotaan sebagaiman yang dikehendaki perundang-undangan politik yang ada, pada waktu itu relatif program yang bersangkutan dijalankan belum sampai 5 tahun. Memang Golkar sendiri telah berusia lebih dari 20 tahun, tetapi karena pada masa yang lampau belum ada pendaftaran keanggotaan, maka tidak mudah menghitung soal masa aktif berjuang dalam organisasi. Hanya mereka yang kebetulan duduk dalam kepengurusan organisasi mudah untuk diketahui masa pengabdiannya, sedang mereka yang diluar itu membutuhkan semacam alibi kehadiran mereka dalam perjuangan Golkar. Maka relatif masih agak sulit menentukan, siapa yang loncat pagar, siapa yang bukan.

Harus Melebihi Masa Yang Lampau

Lalu bagaimana dengan Musda dan Munas mendatang dalam kaitan sistem dan kriteria yang ada, khususnya menyangkut personalia atau kader? Tingkat perkembangan dan dinamika yang dicapai Golkar di era post Pemilu 1987 ini kelihatannya menghadirkan tuntutan agar sistem dan kriteria harus ditegakkan melebihi masa lampau. Karena, rentangan hubungan sebab dan akibatnya akan sangat jelas dengan penentuan di tahun 1992 — pada saat mana setiap kekuatan politik berdiri di hadapan masyarakat pemilih

Digitized by Google

yang akan lebih rasional dan lebih kritis lagi daripada tahun 1987. Bahkan sikap lebih kritis dan lebih rasional itu akan lebih wujud dan nyata dalam tubuh golkar sendiri, diantara kader, anggota dan pendukung.

Selama ini Golkar menganut merit system, yaitu sistem penjenjangan karir. Dalam sistim ini, sebagai misal, seorang anggota pengurus DPP I yang dalam periode lampau berprestasi dapat dan patut untuk terpilih dalam kepengurusan DPP melalui Munas. Seorang pimpinan departemen dalam DPP yang lalu dapat maningkat pada kepengurusan berikutnya. Lebih luas lagi, seorang kader yang berprestasi dan berkemampuan berpeluang untuk masuk ke dalam kepengurusan organisasi di berbagai tingkat. Dengan cara dan jalan yang demokratis tentunya. Di bidang legislatif, begitu pula. Pada pemilu yang baru lalu, kita melihat sejumlah calon untuk DPR-RI tadinya adalah anggota DPRD I yang dinilai berprestasi. Bahkan lebih dari itu, makin terbuka prospek dan cakrawala yang lebar bagi para kader Golkar. Organisasi melalui perangkat yang dimilikinya telah mempromosi beberapa kader yang berkemampuan sehingga dapat menduduki posisi penting di masyarakat maupun pemerintahan.

Merit system ini mempunyai sejumlah kriteria sebagai landasan. Berikut ini dapat dicatatkan kembali kriteria yang ada.

Pertama-tama adalah syarat tak diragukan kesetiaannya terhadap Pancasila dan UUD 1945. Menghayati dan meyakini tujuan Golkar. Berapa lama sudah seseorang telah berjuang dalam jajaran Golkar yang kini mudah diketahui melalui daftar riwayat hidup dan atau data keanggotaan. Data keanggotaan tercatat pada waktu seseorang mendaftarkan diri sebagai anggota. Dan daftar riwayat hidup, diberikan kepada organisasi antara lain pada waktu akan mengikuti kegiatan kaderisasi atau karena diminta oleh organisasi. Terkait dengan itu semua, adalah kriteria PDLT — prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela.

Bila seorang kader telah melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi dengan baik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menopang pendewasaan, kemandirian dan pengakaran Golkar dalam masyarakat, maka ia memperoleh nilai dalam hal prestasi. Seorang kader diukur dedikasinya berdasarkan apakah keyakinannya terhadap tujuan dan program perjuangan Golkar tak tergoyahkan. Apakah ia telah dan tetap siap membela Golkar dalam setiap keadaan dan apakah ia tidak pernah terlibat kegiatan yang bertujuan menentang Golkar. Sedangkan kriteria loyalitas menyangkut fakta kesetiaan yang tinggi seorang kader kepada Golkar, dalam artian selalu siap melaksanakan setiap keputusan Dewan Pimpinan Golkar dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh walau keputusan itu kurang sesuai dengan kepentingannya secara pribadi. Lalu, kriteria tak tercela. Ini menyangkut pengertian bahwa kader yang bersangkutan diketahui mempunyai kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, banyak digunakan sebagai alat bantu pengukur untuk kriteria ini.

Berlaku Sama

Segala sesuatu mengenai kriteria yang telah dimiliki itu, sebenarnya sudah lebih dari jelas. Meskipun demikian, cukup menarik dan perlu membicarakan satu dua hal diantaranya yang terkait dengan beberapa hal faktual di lingkungan keluarga besar Golkar.

Soal jangka waktu pengabdian, barangkali salah satu hal yang perlu lebih diketatkan penterapannya. Jangka waktu minimal lima tahun adalah batasan yang pantas untuk mengukur tingkat pengabdian dan kesungguhan kader terhadap Golkar. Masa pembukaan pendaftaran keanggotaan secara formal juga telah memasuki tahum ke-5. Mereka yang segera mendaftarkan diri di tahun pertama antusiasmenya kepada Golkar. Baik karena mereka pada hakekatnya telah merupakan pendukung Golkar sejak lama, maupun karena hal lainnya. Mereka yang masa keanggotaannya baru dua atau tiga tahun, tentu harus bersabar dalam rangka merit system. Kendati anggota baru dan anggota lama pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban sama, bagaimana pun secara umum akan terasa lebih adil lebih — apalagi bila kita berkeinginan menghabiskan sisa-sisa trauma sekecil apapun dari soal 'loncat pagar' di masa lampau. Walaupun itu semua masih harus dipadukan dengan nilai dari kriteria lain.

Terkait dengan soal jangka waktu ini, juga timbul pertanyaan di antara beberapa kader, bagaimana dengan rekan-rekan dari jalur A keluarga besar kita. Jalur A dalam Golkar tidaklah identik Abri. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggota Abri tidaklah mungkin menjadi anggota Golkar dan atau organisasi politik lainnya, kecuali ia sudah menjadi purnawirawan. Maka pengertian jalur A dalam keluarga besar Golkar adalah teknis koordinatif terhadap simpatisan dan mereka yang menjadi anggota Golkar di antara kalangan keluarga Abri dan purnawirawan.

Apakah dari lingkungan jalur ini dapat tampil tokoh-tokoh pimpinan Golkar? Terlepas dari hubungan historis kelahiran Golkar, kenyataan menunjukkan betapa jalur ini menjadi sumber kepemimpinan Golkar secara langsung atau tidak langsung. Dihubungkan dengan sistem dan kriteria yang saat ini berlaku di Golkar, jelas tak ada keistimewaan bagi jalur manapun : A, B ataupun G. Maka bilamana seorang purnawirawan ingin tampil di dalam kegiatan organisasi, ia pun harus memenuhi segala persyaratan yang ada, dari PDLT sampai kepada jangka waktu minimal pengabdian.

Dalam merit system ini, jalas bahwa disamping kesetiaan dan jangka waktu lamanya mengabdi bagi organisasi — dalam pengertian luas — maka faktor kualitas termasuk hal yang penting. Kualitas disini tentu terutama dihubungkan dengan cita-cita dan kepentingan organisasi dalam rangka perjuangan pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, anggota Golkar yang sempat dididik dan tercatat sebagai kader, memiliki peluang yang pantas. Salah satu tujuan program kaderisasi Golkar memang adalah mencetak kepemimpinan organisasi. Di masa depan pemimpin terbaik Golkar dipilih dari antara kader tangguh yang ada.

Demikianlah jelas terlihat bahwa Musda-Musda maupun Munas Golkar nantinya, cenderung berlangsung dengan baik dan lancar dalam suasana dinamis. Persoalannya adalah konsistensi terhadap sistem dan kriteria yang telah disepakati bersama — sebab konsistensi senantiasa cenderung labih menjamin rasa adil dan kebersamaan — ditambah dengan topangan suasana demokratis yang telah dibina selama ini.

Memang, semuanya ini ibarat ujian. Tapi dengan keadaannya yang sekarang, Golkar semestinya lulus dengan mekanisme baru 'dari bawah ke atas' ini.☐ (Rum Ali)

Digitized by Google

Pemilihan Pengurus DPD Golkar Gunakan Sistim Formatur

Antara bulan Juni - Agustus 1988, 298 DPD Golkar Tingkat II akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Musda tersebut masing-masing akan berlangsung selama 2 hari. Kewenangan Musda sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar antara lain: memilih pengurus DPD Golkar masa bhakti 1988-1993 dan menyusun Program Kerja.

Sebanyak ± 6200 orang Pengurus DPD Golkar Tingkat II akan dipilih dalam MUSDA Golkar Tingkat II dengan asumsi jumlah personalia masing-masing DPD Golkar Tingkat II antara 17 sampai dengan 21 orang.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan nomor : Juklak 9/Golkar/11/1987 tentang Penyelenggaraan Musda Golkar Tingkat I dan Tingkat II seluruh Indonesia, pemilihan pengurus DPD Golkar Tingkat II menggunakan sistim formatur.

Formatur dipilih oleh dan dari peserta Musda dalam Rapat Paripurna Musda. Formatur tersebut berjumlah 7 orang yang terdiri : Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur DPD Golkar Tingkat I, dua orang anggota dari unsur Dewan penasehat, dua orang anggota dari unsur DPD Golkar Tingkat II demisioner dan dua orang anggota dari unsur Komisaris Kecamatan.

Dengan susunan seperti tersebut di atas formatur diharapkan benar-benar dapat mencerminkan unsur-unsur peserta dan mewakili aspirasi yang hidup di kalangan jajaran Golkar.

Pemilihan pengurus dengan menggunakan sistim formatur tersebut diharapkan bisa menyusun kepemimpinan organisasi yang memiliki kemampuan, integritas pribadi dan mendapat dukungan masyarakat serta bersifat kolektif, menjamin kesinambungan dan peremajaan. Dengan demikian dinamika organisasi semakin bergairah dan kehidupan demokrasi dalam tubuh organisasi semakin mantap dengan terselenggaranya mekanisme musyawarah sebagai penjabaran nyata kedaulatan organisasi yang berada di tangan anggota.

Demi kelancaran pelaksanaan Musda dan tercapainya sasaran konsolidasi organisasi, maka formatur dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar obyektif, memperhatikan aspirasi segenap jajaran Golkar, mengutamakan kepentingan organisasi khususnya dan kepentingan nasional pada umumnya.

Enam Syarat

Guna menjamin obyektifitas dalam penyusunan kepengurusan DPD Golkar, formatur harus memperhatikan secara saksama persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kader Golkar untuk dapat dipilih menjadi anggota pengurus DPD Golkar Tingkat II.

Ada enam (6) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : (1). Kader Golkar yang bersangkutan telah terbukti mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Golkar serta tidak tercela (PDLT); (2). Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang tangguh, tanggap, merakyat, dan pengemban hakekat Orde Baru; (3). Mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat; (4). Menjamin adanya kesinambungan dan peremajaan dalam kepemimpinan dalam rangka usaha semakin memantapkan organisasi dengan memperhatikan karier politik bagi kader-kader Golkar; (5). Aktif berjuang dalam jajaran Golkar sekurang-kurangnya sejak 5 tahun terakhir; (6). Dapat meluangkan waktu dan sanggup aktif dalam kepengurusan DPD Golkar Tingkat II.

Disamping memilih anggota DPD Golkar Tingkat II, Musda juga memilih calon Ketua Dewan Penasehat yang juga memegang peranan penting dalam kepemimpinan Golkar. Calon Ketua Dewan Penasehat Golkar dipilih dari kader/tokoh Golkar yang terpercaya memimpin daerah dan yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan program Golkar.

Memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, ukuran obyektif yang diletakan oleh Golkar dalam rekrutmen kepemimpinan organisasinya didasarkan pada kombinasi sistim prestasi kerja dan sistim karier dengan komitmen yang tegas sebagai pengemban hakekat Orde Baru.

Dengan sistim prestasi kerja, setiap kader Golkar diseleksi melalui kecakapan dan prestasi kerjanya yang harus dibuktikan dengan kemampuan kepemimpinannya dan karya nyatanya di dalam perjuangan organisasi. Dan sistim ini dikombinasikan dengan sistim karier dimana disamping kecakapan seorang kader, faktor masa pengabdian, kesetiaan merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan.

Oleh karena kepemimpinan organisasi adalah kepemimpinan politik, maka komitmen ideologis merupakan syarat penting yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dan karena itu komitmen seorang kader kepada ideologi Pancasila, tak boleh ditawar-tawar. Seorang kader Golkar yang akan dipilih menduduki kepemimpinan organisasi haruslah terjamin kesetiaannya kepada Pancasila. Ia haruslah seorang kader yang secara sadar, tulus dan ikhlas mempunyai komitmen yang kuat sebagai pengemban hakekat Orde Baru. Artinya kader kepemimpinan Golkar haruslah memiliki tekad, jiwa dan semangat yang tinggi untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945, demokrasi dan hukum.

Seleksi kepemimpinan organisasi memang merupakan bagian yang sangat berat dalam penyelenggaraan Musda, meskipun untuk itu telah disusun pedoman-pedoman yang obyektif. Sebab dalam proses seleksi kepemimpinan tersebut terdapat faktor politis psikologis yang patut juga dipertimbangkan.

Semangat kekeluargaan dan kesadaran yang tinggi untuk menempatkan kepentingan organisasi/Bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan, pasti akan memperlancar tugas formatur memilih kader-kader Golkar yang terbaik untuk diberikan kepercayaan mengemban tugas kepemimpinan organisasi masa bhakti 1988-1993.

Selain memilih pengurus DPD Golkar Tingkat II, Musda Golkar Tingkat

Digitized by Google

II juga menetapkan Program Kerja.

Program Kerja Golkar Daerah Tingkat II disusun sebagai penjabaran lebih lanjut GBHN 1988-1993, kebijaksanaan DPP Golkar dan DPD Golkar Tingkat I serta dengan memperhatikan kondisi dan situasi daerahnya masing-masing.

Program yang ditetapkan dalam Musda bukanlah merupakan daftar keinginan belaka, tetapi merupakan Program Kerja yang mesti dilaksanakan. Oleh karena itu penyusunan Program Kerja Golkar haruslah realistis artinya memperhatikan situasi dan kondisi daerah serta kemampuan pelaksanaannya, dengan tidak meninggalkan idealisme, sebab setiap tahapan perjuangan Golkar haruslah merupakan penjabaran dan pelaksanaan ideologi nasional Pancasila.

Dalam Program Kerja Golkar Daerah Tingkat II harus jelas tercantum kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di bidang :

Konsolidasi yang meliputi: (a). Konsolidasi idiil dalam arti, memperkukuh kesetiaan Golkar secara tuntas dan tidak tergoyahkan kepada Pancasila dan UUD 1945. (b). Konsolidasi wawasan dalam arti Golkar harus dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai, sikap, perilaku, cara berfikir dan cara bekerja yang menjangkau kepentingan nasional. Dalam kaitan ini Golkar harus mampu semakin mengembangkan dan mendewasakan suasana demokrasi keluar dan kedalam. (c). Konsolidasi organisasi yang mencakup : Konsolidasi kelembagaan, keanggotaan dan kaderisasi.

Pelaksanaan pembangunan yaitu mensukseskan Repelita V dan **Usaha-Usaha pemenangan Pemilu 1992.**

Selain itu Musda Golkar Tingkat II menyusun saran-saran sebagai bahan untuk menyusun Program Kerja Tingkat I, yang kemudian akan dirangkum oleh DPD Golkar Tingkat I dan disampaikan kepada DPD Golkar sebagai bahan penyusunan Program Umum Golkar.

Melalui mekanisme penyusunan Program yang demikian itu aspirasi dari bawah benar-benar tersalurkan ke atas dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Keputusan-keputusan organisasi di tingkat nasional diharapkan mampu memadukan aspirasi dari bawah secara selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan nasional.

Demokrasi dalam tubuh Golkar dengan penyelenggaraan musyawarah-musyawarah organisasi secara berjenjang dari bawah ke atas yaitu dimulai dari Musda Golkar Tingkat II, kemudian Musda Golkar Tingkat I, baru Musyawarah Nasional (MUNAS) — mengandung makna ganda yaitu mencakup demokrasi dalam bentuk atau proses maupun demokrasi dalam isinya yaitu berupa keluaran *(output)* yang aspiratif.

Dengan penyelenggaraan musyawarah-musyawarah organisasi secara tertib, teratur dan berkala yang dilandasi oleh semangat demokrasi Pancasila, Golkar sebagai kekuatan sosial politik senantiasa mampu memperoleh kesegaran baru dengan menyerap dinamika kehidupan masyarakat sehingga menjadikan dirinya semakin dewasa, mandiri dan berakar di tengah-tengah masyarakat.□

(Oka Mahendra)

GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GOLONGAN KARYA

Mengucapkan :

Selamat Idul Fitri 1408 H

Mohon Maaf Lahir Dan Bathin

Ketua Umum,
SUDHARMONO, SH.

Sekretaris Jenderal,
SARWONO KUSUMAATMADJA

Digitized by Google

Penyegaran Komisaris Dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa

Sesuai dengan data-data yang ada di DPP Golkar, ternyata dari 368.000 Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa di seluruh Indonesia sebagian Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa telah berfungsi dengan baik, tetapi sebagian lagi belum begitu berfungsi, bahkan ada Kecamatan/Desa yang tidak lengkap lagi Komisaris dan Pembantu Komisarisnya.
Mengingat fungsinya yang sangat strategis membantu DPD Golkar Tingkat II dalam membina anggota Golkar dan memasyarakatkan tujuan dan program perjuangan Golkar di dalam masyarakat, maka Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa yang lowong perlu diisi dan yang tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik perlu diganti. Tujuannya ialah agar Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa benar-benar dapat diandalkan sebagai ujung tombak Golkar di daerah pedesaan.

Untuk melaksanakan penyegaran Komisaris dan pembantu Komisaris Kecamatan/Desa tersebut DPP Golkar telah mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP 1985/DPP/Golkar/11/1987 tanggal 23 November 1987 tentang Pedoman Penyegaran Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/-Desa.

Sesuai dengan Keputusan DPP Golkar tersebut untuk melaksanakan penyegaran Komisaris dan Pembantu Komisaris DPD Golkar Tingkat II membentuk Team Penyegaran Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa.

Komposisi dan Personalia Team Penyegaran tersebut terdiri dari: seorang Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh Ketua DPD Golkar Tingkat II, seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Wakil Ketua yang membidangi Pemenangan Pemilu dan OKK, seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh sekretaris DPD Golkar Tingkat II, seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh salah seorang Ketua Bagian Pemenangan Pemilu dan OKK serta beberapa orang anggota yang dijabat oleh anggota DPD Golkar Tingkat II dan tokoh-tokoh Golkar lainya yang dipandang perlu.
Tugas Team Penyegaran tersebut adalah: 1. mengadakan inventarisasi Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/desa; 2. mengadakan evaluasi tentang keadaan dan kegiatan Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa; 3. mengajukan usul kepada DPD Golkar Tingkat II tentang Komisaris dan Pembantu Komisaris yang perlu diisi atau diganti; 4. mengajukan usul kepada DPD Golkar Tingkat II mengenai kader Golkar yang dapat diangkat menjadi Komisaris atau Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa.

Bila dipandang perlu DPD Golkar Tingkat II dapat membentuk Sub Team Penyegaran di Kecamatan yang diberi tugas untuk mengevaluasi Komisaris dan Pembantu Komsiaris dan mengajukan usul kepada Team Penyegaran tentang Komisaris dan Pembantu Komisaris yang perlu diisi/diganti serta mengusulkan kader Golkar yang dapat diangkat menjadi Komisaris dan Pembantu Komisaris Desa.

Semua Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa dievaluasi oleh Team Penyegaran diwilayahnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan dan efektifitas Komisaris Kecamatan/Desa. Oleh karena itu evaluasi harus dilakukan dengan jujur, teliti dan obyektif.

Persyaratan

Kader Golkar yang dapat diangkat menjadi Komisaris dan Pembantu Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan: 1. Kader Golkar yang telah terbukti mempunyi prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Golkar serta tidak tercela (PDLT); 2. Mempunyai kemampuan berjuang; 3. Mempunyai rasa pengabdian dan tanggung jawab; 4. Tanggap atas aspirasi masyarakat; 5. Mempunyai kepemiminan yang baik; 6. Mempunyai kemampuan berdiri sendiri; 7. Dapat menyediakan waktu untuk kegiatan organisasi; 8. Dapat diterima di lingkungan masing-masing; 9. Bagi Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan bertempat tinggal di Kecamatan yang bersangkutan dan bagi Komisaris dan Pembantu Komisaris Desa bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang bersangkutan; 10. Telah lulus dari DIKLAT KARAKTERDES atau DIKLAT Kader Fungsional; 11. Berpendidikan serendah-rendahnya SMTP atau mempunyai pengetahuan yang dapat disamakan dengan SMTP; 12. Telah aktif berjuang dalam jajaran Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Sesuai dengan tingkatannya, maka Komisaris Kecamatan diangkat menjadi Kader Penggerak Utama dan Pembantu Komisaris Kecamatan diangkat menjadi Kader Penggerak Madya. Komisaris dan Pembantu Komisaris Desa diangkat menjadi Kader Penggerak madya.

Perlu ditambahkan bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang no 3 tahun 1975 yo Undang-Undang no 3 tahun 1985 di tiap-tiap Kecamatan dapat diangkat seorang Komisaris Kecamatan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 orang Pembantu Komisaris Kecamatan dan di tiap-tiap Desa dapat diangkat seorang Komisaris Desa dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Pembantu Komisaris Desa.

Denganselesainya penyegaran Komisaris dan Pembantu Kmisaris tersebut diharapkan mereka dapat berperan aktif sebagai peserta dalam Penyelenggaraan MUSDA Golkar Tingkat II, sesuai dengan Ketentuan pasal 27 ART Golkar.

MUSDA Golkar Tingkat II yang diselenggarakan antara bulan Juni dan Agustus 1988, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan no : JUKLAK 9/Golkar/11/1987 tanggal 23 November 1987 pesertanya diharapkan sekurang-kurangnya 50 % dari unsur Komisaris. Dengan demikian aspirasi Kader-kader Golkar ditingkat terbawah benar-benar tersalurkan sebagai perwujudan peningkatan proses demokratisasi dalam kehidupan organisasi Golkar. □

(Oka Mahendra)

Digitized by Google

Susunan Panitia Munas IV Golkar

Musyawarah Nasional Golongan Karya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi Golongan Karya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Golkar pasal 21 ayat 2, diselenggarakan sedikitnya sekali dalam lima tahun.

Golkar sebagai salah satu kekuatan sosial politik perlu menyusun dan menetapkan program dalam rangka usaha turut serta secara aktif melaksanakan GBHN. Sesuai dengan tradisi, Golkar melaksanakan dikaitkan dengan peringatan HUT Golkar.

Musyawarah Nasional IV Golkar akan diselenggarakan pada bulan Oktober 1988, di Jakarta, berthema "Dengan semangat persatuan dan kesatuan sukseskan konsolidasi, sukseskan Repelita V, dan sukseskan Pemilu 1992, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila".

Munas IV Golkar antara lain akan membahas, peraturan tata tertib dan jadwal acara Munas IV Golkar, pertanggungjawaban DPP Golkar masa bakti 1983-1988, laporan Dewan Pembina Golkar masa bakti 1983-1988, program umum Golkar masa bakti 1988-1993, penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, pemilihan Ketua Dewan Pembina Golkar masa bakti 1988-1993, pemilihan Anggota DPP Golkar masa bakti 1988-1993 dan pernyataan politik Golkar.

Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Munas IV Golkar, serta menyiapkan rancangan-rancangan keputusan Munas, DPP Golkar dengan keputusannya nomor 206 Mei 1988 telah membentuk Panitia Munas IV Golkar yang terdiri: Ketua AE Manihuruk, Wakil Ketua Oetoyo Oesman SH, Sekretaris AA Oka Mahendra SH, Wakil Sekretaris Ny. TS Darsoyo, Bendahara Zarlons Zaghlul SH, Wakil Bendahara Andi Mochtar SH.

Panitia pengarah terdiri dari: Ketua merangkap anggota AE Manihuruk, Wakil Ketua merangkap anggota Oetoyo Oesman SH, Sekretaris merangkap anggota Zarlons Zaghlul SH, Wakil Sekretaris merangkap anggota Drs Jakob Tobing MPA, Anggota-anggota R Sukardi, KH Moh. Tarmoedji, Ny. AS Moerpratomo, RH Sugandhi, Drs Gatot Suwagio, Drs Imam Sudarwo, Sarwono Kusumaatmadja, Ir Akbar Tandjung, AA Oka Mahendra SH, Drs Sudarmadji, Prof Dr Awaluddin Djamin MPA, Sapardjo, Drs. Cosmas Batubara, Harmoko, Dr. Abdul Gafur, Sukarton Marmosudjono SH, Tatto S Pradjamanggala SH, Ir Rachmat Witular, Basyuni Suriamihardja, Anang Adenansi, Aulia Rachman SH, Drs Freddy Latumahina, Ir Usman Hasan, Albert Hasibuan SH, Drs Moerdopo, Ir Siswono Yudohusodo, Hatta Mustafa SH, Prof Dr Fuad Hassan, Yusuf Wanandi SH, Soeharto, Djamaluddin Tambunan SH, Djoko Sudyatmiko, Dra Ny. Inne Soekaryo, Drs Rivai Siata.

Panitia pelaksana terdiri dari: Ketua Drs Gatot Suwagio, Wakil Ketua Ir Rachmat Witular, Sekretaris Drs Sudarmadji, Wakil Sekretaris Daryono SH.

Kepanitiaan tersebut dilengkapi bidang-bidang yang terdiri dari bidang akomodasi, konsumsi, angkutan, keuangan dan perlengkapan, dekorasi dan tata ruang, persidangan, protokol dan keamanan, humas dan dokumentasi, kesehatan, serta kesekretariatan.

Kelompok Kerja

Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna kerja Panitia Pengarah dalam rangka mempersiapkan konsep rancangan materi dan konsep rancangan keputusan Musyawarah Nasional IV Golongan Karya, telah juga dibentuk kelompok kerja panitia pengarah, untuk menyiapkan konsep rancangan materi dan konsep rancangan keputusan Munas IV Golkar yang terdiri Team Sinkronisasi dengan personalia Ketua merangkap anggota AE Manihuruk, Wakil Ketua merangkap anggota Oetoyo Oesman SH, anggota AA Oka Mahendra SH, Zarlons Zaghlul SH, Drs Jakob Tobing MPA.

Kepanitiaan tersebut dilengkapi pula dengan kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari: Pokja A, yang membidangi jadwal acara, tata tertib dan rancangan keputusan Munas IV Golkar, dengan personalia Ketua merangkap anggota Ny. TS Darsoyo, Sekretaris merangkap anggota Robert Puang Sunur, Anggota Drs Sudarmadji, Andi Mochtar SH, Aulia Rachman SH, Kadarusman Kadi,Ny. Inne Soekaryo, Bambang Sulistomo, Ir Daryatmo Mardianto, Seto Harianto, Banjar Marpaung.

Pokja B, membidangi, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar dengan personalia, Ketua merangkap anggota Drs Moerdopo, Sekretaris merangkap anggota Anton Prijatno SH, Anggota Hatta Mustafa SH, Drs Freddy Latumahina, Ir Tati S Sumiarno, Djamaluddin Tambunan SH, Krissantono, Martin Hutabarat SH, Drs Palar Batubara, Syamsul Mu'arif, Ir Harris Ali Moerfi MSc, Drs Postdam Hutasoit.

Pokja C, yang membidangi Program Umum Golongan Karya masa bakti 1988-1993 dengan personalia, Ketua merangkap anggota Ir Usman Hasan, Sekretaris merangkap anggota Drs Sutradara Gintings, Anggota Ny. Enni Busyiri, KH Sakti Qodratullah, Basyuni Suriamihardja, Drs Rivai Siata, Drs Theo L Sambuaga, Drs Bomer Pasaribu SH, Dra Mubha Kahar Muang, Rajagukguk, Shirato Syafei, Dr Alwi Dahlan, Bambang Warih Koesoema, Drs Mangisara Lubis.

Pokja D, yang membidangi pernyataan politik dengan personalia, Ketua merangkap anggota Ir Rachmat Witular, Sekretaris merangkap anggota Drs Thomas Suyatno, anggota Anang Adenansi, Albert Hasibuan SH, Jusuf Wanandi SH, Tatto Pradjamanggala SH, Soeharto, Djoko Sudyatmiko, Dr Ingriani Gandha, Drs MHL Patrewijaya, Drs Didiet Haryadi, Irsyad Sudiro, Rambe Kamarul Zaman, Slamet Effendi Yusuf.

Demi membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengarah juga dilengkapi personalia kelengkapan panitia pengarah Munas IV Golkar, yang terdiri dari: Krissantono, Drs Bomer Pasaribu, Drs Theo L Sambuaga, Kadarusman Kadi, Anton Prijatno, Martin Hutabarat SH, Dra Mubha Kahar Muang, Rajagukguk, Dr Ingriani Gandha, Syamsul Mua'rif, Patrewijaya, Robert Puang Sunur, Seto Harianto, Shirato Syafei, Drs Thomas Suyatno, Ir Harris Ali Moerfi, Dr Alwi Dahlan, Drs Sutradara Gintings, Irsyad Sudiro, Bambang Sulistomo, Ir Daryatmo Mardianto, Rambe Kamarul Zaman, Drs Postdam Hutasoit, Bambang Warih Koesoema, Drs Didiet Haryadi, Slamet Effendi Yusuf, Banjar Marpaung, Mangisara Lubis.☐ WT

Digitized by Google

Oleh : Drs. Ardi Partadinata

Golkar, Dari Atas Ke Bawah Dari Bawah Ke Atas

Golkar sebagai kekuatan sosial politik pengemban cita-cita Orde Baru yang dijiwai oleh semangat pembaharuan dan pembangunan, memikul tanggung jawab sejarah untuk mengamankan, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus '45. Golkar dalam menegaskan keberadaannya sebagai pelopor dan pembaharu, mewujudkannya dalam berbagai rangkaian perjuangan sejak kelahirannya sampai saat ini secara terus-menerus dan bersinambung, melalui pengabdian kader-kadernya di segala bidang, yang terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, yang senantiasa dibina secara teratur dan berencana.

Betapa besar tanggung jawab yang diletakkan di atas pundak Golongan Karya, oleh karena itu maka dengan segala kesungguhan dan kemampuan yang dimilikinya, terus melangkah dengan pasti untuk meneruskan dan meningkatkan peranannya dalam pembangunan nasional, walaupun tidak sedikit tantangan dan hambatan serta kendala namun dengan semangat yang tinggi dan kerja keras dengan mengerahkan segala daya upaya menyatukan sikap, gerak dan langkah dengan penuh ketegaran serta ketabahan maka setahap demi setahap Golkar mampu memerankan dirinya sebagai kekuatan sosial politik yang dapat diharapkan oleh Bangsa dan Negara.

Tampak jelas dari langkah, sikap dan gerak perjuangannya dalam menyukseskan pembangunan nasional di segala bidang dari Repelita ke Repelita, termasuk kesiapan dan persiapannya untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan hasil Sidang Umum MPR tahun 1988 yang baru lalu dan kesiapannya untuk mensukseskan pembangunan nasional pada masa Repelita V dan memantapkan kerangka landasan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Begitu pula langkah-langkah pembaharuan dalam bidang politik menjadi salah satu perhatian utamanya, yang dilaksanakan secara demokratis, konstitusional, dan berdasarkan hukum.

Sisi lain dalam menegaskan keberadaannya, Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang makin tumbuh berkembang serta berakar di tengah masyarakat bangsa, dapat dilihat dari berbagai indikator keberhasilannya antara lain keberhasilan dari Pemilu ke Pemilu meraih suara terbanyak dibandingkan dengan organisasi politik peserta pemilu lainnya.

Bila memperhatikan keberhasilan hampir di segala bidang perjuangannya, karena Golkar mempunyai modal dasar dan kemampuan yang nyata antara lain dalam menumbuh kembangkan, menjaga dan menyeimbangkan faktor-faktor kekuatan politik yang teramat penting dan mendasarkan yaitu, *pertama,* kekuatan yang bersifat nonfisik yakni kekuatan idiologi yang kokoh dan tangguh yang sudah senafas dan sejiwa, kekuatan idea dan cita-cita, keyakinan yang kuat tentang makna dan hakekat perjuangannya, mempunyai kekuatan moral yang tangguh, mampu menggalang dan menyerap serta menyalurkan aspirasi rakyat, mampu membina kesatuan dan persatuan yang semakinkokoh dan kuat. Kekuatan dan kemampuan ini dijadikan oleh Golkar sebagai kekuatan untuk menggerakan dan mendorong tercapainya cita-cita perjuangan Golkar.

Kedua, kekuatan yang bersifat fisik yakni, kemampuan membina dan mendayagunakan kader-kadernya, baik itu kader teritorial (Karakterdes)

Golkar semakin berkembang dan berakar di tengah-tengah masyarakat

Digitized by Google

maupun kader fungsional (Kasional), mampu menggalang masyarakat dan anggotanya untuk memilih Golkar dalam setiap pemilu dan mampu menggalang dan menggerakan rakyat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan nasional, mempunyai kemampuan mengembangan dan mendayagunakan struktur organisasinya yang setiap saat digerakkan untuk melaksanakan perjuangannya dengan landasan operasional yang jelas dan terarah.

Kedua faktor kekuatan politik baik yang bersifat fisik dan nonfisik yang teramat penting dan mendasar tersebut diatas, oleh Golkar senantiasa ditumbuh-kembangkan dan didayagunakan secara seimbang dan serasi serta diakarkan di tengah-tengah masyarakat bangsa secara luas dan merata, sehingga dari entitas potensi yang kokoh dan kuat, menjelma menjadi kekuatan yang riil dan efektif disamping faktor pendukung lainnya seperti ABRI.

Dari Bawah Ke Atas

Sesuai dengan Anggaran Dasar Golkar, setiap periode tertentu sedikitnya lima tahun sekali, diadakan Musyawarah Daerah tingkat II, Musyawarah Daerah tingkat I dan Musyawarah Nasional. Sejak Munas yang pertama tahun 1973, Golkar melaksanakan musyawarahnya mulai dari tingkat pusat (Munas) kemudian disusul dengan Musda tingkat I dan selanjutnya baru Musda tingkat II. Penyelenggaraan musyawarah dari atas ke bawah telah berjalan selama 3 periode dan yang terakhir Munas III tahun 1983. Dengan kata lain mekanisme demokrasi dalam musyawarah Golkar dimulai dari atas baru kemudian ke bawah. Dengan demikian program umum dan pengurus Golkar tingkat pusat yang ditetapkan oleh Munas dapat memberi bimbingan dan pengarahan dalam Musda tingkat I begitu pula program umum hasil Munas dapat dijabarkan di dalam Musda tingkat I, yang selanjutnya program dan personil hasil Musda tingkat I dapat memberi bimbingan dan arah dalam pembahasan dan keputusan Musda tingkat II. Dengan kata lain Musda tingkat I dan II lebih banyak menitik beratkan penjabaran program dari atas (hasil Munas) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Namun lain halnya dalam Musda dan Munas tahun 1988. Golkar menampilkan kepeloporan dan keberadaannya dalam meningkatkan operasionalisasi demokrasi Pancasila dengan memulai penyelenggaraan musyawarah dari bawah baru kemudian ke tingkat atas, sesuai ketetapan Rapim Golkar pada tanggal 17 sampai 20 Oktober 1987, yaitu bahwa penyelenggaraan musyawarah Golkar yang di mulai dari Musda tingkat II, kemudian Musda tingkat I yang selanjutnya bermuara ke musyawarah nasional (Munas). Antara bulan Juni dan Juli tahun 1988 diadakan Musda tingkat II, dan antara bulan Juli dan September 1988 untuk Musda tingkat I, serta bulan Oktober tahun 1988 untuk penyelenggaraan Munas.

Makna yang paling mendasar dalam penyelenggaraan prinsip musyawarah dari bawah ke atas, antara lain adalah untuk dapat lebih meningkatkan penyerapan dan penyaluran aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari bawah serta merupakan upaya meningkatkan operasionalisasi sistim demokrasi Pancasila, yang berangkat dari bawah ke atas. Dengan cara ini dimungkinkan akan dapat lebih mengakarkan Golkar di tengah-tengah masyarakat bangsa dan meningkatnya kualitas pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Keputusan-keputusan Musda Tingkat II, yang merupakan rumusan aspirasi yang berkembang dari bawah yang sesuai dengan kondisi dan tantangan daerah tersebut, akan menjadi materi dalam pembahasan rumusan Musda tingkat I, yang kemudian keputusan-keputusan Musda tingkat I akan menjadi bahan materi dalam pembahasan rumusan dalam Munas, yang akan merupakan rangkuman dan pengejawantahan kehendak dan aspirasi dari bawah, yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan Nasional dan masa depan Bangsa dan Negara.

Dilihat dari segi program secara sepintas memberi kesan Munas Golkar akan mengalami sedikit kesulitan dalam menghimpun dan merangkum serta mengakomodir aspirasi dari bawah yang telah merupakan keputusan Musda tingkat II dan tingkat I yang beraneka ragam, sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dan sesuai dengan kondisi dan tantangan daerah setempat. Namun demikian Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya telah mengambil langkah yang cepat dan tepat, dengan cara mengeluarkan petunjuk pelaksana sebagai pedoman penyelenggaraan Musda tingkat I maupun Musda tingkat II dengan rinci dan jelas yang dituangkan dalam juklak No. 9 tahun 1987, tentang penyelenggaraan Musda tingkat I dan tingkat II di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan tegas ditetapkan satu thema sentral untuk Musda tingkat I dan tingkat II yaitu **"Sukseskan Konsolidasi Sukseskan Repelita V, Sukseskan Pemilu Tahun 1992"** dengan demikian kesulitan untuk merangkum dan mengejawantahkan aspirasi dari bawah mengenai program tidak akan terjadi karena telah diberi arah yang jelas dan akan bermuara dalam program umum Golkar. Satunya sikap, gerak dan langkah dalam jajaran keluarga besar Golkar akan makin terwujud dengan mantap, baik yang tercermin dari keputusan Musda tingkat II, Keputusan Musda tingkat I dan Keputusan Munas Golkar.

Begitu pula mengenai mekanisme dan tata cara serta syarat-syarat calon pengurus atau dewan pimpinan Golkar telah digariskan secara jelas yang lebih menitikberatkan faktor prestasi, dedikasi dan loyalitas serta tidak tercela, ditambah kemampuan yang riil dan kualitas diri yang mandiri sesuai dengan prinsip dasar keanggotaan Golkar yang stelsel aktif perorangan.

Musyawarah dan kemandirian

Golkar senantiasa mengembangkan sikap kemandiriannya dalam setiap langkah dan gerak perjuangannya tidak terkecuali dalam mengambil keputusan-keputusan pada Musda maupun Munasnya, karena kemandirian bagi Golkar merupakan keterpanggilan yang utuh dan tuntutan yang sangat mendasar dalam rangka memerankan fungsinya sebagai kekuatan sosial politik.

Kemandirian dalam tubuh Golkar dapat dilihat dari berbagai keputusan yang diambil dan langkah serta gerak perjuangannya sesuai dengan tuntutan fungsinya secara utuh, konsekuen dan bertanggungjawab sebagaimana yang telah digariskan oleh ketentuan organisasinya. Kemandirian bagi Golkar bukan berarti kesendirian akan tetapi adalah keutuhan dan kebersamaan yang mandiri.

Adalah suatu harapan dengan mengembangkan prinsip musyawarah dari bawah ke atas untuk mencari mufakat dalam suasana persatuan dan kesatuan dengan semangat pembaharuan dan pembangunan akan dapat lebih menyukseskan pelaksanaan Musda-musda maupun Munas demi meningkatkan pengabdian Golkar kepada Bangsa dan Negara. □

Digitized by Google

Oleh : Widjanarko Poespoyo

Koperasi Sebagai Pemegang Saham

Akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan orang masalah pemilikan saham perusahaan swasta atau perusahaan negara oleh koperasi. Perbincangan ini menembus berbagai lapisan masyarakat, karena peranan koperasi sendiri yang belum optimal. Tingkat peranan ini, misalnya, bisa terlihat pada kontribusi koperasi pada Produk Domestik Bruto yang hanya sekitar dua persen.

Dari pelbagai sudut pandang pembicaraan, kita tiba pada suatu kesimpulan, perlunya ditingkatkan peranan koperasi sebagai salah satu jalur pemerataan pendapatan. Dan itu berarti, koperasi harus berani mengurangi sikap mengharapkan kemurahan hati pemerintah. Padahal iklim usahanya dewasa ini masih cukup berat.

Dalam kondisi seperti itulah Presiden Soeharto mengemukakan pemikiran tersendiri, yakni agar koperasi dapat tinggal landas bersama badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha swasta (BUS), perlu adanya terobosan. Maksudnya, pada BUS yang bermaksud mengembangkan usahanya, katakanlah begitu, hendaknya koperasi terlibat di dalamnya lewat pemilikan saham.

Dari segi jual beli saham, peraturan yang ada memang memungkinkan terjadinya pemilikan saham oleh suatu lembaga. Jika koperasi ingin memiliki saham pada suatu BUS atau BUMN yang mengembangkan usahanya, maka prosesnya sendiri bisa dilalui lewat dua cara. Pertama, dengan membeli saham secara tunai. Yang kedua, dengan cara koperasi bertindak sebagai pemasok barang bagi kebutuhan perusahaan yang menjual sahamnya kepada koperasi.

Mengenai cara yang pertama, dengan pembelian saham secara tunai tentu saja terjadi peralihan modal. Peralihan ini bukan memperkuat koperasi, tetapi justru mengurangi kemampuan finansialnya. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar koperasi malah mempunyai tambahan persoalan dari daftar masalah yang ada.

Sedang cara yang kedua lebih ringan bagi koperasi, karena pemilikan saham disini dilakukan tidak dengan membayar secara tunai, tapi dengan jalan tidak menerima keuntungan yang seharusnya diterima oleh koperasi. Dalam hal ini koperasi, di samping memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk mencicil pembelian saham, juga mendapat jaminan kelangsungan pemasaran barangnya *(goods of fixed market)*. Lain daripada itu koperasi dapat pula melakukan pencicilan pembayaran saham lewat dividen yang seharusnya diterima koperasi pada akhir tahun buku.

Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Koperasi yang bertindak sebagai distributor barang-barang produksi BUMN dan BUS pun dapat mengambil peluang pemilikan saham BUMN atau BUS yang bersangkutan. Katakanlah masalah pupuk. Lewat peranan KUD sebagai distributor, maka keuntungan yang semestinya diraih KUD, tak perlu dikonsumsikan langsung menjadi bentuk sisa hasil usaha. Namun diserahkan kepada PT PUSRI sebagai bentuk pencicilan pembelian saham.

Begitu juga dengan BUS yang memproduksi makanan ternak, misalnya. Dalam hal ini koperasi memasok gabah atau jagung. Dengan mekanisme ini didapat beberapa kelebihan. Misalnya para anggota koperasi dapat dididik untuk tidak mengkonsumsikan sisa hasil usaha, baik sebagian maupun sepenuhnya.

Namun demikian problem yang kita hadapi justru terletak di luar masalah ekonomi. Banyak pihak mengemukakan bahwa dalam situasi sekarang ini diperlukan angin segar, sehingga prakarsa masyarakat dapat bangkit. Ketika Radius Prawiro masih menjabat Menteri Keuangan, ia pun menyatakan, diperlukannya suatu terobosan guna menembus budaya rutinisme. Dan yang nampak cukup penting adalah lontaran Fuad Hassan. Yakni dalam suasana masyarakat yang kurang kooperatif, sukar membangun koperasi dengan sebaik-baiknya.

Masalah-masalah yang terungkap itulah akhirnya membuat koperasi berhadapan dengan fakta belum bertemunya kepentingan masyarakat dengan kepentingan yang diusahakan koperasi. Hidup dan berkembangnya koperasi di perkotaan, misalnya dilihat oleh masyarakat kota sebagai akibat dari banyaknya "kemurahan hati" yang diterima dari pemerintah. Nampak betapa banyaknya koperasi karyawan yang ada pada instansi pemerintah tidak berkembang dengan sehat, karena tidak atau kurang mendapat fasilitas. Kesadaran pengurus dan anggotanya baru berada pada tingkat pemenuhan konsumsi. Inipun titik beratnya pada konsumsi barang-barang sekunder.

Juga beberapa kasus mengenai koperasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat menunjukkan bahwa iklim organisasi koperasi masih belum sehat. Banyak pengurus yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang memenuhi kebutuhan anggota. Kasus ini bertambah lagi dengan amat terbatasnya pendapatan pengurus koperasi di pedesaan. Kesadaran bahwa akumulasi kapital dengan kecepatan perputaran yang memadai, harus dilakukan lewat kemampuan menyinambungkan usaha, relatif masih rendah. Maka terjadilah tujuh ribu KUD yang ada sekarang ini masih terseok-seok dalam pertumbuhannya.

Kriteria

Pada kondisi seperti inilah pembelian saham secara tunai oleh koperasi pada BUMN atau BUS akan merupakan modal koperasi yang lari. *Capital out flow* kepada BUS atau BUMN ini

Digitized by Google

dalam kelanjutannya akan membuat koperasi kembali memohon "belas kasihan" kepada pihak-pihak non koperasi. Apalagi jika pengurusnya bukan orang yang memiliki *fighting spirit* yang tinggi. Namun justru menunjukkan perilaku birokrat, atau sikap-sikap yang berlindung di balik kekuatan suatu posisi.

Kendati begitu, pemikiran Presiden Soeharto tetap berpeluang untuk diaktualisasikan. Dalam hal ini pun harus lebih dulu dipahami bahwa pemilikan saham oleh koperasi pada dua pelaku ekonomi lainnya, benar-benar hanya dilakukan oleh koperasi yang mempunyai prospek untuk tumbuh sehat. Dan prospek ini sendiri dapat diukur lewat berbagai kriteria.

Kriteria penting dalam menilai pertumbuhan koperasi adalah antara lain besarnya sisa hasil usaha dan kemampuan memenuhi kebutuhan anggota. Di sini aspek pelayanan koperasi kepada anggotanya menjadi ukuran penting, sehingga bobot prospek itu sendiri tergantung pada kemampuan mengambil peluang bisnis dan ketepatan mengatasi persoalan intern maupun ekstern. Alhasil, kita bisa mengetahui berapa besar pertumbuhan koperasi yang bersangkutan. Besar pertumbuhan ini tentu saja dilihat dari pertambahan anggota, sisa hasil usaha, dan makin besarnya cadangan modal.

Misalnya pertumbuhan suatu koperasi mencapai lima persen pertahun. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar itu, adalah wajar jika koperasi memiliki saham 20 persen pada suatu pelaku ekonomi nasional tertentu. Tetapi seperti kita sebutkan di muka, koperasi tidaklah membayar tunai saham yang dibelinya.

Tetapi melalui dividen, atau lewat keuntungan koperasi karena memasok atau mendistribusikan suatu barang tertentu. Keuntungan ini tidak dibayarkan semuanya, tetapi sisanya didayagunakan untuk membeli saham yang memang disiapkan buat koperasi.

Repotnya, iklim usaha dalam jual beli menjadi terbuka. Koperasi menjadi "buka kartu", berapa keuntungan yang akan diperoleh. Dan sang pengusaha akan menghitung dua tiga kali, bagaimana jika barang yang dipasok didapat dari pihak lain. Sebab bagaimanapun ceritanya, sang pengusaha akan memilih pembelian suatu barang dengan harga terendah. Tujuannya, menekan biaya produksi, yang berakibat membesarnya kemungkinan mendapat laba lebih tinggi. Dan pada saat

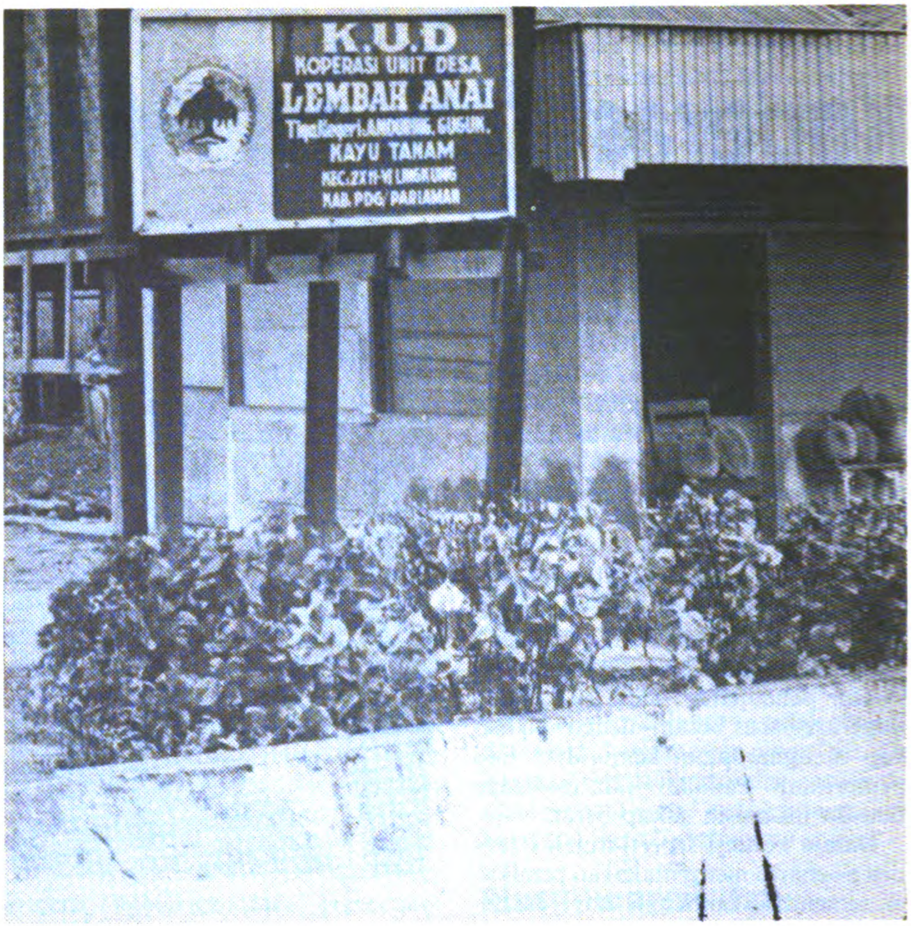

Koperasi sebagai jalur pemerataan pendapatan perlu ditingkatkan

yang sama, penjualan saham tentu dengan dasar pemikiran, siapa yang berani dengan nilai paling tinggi. Walaupun koperasi diberikan peluang memiliki saham, tetapi kalau kemampuan membeli relatif lebih rendah dibanding dengan pihak lain yang juga berminat membeli, maka pihak penjual saham cenderung menjualnya kepada pihak yang berani membayar lebih tinggi.

Untuk mengatasi hal itu semua, tak ada jalan lain kecuali ketentuan hukum yang dikeluarkan pemerintah. Kita bisa mempertimbangkan, misalnya, bahwa dalam peraturan itu dimuat tata cara pemilikan saham oleh koperasi. Lalu yang terpenting adalah, dibentuknya suatu tim yang menilai koperasi mana yang layak. Tim ini menilai pula masalah kredibilitas penjual saham dalam lingkup SWOT *(strenght, weakness, opportunity, threat).* Lingkup ini pun berlaku pula bagi koperasi. Dengan begitu BUS atau BUMN tidak merasa terpaksa bergandeng tangan dengan koperasi tertentu. Dan koperasi sendiri tidak merasa mendapat "anugerah" dari atas.

Peraturan tersebut juga selayaknya mengatur berapa besar target saham yang harus dimiliki koperasi, dan berapa lama target tersebut harus dicapai. Dalam usaha mencapai target itulah prinsip dasar koperasi harus tercermin dengan kuat. Misalnya kemampuan pengurus dalam mengelola, dan sistim serta mekanisme pembinaan para anggota.

Perlu pula diperhatikan bahwa koperasi dan BUS mempunyai dasar hukum yang berbeda. Apabila berdasarkan UU Koperasi (UU 12/1967) hak suara anggota koperasi menganut sistim *one man one vote,* maka berdasarkan KUH Dagang hak suara pemegang saham pada BUS tergantung pada jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Hal tersebut perlu diperhatikan oleh mereka yang mewakili koperasi sebagai pemegang saham dalam BUS atau BUMN. Maksudnya ialah agar koperasi, sebagai pihak yang lemah, tidak justru dirugikan dengan keikutsertaannya dalam BUS atau BUMN.

Perlu terus dijaga dan diusahakan agar pengikutsertaan koperasi lewat pemilikan saham, pada BUS atau BUMN itu, tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai. Ialah menjadikan koperasi maju dan berkembang, hingga betul-betul menjadi soko-guru perekonomian bangsa kita. □

Digitized by Google

Oleh : H. Syamsul Mu'arif

Catatan Kecil Di Sekitar Ramadhan Dan Idul Fitri

Tuhan sungguh Maha Bijaksana. Buktinya orang berda'wah tidak diatur secara rinci seperti orang shalat. Dalam shalat, bentuk, cara dan urutannya telah diatur. Tetapi dalam berda'wah tidak. Tatacaranya dibebaskan kepara kreatifitas penda'i, dengan syarat: bijaksana dan membawa kebaikan (bil hikmati wal mauidzatil hasanati). Dengan landasan ini, cara orang berdawah dapat bervariasi sehingga tidak membosankan, jenuh atau monoton. Lalu timbullah istilah: da'wah bil-lisan, dawah bil-a'mal atau da'wah bil-hal. Yang satu dengan kata-kata, yang satu dengan perbuatan atau yang menciptakan suatu keadaan, untuk diikuti dan diteladani. Yang terakhir ini konon yang paling canggih, tapi sayangnya ia memerlukan persyaratan yang canggih pula. Bahasa sekulernya da'wah bil-hal itu adalah "pembangunan", tetapi karena ia berada dalam terminologi agama maka untuk lengkapnya adalah "pembangunan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya bernafaskan agama, iman dan taqwa.

Kira-kira bagaimana da'i-nya? Nah ini yang sulit! Idealnya kira-kira: orang yang wawasan beragamanya seperti Nurcholish Madjid, pembawaan dan ibadahnya seperti K.H. Hasan Basri (Ketu MUI), kepemimpinanan dan penampilannya seperti Try Sutrisno (Pangab) dan ini yang membuat lebih berat, otak, kemampuan dan keterampilan teknologinya seperti B.J. Habibie (Menristek). Dari orang seperti itu karyanya akan mampu menerobos dimensi waktu ke masa depan untuk kesejahteraan dan kemasalahatan rakyat dan bangsa. Itu kan idealnya! Karena *das sein* tidak pernah sama dengan *das sollen*, atau cita-cita tidak sama dengan realita, maka dari pada berkhayal yang begitu-begitu, lebih baik kita kembali menatap realita.

Suatu subuh, dalam bulan Ramadhan seorang da'i tampil di mimbar Masjid Istiqlal. Ini da'wah bil-lisan! Dalam ceramahnya ia menegaskan penyakit orang mendengarkan da'wah. Antara lain dikatakan: ngomong, ngantuk dan termasuk juga nyander.

Dalam dialek Betawi, satu persatu penyakit itu dikupas. Sampai pada isi ceramah, tiba-tiba sang da'i memanggil ibu-ibu yang kedengarannya tenang. Tidak ada sahutan. "Ibu-ibu masih dengar, atau nggak!", katanya. Lalu terdengar sahutan: "Masih!" Agak sayup-sayup. Dan selesai ceramah ada puluhan pengunjung yang berbaring dan tertidur. Mungkin karena yang terakhir ini tidak termasuk penyakit orang mendengarkan da'wah, ia tak pernah diotak-atik oleh sang da'i. Begini realitas da'wah kita.

JAMA'AH ALA KALIBATA

Komplek Wisma DPR.RI Kalibata, tempat mondoknya 495 anggota DPR RI, karena 5 Pimpinannya dapat rumah jabatan tersendiri di bilangan Gatot Subroto; mempunyai banyak hal yang unik dan khusus untuk ditelaah.

Salah satu di antaranya adalah terpisahnya tempat mondok antara anggota dan pimpinannya itu. Ada yang bilang seandainya antara anak buah dan pimpinan berada dalam satu komplek atau istilah kerennya berada dalam satu kesatuan (meski rumahnya bisa dibikin lebih baik), maka pada hari Lebaran suasana akan terasa lebih hangat. Bukan hanya hangat dalam Lembaran, katanya, tetapi proses kepemimpinan Pancasila yang *Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso dan Tut wuri handayani,* akan elbih terwujud bukan hanya dalam saat-saat formal di kantor. Dan kita akan tahu, katanya pula bersemangat, siapa di antara Pimpinan itu yang lebih sering pergi ke masjid atau lebih banyak bersadaqah, juga yang lebih merakyat. Memang penghuni komplek ini ingin selalu yang serba ideal dan kadang-kadang tidak memperhitungkan masalah-masalah teknis yang sering menyebabkan tersangkutnya hal-hal yang ideal tadi.

Hal-hal yang ideal tersebut juga ingin diwujudkan dalam pengelolaan masjid dan pengaturan tatacara peribadatannya. Tata cara peribatan di masjid dalam Kompleks Wisma DPR RI tentunya disamping mempertimbangkan pendapat keempat Fraksi juga memperhitungkan sekian variasi pelaksanaan ibadah seperti Tarawih dan Witir. Tentunya tidak seorang pun ingin salah satu Fraksi harus angkat bicara diforum DPR gara-gara aspirasinya tidak dipertimbangkan dalam mengatur tata-cara peribadatan. Bayangkan saja dari segi jumlah Shalat Tarawih ada yang melaksanakan 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. Diantaranya ada yang dilaksanakan sekali shalat 2 rakaat dan ada yang 4 rakaat. Ayatnya ada yang tetap ada pula yang bebas bervariasi. Witirnya ada yang sekali salam ada yang dua kali salam. Untung saja dalam hal witir ini jumlah rakaatnya sama-sama tiga. Padahal shalat witir itu sebetulnya tidak terbatas jumlah rakaatnya asal dilaksanakan dalam jumlah rakaat yang ganjil sesuai dengan namanya: shalat witir.

Konon diantara semua perunding tidak ada yang ingin berbanyak-banyak dalam mengerjakan rakaat sembahyang witir. Entah kenapa!? Akhirnya mungkin karena berkat penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka dirumuskanlah tata-cara ibadah Tarawih dan Witir dibulan Ramadhan ini sama seperti di Masjid Istiqlal, dan ceramah Ramadhan diberikan setelah Shalat Isya sebelum Shalat Tarawih. Setelah pelaksanaan shalat tarawih se-

Digitized by Google

banyak 8 rakaat, maka diberikanlah kesempatan kepada Jamaah 8 rakaat (sebaiknya begitu saja disebut) untuk meneruskan dengan shalat witir, dan tentunya terpaksa berganti imam atau dengan imam sendiri. Selesai itu, Jamaah 20 rakaat, meneruskan shalat tarawih sampai cukup bilangannya untuk diteruskan pula dengan shalat witir. Sedang Jamaah 8 rakaat, sudah langsung boleh bubar dan pulang, kalau mau. Sampai kesepakatan ini, alhamdulillah, berjalan lancar. Dan K.H.A Syarifuddin Safari yang menjadi Ketua Ta'mir Masjid, mengantar konsensus tersebut dengan menekankan kita tidak perlu menajam-najamkan perbedaan. Karena Nabi memang bersabda: Ikhtilaafu ummatii rahmah! Perbedaan pendapat di antara ummatku itu, sebetulnya adalah suatu rahmat? Nah, Alhamdulillah!

Hikmah Pancasila sebagai satu-satunya asas memang terasa bukan hanya dalam kancah politik tetapi juga dalam perbedaan kecil (khilafiyah) dalam persoalan agama. Dan shalat tarawih serta shalat witirpun berjalan tenteram.

Tanpa mengganggu ketenteraman itu ternyata secara terselubung sumber konflik masih ada. Suatu waktu, untuk memanfaatkan waktu pengumuman sebelum shalat Isya, Panitia meminta agar setelah selesai shalat Tarawih 8 rakaat, hendaknya jamaah yang akan meneruskan sampai 20 rakaat diminta agar segera mundur guna memberi kesempatan bagi jamaah yang akan melaksanakan shalat Witir. Pengumuman ini sendiri tidak ada apa-apanya. Tetapi dipinggiran masih ada yang ngomel, kenapa katanya, yang shalat Witir duluan itu tidak diminta untuk juga segera mundur memberi kesempatan bagi yang akan terus shalat Tarawih, begitu sahalat selesai. Artinya jangan berlambat-lambat.

Lain lagi ketika seorang Imam Shalat Witir yang Tarawihnya 8 rakaat membaca ayat setelah surah Al-Fatihah, tanpa didahului dengan Basmallah. Padahal ayat yang dibaca adalah merupakan surah-surah pendek. Walaupun tanpa menyebut kasus tersebut tetapi suatu waktu seorang Penceramah lalu mengupas tentang ayat Basmallah pada permulaan surah. Katanya ayat Basmallah tersebut adalah juga bagian dari Qor'an. Maksudnya tentunya harus dibaca. Ini jelas-jelas memasuki wilayah khilafiyah yang semula oleh K.H.A. Syarifuddin Safari diminta untuk dihindarkan. Dalam hal ini memang tidak ada reaksi balik. Tetapi dari hal-hal yang kecil seperti itu terasa bahwa secara terselubung masih ada sumber konflik yang mestinya tidak perlu keluar. Apakah ini yang dalam Al-Qur'an disebutkan: Mereka berkata kita bersatu, tetapi hati mereka masih berpecah belah! Karena berada dalam suasana Idul Fitri marilah kita hilangkan segala prasangka seperti itu. Minal aidin wal faidziin!

Jama'ah Ala Kalibata

Walaa tamsyi fil-ardlii marahaa! Jangan engkau berjalan di muka bumiku sedang engkau berlaku sombong, merasa diri besar atau sikap pamer. Firman Tuhan ini jelas menegaskan sikap yang tidak membenarkan *demonstration effect*. Sikap tersebut seharusnya dikembangkan bukan hanya dalam bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tetapi pada setiap kesempatan kapan dan dimanapun. Yah, kira-kira itulah yang sekarang sedang kita gembar-gemborkan dengan: pola hidup sederhana! Bulan puasa adalah bulan solidaritas sosial kepada kaum *the have not*, mereka yang tidak berpunya. Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang merupakan manifestasi tiadanya penderitaan kelaparan, karena sebelumnya bagi ummat Islam diwajibkan melaksanakan Zakat Fitrah yang lebih ditekankan untuk dibagikan kepada fakir miskin, kaum tak berpunya tadi. Begitu seharusnya.

Tetapi sekali lagi sesuatu yang seharusnya tidak berwujud dalam kenyataannya. Hampir menjadi tradisi di setiap rumah tangga ummat Islam yang menunaikan ibadah puasa, untuk menyajikan makanan dan minuman yang lebih enak, lebih bervariasi dan lebih aduhai. Anjuran seperti itu sebetulnya tidak ada. Mungkin asal muasalnya hanya berlatar belakang selera dan rasa pada siang hari saat puasa tersebut, dimana semua makanan dilihat serba enak. Nah berdasar kebiasaan ber-enak-enak ini maka di Banjarmasin ada suatu pasar khusus yang berjualan makanan, koe-koe, minuman dan segala macam bumbu dan masakan yang serba enak.

Pasar ini buka pada sore hari dan diberi nama Pasar Wadai yang juga ada tulisan bahasa asingnya yakni: *Banjarmasin Cake Fair*. Tulisan yang terakhir ini tentunya ditujukan bagi turis asing, tidak peduli Islam atau tidak. Konon Pasar Wadai ini sekaligus menampung ambisi Walikotanya untuk pengembangan pariwisata. Sayangnya, karena diatur sedemikian rupa bangunannya menyebabkan penebusan lokasi menjadi mahal dan otomatis harga koe dan makanan yang dijual juga mahal. Akhirnya yang banyak membelipun bukan orang yang berpuasa tetapi justru para WNI Keturunan Cina, dan mereka yang berkantong tebal. Apakah pola konsumsi yang seperti ini yang dituntut dalam bulan puasa?

Lain lagi dengan toko-toko besar di kota-kota besar. Menjelang akhir bulan Ramadhan mereka ramai-ramai menjual obral untuk menghabiskan stok dan berbagai dalih lainnya. Walaupun sebenarnya harga obral tersebut tidak beda dengan harga biasanya. Anehnya semua orang berjubel merubung tempat-tempat obral tersebut. Kenapa? Lagi-lagi demonstration effect! Karena, lagi-lagi adat, atau tradisi atau kebiasaan yang tidak jelas sumbernya yaitu: pada hari Hari Raya harus baju atau pakaian baru! Padahal yang disuruh sebelum Shalat Idul Fitri, diwajibkan menunaikan Zakat Fitrah sebagai Tu'mah lil masakin, berbagi penderitaan dengan orang fakir miskin. Ini jelas kontradiktif! Jelas berbeda antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya. Dan sampai saat ini belum ada perubahan.

Demonstration Effect

Idul Fitri artinya: kembali kepada Fitrah! Fitrah adalah kesucian yang ditekankan pada aspek rohaniah. Terhapus dari segala dosa. Dimana kesucian seperti itu dapat kita rasakan, jawabannya: di dalam hati nurani! Kembali ke fitrah adalah kembali kepada kata hati nurani. Hidup sesuai fitrah adalah hidup sesuai kata hati nurani. Hati nurani yang didalamnya bersemayam Iman dan Taqwa. Kasarnya, yang dituntut oleh Islam dalam suasana Idul Fitri adalah agar manusia melakukan sesuatu sesuai kata hati nuraninya dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan kata hati nuraninya.

Seandainya itu saja dapat diwujudkan sudah lebih dari cukup untuk dipersembahkan kepada masa depan bangsa kita. Indonesia yang kita cita-citakan. Bukan kita tenggelam dalam hal-hal yang kecil yang kontroversial. Yang justeru akan memperpanjang jalan Republik tercinta oleh sesuatu yang mestinya sudah kita sadari bersama. Dengan semangat: Minal A'idin wal faa-idziin, semoga kita benar-benar menjadi orang yang kembali (ke fitrah) dan itulah orang yang mendapat keberuntungan, mencapai kemenangan dalam peperangan dengan hawa nafsu sebulan penuh. Sekali lagi: Semoga! □

Digitized by Google

Oleh : M Syafaat Habib

Memasuki Era Industrialisasi Dengan Kepribadian Dan Kewaspadaan

Bangsa Indonesia dalam tahap pembangunan sekarang ini telah memasuki tahapan yang makin menentukan. Pelita ke V akan segera dimasuki. Dalam Pelita ke lima itu Indonesia akan memantapkan kerangka landasan untuk masuk dalam era tinggal landas dalam Pelita ke VI nanti. Saat tinggal landas adalah saat yang telah disepakati bersama, yakni masuk dalam Era Industrialisasi dan Modernisasi.

Mengapa masyarakat yang modern dan industri harus dikejar dan diwujudkan, tentulah masalah ini ada kekuatan daya tariknya sendiri yang akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Dunia pernah mengalami apa yang disebut sebagai "Revolusi Industri". Revolusi Industri telah terjadi di abad ke 18 yang lalu. Istilah tersebut ditujukan kepada suatu zaman yang perkembangan Ekonomi serta Teknologi mampu mengumpulkan kekuatan dengan kecepatan yang luar biasa, yang menghasilkan industrialisasi modern. Waktu itu orang mulai mengecor besi, membuat benang untuk tekstil secara besar-besaran, yang akhirnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan mencengangkan bagi kemanusiaan.

Diketemukannya mesin uap membuat perubahan yang hebat bagi sivilisasi manusia, yang tak akan terlupakan oleh sejarah. Arthur Young, ketika pada tahun 1788, melihat mesin tekstil, mesin wool dan kereta uap serta kapal uap, terkejut mengatakan "Inilah Revolusi Industri".

Manusia menyaksikan perubahan besar dalam teknik meringankan kehidupan dan kebijakan perekonomian serta komersial yang cepat. Kehidupan manusia tentu akan ditata lebih baik. Perubahan yang kemudian tampak di mana-mana di Europa, terutama terhadap kehidupan kemasyarakatan.

Revolusi teknologi rupanya telah mampu merubah struktur Ekonomi dan sosial masyarakat Europa waktu itu, bahkan telah menerobos pada kehidupan politik dan intellektual. Pemikir-pemikir hebat tampil pada

waktu itu beradu argumen dan ratio, baik dari kelompok kiri maupun kanan.

Revolusi ini ada yang menamakannya dengan Revolusi diam-diam atau "Silent Revolution". (1852, Michael Angelo Garvey) ketika waktu itu ia melihat kondisi manusia yang berubah oleh effek penemuan mesin uap dan telegraf. Ia sebut sebagai suatu era yang tenang yang diikuti badai dan guntur yang dahsyat.

Memang industri lahir tidak sekaligus, pada mulanya pada pergabungan dengan pertanian. Industri berada di tangan kaum pengusaha yang bebas yang bergabung dengan kelompok petani besar. Pada mulanya kerjasama antara buruh dengan majikan berjalan lancar, tidak mengalami banyak hambatan. Pengusaha yang kapitalistik masih dalam tahap yang embrional. Kaum pedagang dengan pabrikan bisa bekerjasama secara baik. Kehidupan rakyat banyak dapat terpenuhi oleh jasa perusahaan-perusahaan yang medium ataupun yang kecil saja. Memang keperluan hidup manusiapun belum terlalu rumit dan banyak.

Datangnya Revolusi Industri memang mengagetkan masyarakat. Dunia laksana didobrak oleh gebrakan revolusi hasil usaha manusia berhadapan dengan alam, melalui kekuatan mesin uap dan mesin tenun. Kemudian diikuti dengan perbaikan jalan raya, jalan kereta api, ekspansi perdagangan ke luar negeri, untuk lebih banyak menciptakan kesejahteraan manusia. Pelopor yang tak pernah dilupakan sejarah ialah Adam Smith dan James Watt. Dunia lama diobrak-abrik dan disusunlah dunia baru.

Revolusi Ekonomi juga terjadi bersamaan, metode proses Industri berubah sangat cepat. Tradisi kehidupan berubah hingga ke akar-akarnya, terutama oleh kebijakan masyarakat baru yang bersifat: Laissez-faire, berarti kebebasan yang mutlak. Sikap ini yang kemudian menimbulkan reaksi hebat dari kaum sosialis.

Industri telah mampu menarik orang dari dusun pindah ke pusat kota, untuk mengadu untung dan nasib yang lebih baik. Pertambangan pendudukpun cepat terjadi. Orang pindah dari pertanian ke industri, yang dianggap lebih cepat menguntungkan dan menyejahterakan diri. Sistem kepabrikan menjadi sesuatu yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sistem ini sering mengakibatkan kelebihan hasil produksi atau overproduksi, bahkan depressi ekonomi. Hal ini merupakan gejala perekonomian yang belum pernah dialami sebelumnya oleh dunia manusia, dan ternyata secara kronis akan bisa terus terjadi dalam masyarakat industri.

Awal proses industrialisasi itu ialah kekacauan, karena para pabrikan dan tuan-tuan tanah menjadi pemeras dan mengeksploitasi buruh secara tidak wajar. Ini mengakibatkan ketegangan sosial dan timbulnya kritik pedas terhadap gerakan industrialisasi. Kemiskinan buruh sering menjadi issue politik yang tidak mudah mengatasinya. Hal ini memaksa pemerintah di banyak negeri industri sendiri untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, disamping usaha perbaikan status sosial serta taraf hidup orang banyak. Yang jelas orang mengejar industrialisasi ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan duniawi dengan lebih cepat.

Digitized by Google

Menjalar Ke Seluruh Dunia

Abad ke sembilan belas masih menunjukkan dominannya peranan Inggris dan Perancis dalam industrialisasi. Pada waktu ini muncul gejala baru dalam gerakan industrialisasi, ialah dengan penemuan kekuatan listrik dan prosessing kimiawi baru. Hal ini dianggap sebagai Revolusi Industri baru.

Revolusi Industri baru ini disebut oleh Jevons sebagai Revolusi Industri yang kedua. Jevons terutama melihat adanya revolusi dibidang ekonomi, karena keadaan katastropik telah terjadi oleh gebrakan industri di manamana. Ekonomi sering ketinggalan dengan penanganan melalui konsepkonsep yang matang. Ekonomi ternyata berjalan lebih lambat.

Penemuan-penemuan baru di Perancis dan Jerman ternyata juga mengejutkan (mesin sutera, boiler, turbin air, bahan-bahan kimia baru, mesin jahit dan lain-lain). Sedang di Jerman orang banyak mencurahkan perhatian pada hubungan antara ilmu pengetahuan dan industri.

Setelah itu Amerika Utara mulai dilanda pula oleh gerakan industrialisasi. Setelah dilewati tahun 1800, dan terutama di akhir abad sembilan belas produksi mesin Amerika memasuki pasaran Europa. Kunci kesuksesan Amerika dalam gerakan industrialisasi terletak pada (1) adanya produksi secara massal, dan (2) Standardisasi hasil-hasil produksi. Karena kurangnya buruh yang ahli, maka industri di Amerika ditujukan untuk produk-produk yang murah dan berguna bagi rakyat banyak, tidak menghasilkan barang-barang yang canggih maupun yang bermutu tinggi, yang hanya akan diperlukan oleh konsumen kelas tinggi. Mereka telah berhasil membuat industri senjata, mesin jahit, hasil kayu, alat pertanian, kunci dan lainlain.

Inggris sementara itu masih tetap leading dalam metallurgi, penambangan batu bara, kereta api, kapal uap dan industri berat lainnya. Sejak masa ini mulai terjadi import industrialisasi dari Negara yang telah maju ke negara yang kurang maju.

Dalam hubungan ini di timur muncul Negeri-negeri Industri baru, ialah Jepang, Cina dan India. Mereka mulai dengan gerakan meniru barat atau Westernisasi. Mereka tidak hanya meniru "Life style" barat akan tetapi juga industrialisasinya. Sementara itu Amerika Serikat, Australia dan Canada juga maju pesat dengan industrialisasi. Semua negeri itu memang didukung dengan kekayaan alamnya masing-masing.

Jepang, India dan Cina berpacu dengan kemajuan. Restorasi Meiji mendorong Jepang untuk mengejar ketinggalannya dari barat. India kurang beruntung dalam mengejar ketinggalan ini, oleh karena tradisi yang kurang mendukung di samping penjajahan Inggris sebagai juga faktor penghambat yang penting. Hingga tahun 1914, India masih mengimpor mesin-mesin dan alat-alat industri percobaan untuk membuat proyek besi baja gagal pada waktu itu.

Cina pada tahun 1860 telah mulai mengembangkan pabrik tekstil dan berhasil baik setelah menginjak tahun 1880. Namun kemudian diserbu oleh modal Jepang yang masuk Cina. Shanghai sebagai pusat industri banyak didominasi modal Jepang dan Inggris. Ratusan pabrik tekstil didirikan di Shanghai. Barang-barang jadi lainnya juga membanjiri Shanghai. Di lain bagian Cina masih tetap mundur dengan pertaniannya, kecuali sedikit daerah Manchuria yang dikuasai Jepang ternyata lebih maju.

Jepang sangat cepat mengejar industrialisasi barat. Abad sembilan belas sistem feodal Jepang mulai banyak berubah. Perekonomian juga mengalami perbaikan yang cepat. Pemerintah lebih berani memberikan subsidi kepada rakyat, untuk kemajuan industri dan perdagangan mereka. Kredit dipermudah, juga memberikan ja-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

JL. JENDRAL BASUKI RACHMAT 119-123 TELP. 44751 s/d 44754 TLX. 31921

SURABAYA

Direksi beserta Karyawan/Karyawati PDAM Surabaya

Mengucapkan :

Selamat Atas Terpilihnya Bapak Soeharto Sebagai Presiden Dan Bapak Sudharmono SH, Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sidang Umum MPR 1988.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Menyertai Bapak Dalam Memimpin Bangsa Indonesia Mencapai Masyarakat Adil Makmur Dan Sejahtera Berdasarkan Pancasila.

A.n. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Direktur Utama
ttd.

IR. HOESODO
NIP. 510 055 261

Digitized by Google

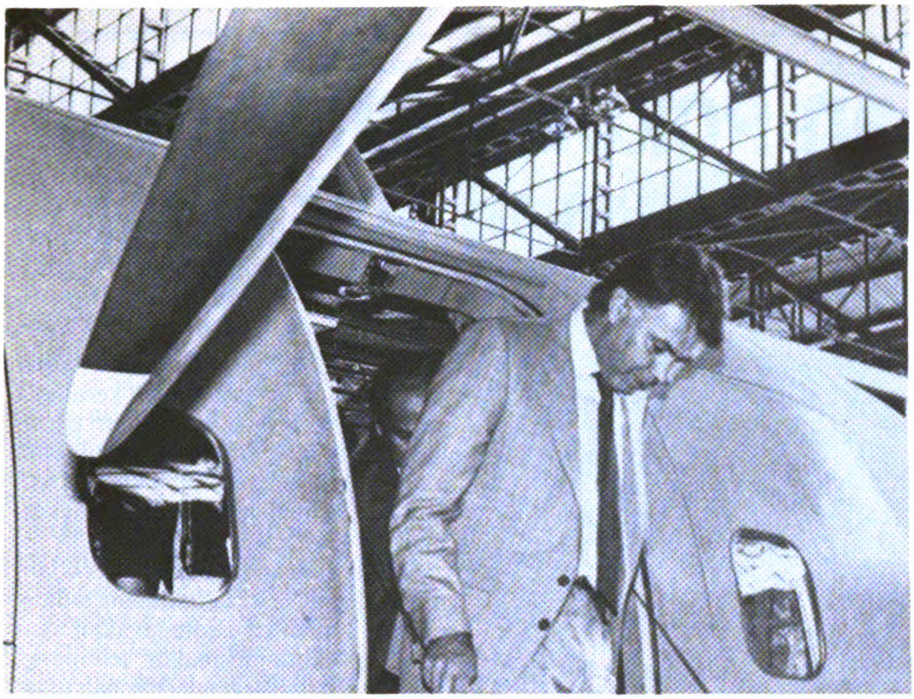

Industrialisasi, gerakan untuk mempermudah manusia hidup

minan bagi pinjaman dari luar negeri untuk industri. Jaringan Kereta Api segera dibangun untuk melancarkan perekonomian Negara. Kemajuan Jepang telah sanggup melebih India dan Cina. Sesudah Perang Dunia Pertama Jepang telah mengadakan ekspansi perdagangan di Timur Jauh. Tahun 1927 Jepang telah memiliki 49.000 pabrik dengan pekerja sebanyak 1.700.000 orang. Industri Jepang terutama tekstil dan sutera, sedang metallurgi mengalami hambatan bahan baku.

Rusia pun tak ketinggalan dengan gerakan industrialisasi, hanya model yang ditempuh agak lain, ingin potong kompas, dengan mendahulukan industri berat. Memang Rusia didukung oleh bahan baku dan potensi rakyat yang cukup. Rusia kurang memperhatikan barang-barang yang diperlukan orang banyak. Dengan demikian jelas bahwa menjelang abad duapuluh dan pada awal abad duapuluh ini di mana-mana di dunia ini orang mengadakan gerakan industrialisasi.

Kepribadian & Kewaspadaan

Menjelang akhir abad duapuluh ini atau menjelang tahun 2.000 Indonesia akan memasuki era industrialisasi. Gambaran yang digambarkan di atas kiranya cukup sebagai langkah-langkah awal era industrialisasi, yang telah terjadi di banyak negeri dunia. Bangsa Indonesia mungkin lebih beruntung, karena bisa belajar dari pendahulunya dalam gerakan industrialisasi.

Pada hakekatnya industrialisasi adalah gerakan untuk lebih mempermudah manusia hidup, dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan teknologi itu manusia ingin menciptakan kesenangan dan informasi yang lebih banyak. Inovasi dan penemuan di bidang industri telah banyak membuka tabir manusia menghadapai persoalan dunia.

Kesejahteraan kebendaan yang bisa dihasilkan dengan mudah oleh gerakan industrialisasi itu, telah mendorong hidup manusia makin menarik, mengenakkan, mewah dan makin aestetik. Hal ini juga mendorong masyarakat makin realistik, pragmatik dan sekularistik.

Memasuki era industrialisasi perlu kewaspadaan tersendiri, karena standar hidup manusia akan lebih baik, harapan hidup lebih panjang, kesehatan dan kebersihan lebih terjamin, kota makin cemerlang, hiburan makin banyak dan mudah dan masyarakat selain akan makin kritis juga makin egoistik.

Bila zaman industri itu tiba mungkin akan terjadi semacam konflik dalam kehidupan masyarakat. Konflik itu terjadi antara prinsip-prinsip nilai etik yang telah banyak di dalam masyarakat dengan perkembangan ekonomi pasar, yang berpedoman kepada Caveat Emptor (biarkan konsumen yang menentukan senang atau tidak). Di samping itu berkembang individualisme yang makin hebat. Dengan demikian akan terjadi dilemma moral, seakan-akan ekonomi pasar akan mengatakan tak perlu ada nilai etik. Etika tak perlu dikembangkan dalam masyarakat industri.

Di zaman baru ini memang timbul yang disebut Etika Ilmiah dan Etika Lingkungan (Scientific Ethics & Environmental Ethics) yang orientasi nilainya kepada fakta kehidupan saja yang dihadapi manusia sehari-hari. Hal ini mungkin karena keengganan manusia baru untuk menengok atau memanfaatkan moralitas yang berasal dari agama misalnya.

Edmund Burke dari Michigan University menyebutkan sebagai berikut: "The new Ethics was the basis of a secular and materialistic value system that has dominated the climate of opinion in western Europe and North America ever since".

Salah satu keinginan etika ilmiah ialah: Keinginan umur panjang dengan kesehatan yang terjamin. Ini sebenarnya berawal sejak dulu ketika Archilles, panglima perang terkenal itu, ingin umur panjang dan awet muda dengan makan sumsum beruang muda. Orang juga mengejar teknologi baru, yang dinamakan: Life Extending technology.

Teknologi baru ini memberikan harapan manusia untuk berumur panjang, hingga bisa mencapai 200 tahun pada abad 21 nanti.

Orientasi bagi nilai etik bagi bangsa Indonesia bukan sesuatu yang harus dicari, karena telah terdapat dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri. Ada tiga hal pokok bagi sumber etika bangsa Indonesia, ialah (1) Tradisi bangsa Indonesia sendiri yang telah berabad-abad memiliki budaya yang tinggi, penuh dengan tata nilai yang luhur (2) Agama yang dianut bangsa Indonesia, juga merupakan sumber tata nilai bagi orientasi etika, dan (3) Filosofi Pancasila, sebagai konsensus politik dan perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adalah juga sumber etika yang tidak akan kering.

Oleh sebab itu memasuki masa atau era modernisasi dan industrialisasi, bangsa Indonesia perlu kepribadian dan kewaspadaan, dengan menggali sebesar-besarnya sumber tata nilai yang telah dimilikinya sejak lama. Sehingga tidak mengalami kekacauan sebagaimana kekacauan yang pernah dialami oleh masyarakat industri sebelumnya. □

Digitized by Google

Oleh : Prof. Dr. Saleh Affif

Kebijaksanaan Pokok Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional

Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan nasional tergantung kepada berbagai faktor yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri.

Beberapa yang pokok diantaranya ialah: - Tujuan pembangunan nasional itu sendiri; - Strategi dasar yang akan diambil; - Berbagai kehendak serta tuntutan-tuntutan yang timbul sejalan dengan perkembangan pembangunan; - Keadaan sekitar yang secara pokok mempengaruhi tujuan beserta kecenderungan-kecenderungannya dan - Kondisi awal, seperti keadaan sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan itu dalam rangka penelaahan kebijaksanaan pokok pembangunan, perlu terlebih dahulu menelaah berbagai faktor tersebut di atas.

Tujuan pembangunan nasional kita seperti yang dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut maka landasan kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan ialah Trilogi Pembangunan, yakni pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Seperti pada Repelita III dan IV maka dalam Repelita V yang akan datang unsur pemerataan menempati urutan pertama. Hal ini tidak berarti bahwa unsur pertumbuhan dan unsur stabilitas nasional mejadi kurang penting. Kedua unsur tersebut adalah sangat penting dan sangat diperlukan untuk pelaksanaan unsur pemerataan.

Hal tersebut dapat dimengerti karena antara unsur yang satu dengan

unsur lainnya dari Trilogi Pembangunan tersebut terdapat saling kaitan yang erat. Stabilitas nasional yang mantap misalnya akan lebih memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang pada gilirannya lebih meningkatkan potensi untuk pemerataan. Sedangkan pemerataan yang lebih baik akan meningkatkan pula stabilitas nasional, dan seterusnya saling berkaitan satu sama lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, GBHN memuat pula prioritas pembangunan yang untuk Repelita V diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada: - sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; - sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Lagi pula dalam GBHN 1988 juga diamanatkan agar dalam Repelita V kerangka landasan yang telah diwujudkan dalam Repelita IV, dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, akan dimantapkan, sehingga dalam Repelita VI bangsa Indonesia dapat tinggal landas. Pemantapan kerangka landasan ini berarti antara lain, pertama, adanya perubahan-perubahan yang bersifat struktural, serta, kedua, kualitas pembangunan yang ditingkatkan.

Dalam rangka perubahan-perubahan struktural ini maka dalam bidang ekonomi akan terus diupayakan agar struktur ekonomi makin seimbang, baik dilihat dari segi nilai tambah maupun dari segi tenaga kerja. Dalam hubungan ini maka peranan sektor industri dan jasa, secara relatif, akan semakin meningkat sedangkan peranan sektor pertanian secara relatif semakin menurun walaupun secara absolut akan terus pula ditingkatkan, sesuai dengan prioritas yang disebutkan dalam salah satu butir terdahulu.

Sejalan dengan itu maka struktur setiap sektor dalam sesuatu bidang, baik bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya juga makin diseimbangkan. Seperti misalnya peranan pangan dan nonpangan dalam sektor pertanian, dan bahkan peranan beras dan nonberas dalam pangan sendiri akan diusahakan agar makin seimbang. Dalam sektor industri, antara industri besar, menengah dan kecil. Juga antara industri mesin dan industri lainnya, dan begitu pula antara industri barang konsumsi dan industri bahan baku. Dalam sektor pendidikan, antara pendidikan umum dan kejuruan, serta antara pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dalam sektor kesehatan, antara tenaga dokter dan para medis, serta fasilitas kesehatan yang ada. Dalam sektor perhubungan, antara perhubungan darat, laut dan udara.

Saling Menunjang

Struktur ekspor dan penerimaan dalam negeri pemerintah, yang selama ini agak rawan karena peranan migas yang besar di satu pihak serta ketidakpastian harga minyak di pihak lain, akan terus pula semakin dikuatkan

Digitized by Google

dengan jalan melanjutkan dan meningkatkan upaya diversifikasi ke arah peranan nonmigas yang semakin besar dengan basis yang semakin luas ke berbagai produk nonmigas. Dalam upaya ini kita perlu secara terus-menerus mengikuti perkembangan pasar terutama pasar luar negeri.

Dalam hubungan dengan perubahan struktural ini, sejalan dengan pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang-bidang lainnya yakni bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lainnya akan terus pula ditingkatkan secara serasi dan agar saling menunjang dengan pembangunan ekonomi sehingga lebih menjamin ketahanan nasional.

Dengan perubahan struktural seperti di atas maka dampak negatif berbagai gejolak timbul, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam akan lebih dapat ditekan sampai seminimal mungkin dan pula peluang yang ada akan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Bahkan dengan adanya perubahan struktural itu akan lebih dimungkinkan pula untuk menciptakan peluang baru bagi pembangunan sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan langgeng dan dengan sebaik-baiknya.

Hal lainnya yang penting untuk pembangunan di masa depan ialah peningkatan kualitas pembangunan. Kualitas pembangunan ini meliputi kualitas kehidupan masyarakat serta kualitas manusia. Kualitas kehidupan ini meliputi aspek lahir dan batin, dan termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang dan papan serta pemenuhan kebutuhan spiritual dan kebutuhan akan rasa aman. Kualitas lingkungan hidup merupakan unsur penting pula dari kualitas pembangunan yang dengan demikian perlu dipelihara dalam pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kualitas manusia memegang peranan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hakekat pembangunan kita yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan kita pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian di samping sebagai tujuan, justru mereka ini pulalah yang melaksanakan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan maka kualitas manusia sebagai pelaksana pembangunan ini sangat penting untuk ditingkatkan. Belajar dari pengalaman kita di masa silam, serta pengalaman berbagai negara lainnya seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang, Korea, Taiwan dan lain sebagainya, pada akhirnya keberhasilan sesuatu bangsa di dalam upaya pembangunannya sangat ditentukan oleh kualitas manusianya atau dalam hal ini kualitas sumberdaya manusianya.

Peningkatan kualitas manusia memegang peranan sangat penting

Dalam pada itu, keadaan sekitar dan kecenderungannya sangat mempengaruhi pula upaya pembangunan yang dilakukan. Dalam hubungan ini ada beberapa unsur pokok keadaan sekitar yang perlu dikemukakan, yakni perkembangan harga minyak bumi, perkembangan produk-produk primer, perkembangan perekonomian dunia, perkembangan ilai tukar antara mata uang utama berbagai negara di dunia, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat belakangan ini.

Pada tahun 1973 dan 1974, harga minyak bumi meningkat dengan pesat. Peningkatan tersebut dilanjutkan lagi pada tahun 1979 hingga 1981 dengan harga puncak sekitar US$ 35 per barrel pada tahun 1981. Perkembangan harga ini telah menghasilkan dana yang telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pembangunan kita. Akan tetapi sejak tahun 1982 harga minyak menurun dengan penurunan drastis pada bulan Agustus 1986, di mana harga minyak sempat mencapai di bawah US$ 10 per barrel.

Masih Lesu

Penurunan yang demikian besar telah mempengaruhi penerimaan pemerintah serta penerimaan devisa yang pada gilirannya telah mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Besarnya pengaruh penurunan harga minyak ini dapat dipahami mengingat peranan migas, baik dalam penerimaan dalam negeri pemerintah maupun dalam penerimaan devisa dari ekspor sangat besar. Sesudah Agustus 1986 memang harga minyak meningkat sedikit, tetapi sesudah itu naik turun tidak menentu. Memang tidak gampang memperkirakan harga minyak ini karena berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti cadangan yang dimiliki oleh negara-negara pemakai minyak, produksi OPEC dan Non-OPEC, kapasitas berlebih OPEC yang sangat besar, kesepakatan OPEC, peranan unsur psikologis yang cenderung semakin besar, persepsi pelaku pasar mengenai kesepakatan OPEC, sisa produksi negara-negara sosialis, sumber-sumber energi lain pengganti minyak, perang Timur Tengah dan sebagainya.

Sesuai dengan itu maka dalam masa mendatang, sangat sulit memperkirakan keadaan harga minyak tersebut. Namun demikian, ada semacam kecenderungan pendapat bahwa dalam beberapa tahun mendatang ini pasar minyak masih lesu. Walaupun sesudah itu keadaan pasar minyak mungkin sedikit membaik, secara realistik sangat sulit membayangkan untuk terjadinya kenaikan harga minyak yang pesat seperti yang terjadi pada dekade 1970 dan awal tahun 1980an. Bahkan sementara kalangan berpendapat, perkembangan dan tingginya harga minyak pada waktu yang lewat telah mendorong upaya R&D di negara-

Digitized by Google

pembangunan, langsung atau tidak langsung, akan berdampak terhadap keadaan devisa. Dengan perkataan lain, apapun yang dilakukan, kalau tidak didukung oleh persediaan devisa, pada akhirnya tidak akan efektif. Sesuai dengan itu maka perkembangan keadaan sekitar seperti yang dikemukakan di atas sangat penting artinya bagi upaya pembangunan kita.

Dalam pada itu unsur keadaan sekitar yang besar pula dampaknya terhadap pembangunan kita ialah perkembangan nilai tukar antara mata uang utama di dunia, khususnya antara dollar Amerika Serikat dengan yen dan mata uang utama lainnya. Dalam tahun-tahun terakhir ini nilai yen dan beberapa mata uang utama lainnya telah meningkat dengan pesat terhadap dollar Amerika Serikat.

Dari peningkatan nilai yen saja maka beban hutang kita telah bertambah sekitar US$ 9 milyar, melulu karena pengaruh luar dan bukan karena kita menambah pinjaman. Perkembangan nilai tukar mata uang utama lainnya telah memperberat pula beban hutang ini.

Sejalan dengan itu perkembangan nilai tukar dengan sistem nilai tukar mengambang yang diterapkan di berbagai negara industri ini telah cenderung pula meningkatkan derajat ketidakpastian bagi berbagai negara di dunia.

Suatu unsur sekitar lainnya yang mempengaruhi upaya pembangunan kita ialah perkembangan teknologi yang demikian pesat belakangan ini. Perkembangan teknologi ini antara lain meliputi biotek, robotik dan informatika. Dampak perkembangan teknologi ini telah kita rasakan pula, baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa dampak positif maupun berupa dampak negatif. Dampak ini dapat kita lihat dalam peningkatan produktivitas di berbagai bidang seperti di pertanian, industri dan sebagainya. Di samping itu telah dirasakan pula dampaknya terhadap lapangan kerja. Perkembangan teknologi di luar negeri telah menyebabkan pergeseran dalam daya saing beberapa produk di pasar internasinal yang pada gilirannya mempengaruhi pula pola perdagangan dan pola produksi internasional dan dengan demikian mempengaruhi pula pergeseran dalam lapangan kerja.

Dalam hubungan dengan lapangan kerja ini dapat pula dikemukakan bahwa dalam jangka pendek, perkembangan teknologi dapat mengakibatkan rasionalisasi, walaupun dalam

Masalah pokok pembangunan yang akan datang adalah penyediaan lapangan kerja

negara industri, dalam rangka diversifikasi ke sumber-sumber energi lainnya. Berbagai hal ini akan menyebabkan sulitnya mengharapkan perkembangan harga minyak dalam jangka panjang.

Berbarengan dengan penurunan harga minyak di atas, maka dalam beberapa tahun terakhir ini harga produk-produk primer yakni produk-produk pertanian dan tambang termasuk logam dasar, secara hampir serempak menurun dengan pesat. Secara teoritis sulit dibayangkan dapat terjadinya kejadian seperti itu, tetapi hal tersebut sudah terjadi, dan telah mempengaruhi pula pembangunan kita. Beberapa pendapat menghubungkan kejadian ini dengan perkembangan perekonomian dunia dan *recycle* dana internasional. Perkembangan teknologi dan *"price support"* di satu pihak telah memungkinkan perkembangan yang pesat sisi suplai yang didukung oleh perkembangan sisi permintaan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan recycle dana internasional.

Namun, belakangan ini, perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong penggunaan bahan pertanian dan tambang yang semakin kecil dan berbarengan dengan itu resesi perekonomian dunia dan perkembangan dana internasional kurang mendorong perkembangan sisi permintaan. Berbagai kalangan memperkirakan, sebegitu jauh belum terlihat tanda-tanda membaiknya harga produk-produk primer ini apalagi kalau dibandingkan terhadap produk-produk industri.

Sementara itu sejak akhir 1979 yang lalu perekonomian dunia telah dilanda oleh resesi yang berkepanjangan. Pada tahun 1983 keadaan sedikit membaik yang kemudian berlanjut pada tahun 1984. Akan tetapi sesudah itu perekonomian dunia kembali kepada keadaan resesi.

Bahkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 1987, yang dikenal dengan Senin kelabu, harga saham di New York mendadak anjlok sekitar 22,6%, yakni suatu penurunan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada penurunan harga saham pada zaman depresi tahun 1930-an. Penurunan harga saham tersebut menjalar pula ke berbagai pusat pasar saham penting lainnya di negara lain. Bagaimanakah prospek perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun mendatang ini?. Berbagai pendapat muncul mengenai hal tersebut. Pendapat inipun bervariasi. Namun demikian ada semacam kecenderungan pendapat bahwa resesi masih akan berkelanjutan dan bahkan ada pula pendapat yang menyatakan bahwa resesi selama ini merupakan bagian dari suatu depresi perekonomian dunia.

Perekonomian Terbuka

Perkembangan keadaan sekitar berupa harga minyak, harga produk primer dan resesi perekonomian dunia di atas telah mempunyai dampak yang besar terhadap upaya pembangunan kita. Hal ini dapat dimengerti mengingat pembangunan kita berlangsung dalam sistem perekonomian terbuka dengan kerjasama internasional. Dalam sistem seperti ini maka peranan devisa bersifat strategik. Apapun yang kita lakukan dalam berbagai upaya

Digitized by Google

jangka panjang kecenderungannya adalah menambah lapangan kerja. Sesuai dengan berbagai hal tersebut maka suatu hal yang jelas ialah bahwa perkembangan teknologi yang demikian pesat ini sebegitu jauh telah cenderung meningkatkan unsur ketidakpastian dalam upaya pembangunan.

Dalam pada itu, salah satu masalah pokok dalam pembangunan kita di masa mendatang ini ialah penyediaan lapangan kerja. Hal ini bertalian dengan laju pertumbuhan penduduk kita yang lumayan tingginya pada waktu yang lalu sebagai akibat dari perbaikan kesehatan dan tingkat kelahiran yang lumayan pula tingginya pada waktu itu. Sekarang ini mereka masuk ke angkatan kerja, sedangkan di lain pihak keadaan sekitar yang mempengaruhi pembangunan, seperti yang dikemukakan tadi, keadaannya cukup berat. Sesuai dengan itu maka dalam masa mendatang ini berbagai upaya akan semakin ditingkatkan dalam rangka penanggulangan masalah tersebut.

Sementara itu dalam hubungan dengan laju pertumbuhan penduduk, berkat berbagai upaya yang dilakukan, belakangan ini laju pertumbuhan penduduk sudah mulai menurun. Akan tetapi dampak penurunan tersebut terhadap angkatan kerja, baru akan dialami di tahun-tahun mendatang setelah mereka yang lahir tersebut menginjak usia angkatan kerja.

Semaksimal Mungkin

Dalam menghadapi masalah lapangan kerja dan masalah-masalah pembangunan lainnya, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, sesuai dengan strategi dasar, prioritas dan kehendak yang ada, dalam keadaan perkembangan sekitar yang tidak menentu dan kurang menguntungkan maka potensi yang ada harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Sesuai dengan itu maka partisipasi serta peran masyarakat, termasuk partisipasi dunia usaha, akan terus didorong agar semakin meningkat. Sejalan dengan itu akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pula efisiensi di segala bidang, termasuk efisiensi BUMN. Di samping itu akan terus diupayakan pula agar peranan pembangunan dari atas semakin sepadan dan saling menunjang dengan peranan pembangunan yang berasal dari bawah.

Dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha maka upaya deregulasi dan debirokratisasi yang telah ditempuh selama ini akan terus dilanjutkan

Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

dan bahkan ditingkatkan. Dengan upaya ini maka potensi dan efisiensi kegiatan dunia usaha diharapkan dapat meningkat. Dengan demikian partisipasi masyarakat pada umumnya dalam pembangunan juga akan semakin meningkat.

Upaya deregulasi dan debirokratisasi dalam mendorong peraan dunia usaha serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dibarengi pula dengan berbagai upaya lainnya seperti upaya peningkatan pembinaan sumberdaya manusia, upaya untuk meningkatkan iklim persaingan yang sehat, upaya meningkatkan kerjasama sesama dunia usaha, cq. kerja sama usaha besar, menengah, kecil dan koperasi. Juga akan ditingkatkan kerja sama atau keterkaitan antara upaya pemerintah dengan dunia usaha. Di samping itu akan ditingkatkan pula kerja sama internasional.

Sesuai dengan peranan devisa yang sangat penting di satu pihak yang di pihak lain merupakan salah satu kendala pokok dalam pembangunan di masa mendatang ini, diversifikasi ekspor ke berbagai produk yang mempunyai peluang yang baik sangatlah penting. Dalam hubungan ini, mengingat perkembangan keadaan sekitar yang berat dan tidak menentu maka peranan informasi dan antisipasi semakin penting.

Dalam hubungan ini maka kerja sama, antara sesama dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, serta kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah sangat penting artinya. Tentu saja upaya dunia usaha untuk tetap memelihara dan meningkatkan daya saing, baik yang menyangkut harga dan biaya, maupun yang menyangkut mutu serta keandalan suplai memegang peranan yang sangat penting pula.

Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, peranan unsur manusia khususnya manusia sebagai pelaksana pembangunan sangat sentral dalam pembangunan. Dalam hubungan ini diperlukan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mampu bekerja keras, berdisiplin dan berorientasi ke masa depan. Hal ini berkaitan dengan berbagai hal seperti pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, nilai-nilai budaya dan berbagai hal lainnya.

Sedemikian sentralnya peranan sumber daya manusia ini dan sedemikian pula pentingnya manusia sebagai tujuan pembangunan sehingga dalam GBHN 1988 dinyatakan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua ialah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya, serta manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. □

Digitized by Google

Oleh : Soekarno D

Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) Salah Satu Bentuk Jaminan Sosial di Indonesia

Mula-Buka Jaminan Sosial

Perkembangan industri yang semakin maju di negara-negara Eropa pada abad ke 19, menyebabkan pendapatan golongan penduduk yang bekerja di pabrik-pabrik sangat tergantung dari pendapatan upah. Upah itu diterima waktu mereka bekerja, sedang kalau tidak, mereka tidak mendapat upah. Tidak adanya kontinuitas pendapatan inilah yang menyebabkan timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pekerja pabrik tersebut.

Pertama-tama diadakanlah *sistem tabungan kecil* bagi para pekerja guna menjamin masa depan mereka. Tetapi dalam praktek sulit dilaksanakan, karena para pekerja dengan upah rendah, sulit menabung. Tabungan itu sendiri membutuhkan waktu pengumpulannya, sedang risiko sakit atau kecelakaan bisa datang setiap waktu. Maka sistim ini dianggap kurang efektif sebagai metode jaminan sosial.

Maka dicobalah suatu sistem jaminan sosial atas *tanggung jawab Pengusaha.* Sistim tanggung jawab jawab pengusaha ini biasanya dikaitkan dengan kecelakaan. Artinya jika terjadi kecelakaan, maka seluruh risiko dibebankan kepada pengusaha. Akan tetapi untuk ini pekerja harus membuktikan di depan pengadilan, bahwa kecelakaan itu akibat kelalaian pengusaha. Dalam praktek, pembuktian ini sulit dilakukan, karena teman sekerja umumnya enggan untuk menjadi saksi karena ia harus berhadapan dengan pengusaha majikannya.

Pemikiran yang kemudian berkembang hingga kini, ialah sistim asuransi yang bersifat wajib dan berlaku secara nasional, yang kemudian dikenal sebagai *sistim asuransi sosial,* yang lahir pertama-tama di Jerman pada pemerintahan Bismarck sekitar tahun 1883-1889. Adapun ciri-ciri asuransi sosial itu ialah: (1) bersifat wajib; (2) dana berasal dari pekerja, pengusaha dan Pemerintah; dan (3) santunannya adalah hak peserta karena dibiayai oleh dana tersebut.

Di Jerman sistim asuransi sosial diawali dengan adanya asuransi hari tua dan cacat (1883); asuransi sakit (1889); asuransi kecelakaan kerja (1884). Contoh yang dirintis Jerman ini segera diikuti oleh negara-negara Australia, dan lebih kurang tiga puluh tahun kemudian oleh Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya, serta Rusia dan Jepang. Setelah depressi besar tahun 1930-an, asuransi sosial menyebar ke USA dan Canada, dan setelah perang dunia ke II ke Asia dan Afrika.

Pada permulaan abad ke 20, di Denmark, timbul pemikiran tentang bentuk jaminan sosial bagi mereka yang tidak tercakup dalam program asuransi sosial, tetapi sangat membutuhkan pertolongan, seperti orang jompo, yatim piatu, wabah, bencana alam dan sebagainya. Bentuk ini disebut *sistim bantuan sosial.* Pembiayaan sistim ini seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah.

Adapun pengertian mengenai Jaminan Sosial pada umumnya digambarkan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya untuk risiko-risiko yang menyebabkan hilangnya/turunnya sebagian besar penghasilannya, dan untuk memberikan pelayanan terhadap konsekuensi-konsekuensi ekonomis yang terjadi karena risiko-risiko tersebut.

Adakah relevansi antara Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dengan program Jaminan Sosial? HIP mendasarkan dirinya pada Pancasila dan UUD 1945. Keseluruhan sila Pancasila yang bermuara pada sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna yang cukup relevan terhadap eksistensi program jaminan sosial. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" memerintahkan kepada kita tentang perlunya tiap-tiap warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika seorang warga negara tidak mempunyai pekerjaan, bagaimana dia akan memiliki penghidupan yang layak?

Disini sudah timbul masalah tentang perlunya program jaminan sosial. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Disini tidak saja program jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial saja yang diperlukan akan tetapi adanya program bantuan soal yang komprehensip sangat dibutuhkan pula. Karena itu jika kita akan melaksanakan HIP dengan sebaik-baiknya, kita harus pula mencoba menghayati bahkan mengamalkan Pancasila itu sebaik-baiknya pula, termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 beserta penjelasannya, maupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam GBHN yang merupakan ujud pola pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Jaminan Sosial di Negara Kita.

Disamping beberapa pasal UUD 1945 yang sudah disebutkan di atas, dasar hukum jaminan sosial kita ketemukan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain ialah:

(1). Undang-Undang No. 2 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya

Digitized by Google

Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947 No. 33 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Pernyataan berlakunya Undang-Undang tersebut untuk seluruh Indonesia ini dipandang perlu, oleh karena Undang-Undang RI tahun 1947 itu lahir pada zaman RI (Yogya), yang pada zaman RIS adalah hanya sebagai Negara Bagian, sedang UUD yang berlaku pada tahun 1951 adalah UUDS 1950 yang berfungsi sebagai perubahan dari Konstitusi Negara RIS sebelumnya. Tetapi Undang-Undang ini hanya memuat salah satu unsur saja dari program jaminan sosial bagi pekerja yang mendapat kecelakaan di tempat kerja. Dengan demikian cakupannya masih terbatas.

(2). Undang-Undang pokok Tenaga Kerja No 14 tahun 1969 yang memberi dasar mengenai pengaturan jaminan sosial ini, tercantum antara lain dalam pasal 10 dan pasal 15 yang mengatakan bahwa Pemerintah akan membina perlindungan kerja, yang mencakup antara lain "pemberian ganti kerugian" (pasal 10 ayat d). Kemudian dalam pasal 15 dikatakan, bahwa "Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya."

(3). Kedua Undang-Undang di atas, terutama Undang-Undang No. 14 pasal 10 dan 15 itu lah, yang kemudian menjadi dasar dari Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau yang terkenal dengan singkatan ASTEK. Sementara itu perlu dijelaskan di sini, bahwa kalau bagi tenaga kerja berlaku program jaminan sosial di bawah ASTEK, maka bagi pegawai negeri berlaku program jaminan sosial di bawah TASPEN, sedang bagi ABRI di bawah ASABRI.

Jika waktu lahirnya jaminan atas timbulnya kecelakaan itu di Eropa pada abad ke 19 didasarkan atas "hak menuntut penggantian kerugian atas perbuatan yang menyebabkan kerugian, dimana pekerja harus membuktikan di depan pengadilan bahwa timbulnya kecelakaan itu adalah atas kesalahan pengusaha, — dalam praktek sangat sulit bagi pekerja untuk membuktikan kesalahan majikannya —, maka Undang-undang Kecelakaan tahun 1951 itu menganut dasar yang lebih maju, ialah bahwa tuntutan penggantian kerugian itu didasarkan atas *pertanggungjawaban penuh majikan/pengusaha*. Ini berarti bahwa tiap-tiap kecelakaan dengan sendirinya membawa hak untuk menerima penggantian kerugian bagi pekerja.

Sebagai Undang-Undang yang menginstrodusir program jaminan sosial, cakupan udang-undang no. 2 tahun 1951 itu sangat terbatas, karena hanya meliputi satu program saja, yaitu tentang kecelakaan di tempat kerja. Tebatasnya program itu memang disadari oleh Pemerintah. Hal itu tergambar dalam penjelasan undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa pada saat itu Pemerintah memang belum mampu dan belum berpengalaman untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang bersifat asuransi. Pelaksanaan undang-undang itu diatur melalui prosedur dan klasifikasi yang cukup terinci, sehingga memerlukan kejelian dari para pelaksana serta pengawas yang terlibat. Disini fungsi aparat Pengawas Perburuhan dan SPSI sangat penting untuk menjamin terlaksananya (dengan baik) undang-undang tersebut.

Asuransi kecelakaan kerja, merupakan salah satu cakupan program Astek

Untuk sekedar ilustrasi, di bawah ini digambarkan sebagian dari hal-hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut: (1). Pasal 11 Undang-Undang itu mengadakan rincian mengenai tunjangan, antara lain: Sementara pekerja yang kena kecelakaan tersebut tidak mampu bekerja, besarnya uang tunjangan sama dengan upah sehari, terhitung sejak pekerja tidak menerima upah lagi, selama 120 hari. Jika sudah lewat 120 hari pekerja belum mampu bekerja, uang tunjangan demikian dikurangi menjadi 50 persen dan dibayar selama pekerja tidak mampu bekerja.

Jika pekerja selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian, tunjangan ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari menurut daftar yang dilampirkan pada undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran uang tunjangan yang dimaksudkan dalam butir pertama berakhir, dan dibayar selama pekerja tidak mampu bekerja sebagian.

Jika pekerja cacad badan selama-lamanya, yang tidak disebut dalam daftar lampiran undang-undang ini — banyaknya prosentase dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan petunjuk dokter-dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi. Jika terjadi perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya prosentase itu, maka Menteri Perburuhan menetapkannya dengan mengingat pertimbangan Menteri Kesehatan dalam hal ini.

Jika pekerja selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali-kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang biasa dikerjakan sebelum pekerja mendapat kecelakaan, maka uang tunjangan karena itu besarnya 50 persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70 persen, jika kecelakaan itu menyebabkan pekerja terus-menerus memerlukan pertolongan orang lain. Tunjang-

Digitized by Google

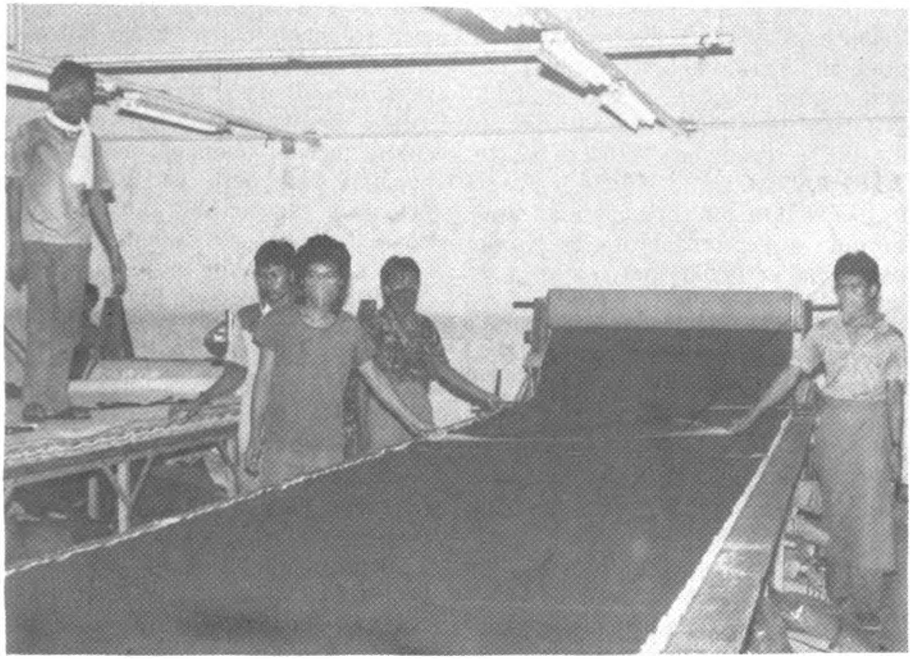

Program Astek lebih luas dari program jaminan sosial

an ini mulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam butir satu berakhir dan dibayar selama pekerja tidak mampu bekerja sama sekali.

(2). Pasal 12 mengatur dalam hal pekerja meninggal karena kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkannya mendapat uang tunjangan sebesar:

— 30 persen sehari tiap-tiap hari bagi janda atau janda-janda yang nafkah hidupnya semuanya atau sebagian besar dicarikan oleh pekerja itu. Begitu pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh pekerja itu. Dalam hal lebih dari seorang janda, maka uang tunjangan itu dibagi rata dan sama banyaknya antara mereka.

— 15 persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi seorang anak yang sah atau disahkan, yang belum berumur 16 tahun dan belum kawin. Jika anak itu karena meninggalnya pekerja menjadi yatim piatu, maka banyaknya tunjangan tadi ditambah menjadi 20 persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari.

— Paling banyak 30 persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak dan ibu atau jika pekerja itu tidak punya bapak dan ibu lagi, kepada kakek dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh pekerja itu.

— Paling banyak 20 persen dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang tua lagi yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh pekerja itu.

(3). Pasal 13 mengatur tentang pendelegasian kepada pegawai pengawas untuk memberikan persetujuan dalam tunjangan berkala diubah menjadi tunjangan yang dibayarkan sekaligus dengan berbagai syarat yang dicantumkan dalam pasal ini.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, materi yang diatur oleh Undang-Undang No 2 tahun 1951 itu cukup sederhana, hanya menyangkut satu program saja, ialah mengenai kecelakaan kerja; akan tetapi dalam pelaksanaannya harus menempuh pelbagai persyaratan dan prosedur yang tidak sederhana, sehingga jika aparat pelaksana maupun pengawas tidak jeli, bisa mengakibatkan pelaksanaan undang-undang itu menjadi kurang efektif. Sampai berapa jauh hal ini terbukti, para pelaksana yang terlibat, termasuk pimpinan SPSI, pegawai pengawas perburuhan dan pengusaha bisa memberikan pengalamannya.

ASTEK

Program asuransi tenaga kerja ini didirikan melalui Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1977, sedang lembaga penyelenggaranya berbentuk PERUM, didirikan melalui Peraturan Pmerintah No. 34 tahun 1977 bernama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja, disingkat PERUM ASTEK.

Cakupan program ASTEK meliputi dua hal, yang *pertama* ialah program Asuransi Kecelakaan Kerja, dan yang *kedua* ialah Program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan Program Asuransi Kematian. Program ASTEK ini memang lebih luas dari program Jaminan Sosial menurut Undang-undang No. 2 tahun 1951, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan Program Asuransi Sosial yang utuh, cakupannya masih terlalu terbatas. Program jaminan sosial yang utuh bukan saja terdiri dari dua unsur di atas, akan tetapi mencakup juga komponen-komponen seperti: sakit dan kesehatan, pensiun, cacad, tunjangan pengangguran atau paling sedikit tunjangan PHK, bahkan juga hal-hal yang biasanya dikategorikan sebagai bantuan sosial (social assistence). Akan tetapi bisa kita pahami, adanya jaminan sosial yang seutuh itu memang memerlukan dana yang cukup banyak, dan ini sangat tergantung dari kemampuan para pendukungnya yang biasanya terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Sering dalam masyarakat dipermasalahkan mengenai perlunya Program ASTEK itu tidak cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi diperkuat atau dikokohkan dengan Undang-Undang.

Maksud pendapat demikian tentu baik. Akan tetapi selama kemampuan masyarakat untuk mendukung program itu belum memadai, dan oleh karena itu perluasan program Asuransi Sosial kita perlu dilaksanakan dengan bertahan sesuai dengan kemampuan pendukung dananya, maka perkuatan dasar hukum menjadi bentuk Undang-Undang dewasa ini, hanya akan menyulitkan kita sendiri karena pada saat kita akan memperluas program itu, kita harus mengganti Undang-Undang yang mengaturnya dan prosesnya tidak mudah. Karena itu selama kita baru mampu melaksanakan program itu secara bertahap, bentuk hukum dalam ujud Peraturan Pemerintah seperti sekarang ini lebih baik sebab lebih mudah disesuaikan dengan perobahan-perobahan. Baru kalau kita nanti sudah mampu melaksanakan program jaminan sosial itu secara utuh, barulah dasar hukumnya kita perkuat menjadi bentuk Undang-Undang. Pentahapan itu misalnya apakah kita sekarang ini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan program pensiun?. Kalau program itu telah dilaksanakan untuk Pegawai Negeri dan ABRI, apakah untuk Tenaga Kerja belum tiba waktunya? Kalau sudah, berapa persen kah dana yang perlu disisihkan? Dan siapa saja yang harus mendukung dana itu? Berapa bagian masing-masing unsur?. Dan sebagainya.

Digitized by Google

Besarnya iuran

Sesuai dengan pasal 5,9 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977, maka jumlah iuran atau dana yang dipungut untuk program asuransi sosial ini ialah sebagai berikut :

Jenis Program	Iuran Pengusaha	Iuran Pekerja	Jumlah
Program Kecelakaan	Min. 2,4% - 36%	—	2,4-36%
Program Hari tua	1,5%	1%	2,5%
Program Kematian	0,5%	—	0,5%
J u m l a h	4,4%	1%	5,4%

Dibanding dengan negara-negara berkembang lain, dana yang dimasukkan ke dalam program asuransi sosial itu di negara kita masih terlalu kecil, sehingga santunan yang diterima oleh pekerja pun dengan sendirinya kecil pula. Untuk mendapatkan gambaran sekedarnya berapa sebenarnya iuran yang wajar, di bawah ini disajikan data besarnya dana yang dipakai di negara-negara lain sebagai berikut:

ASEAN :						
- Filipina	Pengusaha	6,85%	Pekerja	4,55%	Jumlah	11,4%
- Malaysia	Pengusaha	8,75%	Pekerja	6,5%	Jumlah	15,25%
- Singapura	Pengusaha				Jumlah	37,5%
ASIA :						
India	Pengusaha	11,25% (Pemerintah : 2%)	Pekerja	8,75%	Jumlah	21,16%
TIMUR TENGAH :						
- Mesir	Pengusaha	24%	Pekerja	11%	Jumlah	37%
- Syria	Pengusaha	15%	Pekerja	7%	Jumlah	22%
- Irak	Pengusaha	12%	Pekerja	5%	Jumlah	17%
AMERIKA LATIN :						
- Brasil	Pengusaha	14,5%	Pekerja	8%	Jumlah	22,5%
- Chili	Pengusaha	8,75%	Pekerja	6,5%	Jumlah	15,25%

Dari data di atas jelaslah, bahwa dana untuk program Jaminan Sosial cq Asuransi Sosial di Indonesia masih terlalu rendah dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Jika di negara-negara itu jumlah dana yang dimasukkan ke dalam program itu berkisar antara 11-37 persen, atau rata-rata 24 persen, maka di negara kita hanya 5,4 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana meningkatkan mutu dan cakupan program jaminan sosial kita itu dengan menaikkan jumlah santunan, tetapi sekaligus juga menaikkan iuran, sedang tingkat upah kita rata-rata masih tergolong rendah.

Kesimpulan

Baik Pancasila maupun UUD 1945 pada dasarnya mengisyaratkan perlunya kita mengembangkan program Jaminan Sosial. Pasal 27 UUD 1945 bisa kita jadikan dasar adanya Jaminan Sosial sedang pasal 34 UUD 1945 sebagai dasar adanya program Bantuan Sosial.

Oleh karena HIP mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945, maka jika kita ingin melaksanakan dan mengembangkan program Jaminan Sosial, maka harus dilakukan pula program Bantuan Sosial.

Undang-Undang No 33 tahun 1947 yang kemudian dinyatakan berlakunya untuk seluruh Indonesia oleh undang-undang No 2 tahun 1951 merupakan embrio adanya program Jaminan Sosial. Sedang Undang-Undang No 14 tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan memberi dasar tentang adanya program Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial. Pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 33 dan 34 yang meletakkan dasar tentang adanya program Asuransi Sosial dan bantuan penyelenggaranya.

Melihat bahwa program yang diatur oleh Undang-Undang No 33 tahun 1947 cq Undang-Undang No 2 tahun 1951 hanya mengenai satu komponen saja dari program Jaminan Sosial (Tentang Kecelakaan Kerja) sedangkan Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1977 tentang ASTEK telah mencakup disamping Program Kecelakaan Kerja juga Program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan program Asuransi Kematian, maka dapat disimpulkan bahwa Program Jaminan Sosial di Indonesia dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan.

Karena Program Jaminan Sosial yang utuh jauh lebih luas dari program Jaminan Sosial yang dicakup oleh Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 tentang ASTEK, maka pertahapan pelaksanaan program Jaminan Sosial di Indonesia dari waktu ke waktu perlu kita pertimbangkan kembali sampai berapa jauh pada waktu tertentu kita sudah tiba waktunya menambah cakupan program tersebut, misalnya apakah sekarang ini belum tiba waktunya untuk mulai dengan program Pensiun bagi Tenaga Kerja, mengingat bagi pegawai Negeri dan ABRI telah dikenakan program Pensiun itu?

Hal yang sama perlu juga dipertimbangkan tentang program tunjangan PHK. Ini perlu pengkajian baik mengenai jumlah dana yang diperlukan, maupun pendukung-pendukung dana tersebut. Sementara adanya Jaminan Sosial di perusahaan tertentu, bisa diperjuangkan oleh SPSI lewat KKB.

Selama pelaksanaan program Jaminan Sosial di Indonesia masih bertahap, belum mampu penyelenggaraannya dan utuh programnya, maka peraturan yang mengaturnya tidak usah ditingkatkan menjadi Undang-Undang cukup dengan Peraturan Pemerintah seperti sekarang ini, sehingga jika kita mau meningkatkan program itu, Peraturan Pemerintah yang mengaturnya dengan mudah disesuaikan.☐

Digitized by Google

Jusuf Wanandi

Perkembangan Strategis Kawasan Pasifik-Asia Menjelang Abad Ke-21

Suatu Pandangan Regional

Dalam membahas perkembangan strategis kawasan ini, maka perlu diadakan pembahasan pada dua tingkatan. Tingkat pertama, atau tingkat atas, menyangkut perkembangan tiap-tiap negara besar yang berada di kawasan, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, dan Jepang; interaksi antara mereka di masa mendatang; dan pengaruhnya bagi keseimbangan, perdamaian dan perkembangan kawasan. Dalam membicarakan hubungan negara-negara besar ini, yang menjadi pusat pembahasan ialah seberapa jauh hegemoni Amerika Serikat (*Pax Americana*) telah melemah, dan apakah peranan Amerika Serikat di kawasan Pasifik-Asia akan dapat digantikan oleh negara besar lain.

Tingkat kedua, atau tingkat bawah, menyangkut perkembangan negara-negara berkembang di kawasan, baik perkembangannya masing-masing, interaksi di antara mereka dan hubungan mereka dengan negara-negara besar, yang kesemuanya akan mempunyai dampak pada kestabilan, perkembangan dan perdamaian di kawasan.

Sudah jelas bahwa ketidakstabilan dalam negara berkembang di kawasan atau konflik di antara mereka yang merusak ketahanan nasional dan mengganggu ketahaan regional suatu kawasan, akan memberi peluang bagi negara-negara besar untuk ikut campur tangan di dalam masalah-masalah dalam negeri atau masalah regional kawasan itu. Hal ini tampak paling jelas dalam soal konflik di Kampuchea yang dimulai sendiri dengan pembantaian bangsanya oleh Khmer Rouge, lalu berkembang menjadi suatu konflik regional dengan melibatkan Vietnam. Akibatnya ketiga negara besar Uni Soviet, RRC dan Amerika Serikat sekarang ikut terlibat di dalamnya, dan tanpa persetujuan dan dukungan mereka, terutama RRC, maka penyelesaian konflik tersebut tidak akan tercapai.

Tentu ada juga kemungkinan di mana kepentingan suatu negara besar demikian besarnya, sehingga mendo-

rongnya untuk "menguasai" suatu kawasan atau negara, seperti halnya di Teluk Parsi. Situasi yang demikian tidak terdapat di kawasan Pasifik-Asia hingga kini. Asia Timur cukup penting bagi negara-negara besar untuk dipengaruhinya, tetapi negara-negara berkembang di sana sudah cukup mapan ketahanan nasionalnya, sehingga tidak mungkin dipengaruhi atau "dikuasai" oleh suatu negara besar dengan mudah. Karena itu untuk kawasan Pasifik-Asia ketahanan nasional dan ketahanan regional merupakan faktor-faktor yang utama bagi kestabilan dan keamanan kawasan.

Karena dewasa ini di tingkat pertama, yaitu di antara negara-negara besar, terjadi suatu perkembangan yang multipolar, maka negara-negara berkembang di kawasan ini mendapat kesempatan dan secara relatif suatu kebebasan untuk ikut menentukan suatu orde regional di kawasan tersebut.

Pax Americana

Inti pembahasan di bawah ialah pertanyaan sampai sejauh mana hegemoni Amerika Serikat (Pax Americana) di kawasan Pasifik-Asia telah berkurang secara relatif dan apakah di masa mendatang berkurangnya pengaruh Amerika Serikat ini akan diisi oleh negara-negara besar lain yaitu Uni Soviet, RRC dan Jepang atau oleh negara-negara lain secara bersama-sama, seperti ASEAN untuk sub-kawasan Asia Tenggara.

Melemahnya pengaruh Amerika Serikat ini sudah terjadi semenjak Nixon melepaskan keterikatan dollar Amerika Serikat pada emas di tahun 1971, dan pada waktu dia menyatakan apa yang kemudian dikenal sebagai doktrin Nixon atau doktrin Guam pada tahun 1969, yaitu strategi Amerika Serikat yang didasarkan pada strategi maritim, suatu *"forward deployment strategy"* yang berpusat pada kepulauan Asia dan mengundurkan diri dari keterlibatan pasukan Amerika Serikat di benua Asia. Doktrin ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungannya ke Cina pada tahun 1972 yang membuat perimbangan kekuatan tidak lagi bersifat bipolar, yaitu pertentangan antara dua Blok, Barat lawan Timur, tetapi lebih bersifat multipolar, di mana pusat-pusat kekuatan politik dan ekonomi mulai bergeser dan terbagi di antara Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina dan Jepang.

Namun hingga kini sifat multipolar itu hanya berlaku di bidang ekonomi dan politik saja, sedangkan bidang militer dunia dan kawasan Pasifik-Asia masih bersifat bipolar yang melibatkan hanya dua kekuatan adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang masih terus berkompetisi. Pertanyaannya ialah apakah keadaan seperti ini akan berlangsung terus di masa mendatang, terutama untuk kawasan ini, atau akan menjadi multipolar pula, di masa "alliances" (persekutuan) yang ada hingga kini akan berubah menjadi ikatan-ikatan yang lebih longgar sehingga lebih tepat dinamakan "alignments" (perserikatan)?

Hegemoni Amerika Serikat yang menonjol hingga awal tahun 1970-an, sekarang ini telah kian terasa berkurang karena pergeseran perimbangan ekonomi secara relatif antara Amerika Serikat dengan Jepang dan sekutu-sekutu lainnya. Pergeseran ini dikha-

Digitized by Google

watirkan akan menimbulkan suatu kekosongan kekuasaan di masa mendatang yang dapat diisi oleh kekuatan-kekuatan besar lainnya.

Pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan Paul Kennedy dalam bukunya *"The Rise and Fall of The Great Powers"* yang sedang ramai dibicarakan para ahli strategi di Amerika Serikat dan menjadi relevan pula untuk dibahas bagi kawasan kita. Yang dibentangkan Kennedy dan memang menjadi masalah di sini ialah, apakah Amerika Serikat yang secara relatif kurang berkembang dalam kekuatan ekonominya terutama sejak tahun 1980-an kalau dibandingkan dengan Jepang (dan Jerman Barat), dapat terus menanggung beban pertahanan yang demikian besarnya untuk "Dunia Bebas", dan dapat terus bertahan sebagai kekuatan "hegemoni" di dunia dan di kawasan Pasifik-Asia.

Secara konkrit, apakah Amerika Serikat yang memperoleh ± 35 persen dari seluruh GNP "Dunia Bebas" dapat terus mempertahankan anggaran belanja pertahaan yang meliputi ± 60 persen dari seluruh anggaran pertahanan "Dunia Bebas" itu?

Dari sejarah, terutama dari contoh menurunnya pamor dan pengaruh Kerajaan Inggris semenjak tahun 1870-an, maka Kennedy berpendapat bahwa Amerika Serikat sedang mengalami penurunan kekuasaan dan pengaruh secara relatif sebagai kekuatan hegemoni semenjak Perang Dunia Ke II dan karenanya harus mencari berbagai jalan untuk mengatasi melemahnya kekuasaannya itu.

Yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa yang sedang terjadi dengan Amerika Serikat adalah sesuatu yang relatif. Ini disebabkan karena kemajuan ekonomi negara-negara lain telah lebih pesat (seperti Jepang, EC terutama Jerman Barat) dalam 40 tahun terakhir ini, terutama semenjak tahun 1970-an, selain karena Amerika Serikat sendiri mengalami berbagai kesulitan yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Faktor-faktor penghambat itu meliputi pendidikan yang tidak memadai, tingkat tabungan yang rendah, R & D yang tidak dipakai untuk industri sipil, defisit perdagangan karena konsumsi barang-barang impor yang terlalu tinggi, dan defisit anggaran belanja karena kebijakan makro yang salah, ditambah dengan anggaran pertahanan yang terus ditingkatkan.

Jangka waktu penurunan kekuatan dan pengaruh itu memang cukup lama, dan seperti dikatakan oleh Kennedy sendiri, tidak selalu berjalan secara garis lurus. Misalnya, Kerajaan Inggris diperkirakan telah menurun pada pertengahan akhir abad ke-18 karena kehilangan koloninya di Amerika, tetapi justru setelah itu di bawah Ratu Victoria mengalami kejayaan, sehingga masih dapat bertahan lebih dari 100 tahun hingga selesainya Perang Dunia Ke II pada pertengahan abad ke-20 ini. Begitu pula Kerajaan Romawi, yang masih bertahan tiga abad setelah Tacitus menyatakan kehancurannya, atau Kerajaan Habsburg masih bertahan 100 tahun setelah kekalahannya di Austerlitz.

Malahan menurut William Pfaff, Jepang, Jerman dan Perancis dapat kembali jaya setelah mengalami kekalahan-kekalahan yang kelihatannya pada waktu itu fatal. Hal yang sama dinyatakan pula oleh George Will, yaitu bahwa naik atau turunnya pengaruh suatu negara hegemon tidak hanya tergantung pada faktor ekonomi saja.

Akhirnya perlu dicatat bahwa kekuatan Amerika Serikat di masa mendatang sebenarnya akan tergantung dari reaksi para pemimpin dan rakyat Amerika Serikat sendiri: apakah mereka dapat diperbaiki kekuatan ekonominya sebelum betul-betul mencapai suatu *"point of no return"*. Kennedy sendiri berpendapat bahwa Amerika Serikat dapat melakukannya melalui *"burden sharing"* dengan sekutu yang lebih berarti, perbaikan struktur dari ekonomi yang sebenarnya masih terbesar di dunia, antara lain melalui peningkatan R & D, perbaikan budget dan posisi perdagangan, perbaikan pendidikan, penentuan strategi militer yang tepat dan konsisten untuk jangka yang panjang, dan keahlian diplomasi untuk mengimbangi kekurangan kekuatan militernya di masa depan.

Dewasa ini kebijakan-kebijakan Amerika Serikat di kawasan Pasifik-Asia cukup stabil. Karena dukungan yang bipartisan, baik pada tingkat administrasi ataupun di Kongres, semenjak tahun 1975 (dengan jatuhnya Vietnam Selatan) cukup terasa adanya konsistensi kebijakan untuk kawasan Pasifik-Asia. Kekecualian mungkin dirasakan pada awal administrasi Cater, yang mula-mula menghendaki penarikan mundur pasukan darat Amerika Serikat dari Korea Selatan, dan mengurangi kapasitas angkatan laut dan angkatan udara Amerika Serikat di Pasifik Barat sesuai janji-janjinya dalam kampanye pemilu kepresidenan tahun 1976.

Memang perang Vietnam telah menimbulkan keengganan untuk melibatkan pasukan-pasukan Amerika Serikat dalam suatu konflik lokal atau regional, apalagi di kawasan Pasifik-Asia. Sampai kini masih terjadi perdebatan mengenai kepentingan vital Amerika Serikat yang bagaimana yang dapat membenarkan keterlibatan tersebut sehingga bisa memperoleh dukungan rakyat Amerika Serikat. Setelah trauma perang Vietnam dapat diatasi, pada umumnya pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah dapat lebih seimbang.

Kalau diperhatikan dengan seksama, maka pada tahun 1980-an ini perhatian Amerika Serikat terhadap kawasan Pasifik pada umumnya telah meningkat karena berbagai alasan: (a) karena perdagangan Amerika Serikat dengan kawasan Pasifik pada tahun 1982 telah melampaui perdagangan dengan Atlantik; (b) meningkatnya imigran Asia ke Amerika Serikat, terutama dari Indocina; (c) suatu administrasi yang dipimpin seorang Presiden dan Menlu yang berasal dari pantai Pasifik dan karenanya mengenal negara-negara di sana; (d) perkembangan ekonomi Pasifik yang sangat pesat dan potensi yang meningkat terus dibandingkan dengan kawasan lain; (e) stabilitas kawasan yang relatif lebih baik daripada kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika ataupun Amerika Latin.

Administrasi Reagan telah mampu, secara global dan terutama secara regional di kawasan ini, meningkatkan kemampuan militer Amerika Serikat, khususnya yang berkenaan dengan kekuatan laut dan udara beserta persenjataannya yang mutakhir, sehingga untuk kawasan Pasifik-Asia persenjataan konvensional Amerika Serikat cukup memadai untuk menjamin kestabilan dan perdamaian kawasan.

Dengan latar belakang itu maka dapat dimengerti bahwa strategi pembangunan ekonomilah yang diutamakan dan vital artinya bagi kawasan ini. Karena itu pula masalah persenjataan nuklir tidak merupakan suatu isyu yang akut seperti di Eropa, karena tidak terdapat alergi nuklir yang gawat di kawasan Pasifik-Asia. Meskipun opini rakyat Jepang, karena pengalaman Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, tetap sensitif terhadap persenjataan nuklir, tetapi karena persoalannya tidak sampai menonjol, maka tidak pula sampai menjadi suatu perdebatan sengit di sana. □ **Bersambung**

Digitized by Google

Oleh : Maria Sugiharto

DE MAN VAN LEBAK, SASTRAWAN UNTUK DESA

Seratus tahun sudah Multatuli tiada. Dia Edward Douwes Dekker, adalah seorang sastrawan yang turut memberikan nama bagi khasanah sastrawan Indonesia, dengan karya besarnya **Max Havelaar**. Kini, eksistensinya mulai diperdebatkan. Apakah Multatuli adalah seorang pejuang, atau sastrawan, atau pembela rakyat kecil? Atau apakah Multatuli menulis Max Havelaar demi kepentingan perjuangannya pribadi? Apakah Multatuli benar-benar dapat disejajarkan dengan pejuang bagi rakyat, seperti kebanyakan pejuang bangsa Indonesia lainnya?. Multatuli yang kebetulan orang Belanda dan menjabat Asisten Residen di daerah Lebak, Banten, terkenal dengan protesnya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dan, di dalam bukunya yang terkenal Max Havelaar, banyak mengungkapkan keburukan-keburukan akibat praktek-praktek kolonial dan feodal dari para pejabat baik pejabat kolonial Belanda, maupun pejabat Indonesia yang feodalistis.

Tahun lalu, 1987, film mengenai Max Havellar yang berjudul **Saijah** dan **Adinda** mulai lolos sensor dan dipertunjukan di mana-mana, setelah mendekam di Badan Sensor Film selama sebelas tahun. Mengapa mendekam di Badan Sensor Film? Ramainya penonton berduyun-duyun menyaksikan film Max Havelaar tersebut, terlebih karena keingintahuan yang menggebu-gebu dari khalayak karena telah ditahannya film tersebut oleh fihak BSF. Memang, sesuatu yang dilarang, selalu menimbulkan daya tarik tersendiri. Dan demikian juga dengan Saijah dan Adinda. Pertanyaan lain timbul. Mengapa masyarakat penuh keingintahuan? Apakah masyarakat telah semua membaca buku Max Havelaar karangan Multatuli itu, yang sudah diterjemahkan oleh HB Jassin? Saya kira bukan itu.

De Man Van Lebak

Edward Douwes Dekker, terkenal dengan nama Multatuli, karena novel-

nya yang berjudul Max Havelaar, yang lebih banyak merupakan autobiografinya itu, dikenal dengan nama De Man Van Lebak, atau orang dari Lebak. Tidak ingin terlibat arus pro dan kontra, ataupun mempersoalkan bagaimana anggapan masyarakat terhadap Havelaar, yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan keragu-raguan, — sama halnya dengan keragu-raguan terhadap R.A. Kartini, — dimana beberapa pihak mulai meragukan adakah Kartini benar-benar pejuang kedudukan wanita, atau hanya mitos yang dibuat oleh orang-orang kolonial?

Terlepas dari itu semua, ambillah "Liding dongeng" atau inti sari dari cerita mengenai Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli, maka secara makro bisa dipandang kedudukan rakyat pada jaman kolonial dan feodal, lebih-lebih mereka berada di desa, serta betapa seseorang menjadi penguasa atau pejabat, yang turun temurun, masih saja tersisa pendapat bahwa pejabat atau pemimpin haruslah orang kaya. Sang pemimpin yang juga feodal itu mengejar kekayaan demi kedudukannya, dan karena dia bukan saudagar, maka ia harus memeras rakyat untuk menjadi kaya. Itulah yang diserang Multatuli.

Wartawan, kolumnis terkenal Mahbub Junaedi mengingatkan tentang tulisan P.K. Ojong almarhum di dalam Kompasiana yang dimuat di dalam Kompas 26 Mei 1968. Maka tulis Ojong pada waktu itu sebagai berikut: "Setiap kali kami kembali dari peninjauan di daerah atau mendengar laporan orang lain tentang keadaan daerah, kami teringat Multatuli. Dan setiap kali pula kami bertanya pada diri sendiri, kapankah sastrawan kita turun ke desa, ke daerah? Bukan untuk berdiam disana akan tetapi untuk melihat dari dekat dan turut merasakan penderitaan rakyat kecil. Mungkin mereka akan mendapatkan ilham untuk menulis pula seperti Multatuli. Sebab, Saijah dan Adinda (judul lain untuk buku Max Havelaar) masih tetap ada, meskipun sudah seabad kemudian, meskipun keadaan berlainan dan meskipun kita sudah merdeka. Mengapa Saijah dan Adinda masih ada? Karena mentalitas kita pada umumnya masih sama. Sama seperti pertengahan abad ke 19 ketika karya Multatuli ditulis.

Dalam abad ke 19 yang feodal, orang berpikir bahwa pemimpin itu harus kaya. Sang pemimpin yang juga feodal, mengejar kekayaan itu. Karena ia bukan saudagar, maka ia harus memeras rakyat untuk menjadi kaya. Dan itu yang diserang Multatuli. Sekarang juga masih ada pandangan hidup di desa dan di pedalaman, bahwa pemimpin itu mesti kaya. Rumah pribadinya mesti mewah dan besar. Ia memeras rakyat banyak, tapi dalam pergaulan sehari-hari ia ramah tamah. Kalau kita dekat dengan dia, kita bisa kecipratan rejeki. Rejeki hasil pemerasan rakyat. Dan, banyaklah orang yang suka mendekati, suka menjilat pada pemimpin, pada Bupati yang berkuasa itu. Pendeknya tidak ada bedanya dengan pola kebudayaan feodal abad-abad dulu. Dari ratusan ribu penderita abad ke 19, hanya satu di-

Digitized by Google

kenal dunia, yaitu Saijah dan Adinda. Bukan berkat pers, tetapi berkat kepandaian menulis dari sastrawan Multatuli. Kalau sastrawan-sastrawan kita turun ke desa, mungkin tulisan mereka yang indah, yang mengesankan, yang mengetuk hati kita, dapat membangkitkan perubahan pula. Tulisan wartawan yang tidak literer rupanya tidak cukup. Tetapi tentu sastrawan yang dirinya sendiri tidak feodal, yang anti feodal, yang demokrat, dapat menulis seperti karya Saijah dan Adinda, dan berusaha merombak mentalitas feodal itu. Adakah sastrawan Indonesia yang suka turun ke desa dan jiwanya anti feodal?

Demikian Ojong dalam tahun 1968, dua puluh tahun yang lalu.

Sungguh penting meresapkan tulisan Ojong almarhum itu, karena sastrawan Multatuli memang pantas dikenang. Sentuhan kepada kehidupan pedesaan dan keinginan Memberantas feodalisme dan kolonialisme tercermin di dalam Max Havelaar, serta cara mengemukakan di dalam pidato-pidato Havelaar di muka para pemuka adat dan para pejabat Lebak.

Pidato yang disampaikan ke hadapan para pemuka dan pimpinan daerah (Bupati, dan pengemuka desa serta pejabat lainnya). Pada waktu itu kedatangannya di Lebak untuk menjadi Asisten Residen, sangat menarik untuk disimak, yang juga disampaikan dengan gaya yang agak teatral. Pidato yang disampaikan dalam bahasa Melayu, memberikan corak tersendiri, karena seandainya hal itu diucapkan di dalam bahasa Barat, akan kehilangan maknanya karena sifatnya yang dibuat-buat. Dengan bahasa Melayu yang mengalir, mempunyai suatu keistimewaan tersendiri. Ungkapan bahasa Timur yang sederhana, tapi penuh mengandung tenaga.

Dikatakan Havelaar kurang lebih demikian: "Tuanku Raden Adipati bupati Banten Kidul dan sekalian para raden Demang, yang menjadi kepala distrik di daerah ini, tuan Raden Jaksa yang bekerja menegakkan keadilan dan tuan Raden Kliwon yang menjalankan kekuasaan di ibukota dan sekalian para Raden, Menteri-menteri, serta sekalian kepala-kepala daerah Banten Kidul, terimalah salam saya, serta salam takzim saya."

Tatkala Gubernur Jenderal memerintahkan saya untuk datang kepada tuan-tuan menjadi asisten residen di daerah ini, hati saya gembira. Dari tulisan-tulisan yang saya baca, banyak hal yang baik di Banten Kidul. Rakyat tuan memilih sawah di lembah-lembah dan ada pula sawah di gunung-gunung. Tuan-tuan ingin hidup damai. Saya gembira, karena di wilayah mana saja saya bertugas, mendapatkan hal-hal yang baik. Saya lihat bahwa rakyat tuan miskin. Tetapi hal inilah yang menggembirakan saya. Sebab saya tahu bahwa Allah cinta orang yang miskin dan bahwa ia melimpahkan kekayaan kepada orang yang hendak diujinya. Kepada orang miskin, hendak diutusnya orang yang menyampaikan firmanNya supaya mereka bangkit di dalam kemelaratan. Bukankah Dia mencurahkan hujan dimana batang layu mengering dan meneteskan embun dalam kelopak bunga kehausan? Tidakkah hati saya akan menggejolak karena terpilih antara yang banyak untuk merobah keluhan menjadi doa dan ratapan menjadi tasyakur?

Saya dikirim kemari untuk menjadi sahabat tuan-tuan, menjadi saudara yang lebih tua. Apakah tuan tidak memberi tahu adik tuan, jika tuan melihat ada harimau di jalan yang akan dilaluinya? Kepala-kepala negeri Lebak, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan dan negeri kita miskin,

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
"DR. SOETOMO"
SURABAYA

Mengucapkan

Selamat Idul Fitri 1408 H.
Mohon Ma'af Lahir Bathin

Digitized by Google

Multatuli

karena kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Di Cikandi dan Bolang dan di daerah Kerawang dan di tanah-tanah sekitar Betawi, banyak tinggal orang-orang yang lahir di negeri kita, dan yang meninggalkan negeri kita. Mengapa mereka mencari kerja jauh dari tempat mereka menguburkan orang tuanya? Mengapa mereka lari dari desa dimana mereka disunat? Mengapa mereka lebih suka mencari keteduhan pohon yang tumbuh di sana, dari pada naungan hutan kita? Nun di Barat laut, seberang laut, banyak orang yang sebenarnya anak kita, meninggalkan Lebak untuk mengembara di daerah asing, membawa keris dan kelewang dan senapan. Dan mereka mati dengan menyedihkan karena di sana ada kekuasaan pemerintah yang mengalahkan pemberontak. Saya bertanya kepada tuan-tuan, kepala negeri Lebak, mengapa banyak yang pergi untuk dikuburkan ditempat kelahirannya? Mengapa pohon bertanya: "dimana orang yang kulihat bermain sebagai anak kecil di kakiku dulu?"

Kiasan-kiasannya selalu diambil dari kehidupan sekitarnya, dan baginya sungguh-sungguh menjadi alat pembantu untuk justru menjelaskan apa yang dimaksudkan Dalam menutup pidatonya, dia katakan misalnya: "Saya ingin bersahabat dengan tuan-tuan dan karena itu saya minta tuan-tuan menganggap saya sebagai sahabat. Siapa-siapa yang sesat, percayalah bahwa saya akan mengadili dengan lunak. Saya tidak akan menghukum berat dalam kesalahan-kesalahan pekerjaan atau kelalaian-kelalaian biasa. Hanya dimana kelalaian menjadi biasa, saya akan mencegahnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang lebih besar ... penganiayaan dan penindasan, saya tidak akan membicarakan... itu tidak akan terjadi bukan, tuan Adipati?

"Oh tidak, tuan asisten residen, itu tidak akan terjadi di Lebak'"

Havelaar, yang sastrawan.

Karena nuraninya yang membela rakyat, Havelaar, dalam kedudukannya di beberapa tempat sebagai asisten residen, kerap mendapat "hukuman" dari pemerintah kolonial, sehingga mengalami pemecatan atau pemindahan tempat bertugas. Di dalam menunggu, kadang-kadang dia kehabisan uang untuk hidup, dan dari syair-syair yang dia tulis, kadang-kadang menghasilkan uang. Ada peristiwa dimana dia jengkel kepada pemerintah karena harus membayar dua puluh gulden untuk langganan majalah, kopiist dimana kwitansi itu harus dikembalikan ke Betawi. Karena jiwa protesnya, Havelaar menuliskan syair di balik kwitansi tersebut, sebagai protes kemiskinannya":

(Syair ditulis didalam bahasa Perancis)

Vingt florins ... quel trésor, Adieu, litérature
Adieu Copiste, adieu, Trop malhereux destin
Je meurs de faim, de froid, d'ennui et de chagrin ....
Vingt florins ... Je serais mieux chaussé
Mieux nourri, mieux logé; J'en ferais bonne cherè ....
Il faut vivre avant tout, soit vie de misere
Le crime fait la honte, et non la pauverte

Bahasa Indonesianya :

Dua puluh gulden alangkah banyak
Selamat tinggal sastra
Selamat tinggal Kopiist (majalah yang terbit di Betawi yang dia langganan).
Nasibku malang, aku mati kelaparan
Hatiku sedih, kesal dan geram ....
Dua puluh gulden, dua bulan makan
Kalau aku punya sekian ... kupakai sepatu bagus
Kumakan makanan enak, lebih indah tempatku tinggal
Aku kan hidup senang ....
Yang utama adalah hidup, sekalipun hidup melarat
Kejahatan memalukan, bukan kemiskinan.

Kembali kepada tulisan mendiang P.K. Ojong, apakah setelah dua puluh tahun tulisannya (tahun 1968), keadaan masih sama? Adakah setelah dua pertiga generasi, masih belum ada sastrawan yang dapat mengangkat kepermukaan persoalan yang diderita oleh daerah kecil dan terpencil yang membutuhkan perhatian, dengan laporan leterer yang akan jauh lebih menarik untuk didengar dan kemudian diperhatikan dan diamati? Majalah berbahasa daerah, banyak partisipasinya di dalam hal ini, meskipun bahasa daerah yang dipergunakan sebagai sarana di dalam media semacam itu, kadang-kadang dianggap kurang komunikatif karena hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berbahasa daerah sesuai dengan bahasa yang dipakai media itu.

Hal ini tidaklah benar. Banyak media berbahasa daerah yang dapat dinikmati serta diresapi, dan mengungkapkan banyak masalah serta persoalan yang kadang-kadang rawan, tetapi dikemukakan di dalam kolom-kolom yang menarik, atau di dalam cerita-cerita bersambung atau cerita pendek, dimana misinya sangat kena, seperti hasil karya sastra yang dirintis oleh Multatuli. Cerpen dan kolom menyuguhkan masalah itu, dan kerap kali dari penyuguhan-penyuguhan secara populer demikian (kendati berbahasa daerah), diketahui bahwa banyak masalah, soal di tempat-tempat terpencil, atau desa-desa, yang rakyatnya sudah kritis, tetapi dipimpin oleh pamong yang feodalistis, dan masih seperti yang dikemukakan mendiang Ojong, ialah pemimpin harus kaya, dan karena pemimpin bukan saudagar, kekayaan dapat diciptakan tidak dari persaudagaran. □

Digitized by Google

Menyimak Teori Pers Secara Jeli

Judul Buku : Empat Teori Pers
Penulis : Fred S Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm
Penerbit : Intermasa, Jakarta
Tahun : 1987
Tebal : 180 Halaman

Yang disebut sebagai teori, seperti telah dialami oleh banyak pihak, jika dibenturkan dalam realitas sehari-hari ternyata ada kalanya atau bahkan sering terjadi kontradiksi. Gambaran-gambaran verbal yang dilontarkan justru tidak sinkron dengan operasionalisasinya. Konteks ini wajar mengingat bahwa hakekat dari teori itu tidak pernah sempurna, absolut dan tidak pernah tak terbatas dimensi waktu dan ruang. Kiranya terlampau naif jika mulai main kaku-kaku-an.

Menyimak teori pers secara jeli, tidak pernah akan berhasil apabila mulai memihak pada salah satu definisi atau aturan yang ada. Lebih-lebih lagi jika mulai berprasangka atau apriori termasuk menuduh bahwa sesuatu teori dikategorikan sebagai tidak mendidik, tidak manusiawi dan menyesatkan.

Buku ini secara eksplisit mengajak pembaca untuk tidak cepat-cepat berprasangka buruk terhadap suatu teori pers. Betapapun lemahnya teori tersebut dan betapapun kejinya gagasan-gagasan penciptanya serta pengikut-pengikut (aliran)-nya. Yang diperbincangkan adalah adanya teori pers otoritarian, libertarian, tanggung-jawab sosial dan teori pers Soviet Komunis. Dua yang pertama digubah oleh seorang dekan pensiun *College of Communication Arts,* Universitas Michigan Fred S Sibert. Lantas berikutnya masing-masing direka oleh seorang dekan pula dari College of Communication, Universitas Illinois, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm seorang direktur *Institute for Communication Research,* Universitas Stanford.

Sejak awal komunikasi massa — di era renaisans, cuma ada dua atau empat teori dasar tentang pers — yang diakui dunia, tergantung bagaimana cara menghitungnya. Dalam buku ini ditulis empat essei perihal teori tersebut dan berusaha ditunjukkan bahwa dua teori terakhir (teori tanggung jawab sosial dan komunis Soviet) semata-mata merupakan pengembangan dan modifikasi dari dua yang pertama. Teori komunis Soviet hanyalah pengembangan teori otoritarian yang lebih dulu muncul dan apa yang dinamakan teori tanggung jawab sosial hanyalah sebuah modifikasi dari teori libertarian. Tetapi karena orang Soviet telah menghasilkan sesuatu yang begitu berbeda dengan otoritarianisme yang lebih tua darinya dan sesuatu yang begitu penting untuk dunia masa kini, dan karena teori tanggung jawab sosial merupakan jalan yang kini ditempuh pers Amerika Serikat, maka dipandang perlu memisahkan mereka menjadi empat teori, sementara mencoba mencari hubungan antara keempat teori tersebut.

Mitra Kebenaran

Dalam teori Otoritarian, kebenaran

EMPAT TEORI PERS

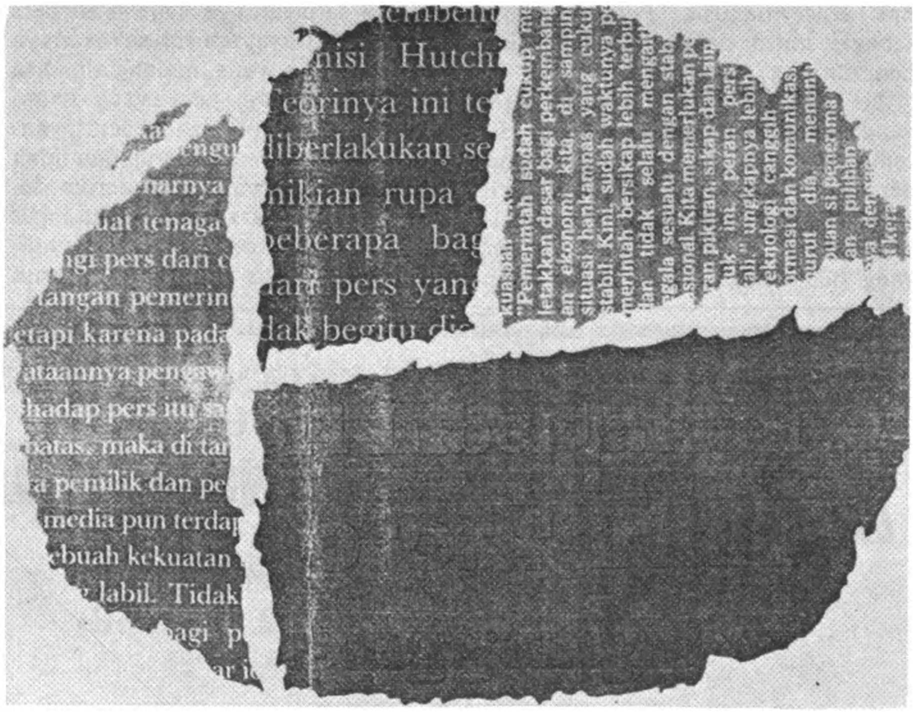

Penerbit PT Intermasa

Digitized by Google

dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan begitu, pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu — sekitar era renaissance — menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang oleh pengusaha itu dianggap perlu diketahui rakyat dan perihal kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Cuma dengan izin khusus pers boleh dimiliki swasta dan izin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggung jawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan.

Dalam kerangka teoritis yang terbingkai dengan isme liberatarian, manusia tidak lagi dianggap sebagai makhluk tergantung yang perlu dituntun dan diarahkan, melainkan sebagai makhluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, antara alternatif yang lebih baik dengan yang buruk, jika disejajarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dan pilihan-pilihan alternatif. Kebenaran bukan lagi monopoli penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak azasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam menggaet kebenaran.

Teori pers tanggung jawab sosial yang paling penting untuk segera direnungkan adalah yang menyangkut perasaan tanggung jawab yang baru sama sekali. Pertama-tama yang harus disadari ialah bahwa surat khabar yang benar-benar besar harus lebih besar dari setiap atau gabungan dari seluruh kata hati redaksinya. Artinya, jika surat khabar tersebut berucap, ucapannya adalah perkaitan orang yang lebih bijaksana, jauh lebih logis, lebih seimbang, menghibur, penuh pengertian dan lebih jujur daripada orang-orang redaksi, yang dibatasi oleh kelemahan dan kesalahan sebagai manusia. Surat khabar yang benar-benar besar harus tetap tak terkekang oleh setiap atau seluruh kelompok dengan kepentingan tertentu.

Dalam suatu kesempatan langka wartawan Amerika Serikat bertemu dengan kuli tinta Uni Soviet, menurut Wilbur Schramm pastilah pembicaraan mereka akan menarik, sekaligus menyebalkan. Karena pada menit-menit pertama saja sudah jelas bahwa kedua kerangka referensi mereka tidak sama. Si orang Amerika merasa dianugerahi dengan pers-nya yang bebas, dan cenderung bersimpati dengan rekan mereka dari Soviet yang menderita di bawah sistem pemilikan oleh negara, penyensoran dan propaganda. Duta dari Soviet — di lain pihak — mengaku bahwa dialah yang diberkati dengan satu-satunya kebebasan pers yang sebenarnya, sementara rekannya dari Amerika yang malang dipaksa melayani sistem pers yang mata duitan, dikontrol oleh kepentingan-kepentingan tertentu, korup dan tidak bertanggung jawab. Si Amerika dengan bangga bicara tentang kemampuan pers dan kantor beritanya menyajikan berita-berita aktual dari seluruh penjuru dunia, serta kesanggupan media massa untuk menghibur dan membuatnya gembira. Si Soviet berpendapat bahwa sebagian besar hiburan di media Amerika itu *"omong kosong"*, tidak ada faedahnya untuk sebuah bangsa yang besar. Dan, begitulah seterusnya, sampai masing-masing mundur, sama-sama curiga bahwa lawan bicaranya berkepala udang.

Potret realitas yang berkembang dalam masing-masing teori pasti memiliki dimensi yang kira-kira identik. Sama-sama memiliki aspek positif tetapi besar peluangnya pula untuk memiliki sifat destruktif dan mencelakakan. Sebenarnya, justru personal, situasi dan kondisilah yang banyak bertanggung jawab terhadap kesuksesan sebuah teori. Dengan kata lain jika teori muluk tetapi pelaksanaannya tidak muluk alias tidak bermutu, mustahil menghasilkan kesejahteraan yang komplit.

Buku ini berhasil untuk menggiring pembaca dan menuntunnya, kendati tidak dengan cara yang ekstrim, pada upaya pemahaman empat teori pers secara lebih tuntas. Tidak setengah-setengah. Ada potensi, setiap pembaca yang serius membacanya akan lebih terangsang membaca karya-karya sejenis dalam rangka memperkaya perangkat teoritis. Ini penting demi penciptaan iklim ilmiah yang positif bagi dunia pers pada umumnya dan pers Indonesia dalam skala yang lebih mikro. Lebih-lebih lagi guna memikirkan langkah operasional. □ (AP Nugroho)

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
BADAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA PARKIR
(BP-2 PARKIR)

Mengucapkan
Selamat Idul Fitri 1408 H.
Mohon Ma'af Lahir & Bathin

Digitized by Google

Hari-hari penuh kepastian...

baca saja

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya no. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 Sal), 797020
Teleks 47459 Eska JKT.
Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat III Telp. 621691 - 646146 Jakarta Barat.
Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta no. 13 Telp 56213 Bandung.
Perwakilan Jawa Tengah & D.I.Y. Jl. Lamper Sari 12A Telp. 313113, Semarang.
Perwakilan Sumatera Utara Jl. Timor 14C Telp. 515089 Medan
Perwakilan Jawa Timur & Bali Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 814329, Surabaya
Sub. Perwakilan Bali Jl. Imam Bonjol 99 Telp. 3317 Denpasar

Digitized by Google

Protein 12% — 13%
BOGASARI cap CAKRA KEMBAR
khusus untuk roti dan
mi istimewa

Protein 10% — 11%
BOGASARI cap SEGITIGA BIRU
istimewa untuk kue
donat dan bakpao

Protein 8% — 9%
BOGASARI cap KUNCI
utama untuk biskuit
dan tart

Remaja yang sehat dapat menikmati masa-masa santai yang memberikan mereka gairah hidup. Untuk menjaga kesehatan anak-anak remaja Anda, gizi dalam makanan sehari-hari harus dipenuhi. Tepung terigu Bogasari mengandung unsur-unsur gizi yang tinggi dan menjamin mutu.
Agar anak-anak Anda dapat menikmati masa-masa santai yang sehat, berikanlah mereka setiap hari roti atau aneka olahan dari tepung terigu Bogasari!

bs
FLOUR MILLS

p.t. bogasari flour mills

Head office:
Level 18 Wisma Indocement Kav. 70-71
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta — Indonesia
Phone : 5782500 Telex : 44506 JKT
Cable : SARIMILL JAKARTA P.O. Box 4118

Factories:
Jalan Sindang Laut Tanjung Priok, Jakarta
Phone: 492908

Jalan Nilam Timur 16 Tanjung Perak, Surab
Phone: 293081-293082-293083
Telex: 31396 BOGASARI SB
Cable: SARIMILL SURABAYA P.O. Box 203

Digitized by Google

Digitized by Google

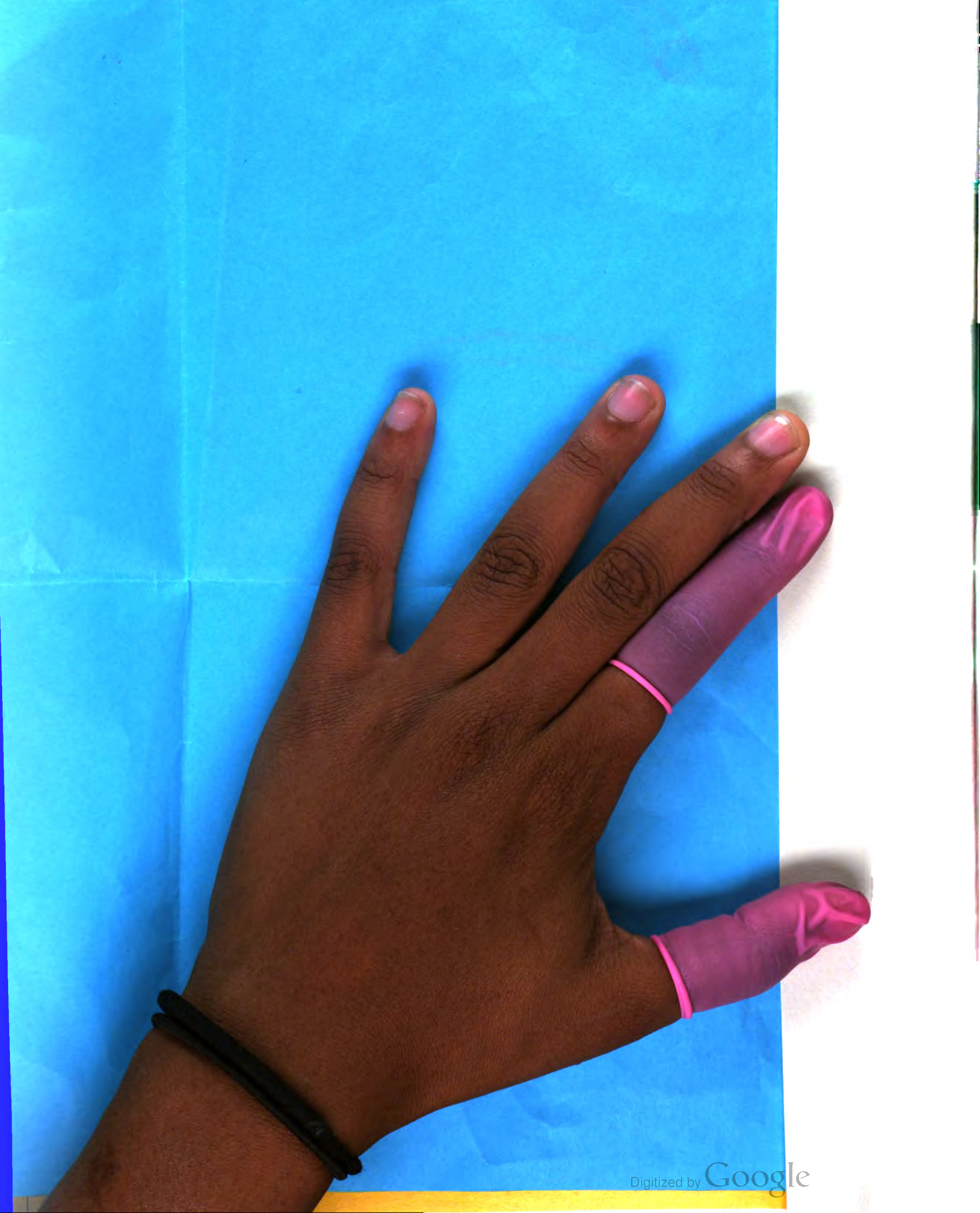

Digitized by Google

No 52 Juni-Juli 198

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

OPTIMISME NON MIGAS

Majalah Bulanan Dewan ... Karya

Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT**.
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI**.
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA**.
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Kewaspadaan Yang Proporsional

FOKUS

Meningkatkan Hasil Pembangunan Sesuai Harapan Rakyat, wawancara dengan Ketua Umum Golkar Sudharmono SH.

LAPORAN UTAMA

Optimisme Baru Di Sektor Nonmigas. Lonjakan ekspor beberapa komoditi nonmigas melegakan banyak pihak. Peluang emas ini ternyata bermula dari rangkaian upaya deregulasi dan debirokratisasi. Bagaimana pula tantangan dan peluangnya? Ikuti pendapat Ir Trisura, Pande Raja Silalahi dan Ir Tati Sumiarno.

LAPORAN KHUSUS

Berita-berita tentang PKI sempat diramaikan surat khabar nasional. Isu penyusupan dan tudingan orang lain "tidak bersih", bermunculan. Apakah ini suara yang mewaspadai atau ada apa? Ikuti pendapat Menko Polkam Sudomo dan Menpen Harmoko serta sejumlah pengamat.

NASIONAL

Sejumlah Masalah Dalam Sorotan FKP; Mereka Yang Menggondol Adipura Dan Kalpataru; Mendagri Lantik Sejumlah Gubernur dan AMPI Bukan Hanya Meminta Tapi Harus Memberi Arti.

KOMENTAR

ORGANISASI

Diklat Kader Fungsional; Gairah Dari Bawah Ke Atas Di Sumut, DIY dan Jateng, Sejumlah Daerah Rampungkan Musda serta Optimisme Sumbar Menghadapi Musda.

SPEKTRUM

Cosmas Batubara menulis tentang Kebijaksanaan Pemerintah Di Bidang Ketenagakerjaan, Kedudukan Wanita dan Wanita Pekerja Dalam Negara Pancasila, oleh Soekarno D serta Sistim Bagi Hasil Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, oleh Djoko Mulyono.

INTERNASIONAL

Pandangan Regional Tentang Perkembangan Strategis Kawasan Pasifik-Asia Menjelang Abad Ke-21, oleh Yusuf Wanandi.

SENI & BUDAYA

Marcel Marceau Yang Pantomime oleh Maria Sugiharto, serta Semoga Budaya Bali Tetap Menjadi Idola.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

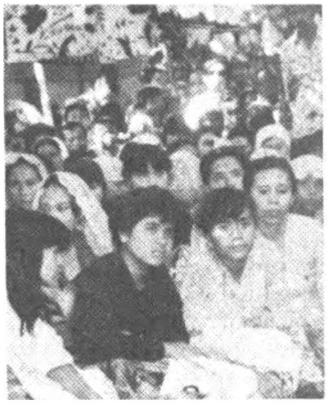

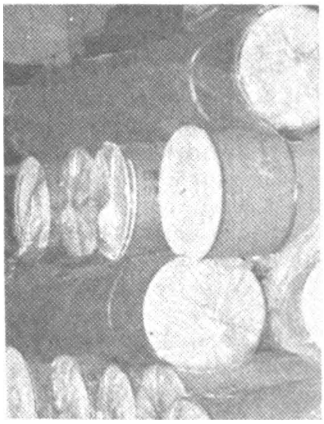

Ny. TS. Darsoyo

Digitized by Google

Kewaspadaan Yang Proporsional

Bahaya komunisme, terutama dalam kaitannya dengan sisa-sisa G30S/PKI, dibicarakan intensif oleh banyak pihak belakangan ini. Khalayak dapat mengikuti berbagai lontaran pendapat sejumlah tokoh politik dan masyarakat mengenai topik tersebut, terutama melalui beberapa media cetak. Apa dan bagaimana reaksi masyarakat sendiri secara umum, sejauh ini tidak terekam. Tidak tampil. Ini berbeda dengan keadaan di masa lampau, pada masa-masa awal Orde Baru. Waktu itu antusiasme dan keikutsertaan masyarakat dalam membicarakan masalah serupa amat menonjol.

Akan tetapi, terlepas dari keadaan penerimaan atau pola reaksi masyarakat tersebut, lontaran-lontaran pernyataan mengenai bahaya komunisme kali ini pada bagian tertentu juga menunjukkan jurus-jurus baru yang agak berbeda dengan sebelumnya (Dengan mengecualikan pendapat beberapa tokoh terkemuka pejuang Orde Baru yang tak perlu diragukan integritasnya). Dulu pernyataan-pernyataan terbuka umumnya didahului atau berbarengan dengan peristiwa terungkap dan atau tertangkapnya penyusup-penyusup sisa G30S/PKI baik di tubuh lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintahan maupun di tubuh Abri sendiri. Dan keberhasilan pengungkapan itu, dalam banyak hal juga karena partisipasi masyarakat dengan memberikan laporan langsung kepada aparat keamanan, kendati bukannya tak ada ekses yang antara lain berupa fitnah. Kini, sebagian dari lontaran pernyataan mengesankan dengan kuat bahwa ada sisa-sisa G30S/PKI dan atau orang-orang berhaluan komunis berhasil memperoleh posisi penting dalam pemerintahan. Tapi, tidak ada pihak yang sejauh ini memberikan laporan langsung berupa bukti atau indikasi mengenai siapa-siapa tokoh penyusup yang dimaksudkan. Letak dimensi waktu pun kini memberi makna lain. Momentum pelontaran pernyataan itu di sekitar SU MPR dan pembentukan kabinet baru, sengaja atau tidak, bahkan dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat asosiatif — yang efek lanjutnya tak selalu bisa ditebak.

Barangkali, bila hal serupa dilontarkan dua puluh atau lima belas tahun yang lalu, maknanya jelas berbeda dengan saat ini, yakni setelah ada jarak rentang waktu 20 tahun lebih setelah pecahnya peristiwa G30S/PKI. Maka untuk lontaran serupa kini, mau tak mau ada nuansa baru yang berbeda. Ini perlu dipikirkan bersama lebih teliti, lebih hati-hati. Bila sikap lebih teliti dan lebih hati-hati ini dipilih, maka tanggapan Menko Polkam menjadi terasa amat relevan dan pas. Bekas Kepala Staf Kopkamtib ini menghimbau agar tudingan PKI jangan terlalu mudah dilontarkan terbuka melalui pers — tanpa mengecilkan arti pers — tetapi bilamana ada pihak yang merasa memiliki data, petunjuk apalagi bukti mengenai keterlibatan seseorang, hendaknya segera melaporkan kepada aparat keamanan. Suatu laporan kepada yang berwajib bernilai tinggi dan membantu keamanan politik, tetapi sekedar suatu lontaran pernyataan yang mensuggestikan adanya tokoh PKI berhasil memperoleh posisi penting dalam pemerintahan bisa menjadi 'sekedar' isu politik yang perlu dipertanyakan lebih jauh arah dan tujuannya, bahkan itikad di belakangnya.

Ada beberapa hal yang bisa kita telaah kembali berdasarkan pengalaman yang lampau, yang akan menunjukkan kadar relevansi pernyataan Menko Polkam dalam masalah kewaspadaan terhadap bahaya laten PKI.

Berdasarkan sejarahnya, sejak semula, jauh sebelum G30S sendiri, PKI memang telah melancarkan semacam perang sosial politik. G30S sendiri hanyalah sentuhan akhir atau *final touch*. Setelah pemberontakan Madiun, dalam beberapa tahun PKI bisa tampil kembali dan kemudian memperoleh legitimasi melalui Pemilihan Umum 1955. Perolehan suara yang tidak kecil waktu itu — peringkat keempat — membuat PKI diperhitungkan, termasuk oleh Presiden Soekarno pencipta bangunan politik Nasakom. Adalah menonjol bahwa dengan bangunan politik Nasakom justru PKI berada di atas angin dalam memperbesar faktor desintegratif bangsa dengan merangsang ketegangan sosial. Tapi ketika *final touch* di akhir September 1965 gagal, tiada pilihan lain bagi PKI kecuali melanjutkan perang sosial politik tersebut. Dari berbagai proses peradilan atas tokoh-tokoh PKI arah inipun terungkap. Maka kita dapat menyaksikan betapa PKI akan tetap memperdalam jurang atau memperbesar faktor desintegratif yang ada — kesukuan, perbedaan agama dan ras, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. PKI juga akan memanfaatkan peluang-peluang temporer yang terjadi karena kontradiksi-kontradiksi sesaat yang antara lain terjadi sebagai akibat persaingan kepentingan dan ambisi perorangan atau kelompok di antara barisan Orde Baru sendiri. Setiap saat, pada setiap kesempatan.

Selain itu, sisa-sisa PKI pun bahkan bisa memanfaatkan suasana anti PKI untuk kepentingan perang sosial politiknya. Mereka tidak segan-segan menggunakan isu anti PKI dan tuduhan terlibat atau berindikasi PKI untuk menimbulkan suasana saling curiga di antara barisan Orde Baru penentang PKI. Antara lain dengan menuding orang yang sebenarnya anti PKI dengan tuduhan PKI. Bersamaan dengan itu, PKI 'diuntungkan' pula oleh adanya orang-orang bukan PKI yang ikut memanfaatkan suasana anti PKI dengan melancarkan tuduhan 'berindikasi' PKI kepada orang lain yang tidak disenangi berdasarkan suatu alasan dan motif pribadi atau niat 'menggeser kedudukan'. Dan cukup banyak korban yang pernah jatuh karena fitnah semacam ini. Maka kewaspadaan dalam menghadapi gerakan bawah tanah PKI ini, semestinya berarti pula kewaspadaan untuk tak terlalu mudah menuduh seseorang sebagai PKI sebelum ada bukti atau setidaknya indikasi yang cukup jelas dan kuat. Supaya para penentang PKI tidak justru tergelincir jadi 'kanibal'. Tegasnya, suatu kewaspadaan yang proporsional. Bukan sekedar lontar-melontar isu, entah demi popularitas, entah untuk tujuan lain!

Bahwa kewaspadaan tidak bisa dikendorkan, sudah merupakan keharusan, sebab salah satu musuh utama Orde Baru sejak awal memanglah sisa-sisa G30S/PKI — disamping korupsi, manipulasi dan segala bentuk ketidakadilan. Apalagi karena landasan 'perjuangan' PKI adalah ideologi, maka perang sosial politik itu pasti akan dilanjutkan oleh sisa-sisa PKI yang sebagian diantara mereka belum kita ketahui. Dan karena mereka kini adalah illegal, mereka tentunya akan memakai pula cara-cara illegal dan rahasia. Untuk mematahkan suatu gerakan rahasia, maka menghadapinya haruslah secara rahasia pula melalui aspek sekuriti, intelijens dan kontra intelijens. Jelas ini tugas aparat keamanan — yang jauh lebih profesional dari siapapun — dengan bantuan semua pihak, termasuk pers. Tentu tidak ada pihak yang mampu lebih baik daripada aparat keamanan dalam hal ini. Akan tetapi, pada sisi lain adalah amat mendasar peran serta masyarakat untuk menjalankan dan memelihara suatu kehidupan sosial politik dan ekonomi yang adil dan benar, sehingga tak tercipta peluang dan keleluasaan bagi sisa-sisa PKI melancarkan perang sosial politiknya!•

Digitized by Google

Wawancara Dengan Ketua Umum Golkar Sudharmono SH

Tantangan Kita, Meningkatkan Hasil Pembangunan Sesuai Harapan Rakyat

Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono SH belum lama ini meluangkan wawancara dengan LKBN ANTARA dan Reuters, bertempat di Istana Wakil Presiden, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta. Berikut adalah jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ANTARA dan Reuters sebelumnya. Melihat pertanyaan-pertanyaan kedua kantor berita saling melengkapi, Sudharmono memutuskan memberikan jawaban sekaligus untuk keduanya.

Tanya: Bagaimanakah Bapak melihat pembangunan "mid term" di Indonesia dalam pengertian memperkuat tumbuhnya lembaga politik, sistem hukum dan demokrasi? Apa sebab Golkar menentang usul untuk diizinkannya organisasi partai pada tigkat desa?

Jawab: Dalam menanggapi pertanyaan anda ini sebaiknya saya tegaskan kembali konsepsi dasar Orde Baru sejak lahirnya, ialah konsepsi yang bertekad menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Dasar Negara Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu maka kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ditata berdasar atas demokrasi, konstitusi dan tegaknya hukum. Atas dasar nilai-nilai yang kita anggap luhur dan benar itu kita laksanakan pembangunan nasional di segala bidang secara berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Pembangunan nasional di segala bidang itu, memang menitik beratkan pada bidang ekonomi, namun sama sekali tidak mengabaikan bidang-bidang yang lain, khususnya di bidang politik. Pembangunan dalam bidang politik kita usahakan dan telah berhasil menciptakan sistem kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ialah apa yang kita namakan istem mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan untuk membentuk kelembagaan negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, yang kesemua kelembagaan itu telah disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-undang yang bersangkutan, dan telah berfungsi sesuai dengan tugas lembaga-lembaga tersebut menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Sudharmono

Pembangunan sistem nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang terus kita lembagakan dan kita tingkatkan bobot pelaksanaannya selama ini.

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang terus kita lembagakan dan kita tingkatkan bobot pelaksanannya selama ini.

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan negara ada di tangan rakyat (demokrasi) dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan Golongan-golongan yang ditetapkan dengan aturan Undang-undang", kita telah memiliki berbagai undang-undangnya untuk melaksanakan sistem tersebut, yang berupa Undang-undang Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, Undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menetapkan bahwa ketiga organisasi politik tersebut memiliki kedudukan, hak dan

Digitized by Google

kewajiban yang sama, antara lain turut serta dalam Pemilihan Umum untuk memilh wakil-wakil rakyat untuk duduk di MPR, DPR dan DPRD. Seperangkat perundang-undangan di bidang politik tersebut telah beberapa kali disempurnakan, yang trakhir pada tahun 1985 sebagai pelaksanaan dari tekad kita bersama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Demikian pula sesuai sistem nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPR sebagai pemegang kedaulatan negara yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum dalam sidang umumnya bertugas menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan memilih Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden. Ketentuan ini pun telah berhasil dilaksanakan dengan baik setiap 5 tahun sekali dalam sidang umum MPR sejak Sidang MPR tahun 1973 sampai sekarang telah berlangsung 4 kali. Kita semua berharap dan berkeyakinan bahwa sistem mekanisme seperti yang diuraikan tadi akan makin memasyarakat dan baku, sehingga akan merupakan landasan yang kokoh di bidang politik untuk melanjutkan pembangunan yang makin meningkat.

Kelembagaan politik yang diatur dalam Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya juga makin terkonsolidasi dan makin berfungsi dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, makin mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang politik.

Mengenai sikap Golkar tentang struktur organisasi politik sampai di desa, Golkar tetap berpegang pada konsepsi Orde Baru dalam rangka menyederhanakan organisasi kekuatan politik, baik jumlahnya: hanya 3 organisasi politik; prinsip dan asasnya: prinsip organisasi kader — bukan organisasi massa —, yang harus menganut keanggotaan perseorangan, dan asas Pancasila sebagai satu-satunya asas; maupun soal struktur organisasinya: sampai pada Daerah Tingkat II, Daerah otonom yang terbawah yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Konsepsi penyederhanaan organisasi kekuatan politik itu, yang bertujuan agar organisasi kekuatan politik itu dapat benar-benar berfungsi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dewasa ini telah dituangkan dalam Undang-undang, seharusnya kita laksanakan sebaik-baiknya.

Perlu kiranya ditegaskan bahwa meskipun struktur organisasi politik itu hanya sampai di Daerah Tingkat II, tetapi organisasi politik itu dapat melaksanakan kegiatan politik sampai di desa-desa dan tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap warganegara yang tinggal di desa-desa untuk turut serta dalam kegiatan politik, menjadi anggota dan kader organisasi politik menurut aspirasinya. Adalah menjadi kewajiban setiap organisasi politik untuk mengajak rakyat dan melaksanakan pendidikan politik rakyat yang berada di desa-desa tersebut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Golkar berpendapat bahwa dengan undang-undang yang ada selarang setiap organisasi politik dapat dan berkesempatan yang sebaik-baiknya untuk mengadakan konsolidasi organisasinya dan mengajak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang.

Tanya: Menurut pandangan Bapak, apakah tantangan paling utama yang dihadapi pemerintah dalam 10 tahun yang akan datang?

Apakah kondisi harga minyak yang relatif rendah, pertumbuhan ekonomi yang juga rendah dan angka pengangguran yang cukup tinggi dan kewajiban membayar hutang luar negeri yang juga tinggi kini tidak merubah tekad bangsa Indonesia untuk tinggal landas dalam Repelita VI?

Seberapa besar peranan penghasilan ekspor non-migas untuk mendukung tinggal landas?

Jika penghasilan non-migas tak seperti yang diharapkan, sementara untuk tinggal landas kita memerlukan banyak modal dan teknologi, apakah Indonesia akan mengharapkan lebih banyak modal asing untuk pembangunan dengan jalan semakin mengendorkan persyaratan-persyaratan yang selama ini dimaksudkan untuk melindungi pengusaha nasional, termasuk menghapuskan monopoli?

Jika modal asing tidak mengalir seperti yang diharapkan, apakah pemerintah akan membiayai pembangunannya dengan terus memperbesar jumlah pinjaman luar negeri atau melaksanakan pembangunan dengan cara pembiayaan lain, misalnya melalui cara "Build, Operate Transfer (BOT)" atau "Non Resource Project"?

Angka pengangguran yang tinggi dan terus membengkak setiap tahun, langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk menghindarkan gejolak sosial akibat pengangguran, jika ekonomi tidak tumbuh seperti yang diharapkan?

Jawab: Tantangan yang utama adalah bagaimana mengatasi hambatan baik hambatan yang berasal dari luar maupun dari dalam, dalam melaksanakan pembangunan umumnya, bagaimana kemampuan kita untuk melanjutkan dan meningkatkan hasil pembangunan sesuai dengan harapan rakyat.

Hambatan dari luar adalah keadaan ekonomi dunia yang masih belum menentu sehingga tidak dapat memberikan dukungan yang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan. Keadaan harga-harga komoditi dan minyak bumi, perkembangan nilai dolar, hambatan-hambatan ekspor dan sebagainya akan tetap memerlukan kewaspadaan dan langkah-langkah penyesuaian yang memadai seperti yang selama ini telah kita lakukan.

Sedangkan masalah dari dalam yang utama adalah masalah kependudukan dimana pertambahan penduduk masih cukup tinggi, demikian pula pertambahan angkatan kerja yang cukup besar, memerlukan penyediaan lapangan kerja yang memadai, yang hanya dapat disediakan apabila peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara memadai pula.

Upaya kita yang harus dilakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengerahkan dan mobilisasi dana dan daya yang ada secara terpadu untuk melanjutkan pembangunan dengan dilengkapi tambahan dana dari luar negeri, sehingga kita mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai, mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata.

Dengan tekad yang teguh untuk mengerahkan dan mobilisasi daya dan dana nasional dengan tambahan sumber dana dari luar Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa bukan saja kelanjutan pembangunan dapat dipelihara, tetapi juga proses tinggal landas menuju masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dapat dimulai sejak Pelita ke-VI yang akan datang.

Salah satu langkah yang secara konsisten diusahakan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi — khususnya masalah tidak stabilnya harga minyak

Digitized by Google

bumi — adalah dengan menggerakkan dan memberikan dorongan kepada pihak swasta — nasional maupun asing — untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dapat memecahkan masalah lapangan kerja dan mendorong ekspor non migas. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, mendorong kegiatan sektor non formal, meningkatkan nilai tambah dan efisiensi usaha masyarakat dengan memadukan usaha-usaha industri besar dan industri rakyat melalui sistem bapak angkat dan lain-lain.

Perlu pula ditekankan bahwa peranan peningkatan ekspor non migas ini amat besar dan penting, karena bukan saja akan menambah penerimaan devisa sebagai substitusi penerimaan devisa dari hasil minyak bumi yang menurun, tetapi ekspor non migas itu menyangkut usaha rakyat banyak yang berarti terbukanya banyak lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak pula.

Dalam pada itu untuk mendorong partisipasi usaha swasta asing dalam rangka penanaman modal langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi termasuk penyederhanaan prosedur peridzinan akan terus diusahakan.

Dalam rangka memperluas kesempatan partisipasi swasta luar negeri dalam pembangunan ekonomi kita, memang dimungkinkan melalui sistem "Non Resource Project atau sistem Build, Operate Transfer" sepanjang sistem tersebut setelah dihitung sebaik-baiknya tidak menambah beban kepada ekonomi nasional.

Dalam waktu beberapa tahun ini yang lebih kita perlukan dalam memecahkan masalah ekonomi — terutama yang disebabkan oleh faktor ekstern — adalah tambahan bantuan lunak dalam bentuk bantuan program (cash) seperti yang kita harapkan dari Jepang dan negara-negara anggota IGGI lainnya.

Tanya: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tetap tergantung/mengandalkan personal militer. Sejauh mana Bapak melihat partisipasi militer dalam pemerintahan berkelanjutan?

Jawab: Saya kira tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tergantung pada personil militer. Yang benar adalah bahwa sesuai dengan semangat perjuangan dan pembangunan kita, ABRI memang di-

Dalam melakukan dwi fungsi, Abri memang disertakan dalam seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

ikutsertakan dalam seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka melaksanakan Dwi Fungsi ABRI, yaitu peranan dan fungsi sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan peranan dan fungsi sebagai kekuatan sosial-politik.

Apabila di antara pejabat pemerintah di pusat maupun daerah terdapat anggota militer, mereka adalah dinilai mampu sebagai putera-putera yang baik dan dalam rangka pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI.

Sebagai salah satu kekuatan pembangunan bangsa, sejak kelahirannya ABRI dipercayakan mengemban tugas di bidang pertahanan dan keamanan serta bidang sosial politik. Dan konsep ini akan terus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Tanya: Bagaimana seriusnya korupsi di Indonesia, dan apakah usaha Bapak untuk mengurangi korupsi dapat berhasil?

Penyalahgunaan wewenang dan korupsi diakui pemerintah sebagai salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, berbagai usaha telah dilakukan, tetapi hasilnya belum banyak terasa. Apakah rendahnya pendapatan pegawai negeri bukan merupakan salah satu sebab pokok penyalahgunaan wewenang dan korupsi?

Penegakkan disiplin nasional erat hubungannya dengan "nation and character building", selama ini ada kesan pembangunan ekonomi yang berhasil telah melahirkan masyarakat yang konsumtif, individualistis dan cenderung mengambil sikap "easy going" (ambil gampangnya saja). Bagaimana penilaian Bapak?

Jawab: Betapa seriusnya korupsi di Indonesia, saya kira sulit untuk mengukurnya, tetapi yang jelas pemerintah selalu memberikan perhatian serius untuk mencegah dan menindak korupsi yang dilakukan oleh siapapun.

Seandainya masalah korupsi itu telah ada pada tingkat yang membahayakan, tentunya tidak mungkin tercapai stabilitas nasional dan hasil-hasil pembangunan seperti yang dicapai selama ini.

Untuk menanggulangi masalah korupsi, berbagai kebijaksanaan telah diambil antara lain dengan meningkatkan pengawasan, mengadakan deregulasi dan debirokratisasi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang disertai sangsi-sangsi yang keras, termasuk undang-undang anti korupsi. Disamping itu salah satu upaya untuk mencegah timbulnya korupsi adalah dengan meningkatkan tingkat penerimaan dan kesejahteraan pegawai negeri sesuai dengan kemampuan negara.

Demikian pula upaya penegakkan disiplin nasional sebagai salah satu aspek "nation and character building" merupakan bagian dari penanggulangan "side effect" dari pembangunan ekonomi. Memang konsep pembangunan kita adalah pembangunan

Digitized by Google

di segala bidang — pembangunan bangsa dan pembangunan kepribadian Indonesia —, bukan sekedar pembangunan di satu bidang ekonomi, meskipun pembangunan bidang ekonomi memperoleh prioritas.

Juga Pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat luas untuk di satu pihak tidak memberikan peluang bagi terjadinya korupsi di kalangan aparatur pemerintah dan di pihak lain turut memberikan informasi yang berbobot untuk menindak korupsi.

Tanya: Kalangan diplomatik merasa bahwa setelah 20 tahun Orde Baru di Indonesia, salah satu pertanyaan yang utama adalah apakah akan terjadi suatu suksesi kepemimpinan nasional secara wajar. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan nasional?

Jawab: Mengenai suksesi tidak terlepas daripada usaha untuk mengembangkan serta membangun sistem yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti disinggung di atas. Jadi apabila sistem mekanisme kepemimpinan nasional (sistem mekanisme lima tahunan) dapat dilaksanakan dan berkembang seperti yang selama ini berjalan, maka suksesi kepemimpinan akan dapat berlangsung dengan aman menurut mekanisme tersebut. Salah satu hal yang penting adalah kelancaran pelaksanaan pendidikan politik kepada rakyat dengan tujuan agar setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu penataran-penataran P4 merupakan salah satu pendidikan politik rakyat yang baik di samping peranan dari organisasi-organisasi politik dalam mengkonsolidasi dirinya dan peran sertanya dalam melaksanakan pendidikan politik.

Tanya: Apakah dalam Sidang MPR yang akan datang, mungkin terjadi bahwa calon Presiden akan lebih dari satu?

Jawab: Sesuai dengan Konstitusi kita, maka tidak ada ketentuan bahwa calon Presiden harus hanya satu. Seandainya pada suatu ketika dalam Sidang Umum MPR terdapat lebih dari satu calon Presiden, itu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Namuan, apabila demokrasi Pancasila benar-benar berjalan dengan baik, dimana musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu cirinya, maka kita berharap agar dalam Sidang Umum MPR di waktu-waktu yang akan datang dapat ditempuh jalan musyawarah untuk mufakat dalam memilih pimpinan nasional, hingga hanya ada seorang calon Presiden dan seorang calon Wakil Presiden. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku sekarang apabila terdapat konsensus untuk mencalonkan hanya seorang calon Presiden dan seorang calon Wakil Presiden, maka sidang MPR akan mengesahkan calon tunggal tersebut secara aklamasi dan tidak perlu melalui pemungutan suara.

Tanya: Apakah komunisme masih menjadi ancaman bagi Indonesia, atau apakah Bapak dapat menerima pendapat kalangan luar bahwa Islam yang militan lebih besar tantangannya terhadap stabilitas?

Apakah bahaya ekstrim kanan sampai kini dianggap sama berbahayanya dengan ancaman dari ekstrim kiri?

Jawab: Komunisme tetap merupakan bahaya laten bagi Indonesia, karena itu kita harus tetap waspada. Dalam rangka ini kita perlu terus mengusahakan pemasyarakatan ideologi Pancasila sehingga setiap orang Indonesia dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian akan dapat menjadi kekuatan penangkal daripada susupan unsur komunisme atau unsur-unsur ekstrim lainnya yang tidak sesuai dengan filsafat Pancasila termasuk unsur ekstrim kanan yang berasal dari kalangan ekstrim aliran agama.

Tanya: Apakah pemerintah telah melakukan tindakan yang cukup untuk menyediakan lapangan kerja serta mengurangi dampak sosial daripada pengangguran yang meningkat?

Jawab: Salah satu prinsip pembangunan sejak Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan yakni: 1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; 3. stabilitas nasional yang dinamis;

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan itu antara lain ditempuh melalui jalur perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha. Boleh dikatakan setiap langkah dan proyek pembangunan selalu dikaitkan dengan usaha pertambahan dan perluasan lapangan kerja.

Demikian juga perhatian yang besar diarahkan untuk pembangunan daerah dan pembangunan desa melalui proyek-proyek INPRES Desa, INPRES Kabupaten dan INPRES Propinsi, dimana setiap desa yang ± 70.000 jumlahnya setiap Kabupaten dan Propinsi di dorong untuk membangun desa dan daerahnya dengan membuka lapangan kerja. Demikian juga pengutamaan pembangunan bidang pertanian, pembangunan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat, pembangunan jalan dan infra struktur lainnya melalui proyek-proyek padat karya, pembangunan pariwisata dan sebagainya, semuanya adalah usaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Salah satu langkah yang terus diusahakan adalah pembangunan pendidikan kejuruan yang mampu meng-

Setiap kabupaten dan pronpinsi didorong untuk membangun daerahnya

Digitized by Google

hasilkan tenaga-tenaga yang dapat langsung siap pakai, sehingga akan mengurangi tenaga penganggur yang terdidik. Kita juga mendorong penanaman modal asing dan dalam negeri yang membuka banyak lapangan kerja.

Tanya: Bagaimana pendapat Bapak mengenai peran Wakil Presiden dan apakah wawasannya akan berkembang selama Bapak menjabat sebagai Wakil Presiden?

Jawab: Sesuai dengan konstitusi Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai Mandataris MPR, dibantu oleh Wakil Presiden. Maka pelaksanaan tugas seorang Wakil Presiden adalah bagaimana ia dapat membantu pelaksanaan tugas Presiden itu sebaik-baiknya, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi ruang lingkup tugas dan peran seorang Wakil Presiden adalah agar Wakil Presiden dapat membantu Presiden dalam melaksanakan tugas yang berat itu.

Tanya: Kebijaksanaan luar negeri: Bila hubungan dengan RRC akan dinormalisasikan? Apakah Presiden RI akan melakukan kunjungan ke Uni Soviet tahun ini? Apakah Indonesia masih memiliki peluang untuk menjadi Ketua Gerakan Non Blok, dan ke arah mana Indonesia berkeinginan gerakan tersebut menuju?

Banyak pengamat menilai politik luar negeri Indonesia sejak lahirnya Orde Baru cenderung memihak ke Barat dan lebih mementingkan pendekatan dengan negara-negara di sekitarnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, bisakah Bapak menjelaskan latar belakang kebijaksanaan politik luar negeri ini?

Langkah-langkah apa yang merupakan penegasan garis politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia tetap setia kepada barisan Non Blok, yang turut dilahirkannya lebih 30 tahun lalu?

Jawab: Seperti berulangkali dikatakan, normalisasi hubungan RI-RRC dikaitkan dengan bagaimana sikap politik RRC — Pemerintah dan Partai Komunis Cina — terhadap unsur-unsur atau organisasi komunis di luar negeri, khususnya di Indonesia. Apabila Pemerintah dan Komunis Cina mau tegas-tegas menyatakan sikapnya, bahwa mereka tidak akan membantu gerakan komunis di Indonesia, maka itu akan membuka jalan yang akan mempercepat normalisasi diplomatik antara RI-RRC. Ini didasarkan pada pengalaman sejarah masa lampau, di mana RRC terbukti terlibat dalam pemberontakan G-30S/PKI yang gagal pada tahun 1965.

Mengenai kunjungan Presiden RI ke Uni Soviet sampai saat ini belum ada rencana yang pasti.

Indonesia telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah bagi KTT Non Blok pada tahun 1989, dengan pertimbangan agar Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya organisasi Non Blok dapat berperan serta lebih efektif dalam memberi isi yang sebaik-baiknya dari kemurnian tujuan organisasi tersebut.

Kita mengetahui bahwa untuk dapat terpilih sebagai negara penyelenggara KTT diperlukan persetujuan semua anggota. Karenanya Indonesia tetap berharap dapat dicapai keputusan yang sebaik-baiknya mengenai negara penyelenggara KTT ini yang akan diputuskan dalam konperensi tingkat Menteri yang akan datang. Yang lebih penting adalah agar terjamin kemurnian arah perjuangan Non Blok seperti yang dikehendaki sejak berdirinya; agar forum KTT Non Blok nanti tidak menjadi alat dari salah satu blok dan dapat meningkatkan kerjasama di antara negara-negara non blok yang saling menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Orde Baru sejak kelahirannya dalam tahun 1966 tetap secara tegas menempuh politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional. Oleh karena itu Indonesia secara konsekuen berdiri di barisan negara-negara non blok sebagai kekuatan ketiga yang tidak menghendaki memihak blok Barat ataupun blok Timur, bahkan Indonesia selalu dengan gigih berjuang bersama dengan negara-negara non blok lainnya agar organisasi negara non blok tetap berpijak kepada kemurnian konsepsi non blok, dan tidak terseret oleh salah satu blok baik barat maupun timur.

Bahwasanya dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia banyak melakukan kerjasama ekonomi dengan dunia barat, itu tidak berarti bahwa Indonesia berpaling kepada politik barat, melainkan karena memang negara-negara barat lah yang kenyataannya dapat memenuhi persyaratan kerjasama ekonomi yang diperlukan oleh Indonesia seperti memberikan pinjaman lunak, kerjasama teknik, penanaman modal asing dan sebagainya. Dalam membina hubungan luar negeri dengan negara-negara di dunia, Indonesia selalu berpegang teguh kepada hasil-hasil konperensi Bandung antara lain: saling hormat menghormati, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan kerja sama yang saling menguntungkan dan tanpa membedakan sistem sosial maupun politik negara yang bersangkutan.

Tanya: Dalam wawancara Bapak dengan ANTARA dalam rangka 17 Agustus 1986, selaku Ketua Umum DPP Golkar Bapak waktu itu mengatakan Golkar ingin terus memerintah 25 tahun lagi untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua. Persiapan apakah yang dilakukan Golkar untuk meraih keinginannya itu di tengah-tengah bayangan kesulitan perekonomian dan semakin kritisnya masyarakat? Tokoh-tokoh Golkar telah muncul sebagai anggota Kabinet Pembangunan V, apakah pola ini akan dilanjutkan dalam masa-masa mendatang? Apakah Bapak bersedia menjadi Ketua Umum DPP Golkar, jika Munas Golkar Oktober nanti menghendakinya?

Jawab: Golkar sebagai salah satu kekuatan politik yang selama 4 kali Pemilu selalu memperoleh kepercayaan yang besar dari rakyat dan telah berhasil menjadi kekuatan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak memang merasa mengemban tugas besar untuk melanjutkan perjuangannya, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan mengutamakan bidang ekonomi tanpa mengabaikan bidang-bidang yang lain.

Untuk itu Golkar harus terus mengkonsolidasikan dirinya agar dapat berkembang makin dewasa dan berakar di tengah-tengah rakyat. Langkah-langkah yang diambil oleh Golkar adalah meningkatkan kualitas organisasi kader-kader dan kepemimpinannya serta makin mengembangkan kehidupan demokrasi di kalangan organisasi Golkar. Dewasa ini Golkar sedang sibuk menyelenggarakan Musyawarah-musyawarah Daerah Tingkat II, Musyawarah-musyawarah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia dan akan disusul dengan Musyawarah Nasional pada bulan Oktober 1988 ini.

Dengan demikian akan dapat ditumbuhkan pengembangan kepemimpinan di lingkungan Golkar sebagai calon-calon pimpinan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Mengenai kepemimpinan Golkar yang akan datang sepenuhnya menjadi kewenangan Musyawarah Nasional yang bersangkutan.

Digitized by Google

Optimisme Baru Di Sektor Nonmigas

Komoditi nonmigas memang sejak lama diharap mampu bangkit menggantikan peranan migas sebagai penyumbang devisa negara. Setelah sekian lama terseok-seok karena prestasi migas, maka sejak tahun 1987 yang lalu ekspor nonmigas mencatat lonjakan drastis.

Bulan Agustus tahun lalu misalnya, angka ekspor sebulan mencapai 800 juta dolar. Padahal dalam periode-periode sebelumnya, angka ini tidak pernah berhasil didekati. Bahkan untuk melewati angka 500 juta dolar sebulan pun terasa sulit.

Lonjakan itu, tentu disambut gembira. Dalam APBN 1988/1989, proyeksi penerimaan nonmigas melampaui penerimaan yang selama ini didominasi migas. Pemerintah memang sejak lama bertekad mengurangi ketergantungan pada devisa yang mengalir lewat minyak dan gas bumi, karena komoditi andalan ini sangat dipengaruhi konjungtur ekstern. Ekonomi (penerimaan) yang sejak lama didominasi monokultur minyak, memang tidak aman.

Bila menengok ke belakang, lonjakan ekspor nonmigas ini tidak begitu saja diraih. Ia adalah hasil dari sebuah proses dan perjuangan yang telah dirintis sejak lama. Perjuangan itu adalah kesadaran pemerintah melakukan deregulasi dalam berbagai bidang yang dimulai sejak 1983. Jadi lonjakan ekspor nonmigas sekarang merupakan buah debirokratisasi dan deregulasi itu yang bakal terus dilanjutkan. Ini tentu tekad yang melegakan semua pihak. Dan dalam Pelita V, diproyeksikan penerimaan nonmigas di atas 1 milyar dolar setiap bulannya.

Untuk mengetahui plus minus, peluang dan tantangan yang membentang di sektor ekspor nonmigas ini, *Media Karya* mewawancarai Ir Trisura, Dirjen Industri Kecil, Dr Pande Raja Silalahi, ekonom dari CSIS, serta Ir Taty Sumiarno, anggota DPR dari FKP yang juga aktif di sektor pembinaan industri kecil khususnya di lingkungan tani dan nelayan.

Pande Raja Silalahi

Faktor Extern & Intern

Yang menyebabkan ekspor nonmigas kita naik dan bahkan melonjak sangat tinggi, sebenarnya ada dua faktor. Pertama, faktor intern dan yang kedua, faktor ekstern. Faktor intern, adanya agresivitas dari para pengusaha domestik dan langkah pemerintah dalam bidang deregulasi dan debirokratisasi. Sedangkan faktor eksternnya adalah, seperti yang banyak digembar-gemborkan tentang proteksi yang dilakukan oleh negara lain, sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Pande Raja Silalahi

Ternyata, kalau kita dapat memasuki pasaran internasional, maka hal itu akan dapat mendukung ekspor kita lebih jauh lagi. Kita menjadi lebih memahami seluk beluk peluang dan tantangan dalam perdagangan internasional.

Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah apakah betul ekspor nonmigas kita itu dapat sekaligus memberi nilai tambah. Ada semacam pendapat —entah seberapa jauh kebenarannya— bahwa ekspor nonmigas kita itu hanya digeluti oleh mereka yang tidak ada pilihan lain. Jadi mereka itu pengusaha, hanya menginginkan perputaran barang tersebut daripada memikirkan nilai tambahnya. Kita itu akan dapat meningkatkan ekspor nonmigas dengan lebih cepat lagi apabila ada kesatuan dalam gerak dan langkah. Selain itu deregulasi dan debirokratisasi perlu diteruskan, dan para pengusaha agar lebih agresif merebut pasar di luar negeri.

Sehubungan dengan itu, maka gagasan *Indonesia Incorporeted,* merupakan hal yang positip, karena gagasan tersebut akan mempererat hubungan antara pemerintah dan swasta serta elemen-elemen lainnya. Gagasan tersebut menginginkan kita maju dalam gerak dan langkah yang sama dalam memasuki pasaran internasional. Dengan demikian, bukan tidak mungkin ekspor nonmigas kita akan terus berkembang.

Jadi sekarang ini ada optimisme. Dasarnya, karena komunikasi antara pemerintah dengan swasta yang semakin baik serta adanya keterbukaan dalam menerima kritik. Dari sini diharap akan timbul semangat yang menggebu para wiraswasta kita untuk menerobos pasar internasional.

Memasuki pasar internasional kelihatannya gampang, namun ternyata untuk terjun ke sana dibutuhkan berbagai kondisi. Dan bila berbicara mengenai Indonesia Incorporeted, kita harus melihat ini sebagai proses. Indonesia incorporeted ini merupakan gagasan untuk menjalin dan menciptakan kerjasama. Namun, jangan bermimpi Indonesia Incorporeted itu akan lahir besok. Kita sebaiknya mengarah ke sana.

Bagaimana pun juga ide tentang Indonesia Incorporeted itu merupakan gagasan raksasa. Kita melihat ada misi, ada *sense of nasionality* yang lebih tinggi. Kita menuju ke ekonomi nasional yang semakin terintegrasi. Namun Indonesia Incorporeted masih akan makan waktu. Yang penting kita mengarah ke sana.

Tapi Pande mengingatkan pening-

Digitized by Google

katan ekspor nonmigas, jangan sampai menelantarkan pasar dalam negeri. Justru pasar domestik (Indonesia yang berpenduduk 170 juta jiwa) merupakan potensi yang sangat besar. Pasar domestik merupakan batu loncatan, sehingga kita dapat menjual produk dengan lebih murah ke luar negeri.

Misalnya saja, Jepang saat ini sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan perumahan (lagi boom). Untuk dapat mensuplai kebutuhan yang diperlukan seperti paku, lem dan yang lain, kita tidak dapat menunggu terlalu lama. Kalau kita menunggu terlalu lama, nantinya akan diisi oleh pesaing yang lain.

Sekarang ini, ekspor non migas kita memang sudah meningkat. Tapi sebenarnya kekuatan kita itu ada di mana? Orang selalu gampang mengatakan bahwa tenaga kerja kita itu murah. Tetapi kekuatan kita bukan hanya di situ (tenaga kerja) saja. Misalnya saja Bali, daerah wisata yang banyak menghasilkan barang kerajinan itu, dalam tahun-tahun terakhir ini ekspor nonmigasnya terus meningkat. Kenaikan ekspor daerah tersebut bukan hanya terletak pada murahnya tenaga kerja, tapi disebabkan karena keunikan dari produknya itu. Ini menarik.

Di daerah-daerah lain dan produk-produk yang lain, kendalanya mungkin kualitasnya, mungkin kontinuitas pengirimannya tidak terjamin yang menyebabkan kehilangan pasar dan mati sendiri. Jadi perlu diteliti keunggulan komparatif kita ada di mana, sehingga nanti kalau pemerintah mau mendorong, senjata pendorongnya sudah tepat dan benar. Misalnya saja kelemahannya terletak pada desain, kita mengharapkan bantuan desain dan bahkan kalau perlu mendatangkan tenaga ahli mengenai desain dari luar negeri.

Contoh lain lagi, kopi misalnya. Kalau kita ada kelemahan dalam bidang perkopian, khususnya untuk produk ekspornya, barang kali kita perlu mendatangkan tenaga ahli untuk mencium kopi yang cocok dengan pasaran yang diinginkan, Eropa misalnya. Dengan demikian, kita tinggal meramu dan diperuntukkan pada pasaran yang kita inginkan. Ini tentu membutuhkan imformasi.

Ir Trisura

Potensi industri kecil luar biasa

Ekspor industri kecil, selain bertujuan meraih devisa sebanyak mungkin dari kelompok ini, juga bertujuan menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat kita terutama mereka (kaum petani) yang berada di desa-desa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Diperkirakan di kelompok industri kecil, tersimpan 1 juta jenis produk yang berpotensi untuk ekspor. Peluang untuk itu demikian besarnya, mengingat produk kelompok industri kecil umumnya tidak dicegat oleh hambatan tarif. Dan dalam perdagangan internasional, harga barang-barang industri kecil umumnya tidak diatur.

Ir Trisura

Indonesia, dan negara-negara Asia pada umumnya mempunyai potensi di sektor ini. Karena selain ongkos tenaga kerja yang murah, bahan baku untuk industri kecil umumnya tidak diimpor. "Sehingga peluang kita untuk bersaing sangat besar." Ditambah dengan deregulasi dan debirokratisasi yang kini digalakkan pemerintah, keunggulan di sektor industri kecil diharap mampu menciptakan nilai tambah di sektor industri kecil sendiri.

Dengan deregulasi dan debirokratisasi, untuk mengekspor barang menjadi mudah. Kalau dulu ijinnya bisa macam-macam. Tapi sekarang seorang pengusaha yang memiliki ijin usaha saja, sudah bisa mengekspor. "Ini adalah iklim yang sangat menunjang."

Sekali kita melakukan ekspor, maka kepastian berusaha semakin mantap, karena, sekali dia mengimpor, dia pasti memesan lagi bukan saja dalam volume yang lebih besar, tapi juga dalam jenis yang lebih luas. Sekarang kita baru memiliki sekitar 300 jenis produksi komoditi yang bisa diekspor, padahal Taiwan sudah mempunyai 6 ribu jenis. Oleh karena itu, kebijaksanaan ekspor pemerintah kita adalah *broad spectrum*. Itu yang kita kembangkan terus. "Kita baru 300 jenis saja mau mengatur, biarkan saja dulu, biar kekuatan-kekuatan itu yang menunjukkan kemampuan kita," katanya.

Keuntungan lain, adalah kesempatan untuk mendidik disiplin dalam perdagangan internasional. Karena, perdagangan internasional, menuntut kualitas, waktu dan etika. Dengan demikian kalau kita berbicara penggalangan ekspor dalam rangka tinggal landas, pijakan kita mantap.

Untuk ini diperlukan pembangunan struktur industri yang tidak bisa selesai dalam tempo satu atau dua tahun. Tapi dengan pijakan yang jelas dan mantap, disana lah struktur yang akan kita bangun.

Selain iklim yang mendukung, juga kita adakan promosi dan pameran sebagai tempat kontak dagang. Juga memberi kemudahan dengan menciptakan sistim bapak angkat agar para pengrajin (pengusaha) kecil bisa berhubungan dengan pihak pembeli luar negeri. Bapak angkat ini merupakan kunci suksesnya industri kecil di masa sekarang dan akan datang.

Bapak angkat ini masih kurang, karena mereka (bapak angkat) belum yakin bahwa barang kecil ini bisa laku di pasaran internasional. Namun, setelah kita promosikan, banyak yang yakin. Bapak angkat ini dalam memasarkan diminta agar turut menilai, jangan memetik buahnya saja. Karena, dalam perdagangan internasional, ada faktor-faktor teknis dan non teknis. Misalnya, soal zat warna mana untuk mewarnai kerajinan bunga plastik yang tidak mengandung racun, adalah tugas bapak angkat untuk memberi penyuluhan. Sedangkan dalam segi non teknis pun kiranya perlu ada petunjuk bapak angkat kepada pengusaha kecil dalam melakukan kontak dagang yang berlaku di dunia internasional, seperti masalah perjanjian kontrak pembayaran, sehingga pengusaha kecil mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dalam kontrak dagang itu.

Kita sudah mempunyai 53 BUMN yang menangani masalah ini dengan dana sekitar 66 milyar. Kita sudah mempunyai komoditi andalan, yang mampu menjadi pendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan usaha. Misi industri kecil sebenarnya disana. Tidak berpretensi menciptakan yang spektakuler, tetapi setiap yang punya peluang ekspor terus didorong,

Digitized by Google

sehingga komoditi andalan terus bertambah.

Kalau bisa mengekspor, maka akan ada 10 job yang terikutkan. Misalnya kita tidak menjual kayu gelondongan, tapi kayu yang sudah menjadi mebel supaya nilai tambah lebih tinggi. Ini adalah contoh betapa kita memperhatikan faktor nilai tambah.

Dalam perdagangan internasional, dikenal sistim partai besar. Orang tidak lagi memesan satu atau dua biji produk, tapi sudah menyebut konteiner. Jadi industri kecil diarahkan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar. Sebagai contoh, adalah ibu Raja Abah dari NTT. Pengrajin tenun ikat ini semula hanya menghasilkan beberapa lembar kain tenun saja untuk dijual. Tetapi setelah dibina, dia mampu melayani pesanan dari sebuah hotel di Singapura yang mencapai 10.000 lembar kain.

Masalahnya tidak berhenti di sana. Ibu ini mengalami kesulitan manajemen. Untuk itu bapak angkat dilibatkan agar berfungsi dalam menerobos pasar dan menggolkan kontrak. "Sekarang ini kita kewalahan, tidak menerima namanya pesanan, tapi menerima bagaimana ya," kata Trisura meniru ucapan ibu Raja Abah. Masih banyak contoh sukses lainnya lagi.

Perbankan yang menunjang adalah problem yang dihadapi dunia industri kecil. Kalangan ini umumnya tidak terlalu memperhatikan tertib administratif. Padahal bank dalam mengeluarkan kredit membutuhkan banyak syarat, termasuk agunan. Namun bank seharusnya melihat, bahwa sesuatu produk yang bisa dijual, berarti mempunyai potensi untuk meraih keuntungan yang pada gilirannya akan mampu mengembalikan kredit bank. Untuk menembus hambatan ini, biasanya bapak angkat yang menjamin. Namun bank kadang-kadang terlalu kaku dalam menerapkan syarat kredit.

Tidak dengan maksud membanggakan sektor industri kecil, namun dari data yang ada pada BPS, beberapa produk industri kelompok ini mengalami lonjakan ekspor 100 persen.

Yang menjadi persoalan mungkin bagaimana membina industri kecil ini. Pernah Departemen Perindustrian menempuh lewat Lingkungan Industri Kecil (LIK) tetapi tidak semua berjalan baik, karena faktor hambatan kultural para pengrajin kecil itu sendiri. Kalau mereka masuk LIK berarti ada keharusan masuk kantor jam 7 atau 8 pagi dan pulang jam 4 atau 5 sore. Ini ternyata menimbulkan problem tersendiri. Para pengrajin ini umumnya mereka yang bekerja tanpa ketentuan waktu, karena pekerjaan itu dilakukan (umumnya) di rumah sendiri (home industry). Belum lagi keharusan membayar sewa listrik dan air serta fasilitas lainnya yang belum biasa dilakukan. Untuk itu di LIK sekarang ini tidak hanya pengrajin kecil yang masuk ke sana, tetapi juga para bapak angkat.

Sekarang LIK tidak dibangun lagi, dan diganti dengan sentra-sentra yang mengelompokkan satu usaha sejenis. Sentra ini lebih strategis karena pemberian bantuan dan usaha modernisasi langsung ke sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Juga, setiap kali ada nilai tambah yang menikmati adalah mereka sendiri atau lingkungan yang paling dekat dengan mereka, misalnya anak atau isteri.

Bila mereka sudah maju, mereka mengorganisir diri sendiri dengan mengangkat ketua kelompok sendiri. Bila lebih maju lagi, mereka kita arahkan untuk membentuk koperasi. Dalam wadah koperasi, diharapkan wawasan industrial mereka tumbuh. Dalam lingkup nasional, kita sebenarnya telah menciptakan bibit-bibit ekspor (khusus industri kecil) yang tersebar di desa-desa. Sekarang kita memiliki 400 sentra di 27 propinsi, dan diharapkan dalam akhir Pelita IV ini jumlah mereka akan mencapai 6000 sentra. Ini adalah kekuatan ekonomi yang handal.

Ir Taty Sumiarno

Kesempatan Emas

Sekarang ini tepat sekali kita memacu ekspor sektor nonmigas, karena kita tidak harus terpaku pada sektor migas. Dengan demikian perhatian sekarang ini harus lebih ditujukan pada pengembangan peningkatan, perluasan dan penataan dalam rangka usaha untuk meningkatkan sektor nonmigas itu.

Dalam peningkatan ekspor nonmigas, kita optimis, sebab kita memiliki potensi yang cukup besar. Pertama, adanya sumber daya manusia — 170 juta jiwa penduduk Indonesia —. Kedua, adanya sumber kekayaan alam Indonesia sendiri baik di sektor migas, maupun sektor lain seperti pertanian, kehutanan, perikanan bahkan cuaca.

Sekarang ada peluang emas untuk sektor nonmigas, karena pemerintah betul-betul sudah mengusahakannya, berupa iklim dan peluang yang memadai. Untuk itu potensi para pengusaha sendiri perlu dipacu. Baik pengusaha informal, kecil, menengah dan besar untuk benar-benar memanfaatkan peluang dan situasi tersebut, karena "ini kesempatan emas".

Sekarang, banyak sektor yang bisa dikembangkan, di luar playwood, karet, garmen, tekstil, kopi dan coklat yang telah laris di pasaran ekspor. Kita perlu memperluas dengan upaya diversifikasi.

Korea dan Taiwan, misalnya selain menggalakkan ekspor nonmigas dari lingkungan manufaktur, juga produk-produk industri kecil. "Kita perlu belajar dari negara-negara tersebut".

Belum lagi kalau kita melihat potensi sumber daya alam, dan manusia Indonesia. Peluang ekspor memang terbuka luas. Sekarang faktor-faktor apa yang dapat menunjang langkah tersebut? Yang penting adalah kemampuan pengusaha, iklim, serta tekad menerobos pasaran luar negeri, tidak saja tertuju pada negara-negara maju, tapi juga negara-negara berkembang lain. Deregulasi dan debirokratisasi perlu diterjemahkan dalam arti yang lebih luas. Tidak saja menyangkut masalah peraturan teknis semata, tetapi menyangkut masalah-masalah kebijaksanaan, sehingga mampu memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin pengusaha.

Di luar itu, sektor pertanian dan perikanan perlu digalakkan. Kalau kita berbicara tentang sektor perikanan, terukir fakta bahwa 70 persen dari bumi kita adalah lautan, dan 13.667 pulau. Hal tersebut merupakan kekayaan pantai saja merupakan aset luar biasa. Kekayaan lainnya adalah variasi dari ikan yang ada, baik ikan yang dapat dimakan, maupun ikan hias.

Digitized by Google

Untuk mengisi peluang ekspor nonmigas, perlu dibenahi semua aspek yang terkait.

Kekayaan alam tersebut tampaknya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Mengingat, hingga saat ini pengelolaan kekayaan alam di Indonesia itu masih tradisional. Hampir 95 persen ikan yang dihasilkan itu didapat dari nelayan tradisional, sehingga pemanfaatan laut untuk meningkatkan daya saing kita di pasar internasional masih sangat minim. Nelayan agaknya perlu ditunjang dengan peralatan yang canggih. Modernisasi dunia perikanan seakan dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan nelayan, walaupun untuk ini masih diperlukan pemikiran yang *integrated* antara permodalan, teknologi dan ketrampilan.

Maluku misalnya, dengan zone eksklusif 200 mil, diperlukan sekitar 200 sampai 300 kapal penangkap ikan. Ternyata disana selain kesulitan tempat ikan juga kesulitan crew yang trampil. Terpaksa tenaga trampil diambil dari luar.

Oleh karena itu, untuk mengisi peluang ekspor nonmigas perlu dibenahi secara menyeluruh semua aspek yang terkait, agar devisa bisa mengalir deras. Katakanlah udang. Kebutuhan akan udang dari negara-negara maju mencapai sekitar 150 juta ton. Indonesia baru mampu memasok 10%. Sedangkan kalau kita melihat dari kemampuan pantai kita yang ada, sebenarnya kita dapat memenuhi permintaan pasar tersebut.

Untuk itu sektor perikanan tidak menjadi tanggungjawab departemen pertanian saja, tapi juga melibatkan instansi perdagangan, perindustrian, BKPM dan perbankan.

Tapi kemampuan teknologi yang terbatas, menyebabkan kita sulit bersaing. Contoh, pesanan ikan tuna dari Jepang, setelah diadakan screening di negara tersebut, ternyata Jepang hanya mengakui 30 persen saja yang mutunya baik. Dengan demikian harga ikan tersebut menjadi anjlok. Kekurangan-kekurangan tersebut hendaknya jangan sampai mengendorkan semangat untuk bersaing.

Sebenarnya banyak komoditi lain yang masih dapat dikembangkan. Misalnya agar-agar. Ternyata, agar-agar ini mempunyai potensi yang cukup besar, sebab, seluruh pantai yang ada di Indonesia mempunyai potensi untuk pembudidayaan agar-agar. Potensi lain juga masih banyak, kalau kita mau "memetani".

Ikan hias juga mempunyai potensi untuk diekspor, karena harganya cukup tinggi. Selain jenis ini tidak terkena kuota, peluang pembiakan pun luar biasa. Kemungkinan juga terbuka untuk kodok dan bekicot. Dan masih banyak yang lain lagi.

Sekarang yang jadi permasalahan adalah, siapa yang mampu menjembatani antara nelayan dan yang lain itu ke jenjang ekspor. Konsep bapak angkat hendaknya juga menjangkau sektor perikanan.

Masalah lain adalah informasi. Banyak kalangan industri (industri kecil) tidak mampu menjangkau komoditi apa yang sedang baik karena kelangkaan informasi. Mungkin sekarang mereka dianjurkan menanam rumput laut, tau-tau yang maju malah bekicot. Dan pada saat mereka mengembangkan bekicot, tau-tau yang diminta adalah kelinci dan seterusnya. Karenanya perlu koordinasi informasi, tentang kebutuhan di luar negeri.

Untuk itu diperlukan medium-medium seperti colektor, eksportir dan yang lainnya. Di bidang pendidikan industri kita masih terbelakang. Karena itu dalam rangka memacu ekspor nonmigas, faktor penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penting. Untuk menanggulangi kekurangan dalam masalah pendidikan, perlu diadakan crash program, yang ada kaitannya dengan peningkatan ekspor nonmigas. □ (LT/BM)

Digitized by Google

Antara Isu PKI Dan Kewaspadaan

Jangan sampai tindakan-tindakan kita sendiri memberi peluang hidup bagi komunis

SETIDAKNYA ada dua pernyataan penting yang dapat dicatat ditengah derasnya berbagai isu tentang penyusupan sisa-sisa G30S/PKI belakangan ini. Dan dua pernyataan dari dua tokoh yang kompeten itu - Menko Polkam dan Menhankam - langsung menjawab isu adanya sisa-sisa PKI berhasil menyusup dan memperoleh posisi penting dalam pemerintahan. Berturut-turut pada pekan terakhir bulan Juni Menko Polkam Sudomo dan Menhankam LB Moerdani menegaskan tidak ada eks G30S/PKI di pemerintahan sekarang ini, apalagi di Abri. LB Moerdani - tokoh yang selama menjabat sebagai Pangab tercatat amat banyak melontarkan peringatan tentang bahaya laten PKI - bahkan menganggap adalah penghinaan kalau ada orang yang mengatakan pemerintah atau Abri kemasukan PKI.

Isu penyusupan PKI akhir-akhir ini memang banyak dilontarkan melalui pers, yaitu sejak sekitar SU MPR yang baru lalu. Dan beberapa dari pernyataan yang dilontarkan mengenai masalah itu berkembang menjadi semacam tudingan adanya penyusupan sisa-sisa G30S/PKI di Pemerintahan (Baca : Memo Redaksi). Secara menyeluruh, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menko Polkam, cukup proporsional dalam menanggapi pernyataan-pernyataan mengenai masalah sisa-sisa G30S/PKI tersebut. Pemerintah sepakat bahkan amat menganjurkan sikap waspada di masyarakat. Akan tetapi bila sudah bersifat membeberkan indikasi, Menko Polkam menganjurkan sebaiknya jangan dilakukan terbuka melalui pers, melainkan langsung memberikan laporan kepada yang berwajib. Tegasnya, pemerintah juga meminta semua pihak bersikap proporsional dalam menjalankan kewaspadaan tersebut.

Bagaimana persisnya kewaspadaan itu dijalankan secara proporsional, antara lain dinyatakan Menko Polkam dalam wawancaranya dengan 'Media Karya'. Selain dari Menko Polkam, ada tiga wawancara lagi. Yang pertama, dari seorang Jenderal Purnawirawan Polri yang kini duduk di lembaga legislatif, Drs. Sabar Koembino Wakil Ketua Komisi I bidang Hankam dan Luar Negeri DPR-RI. Yang berikut adalah Sekjen KNPI Cahyo Kumolo dari kalangan generasi muda yang seperti dikatakannya sendiri "generasi yang tidak 'menyaksikan' pemberontakan G30S/PKI". Dan berikutnya lagi, dari kalangan perguruan tinggi Drs Madiri Thamrin Sianipar - yang juga sebenarnya termasuk golongan usia muda.

Terdapat beberapa titik temu dalam pandangan mereka. Tetapi pada sisi tertentu terdapat pula spesifikasi yang khas.

"Tidak Sekedar Lontaran Dari Seseorang, Lalu Dianggap Suatu Kebenaran..."

Drs Sabar Koembino, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI.

Apakah kita kecolongan dalam soal PKI? "Sulit bagi saya untuk mengatakan kita kecolongan". Dikaitkan dengan kewaspadaan, rasanya ada yang

Sabar Koembino

kurang sreg. Karena ada hal yang kurang sreg ini lalu timbul suatu hipotesa yang akhirnya berupa suatu pendapat. Bahkan ada yang seakan-akan memberi analisa 'sudah terjadi' - kecolongan. Tapi pertanyaannya "apa benar sudah terjadi?". Mungkin itu sinyalemen dari beberapa tokoh. Dalam hal ini, pemerintah sudah cukup responsif, dan tentunya akan menerima setiap sinyalemen sebagai suatu batu loncatan untuk mengadakan penelitian berikutnya. "Tapi karena kita negara hukum, tentu ada prosedurnya sendiri. Tidak hanya sekedar lontaran dari seseorang lalu dianggap suatu kebenaran. Kalau begitu, nanti susah". Anggaplah ungkapan para tokoh itu, kalau bukan perangsang, ya katalisator. Kewenangan ada pada aparat keamanan - apakah itu Kopkamtib, apakah Polri. Lembaga-lembaga inilah yang harus kita dukung dalam rangka mengarah kepada kewaspadaan nasional yang cermat dan teliti.

Apa dan bagaimana kewaspadaan nasional itu?

Kita harus belajar dari pengalaman. Adalah tokoh-tokoh utama PKI sendiri memberikan estimasi akan munculnya kembali PKI dalam jangka waktu tertentu. Bila kita hitung, sejak Peristiwa G30S hingga kini telah 23 tahun lamanya. Sementara itu, Pelita jangka 25 tahun tinggal 5 tahun terakhir. Jadi, dalam lima tahun terakhir kita tidak boleh lengah. "Kalau lengah akan digunakan oleh unsur sisa-sisa G30S/PKI untuk mengambil peranan dan melakukan penyusupan".

PKI takkan berhenti. Kita tahu Golongan A, B, C kini praktis sudah membaur dalam lapisan masyarakat. "Kita tidak mengurangi, tidak menambah, tapi malah mungkin sebagian sudah ikut Pemilu. Apakah ini tidak pantas kita waspadai? Kita lihat contoh peristiwa Sumatera Barat, itu usaha sisa-sisa G30S/PKI menyusup dalam organisasi di bidang pemerintahan. Kemudian di organisasi kemasyarakatan, saya tidak yakin kalau

Digitized by Google

tidak ada. Karena mereka sudah membaur dalam organisasi kemasyarakatan maupun dalam kekuatan sosial politik, maka di bidang legislatif pun kita harus waspada sejak sekarang".

Kewaspadaan itu ada dua macam. Pertama, kita harus mawas diri ke dalam, apakah kita disusupi atau tidak. Kita sudah menyatakan G30S/PKI sebagai bahaya laten, maka analisa kita harus juga mengarah kepada aspek bahaya laten itu. Mawas diri di sini berarti kalau nyata-nyata ada penyusupan, harus ditindak sesuai kehendak GBHN. Setiap organisasi kemasyarakatan maupun politik, setelah mengetahui adanya penyusupan jangan sampai menunggu ditindak oleh negara. Kalau ditindak oleh negara, sanksinya bisa organisasinya harus dibubarkan pula. Kedua, terhadap yang berasal dari luar. Harus waspada dan menseleksi sebaik-baiknya. Jangan terlalu cepat-cepat memberi kesempatan menjadi anggota. Seperti halnya di pemerintahan, ada syarat bersih diri. Sedangkan di Abri, lebih ketat lagi, yaitu bersih lingkungan.

Perlu Kehidupan Yang Adil Dan Merata.

Cahyo Kumolo, Sekjen KNPI.

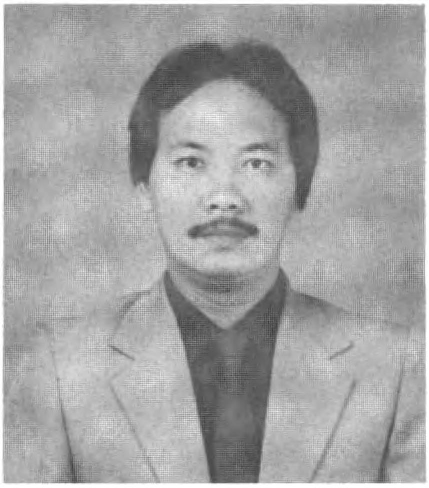

Cahyo Kumolo

Alat penangkal bahaya laten komunis di Indonesia adalah kewaspadaan yang diwujudkan dengan penajaman-penajaman baik aparat maupun masyarakat kepada setiap gerak dinamika pembangunan yang menampakkan kerawanan ipoleksosbud. "Semua pihak - aparat, masyarakat, lembaga - harus tanggap dan mawas diri untuk mengevaluasi, mendata, konsolidasi ke dalam, penelitian, saling introspeksi. Ini untuk mencegah adanya paham-paham atau susupan komunis dalam kehidupan sehari-hari. Semua pihak juga harus peka dan tanggap terhadap jiwa dan aspirasi rakyat dan masalah-masalah sosial yang berkembang".

Bekal untuk menghadapi bahaya komunis, pertama-tama yang bersifat ke dalam, yakni peningkatan dan pemantapan spiritual dalam diri kita. Berikutnya, bersifat keluar, adalah dalil "musuh utama komunis adalah kemakmuran". Untuk itu, peningkatan kemakmuran lewat pembangunan harus berjalan terus, "sehingga dapat menghasilkan kehidupan yang adil dan merata - memapankan bidang ekonomi". Seiring dengan dinamika pembangunan, maka ada gerak dinamika masyarakat untuk maju, untuk sejahtera. Keberhasilan pembangunan dan kemajuan yang dihasilkannya adalah penangkal terhadap musuh pembangunan dan ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan dalam masyarakat, dapat dimanipulasikan dan dimanfaatkan oleh kalangan komunis. "Kesejahteraan harus ditingkatkan secara merata, yakni kesejahteraan tanpa kesenjangan kaya-miskin".

Terkait dengan itu, dengan segala keberhasilan dan kesulitan pembangunan yang kita jalankan selama ini, maka perlindungan hukum dan keadilan merupakan salah satu bidang yang selalu harus mendapat perhatian kita. Harus ditangani lebih intensif dan serius. "Kurangnya rasa keadilan dan perlindungan hukum, jelas akan merupakan salah satu sumber keresahan masyarakat. Ini yang harus kita cegah. Karena, dimana ada keresahan, di situ muncul pola-pola komunis. PKI akan mulai bergerak dengan isu-isu yang menghasut, sehingga tidak jarang mengecilkan bahkan meniadakan arti pembangunan yang telah kita capai selama ini".

Generasi saya ini, boleh dikatakan tidak tahu secara langsung, tidak menyaksikan pemberontakan G30S/PKI. "Generasi muda sekarang ini hidup dalam iklim ekonomi Orde Baru yang baik, relatif tidak begitu susah sebenarnya dan cukup fasilitas untuk maju". Tapi yang dihadapi pemuda justru adanya kesenjangan sosial diantara pemuda sendiri dan diantara masyarakat. "Ini yang rawan". Padahal, timbulnya pendapat-pendapat tentang 'pertentangan kelas' merupakan awal bagi komunisme. Sistem pendidikan pun harus dikoreksi secara bertahap dan dikaji kembali secara mendalam. Pendidikan formal harus lebih intensif dan dimantapkan dengan memperhatikan aspek demokrasi pendidikan - dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk menikmati fasilitas pendidikan yang ada.

Hal lain yang kita perlukan adalah peningkatan peran partisipasi sosial, keikutsertaan rakyat secara aktif dalam menjalankan kebijaksanaan pembangunan.

"Partisipasi sosial yang efektif merupakan pula salah satu unsur ketahanan nasional". Kontrol yang terbuka di masa Orde Baru ini akan memberikan makna strategis terhadap kelangsungan pembangunan bangsa, terutama "bila semua pihak memiliki keberanian menentukan sikap kepeloporannya". Sikap kepeloporan yang dimaksud adalah suatu kesadaran dan ketulusan untuk menentukan pilihan

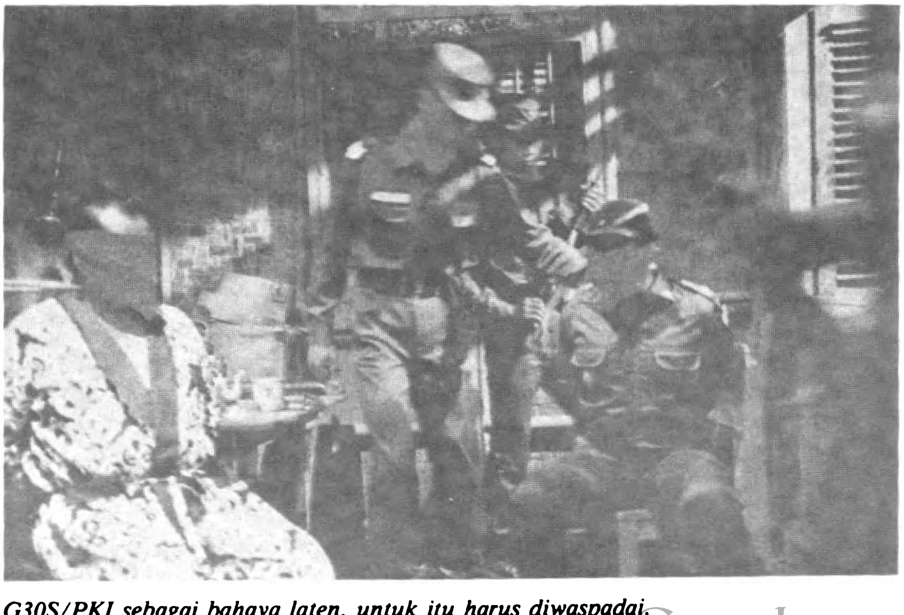

G30S/PKI sebagai bahaya laten, untuk itu harus diwaspadai.

Digitized by Google

'kawan-lawan' Pancasila sebagai ideologi negara.

"Lima Tahun Mendatang, Memang Ada Masalah-masalah Strategis"

Drs Madiri Thamrin Sianipar, Dosen Universitas Krisnadwipayana.

Madiri Thamrin Sianipar

Isu mengenai ada orang yang dulu terlibat dalam organisasi terlarang dan kini duduk dalam jajaran birokrasi, memang berkembang belakangan ini. ''Apakah benar orang yang duduk dalam birokrasi itu terlibat, saya tidak tahu persis''. Yang jelas, isu seperti itu dibantah Menko Polkam dan Menhankam.

Sebenarnya, untuk menangkal orang-orang eks PKI dan mantel-mantelnya ini hidup dan berkembang, pemerintah punya sejumlah garis kebijaksanaan. Pertama, eks PKI dan mantel-mantelnya serta ideologinya dinyatakan sebagai bahaya laten. Kedua, dalam rangka itu maka diperlukan kewaspadaan dan ketahanan nasional. Dan yang ketiga, ada penggarisan mengenai bersih diri dan lingkungan.

Kalau kita mencoba menelusuri anatomi perkembangan komunis di Indonesia, akan terlihat bahwa ''pada kesempatan apapun mereka akan siap''. Pada tahun 1926/1927 misalnya mereka (PKI) 'masuk' melalui jalur organisasi agama. Waktu itu kaum komunis berelaborasi dengan Sarekat Islam. Sehingga, terjadi dua aliran dalam SI, yaitu aliran putih yang kemudian melahirkan Sarekat Dagang Islam, dan aliran merah yang kemudian mendirikan Partai Komunis (PKI). Lalu, pada tahun 1948, PKI berusaha 'masuk' melalui kemelut politik, terjadi Peristiwa Madiun.

Menurut teori Gertz, kaum santri cenderung untuk memilih NU atau Masyumi, sedang kelompok priyayi cenderung memilih PNI dan kaum abangan akan cenderung memilih PKI. Kini, secara teoritis, eks PKI agak lebih susah untuk masuk organisai agama. Masuk akal kalau mereka memilih mencoba kemungkinan masuk ke dalam jajaran birokrasi. Dan juga ormas maupun orpol.

Dalam upaya penyusupan itu, setelah kegagalan di tahun 1965, dalam gerakannya PKI dapat menggunakan dua macam jalur atau bentuk. Pertama, dengan menggunakan eks PKI sendiri atau eks Partindo dan PNI Asu sebagai intinya. Sedangkan plasmanya, adalah tindakan-tindakan kita sendiri yang dengan sengaja atau tidak menciptakan keadaan dan peluang bagi komunisme untuk hidup. Kedua, mereka bergerak dengan menyatakan diri anti komunis.

Terlepas dari itu, apakah munculnya isu-isu tentang adanya orang yang duduk dalam birokrat kini pernah terlibat G30S/PKI, bukan merupakan isu politik menghadapi lima tahun mendatang? ''Ini bisa saja terjadi''.

Dalam masa lima tahun yang akan datang memang akan terdapat masalah-masalah yang strategis, ''yaitu proses suksesi''. Dan berikutnya lagi, adalah proses regenerasi. Lalu yang ketiga, masalah lepas landas. Dalam kerangka lepas landas, akan dihadapi dua macam hal atau alternatif. Apakah dalam lepas landas itu kita menangis atau bergembira. Kalau menangis, berarti kita gagal, seperti Iran misalnya. Ataukah kita bergembira, seperti Taiwan misalnya.

Bila kita melihat keadaan di negara-negara lain, antara yang kebagian dan yang tidak kebagian itu terdapat masalah. Di negara kita, bila yang tidak kebagian itu makin bertumpuk, akan menjadi celah penetrasi bagi eks PKI.

Kalau ditanyakan, isu PKI seperti yang dilontarkan belakangan ini, masyarakat tampaknya tidak begitu tertarik. Jadi, kemungkinannya, ada yang secara mendasar melemparkan hal itu. Bila dikaji, mengenai orang per orang, kembali kepada soal yang 'tidak kebagian' yang makin bertumpuk. Golkar sendiri tentu bisa menghadapi masalah ini. Yang tidak masuk DPR atau yang tidak jadi ini dan itu, dapat 'merepotkan' Golkar. ''Dan ini dapat melemahkan Golkar itu sendiri''. Lalu? ''Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penataan ulang bagi kaderisasi Golkar, termasuk dalam arti untuk menangkal intrik-intrik politik yang dapat memungkinkan PKI dapat kembali tumbuh''.

Kita menghadapi pula masalah ekonomi. Pajak masih sulit untuk terlalu diharapkan. Begitu pula non-migas. Koperasi pun belum mantap. Oleh karena itu kita harus berpaling dari mobilisasi politik kepada partisipasi. Dan partisipasi harus tumbuh dengan sukarela dari masyarakat. Sebagai salah satu kekuatan pokok Orde Baru, Golkar harus berperan. ''Kalau Golkar tidak dapat mengkanalisir permasalahan tersebut, bisa lain jadinya''. □

(RA/BM/DT/RMS)

Diperlukan kewaspadaan dan ketahanan nasional yang tangguh.

Digitized by Google

Perlu Waspada Terhadap PKI Tetapi Tidak Usah Panik

Akhir-akhir ini, 23 tahun sesudah peristiwa berdarah G 30 S/PKI pada 1965, melalui berita-beritanya berbagai media massa mengungkapkan masalah bahaya komunisme. Berbagai ulasan dan pandangan sejumlah tokoh mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya komunisme sebagai bahaya laten, meski partai komunis sendiri telah dibubarkan sejak 1966 lalu.

Akan adanya berita-berita itu, Menko Polkam Sudomo, dalam wawancara dengan Media Karya mengemukakan, bukan tanpa alasan. Sebagai latar belakang, mantan Pangkopkamtib itu mengidentifikasi beberapa hal yang dapat menjadi alasan mengapa isyu mengenai komunisme ini kembali memasyarakat. Pertama, ketika Sidang Umum MPR lalu, masalah komunisme ini memang diungkap dan itu mungkin dimaksudkan oleh para politisi sebagai "warning" atau peringatan akan bahaya komunisme sebagai bahaya laten. Selain itu, selama sidang wakil-wakil rakyat itu memang banyak selebaran beredar di masyarakat, yang tidak mustahil didalangi oleh bekas PKI. Kedua, terbongkarnya tokoh yang berindikasi terlibat G 30 S/PKI menjadi pemimpin suatu kekuatan sospol. Ketiga, terbongkarnya kasus seorang tokoh golongan C yang berhasil dipilih menjadi lurah di Jawa Tengah. Keempat, ada eks PKI yang menyarankan pembentukan partai baru, dan itu mucul di koran, yang dapat dikaitkan dengan reaksi tokoh eks tahanan Pulau Buru Pramudya Ananta Tour yang memberi tanggapan kepada wartawan kawakan Rosihan Anwar di surat kabar. "Soalnya masalah-masalah itu dimuat di koran, dan masalahnya lalu terangkat meluas, dan itu memang bahayanya," kata Sudomo.

Terhadap meluasnya masalah komunisme ini, Sudomo mengakui, pihak yang berwajib, dalam hal ini pemerintah memang tadinya kurang cepat memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga timbul berbagai interpretasi. Semestinya, katanya, pemerintah tadinya memang perlu memberikan penjelasan, sehingga permasalahannya dapat didudukkan pada proporsi yang sebenarnya, dan masyarakat pun tetap tenang.

Tentang komunisme sendiri, Sudomo menegaskan, gerakan itu merupakan bahaya laten. MPR sendiri menyadari akan hal itu dan melalui salah satu ketetapannya mengingatkan kepada rakyat akan bahaya laten komunis.

Sejarah juga telah memberikan pengalaman. Pada tahun 1948 PKI mengadakan pemberontakan, tetapi berhasil digagalkan. Dalam waktu yang relatif singkat, PKI berhasil bangkit dari puing-puing kehancurannya, dan dalam jangka waktu kurang 20 tahun telah menjadi kekuatan besar, bahkan mengadakan aksi pemberontakan pada 1965, meski akhirnya juga berhasil dihancurkan. "Meski PKI berhasil dihancurkan, bahayanya belum tentu hilang karena komunisme ini menyangkut ideologi, menyangkut keyakinan. Jadi sulit untuk menghilangkannya," katanya. Tahun 1965 PKI berhasil dipukul, sejumlah tokohnya ditahan di Pulau Buru, dan dicoba untuk direhabilitasi. Pada tahun 1979 mereka sudah dilepas kembali ke masyarakat. "Tetapi masalahnya, komunis ya tetap komunis. Dan karena ini menyangkut ideologi atau keyakin-

Sudomo

Digitized by Google

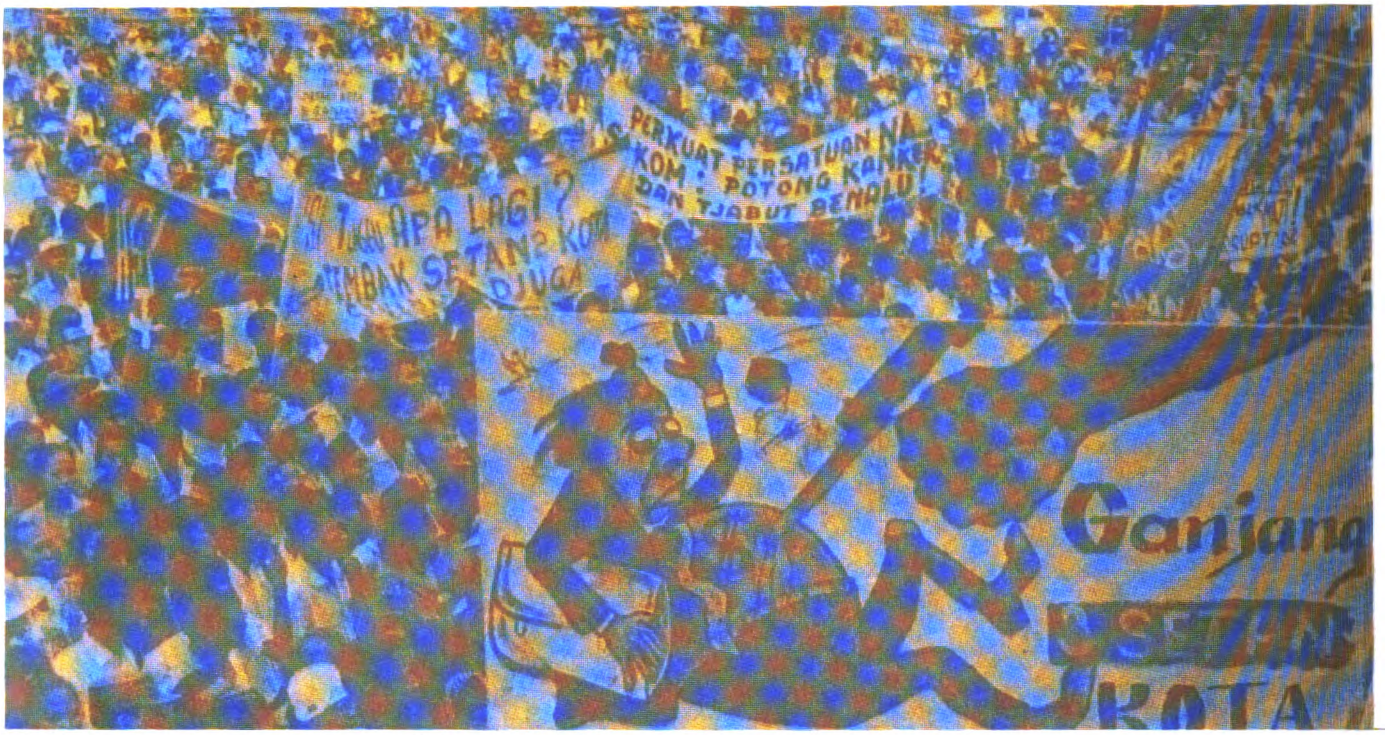

Ada beberapa dokumen tentang PKI di daerah yang hilang

an, bukan mustahil kalau ada kesempatan akan dimanfaatkan untuk kembali lagi,'' kata Sudomo.

Come Back

Ia mengingatkan, pada HUT PKI ke 60, Jusuf Ajitorop dalam pengasingan mengatakan, bahwa tahun 1982 dipakai sebagai titik tolak untuk kembali lagi (come back). Dasar untuk kembali lagi itu menurut Sudomo bukan tanpa alasan. Dipilihnya periode 1982 tidak dapat dilepaskan dari siklus regenerasi ABRI. Pada saat itu generasi Angkatan 45 mulai berkurang, dan mulai tampil generasi baru dalam kepemimpinan ABRI. Kekuatan komunisme itu akan memanfaatkan situasi dengan keyakinan kepemimpinan ABRI yang baru sudah tidak begitu memahami atau mengenal gerakan komunisme lagi sehingga mudah disusupi.

Potensi bekas G 30 S/PKI masih besar. Pada tahun 1979 saat pelepasan terakhir tahanan Pulau Buru tercatat 33 ribu golongan B, dan sekitar 500 ribu golongan C. Di luar itu, tercatat 173 ribu di berbagai departemen yang masih perlu di ''screen'' dan tetap diperbolehkan bekerja di lingkungan pemerintahan, meski tidak menduduki pos penting dan strategis. Selain itu, tahanan-tahanan golongan A yang sudah diadili, telah selesai menjalankan masa hukumannya. Jumlah mereka ini tidak tercatat jelas. Belum lagi bekas anggota golongan F dan kader-kader yang ada di luar negeri, di antaranya ada yang berhasil kembali. Kesemuanya itu menunjukkan, meski jumlah mereka berkurang, potensi tetap ada dan besar.

Menurut Sudomo, petunjuk untuk ''come back'' tetap ada. Ada beberapa dokumen tentang PKI di daerah yang hilang. ''Bahkan naskah pembubaran PKI yang asli itu tidak ada sekarang ini. Yang orisinil ditandatangani Presiden pada 12 Maret setelah Supersemar ternyata hilang. Selain itu ada dokumen-dokumen yang isinya telah dimanipulasi, misalnya dokumen pembubaran PKI itu dalam konsideransnya tetap mengakui jasa-jasa PKI. ''Jadi ini bukan hantu di siang hari bolong dan bukan untuk mengalihkan segi lain. ''Bagaimana pun perlu kewaspadaan,'' katanya seraya mengingatkan, apabila seseorang melihat gejala komunisme hendaknya segera melaporkan kepada yang berwajib. ''Menko Polkam siap menerima laporan,'' ucapnya.

Menjelaskan bagaimana cara PKI bergerak, Sudomo mengungkapkan strategi peperangan revolusioner komunisme, mengutip pendapat John I Mc Cuen. Dari segi organisasi, umumnya golongan revolusioner memulai dari suatu yang nihil. Bermula dari suatu kenihilan, memerlukan suatu pengorganisasian. Secara rahasia, golongan revolusioner akan mengorganisir diri, pertama-tama, sel-sel, kemudian jaringan konspirasi secara luas. Di sekeliling sel-sel mereka akan membentuk grup politik dan propaganda untuk mendapatkan dukungan massa dan membentuk tim teroris untuk melakukan intimidasi dalam hal propaganda mengalami kegagalan.

Mereka akan mengorganisir front-front, partai-partai dan pressure groups untuk memobilisir dukungan massa. Agen-agen akan menginfiltrasi pemerintahan, angkatan bersenjata, polisi, serikat-serikat buruh dan pusat-pusat kekuasaan lainnya. Jaringan intelijen akan didirikan. Golongan revolusioner tersebut akan mengadakan demonstrasi, pemogokan, sabotase dan kekacauan-kekacauan. Mereka akan memperbesar skala dan volume serangan propaganda mereka terhadap pejabat-pejabat yang memerintah. Seluruh lapisan di dalam struktur sosial dan administrasi akan dikembangkan dan dieksploitir. Menghadapi kontra aksi oleh polisi, organisasi golongan revolusioner akan menjadi lebih keras, lebih bersatu dan berpengalaman.

Revolusi, demikian Sudomo, mengutip ''Philosphy & Political Action oleh Virginia Held Cs'', adalah penggulingan suatu pemerintahan dan konstitusi yang sah oleh suatu klas sosial atau suatu gerakan dengan tujuan untuk mengganti struktur sosial maupun struktur politik (dari pemerintah tersebut).

Pentahapan strategi perang revolusioner menyangkut 3 hal. Tahap I, Penyusupan/infiltrasi, Tahap II, Pe-

Digitized by Google

Pemerintah telah menempuh strategi dasar pembangunan ekonomi nasional untuk memerangi kemiskinan dankebodohan.

matangan revolusioner: a. pengembangan subversi (Subversive build up), b. Guerilla/insurgence, c. Waor of movement. Tahap III adalah Revolusi.

Untuk menghadapi bahaya laten G 30 S/PKI, pemerintah telah menempuh strategi dasar yang dapat menjadi pedoman bertindak. Strategi dasar itu:

1. Menegakkan dan meningkatkan Ketahanan Nasional di bidang ideologi dari masyarakat melalui pendidikan politik khusus dengan penyelenggaraan Penataran P-4 dan Kewaspadaan Nasional. Dijelaskan, masalah ini sudah dilaksanakan melalui penataran P-4 oleh BP-7 serta kursus Kewaspadaan Nasional di Lemhanas. Bahkan kini penataran P-4 telah menambah kurikulum penataran dengan materi kewaspadaan nasional, yang menyangkut bahaya komunisme.

2. Memelihara dan meningkatkan stabilitas Nasional dengan penekanan kepada pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional dan pengamanan kebijaksanaan pembangunan untuk tidak berkembang menjadi gejolak sosial, sehingga tertutup kemungkinan pemanfaatan situasi oleh G 30 S/PKI untuk pematangan revolusioner. Sudomo memberikan contoh bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi adu domba antar kelompok masyarakat dengan mengobarkan gejolak perbedaan sosial. Bahkan, tidak mustahil komunisme itu menyusup pada kelompok keagamaan.

3. Pembangunan Ekonomi Nasional yang berhasil memerangi kemiskinan dan kebodohan yang merupakan tanah subur untuk berkembangnya komunisme.

4. Pengawasan efektif terhadap eks tahanan G 30 S/PKI yang telah dikembalikan ke masyarakat baik golongan A, B maupun C melalui sistem teritorial. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan semua pihak sebab belakangan diketahui ada usaha-usaha dari para bekas anggota G 30 S/PKI yang mencoba menghilangkan jejak.

Atas pertanyaan, Sudomo mengatakan, saat ini kekuatan ancaman bahaya komunisme memang belum serius. Mereka baru pada tingkat I, yaitu tingkat mengadakan subversi. "Jadi belum sampai tingkat sedemikian rupa seperti mau kiamat", katanya. "Tetapi kita harus waspada, karena mereka itu dapat menjalankan taktik adu domba antar kita", katanya, menambahkan.

Para bekas tahanan PKI yang kembali ke masyarakat itu tetap diawasi dan dibina. Mantan Pangkopkamtib itu mengatakan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk membina mereka. Pembinaan itu dikordinir oleh pemerintah daerah melalui aparatur pembina teritorial, dalam hal ini Koramil. Dalam pembinaan itu mereka tetap diawasi, dan tidak boleh menjadi anggota ABRI, aparat pemerintahan, bekerja sebagai guru, bekerja di lingkungan pers, dalang, serta partai politik dan Golkar. Kecuali cabang-cabang profesi itu, sebagai warga masyarakat, mereka berhak hidup dan mencari nafkah. Bahkan warga masyarakat berupa perorangan maupun badan atau kelembagaan dapat membina dan mempekerjakan mereka asalkan di bawah kordinasi dan pengawasan pemerintah.

Tentang kegiatan Pramudya sebagai penulis, Sudomo mengatakan, bahwa hukum tidak melarang seseorang untuk berkarya tulis. Setelah tulisan jadi, akan dikaji apakah memuat pemikiran yang bertentangan perundang-undangan atau tidak. Dalam hal ini, ternyata ada tulisan Pramudya yang bertentangan dengan perundang-undangan, dan karenanya dilarang. "Pemerintah memang sedang memikirkan bagaimana penindakan terhadap yang bersangkutan serta penerbitnya," kata Sudomo.

Atas pertanyaan, apakah bekas anggota G 30 S/PKI dapat direhabilitasi, Sudomo mengatakan "tidak" "Bekas Gestapu ya tetap bekas Gestapu", katanya. Bahkan keikutsertaan pada penataran P4 tidak akan menghilangkan status itu. Keikutsertaan pada penataran P4 bukan merupakan jaminan bagi bekas anggota Gestapu.

Sudomo juga mengiakan, bahwa bahaya bukan datang dari PKI saja, tetapi juga dari kekuatan lain. "Kita kenal bahaya ekstrem kiri dan kanan, serta liberalisme", katanya. Diakuinya, bahwa bahaya PKI paling konseptual, meski bahaya lainnya tidak dapat diabaikan. Bahaya ekstrem kanan yang bercorak keagamaan radikal masih sering muncul, dan perlu mendapat perhatian. Demikian pula, liberalisme juga merupakan bahaya yang sulit dideteksi karena penampilannya kadang-kadang tidak terlihat.

Mengenai eksistensi Kopkamtib yang bertugas mengamankan negara dari unsur-unsur bahaya, Sudomo mengatakan, lembaga itu menjadi tanggungjawab Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Penugasan oleh Presiden kepada Pangkopkamtib tidak lebih sebagai pendelegasian wewenang. Lembaga ini hanya MPR yang dapat membubarkan. Kopkamtib ini mempunyai kewenangan langsung bertindak terhadap anasir-anasir yang mengancam keamanan dan ketertiban negara. Peran lembaga ini memang bersifat menangkal bahaya yang mungkin terjadi, demikian Menko Polkam, Sudomo. □ Sugiyanto/Subandrio.

Digitized by Google

Kuncinya, Kepatuhan Pada Cita-cita

PKI yang mengimpikan ideologi komunis, tetap menjadi bahaya laten bagi Indonesia. Sebagai ancaman yang sifatnya laten, maka intensitas bahaya yang melekat dalam dirinya, tetap aktual. Konsekuensi logisnya, kewaspadaan terhadap bahaya laten harus tercermin dalam setiap front.

Salah satu segmen dalam masyarakat yang perlu mewaspadai bahaya laten komunisme, adalah pers. Institusi ini, seperti kata Menteri Penerangan Harmoko, adalah media yang ampuh, baik untuk mencegah komunisme maupun sebagai target yang bisa dimanfaatkan sebaliknya. "Karena itu sejak tegaknya Orde Baru, pers konsisten melawan ideologi Komunisme, Marxisme maupun Leninisme," kata Harmoko dalam wawancara dengan *Media Karya* baru-baru ini.

Karena pers bisa menjadi media yang efisien untuk disusupi ideologi komunisme, maka kewaspadaan itu terjelma dalam serangkaian institusi yang selama ini terpelihara baik. Insitusi pertama dan utama adalah insan pers itu sendiri. Atau individu-individu pelaksana media pers, termasuk di dalamnya, para wartawan. Sebagai institusi pertama dan utama, maka insan pers harus mengerti betul betapa gawatnya bila paham Komunisme menyusup dalam tubuh pers. Untuk itu, kita mengembangkan perangkat penangkal, yaitu sistim pers Pancasila. Artinya pers kita harus mengembangkan norma-norma pers yang sesuai dengan budaya dan ideologi Pancasila. "Tidak yang lain."

Pancasila telah memberikan landasan kesistiman yang handal untuk menangkal paham Komunisme. Pengamalan Pancasila oleh pers nasional, dengan demikian, harus tercermin dalam bentuk berita, tulisan, dan opini serta lainnya.

Dan agar menjamin insan pers menangkal paham dan bahaya Komunisme, maka ada institusi lain yang mendukungnya, yaitu praturan dan perundang-undangan. Dalam TAP MPRS No 25/1966, jelas tercantum ketentuan bahwa pers Indonesia tidak memuat paham, tulisan maupun berita yang berpahamkan Komunisme, Leninisme maupun Marxisme. Larangan ini kemudian disusul dengan peraturan lain yang secara tegas tidak mengizinkan media pers mempekerjakan para sisa G'30'S PKI. UU Pokok Pers tahun 1966, kemudian disempurnakan dengan UU Pokok Pers tahun 1982 yang berlaku hingga sekarang dimana konsistensi keharusan agar pers menangkal faham Komunisme, tidak pernah kendor.

Bila melihat serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang mengatur lembaga pers dalam rangka menangkal paham Komunisme, orang mungkin akan tergoda bertanya, "Begitu penting kah pers itu?". "Belajar dari pengalaman sejarah dan hakekat pers itu sendiri, maka pers sebagai media yang vital untuk merebut opini publik, tidak perlu diragukan lagi khasiatnya," jawab Harmoko.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa informasi dan komunikasi, pers sebenarnya menjaja produk yang diperlukan khalayak. Dia mampu membentuk maupun mempengaruhi opini publik. Dan dapat dibayangkan bagaimana celakanya kalau pers yang merasuk publik dengan informasi, kesusupan paham Komunisme. Bahaya yang ditimbulkannya akan luar biasa. Bila pers telah terjangkit paham Komunisme, maka produk yang dijajakan, (dalam konteks Indonesia) adalah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk memperkuat argumen ini, Harmoko coba menoleh pada pengalaman sejarah. Menjelang atau sebelum tahun 1966, pers nasional terbagi sangat kentara dalam dua kubu, yang satu pers yang berpahamkan Komunisme (PKI) dan yang lain adalah pers Pancasila. Antara sesama pers saling menyerang dan beradu argumentasi, sehingga khalayak pembaca dibuat bingung untuk menentukan

Harmoko, kewaspadaan terhadap bahaya laten harus tercermin dalam setiap front.

Digitized by Google

Pancasila telah memberikan landasan kesistiman yang handal untuk menangkal paham komunisme.

mana yang benar dan salah. Pers PKI yang dimotori Harian Rakyat waktu itu, membuat istilah-istilah bernada agitatif untuk meruntuhkan Pancasila. "Pers yang begini jelas tidak mendidik."

Institusi kedua dalam lingkungan media pers yang bisa menangkal bahaya Komunisme/PKI, adalah lembaga penerbitan. Sesuai dengan UU Pokok Pers tahun 1982, penanggungjawab penerbitan pers yaitu Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi diharuskan menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan sistim Pers Pancasila. Dengan demikian Pemimpin Umum dan Pemimpin redaksi bertanggungjawab dalam menegakkan kewaspadaan.

Sang Pemimpin Umum bertanggungjawab terhadap segi manajemen, termasuk mewaspadai iklan-iklan yang mungkin menyusupkan pesan-pesan dan propaganda yang berbau Komunis. Pemimpin Umum bersama Pemimpin Perusahaan juga bertanggungjawab terhadap pencetakannya. Karena perusahaan percetakan pers juga harus mencegah penyusupan paham Komunisme, Marxisme maupun Leninisme.

Sedangkan isi dan watak pemberitaan adalah tanggungjawab Pemimpin Redaksi. Dengan demikian Pemimpin redaksi diserahi tanggungjawab kewaspadaan jangan sampai berita, tulisan, analisa, opini, gambar maupun foto yang dimuat dalam surat khabar bernafaskan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Dan kelembagaan ketiga yang melengkapi perangkat kewaspadaan adalah organisasi-organisasi pers itu sendiri. Di bidang redaksional, tanggungjawabnya ada pada PWI, di bidang perusahaan ada SPS, di bidang percetakan ada SGP dan di bidang periklanan ada P3I. "Dari tiga unsur kelembagaan itu kita membentuk sistim," ujar Harmoko.

Lantas seberapa jauh tanggungjawab Departemen Penerangan dalam hal menumbuhkan pers yang handal menangkal paham Komunisme? "Deppen adalah lembaga yang tugasnya membina agar pers nasional benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan landasan idealnya, landasan konstitusional-nya, landasan yuridisnya serta landasan kemasyarakatan," tegas Menpen.

Hati & Kepala Dingin

Isu dan pemberitaan yang bertopik PKI, seakan lenyap dari sentuhan pers nasioal dalam satu dasawarsa terakhir. Tetap belakangan pers nasional sempat membuat "ramai" dengan pemberitaan-pemberitaan di sekitar PKI. Dan bersamaan dengan itu, muncul pula tendensi untuk menuding lawan politik sebagai 'orang yang tidak bersih".

Hakekat kewaspadaan, adalah meningginya kecurigaan. Karena PKI bisa menggunakan segala cara untuk *come back*, maka tudingan dan pemberitaan sekitar PKI yang dilansir koran-koran nasional baru-baru ini, harus diikuti dengan kewaspadaan yang prima. Artinya, bila seseorang menuding lawannya PKI atau mengungkit masalah PKI, tidak dengan otomatis yang bersangkutan bersih. Karena kader-kader PKI menguasai betul cara-cara maling teriak maling.

Bertolak dari rasa kewaspadaan seperti itu, maka tendensi pemberitaan pers tentang PKI belakangan ini, masuk dalam kategori mana? Apakah pers kita telah kesusupan PKI? Atau pers kita benar-benar hanya mengingatkan agar kita tetap waspada terhadap PKI?

Menurut penilaian Harmoko, berita-berita tentang PKI yang diramaikan surat khabar baru-baru ini, masih dalam misi mengingatkan agar kita tidak mengendorkan kewaspadaan terhadap penyusupan orang-orang eks PKI. Pers setidak-tidaknya ingin membuktikan bahwa lembaga ini tetap waspada terhadap bahaya PKI.

Menyentil kewaspadaan, adalah hal arif bila itu dilakukan pers. Insan pers mungkin menangkap betul militansi para kader PKI. Dalam catatan sejarah kembalinya PKI ke pentas politik formal kita, disebabkan oleh faktor kelengahan.

Sebagai contoh, setelah dihancurkan tahun 1948 menyusul peristiwa berdarah di Madiun, PKI pimpinan Muso waktu itu, berhasil ditenggelamkan. Tapi karena faktor kelengahan, pada tahun 1952, muncul Harian Rakyat yang memperjuangkan kepentingan PKI. Dan apa lacur, pada Pemilu 1955 — hanya berselang tujuh tahun dari Peristiwa Madiun — PKI berhasil masuk dalam 5 besar partai yang memenangkan simpati rakyat. Penampilan kembali yang gemilang itu, akhirnya buntu pada anti klimaks peristiwa G'30'S PKI di tahun 1965. PKI akhirnya dibubarkan. Namun gagal tahun 1965, PKI belum jera. Tahun 1968, hanya berselang tiga tahun, mereka coba muncul dalam pergolakan bersenjata di Blitar Selatan.

Kalau sekarang pers memberitakan soal PKI, bobotnya adalah menyentil kewaspadaan. Kita berada alam era Orde Baru yang dalam catatan sejarah merupakan kurun stabil paling lama

Digitized by Google

sepanjang eksistensi republik ini. Dan bila pers sekarang mengingatkan agar kita waspada terhadap bahaya PKI, itu adalah sentilan yang bijaksana. "Jadi jangan menganggap pemberitaan pers sekitar kewaspadaan kita terhadap PKI belakangan ini, seperti hantu yang muncul di siang bolong," kata Harmoko.

Hanya saja, di tengah ramainya pers mengingatkan kita agar waspada terhadap penyusupan eks PKI, Deppen ternyata melihat ada institusi pers yang justru kesusupan. "Untuk itu Deppen telah memberi peringatan keras penerbitan pers tersebut," ujarnya. Pemerintah, kata Harmoko, tidak pernah mentolerir pers yang dijangkiti paham komunis, marxis maupun Leninis. Tidak hanya itu. Pemerintah pun waspada terhadap kemungkinan pers terjerumus pada kepentingan ekstrim kanan Konsistensi pemerintah dalam hal bahaya Komunisme ini terpantul pada tahun 1984, ketika menutup sebuah penerbitan yang berindikasi komunis.

Tapi bila pers menganggap bijaksana menyentil kewaspadaan dengan memberitakan soal-soal sekitar PKI, pers pun diminta agar bijaksana dalam memberitakannya. Jangan sampai hakekat pemberitaan yang menyentil kewaspadaan, justru terjerumus dalam adu domba. Pers juga diminta agar tidak emosional. "Kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan kepala dingin dan hati yang dingin juga, agar hasilnya nanti menyejukkan masyarakat," ujar Harmoko.

Sebagai lembaga yang membina, Deppen memang berupaya, misalnya lewat penataran-penataran, agar pers tidak kesusupan. Deppen, menurut Harmoko, masih menyimpan file-file tentang eks-eks wartawan yang dulu bekerja pada harian-harian PKI. Bila ada penerbitan yang mempekerjakan mereka, akan ditindak.

Pemerintah memang melihat ada indikasi itu. Karenanya, Deppen telah memberi teguran agar hal tersebut diperhatikan. "Bila kemudian tertanya tidak digubris, kita akan mengambil tindakan keras sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Harmoko.

Karena vital-nya pers sebagai media yang empuk untuk menyebarkan paham dan perjuangan komunis, maka pembentukan kader-kader Pancasilais di lingkungan pers menjadi kebutuhan yang urgen. Karena menurut Harmoko, pembentukan kader dalam rangka regenerasi, tidak hanya berurusan dengan pergantian orang

Membangun kerangka kesistiman untuk menolak habis paham komunisme.

atau individu. Yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi nilai.

Pengkaderan dalam pengertian transformasi nilai menjadi kebutuhan kita, karena kemudian hari, pers nasional akan dikelola oleh individu-individu yang tidak mengalami secara empiris bagaimana trauma PKI itu. "Dan bila transformasi nilai ini berjalan baik, tidak usah diragukan bahwa kemudian hari pers kita semakin luntur kadar kewaspadaannya terhadap bahaya laten PKI," katanya.

Kepatuhan Nilai

Setiap bahaya laten, kewaspadaan terhadap PKI tidak boleh terbatas pada pemantauan atau pengalaman empiris saja. Artinya mengetahui bahaya oknum-oknum PKI, tidak lagi sekedar mengecek file dan data diri oknum yang dicurigai.

Satu atau dua dasawarsa mendatang, generasi bangsa ini mungkin tidak menyimpan lagi orang-orang yang mempunyai pengalaman empiris dengan keganasan PKI. Ini berarti alat ukur kewaspadaan dan perangkat penangkal yang handal pun berubah. Bahaya PKI tidak lagi mengacu pada orang, tapi semangat dan karakter. Bagaimana mewaspadai ini semua?

Tentu kemudian hari kewaspadaan akhirnya tidak terbatas pada pengecekan data diri dan tim screening, seperti yang sekarang lazim dipergunakan. Mewaspadai bahaya laten PKI kelak harus menggunakan perangkat yang lebih komprehensif dan handal. "Kuncinya adalah kepatuhan kita pada nilai-nilai yang dijunjung bersama," ujar Harmoko.

Karena itu, sejak sekarang kita membangun kerangka kesistiman yang menolak habis paham Komunisme, Marxisme maupun Leninisme. Untuk itu sejumlah peraturan dan perundang-undangan dibentuk, lengkap dengan aturan mainnya. Bila kesistiman Pancasila yang dibangun sekarang diperkuat terus-menerus, maka kita tidak akan kehilangan alat ukur untuk mengetahui seseorang atau sebuah paham itu berindikasi komunis atau tidak.

Dan dalam kerangka ini, pers diharap memberi informasi yang jujur, terbuka dan edukatif. Tidak emosional atau mengadu-domba.

Setelah dua dasawarsa Era Orde Baru, kestabilan sosial politik yang cukup terjaga, menyebabkan pers pun semakin menemukan dirinya ikut berperan dalam pembangunan serta menghayati sistim pers Pancasila. Apresiasi terhadap missi pers yang bebas dan bertanggungjawab, lama-kelamaan terdefinisi secara pas.

Dan dalam konteks menangkal bahaya Komunisme, pers kita adalah pers perjuangan. Artinya, pers nasional akan berada di pihak Pancasila. Tidak yang lain. □ (LT/BM)

Digitized by Google

Sejumlah Masalah Dalam Sorotan Fraksi Karya Pembangunan

Dalam konperensi pers akhir Juni lalu, FKP mengajak seluruh masyarakat, wartawan, kekuatan sospol dan Pemerintah untuk mengfokuskan perhatian terhadap masalah-masalah strategis yang kita hadapi.

Masalah-masalah yang dihadapi itu masih merupakan kelanjutan dari apa yang dikonstatir berulang-ulang selama ini, dengan beberapa penonjolan dalam beberapa aspek pembangunan. Yang menjadi perhatian kita secara khusus adalah kelanjutan dan peningkatan pembangunan kita, dimana beberapa hal pokok perlu mendapatkan perhatian.

Jangan menganut falsafah burung unta. Kita harus menghindarkan sikap burung unta yang membuta terhadap persoalan, dengan menganggapnya tidak ada. Kalau sampai waktunya masalah itu pasti akan keluar dan mungkin dalam ukuran yang tidak dapat dikendalikan lagi.

FKP mengajak untuk mengambil sikap waspada secara dini agar masalah dapat dilacak sedini-dininya, sebelum berkembang, dan menyelesaikan secara tuntas sampai ke akar-akarnya.

"Hanya dengan cara pandang yang tegas, lugas, apa adanya, dapat kita membebaskan diri kita dari bom-bom waktu kelak," kata jurubicara FKP, Rachmat Witoelar.

Secara tidak bosan-bosannya FKP menyatakan keyakinannya bahwa satu-satunya jalan untuk meningkatkan kewaspadaan adalah sikap keterbukaan, pers sehat, berani melihat pahitnya, dan curiga terhadap bau kesan segala beres.

Pembangunan & Partisipasi

Kita sekarang berada pada ambang waktu memasuki tahap pelaksanaan Pelita ke V, yaitu pelita terakhir dari seluruh rangkaian pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap ke I.

Sejalan dengan itu, Pelita V juga merupakan kurun waktu terakhir bagi pemantapan Kerangka Landasan Pembangunan Nasional, diatas mana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap ke II akan bertolak. Sehubungan dengan itu, perlu ditegaskan kembali keterikatan FKP sebagai lembaga dari Golongan Karya untuk terus melaksanakan Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila.

Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila berarti bahwa, segala perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus berpegang teguh pada tolok ukur yang satu yaitu: Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Nasional dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara, dijiwai oleh Sumpah Pemuda dan Bhineka Tunggal Ika, Pedoman dan Penghayatan Pengamalan Pancasila, serta Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sebagai satu rangkaian kesatuan.

Kewaspadaan Nasional perlu mendapat kembali perhatian yang lebih serius baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri karena dewasa ini kita berada dalam situasi peralihan seperti peralihan generasi maupun peralihan dari era pembangunan nasional jangka panjang pertama ke era jangka panjang kedua. Situasi peralihan biasanya mengandung beberapa titik rawan.

Pada sisi lain bekas terpidana dan tahanan G-30S/PKI baik dari golongan A, B maupun C telah kembali dan berbaur di dalam masyarakat yang tidak mustahil akan memanfaatkan situasi demikian bagi usaha "come back" mereka. Gejala ke arah itu antara lain adalah tindakan tindakan: ganti nama, ganti alamat dan ganti profesi yang memungkinkan mereka menduduki posisi-posisi tertentu di sektor Pemerintah maupun di sektor Masyarakat. Berbagai sinyalemen penyusupan mereka ke sementara Instansi Pemerintah, Orpol, Ormas dan media massa perlu mendapatkan pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Penerapan sistem dan prosedur screening dan pewaspadaan perlu dipertegas dan diperketat kembali baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Untuk dapat memantapkan sasaran kerangka landasan segala daya perlu dikerahkan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagaimana terinci dalam GBHN 1988.

Pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta pemanfaatan peluang-peluang dalam ruang

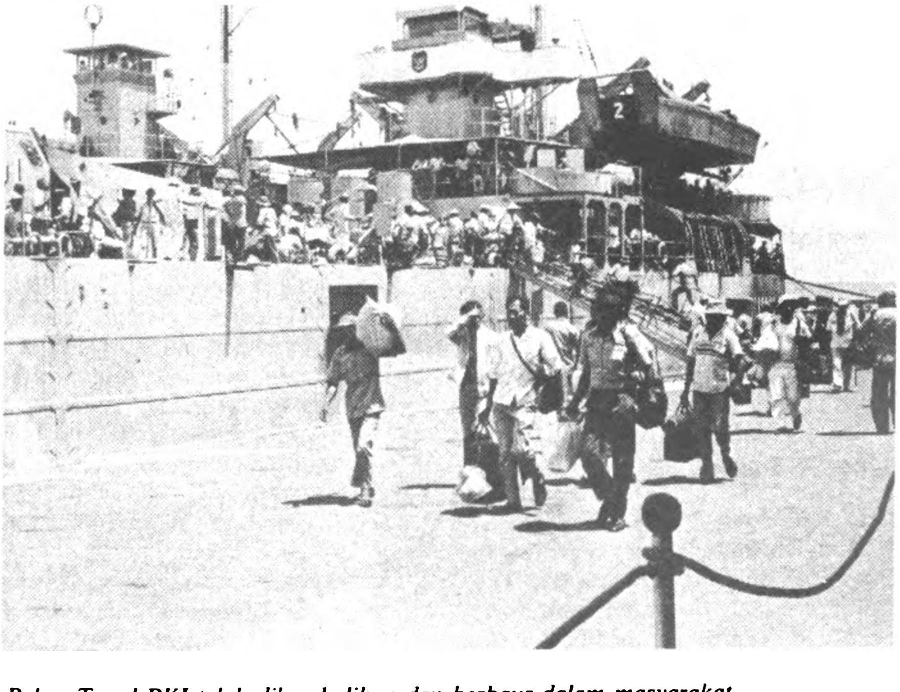

Bekas Tapol PKI telah dikembalikan dan berbaur dalam masyarakat.

Digitized by Google

lingkup Internasional perlu dilakukan untuk mencapai hasil maksimal.

Usaha tersebut akan dapat terwujud apabila hal itu merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat, sehingga karenanya perlu diciptakan suasana solidaritas sebagai satu bangsa yang berjuang. Terciptanya solidaritas adalah salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang sangat penting, dan menjadi lebih penting lagi karena kita sedang berhadapan dengan kesulitan di bidang ekonomi.

Segala hal yang dapat mengganggu terciptanya iklim solidaritas seperti: perlakuan hukum yang tidak adil, perlakuan hukum yang terbias karena latar belakang status sosial, ras, suku, agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keadaan yang memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat dan menyinggung rasa keadilan, pelayanan pemerintah terhadap warga negara di segala bidang yang kurang memadai, kurangnya rasa terjamin dalam keamanan dan ketertiban, korupsi serta penyalahgunaan wewenang dan hal-hal yang dapat menimbulkan "conflict of interest" dalam lingkungan aparatur pemerintah dll, harus terus menerus dihindari dan dihapuskan dengan konsekuen.

Sebaliknya, usaha untuk menjaga dan memenuhi hak-hak warga negara, penciptaan ketertiban umum disertai usaha-usaha penegakan disiplin Nasional harus digalakkan. Sementara itu dapat kita catat bahwa di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang ada, telah terjadi peningkatan peranan sektor masyarakat dalam ikut menjalankan roda perekonomian. Peningkatan peranan ini lebih dari sekedar bersifat situasional adalah merupakan salah satu tujuan pembangunan itu sendiri dan merupakan salah satu ciri dari kondisi tinggal landas yang sedang kita persiapkan. Oleh karenanya usaha untuk mendorong lebih lanjut persiapan auto activitas masyarakat harus terus ditingkatkan.

Deregulasi, debirokratisasi dan segala usaha lainnya untuk mencapai effisiensi dan mengikis ekonomi biaya tinggi harus dilanjutkan dan dipercepat. Disamping untuk mencapai daya saing hubungan Internasional, usaha tersebut adalah juga demi kepentingan dan dapat dinikmati masyarakat kita sendiri sebagai konsumen, yang pada gilirannya juga berarti membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengaduan masyarakat ke FKP menandakan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara lembaga, sebaliknya FKP dapat memperoleh masukan untuk memperjuangkan secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. FKP akan meneliti dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah tersebut sebaik-baiknya serta akan mencoba untuk mengusulkan penyelesaian yang lebih fundamental mengenai bahan-bahan yang diadukan oleh masyarakat karena kita konstatir bahwa sebagian besar pengaduan itu berkisar masalah tanah, kesempatan kerja maupun perlakuan kurang adil dari aparat pemerintah.

Perkembangan jaman menunjukkan bahwa kemajuan yang terjadi di bidang pengetahuan dan teknologi serta hubungan ekonomi antara bangsa/negara dalam ruang lingkup internasional, telah menyebabkan saling ketergantungan antar negara yang makin meningkat. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus tampil terhormat dan bertanggung jawab. Itu berarti bahwa kita harus benar-benar menyiapkan diri dalam percaturan internasional yang penuh persaingan di segala bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi telah menjadi ciri dari kuatnya posisi suatu negara. Oleh karenanya, disamping upaya-upaya memajukan perekonomian, peningkatan mutu sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian yang semakin besar.

Sikap Terhadap RUU Pendidikan

Dalam rangka itu peranan pendidikan, juga peranan lembaga-lembaga pendidikan masyarakat, perlu memperoleh iklim yang sebaik-baiknya untuk berkembang, konsisten dengan peningkatan peranan masyarakat pada umumnya.

FKP menyambut baik RUU Pendidikan Nasional, yang sudah ditunggu oleh semua orang. Kita semua berkepentingan terhadap pendidikan ini, karena pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan memerlukan perangkat hukum, sedangkan perangkat perundangan yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Perangkat hukum yang ada ialah UU No. 4 th. 1950 tentang dasar dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah; UU No. 12 th. 1954 tentang pernyataan berlakunya UU no. 4 th. 1950 di seluruh Indonesia; dan UU no. 22 th. 1961 tentang perguruan tinggi; UU no. 14 PRPS th. 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional; dan UU no. 19 PNPS th. 1965 tentang pokok pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

FKP bersama seluruh masyarakat mengharapkan agar dengan adanya satu UU tentang Pendidikan Nasional maka kita mempunyai landasan pijak yang sama dengan persepsi yang sama pula, sehingga tidak terjadi lagi kebijaksanaan pendidikan yang berubah-ubah seiring dengan perubahan pejabat yang diserahi memimpin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

FKP berpendapat bahwa (R) UU tentang Pendidikan Nasional itu benar-benar merupakan satu-satunya landasan yuridis bagi satu sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh pasal 31 UU 1945. Karena itu (R) UU itu harus merupakan produk hukum yang berbobot, mengatur permasalahan pendidikan secara lengkap, jelas tuntas dan terpadu. Sekurang-kurangnya (R) UU itu perlu memuat prinsip-prinsip dasar tentang pendidikan yang fundamental, sedangkan variabel dalam peraturan yang lebih rendah dari UU, dituangkan seperlunya saja.

FKP menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat prinsipil bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional merupakan masalah yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya UU Pendidikan Nasional yang berbobot akan lebih mendorong kelancaran dan pemantapan Pembangunan Nasional dan mewarnai pembentukan Kerangka Landasan dalam Pelita V ini.

Pada tahap sekarang ini FKP sedang mengkaji, mengolah dan mendiskusikan RUU tentang Pendidikan Nasional itu secara terus menerus. Karena masih dalam proses pengkajian yang belum tuntas, maka FKP belum dapat mengumumkan hasil kajiannya itu. Setelah mendengar maksud, motivasi dan penjelasan Pemerintah, FKP akan mempelajari. FKP juga akan mengadakan hearing dengan pelbagai tokoh pendidikan sehingga pandangan FKP yang disampaikan dalam Pemandangan umum dapat dimantapkan dan dilengkapi oleh pandangan dari masyarakat.

Kerawanan Ekonomi Dunia

Sebagai akibat dari depresiasi dollar terhadap valuta asing lainnya maka beban hutang luar negeri Indonesia dalam mata uang dollar menjadi meningkat walaupun dalam mata uang asal-

Digitized by Google

nya tidak berubah. Sebagai Ilustrasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pada tahun 1985 kurs dollar rata rata terhadap Yen adalah US $ 1,- = Yen 238. Selama Januari sampai dengan April 1988 Kurs dollar rata rata berubah menjadi US $ 1,- = 125, sehingga terjadi kemerosotan nilai dollar sebesar -+ 48 %.
Apabila hutang Indonesia termasuk bunga yang harus dibayar pada tahun 1988 adalah 287 milyar Yen maka: a. Pada tahun 1985 nilai dollarnya = 287/278 milyar = US$ 1,2 milyar b. Pada tahun 1988 nilai dollarnya = 287/125 milyar = US$ 2,3 milyar. Dengan demikian pembayaran hutang dan bunga dalam dollar meningkat dengan US $ 1,1 milyar atau -+ 91,7 %, walaupun beban pelunasan dalam Yen tetap.

Disamping meningkatkan hutang luar negeri dengan adanya depresiasi dollar maka merosotnya harga minyak dari US $ 25/barel pada tahun 1985 menjadi US $ 16/barel pertahun 1988 atau turun dengan -+ 36 % dalam kenyataannya kemerosotan harga minyak lebih drastis dari itu, karena dalam jual beli minyak harganya dinyatakan dalam dollar.

Hal ini dapat dillustrasikan sebagai berikut: Pada tahun 1985 harga minyak dalam Yen adalah 25 x 238 = Yen 5.950; Pada tahun 1988 harga minyak dalam Yen adalah 16 x 125 = Yen 2.000; Walaupun nilai dollar turun dengan 36 % tetapi harga minyak dalam yen turun dengan 66,4 %. Dengan demikian dihitung dalam Yen harga minyak dalam US $ 16/barel sesungguhnya hanya sepertiga dari tahun 1985.

Apabila Jepang mengimpor dari Indonesia minyak sebanyak 400.000 barel sehari maka penurunan harga minyak dalam Yen 3950/brl berarti terjadi penghematan sebesar 400.000 x 3.950 = Yen 1,580 milyar atau equivalen US $ 12,64 juta sehari atau dalam setahun terjadi penghematan sebesar US $ 4.612,6 belum termasuk (LNG). Karena impor minyak bumi dari Indonesia merupakan 13 % dari seluruh impor minyak bumi Jepang maka seluruh penghematan impor minyak bumi Jepang dalam setahun akan mencapai 100/13 x 4.613,6,3 juta.

Ilustrasi-ilustrasi di muka menunjukkan dengan jelas bahwa depresiasi dollar mengakibatkan beban hutang luar negeri Indonesia bertambah besar sedangkan negara negara donor non dollar khususnya Jepang memperoleh rejeki ekonomi yang besar.

Pendayagunaan sumber daya alam perlu dilakukan

Kesediaan Jepang untuk memberikan pinjaman dalam tahun 1988/1989 sebesar 2,3 milyar dollar kepada Pemerintah Indonesia disertai pula pemberian kelonggaran bagi Pemerintah Indonesia untuk meminjamkan lebih lanjut pinjaman tersebut kepada dunia usaha swasta yang dinamakan "two-step loan". Adanya two-step loan dalam pinjaman luar negeri sebenarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia walaupun peminjamnya adalah BUMN-BUMN. Dalam rangka meningkatkan peranan swasta perluasan two-step loan kepada swasta tentu harus didukung, namun mengingat bahwa penanggung jawab atas hutang-hutang luar negeri adalah Pemerintah Indonesia maka perlu ditetapkan langkah langkah pengamanan sedemikian rupa sehingga penggunaan two-step loan tidak menimbulkan beban pembayaran hutang dimaksud pada Pemerintah karena ketidak mampuan dunia usaha yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban kewajibannya.

Ilustrasi ilustrasi mengenai depresiasi dollar dengan dampaknya terhadap beban hutang luar negeri Indonesia menunjukkan dengan jelas betapa besarnya tantangan dalam penyelesaian hutang hutang luar negeri yang harus diatasi di masa-masa mendatang. Dalam kaitan inilah perlu diberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk mengupayakan keringan beban hutang dan pelunasannya seperti yang telah dilakukan selama ini terhadap Jepang. Untuk itu Indonesia hendaknya memanfaatkan secara maksimal peluang yang diberikan oleh negara negara industri maju melalui kesepakatan mereka yang dicapai pada sidang mereka yang baru lalu. Mengingat bahwa pendapatan per kapita Indonesia apabila dihitung berdasarkan US$ 1 = Rp 1.650, tingkat pendapatan per kapita Indonesia telah berubah dari US$ 530/setahun menjadi -+ US$ 380/setahun maka Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk memanfaatkan kesepakatan negara negara Industri maju tersebut.

Mengingat bahwa peningkatan kemampuan dalam penyelesaian hutang-hutang luar negeri sangat tergantung pada penggunaan yang efektif, efisien dan tepat arah dari hutang hutang luar negeri, maka disamping terus mengupayakan keringanan beban hutang dan pelunasannya perlu ditingkatkan daya serap dalam penggunaan hutang hutang luar negeri tersebut dibarengi dengan penggalakkan pengawasan yang efektif pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan kita.

Untuk memungkinkan Dewan melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif pada penggunaan hutang hutang luar negeri, maka diharapkan keterbukaan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah melalui penyampaian penjelasan dan informasi yang terinci kepada Dewan. Termasuk manajemen hutang hutang luar negeri yang perlu ditingkatkan pula.

Dari data-data yang diperoleh, jelas terlihat bahwa posisi hutang pemerintah pada akhir Maret 1988 menurut Menteri keuangan sebesar US$ 38,362 Milyar, sedangkan menurut BI adalah sebesar US$ 34,423 milyar dan menurut Neraca Pembayaran adalah US$ 33,187 Milyar. Antara penjelasan Menteri keuangan, Laporan BI dan Neraca Pembayaran terdapat perbedaan mengenai posisi outstanding hutang luar negeri Pemerintah. Seharusnya penyebab perbedaan itu dapat ditelu-

Digitized by Google

suri dari suatu penjelasan yang terinci dan menyeluruh dari pemerintah. Tetapi penjelasan yang demikian belum pernah disampaikan kepada DPR, sehingga sulit bagi Dewan untuk menentukan sebab yang menimbulkan perbedaan tersebut. Keadaan informasi hutang seperti ini sudah tentu juga mempersulit pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan atas hutang hutang luar negeri kita.

Dari segi syarat-syarat pinjaman, dalam Raker Komisi APBN dengan Menkeu tanggal 22 Juni 1988 diperoleh informasi bahwa hutang-hutang Pemerintah bersyarat lunak dan setengah lunak meliputi 77,9 %, sedangkan bersyarat komersial meliputi 21,1 %. Dalam hal inipun terdapat perbedaan antara penjelasan Menteri Keuangan dengan Laporan BI maupun data data yang disajikan dalam Neraca Pembayaran. Berdasarkan Laporan BI maka semua pinjaman yang diperoleh dari IGGI maupun diluar IGGI dalam ODA dapat bersyarat lunak dan kurang lunak. Pinjaman bukan ODA di luar IGGI sebagian besar merupakan pinjaman dengan syarat komersial. Pinjaman bukan ODA dari IGGI tidak dijelaskan dengan tegas, apakah bersyarat lunak atau kurang lunak atau bersyarat komersial, baik dalam Laporan BI dan penjelasan pemerintah maupun oleh Neraca Pembayaran. Dengan demikian perbedaan yang terjadi sulit ditelusuri untuk menemukan sebabnya.

DSR pada akhir Maret 1988 oleh Menteri Keuangan diinformasikan sebesar 30 % sebagai rasio antara Bunga dan cicilan Hutang (BCH) dengan nilai Ekspor yaitu 5.480 : 18.256. Apabila dibandingkan Bunga Cicilan hutang sebesar US$ 5.480 juta dengan perkiraan realisasi Bunga dan Cicilan Hutang yang terdapat dalam TP-APBN 1987/1988 sebesar Rp 8.165.498 juta, maka kurs dollar yang diperoleh adalah sebesar 1.490 juta kurs dollar seperti itu kurang sesuai dengan kenyataan. Disamping itu terdapat perubahan pula pada penggunaan Nilai Ekspor, karena sebelumnya baik Pemerintah maupun menurut laporan BI dipergunakan Nilai Ekspor Netto, yaitu jumlah Ekspor dikurangi impor minyak. Hal-hal tersebut menimbulkan ketidak pastian dalam pengertian DSR, sehingga fungsi DSR sebagai unit standar bagi pelaksanaan pengawasan menjadi kabur.

Selain hal-hal diatas perlu juga diwaspadai mengenai masalah pengamanan persediaan pangan. Berhubung dengan menyusutnya persediaan pangan (beras) yang dikuasai pemerintah (BULOG) pada bulan Februari/-Maret/April 1987 yang lalu (-+ 800.000 ton), terjadi kenaikan-kenaikan harga beras pada beberapa daerah. Bahkan juga daerah-daerah penghasil beras. Oleh karena itu FKP berpendapat bahwa pada musim panen yang akan datang, upaya untuk melancarkan pembelian gabah/beras yang dijual oleh para petani perlu terus ditingkatkan, sedemikian rupa agar cadangan pangan (iron stock) yang dikuasai BULOG dipertahankan minimal sebesar 5 % dari perkiraan produksi. Persediaan yang lebih kecil dari jumlah itu akan mendorong terjadinya spekulasi harga beras yang tidak mendukung stabilitas nasional.

Kalau memang produksi nasional realisasinya mampu mencapai angka angka yang diperkirakan (- + 28,7 juta ton), maka sasaran pengadaan pangan akan dapat dicapai. Dalam hubungan itu FKP berpendapat bahwa impor beras perlu di hindari dengan upaya peningkatan produksi, bukan saja berkaitan dengan citra swa-sembada, akan tetapi lebih dari itu adalah menjamin penyediaan pangan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Streamlining

Masalah sinkronisasi dan pertajaman keterpaduan perlu ditingkatkan terus. Beberapa ilustrasi diperoleh dalam sidang-sidang DPR, laporan BPK, maupun laporan pemerintah dapat kita kaji: Persoalan antara proyek Indorayon dan Departemen Kehutanan karena masalah kawasan hutan cadangan yang dijadikan sumber bahan baku bagi proyek Indorayon yang nampaknya belum teratasi. Persoalan antara Indorayon dan Inalum karena menurunnya debit air sungai Asahan yang menjadi sumber tenaga pembangkit listrik Inalum. Persoalan penyediaan tanah bagi proyek proyek pembangunan, dan berbagai kasus lainnya.

Penelaahan secara mendalam terhadap hasil-hasil pengamatan tersebut, melahirkan kesimpulan bahwa implikasi dari kasus-kasus tersebut adalah kelemahan integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan dan bimbingan administrasi dalam pelaksanaan proyek proyek pembangunan, sebagai akibat dari koordinasi substansial dan prosedural yang kurang efektif.

Padahal di hadapan kita menghadang berbagai tantangan perekonomian era lepas landas yang semakin berat. Beberapa tantangan yang dikemukakan berikut ini, akan mengungkapkan berapa luas dan besarnya tantangan-tantangan itu.

Pertama, pendapat perkapita perlu ditingkatkan dari $ 500 per kapita dewasa ini menjadi $ 1600,- per kapita setahun. Hal ini berarti bahwa apabila dijadwalkan 15 tahun, maka laju pertumbuhan PDB rata-rata harus mencapai 10 % setahun, apabila ingin mencapai $ 1600/ kapita setahun dalam jangka waktu yang lebih besar dari 10 %. Jika laju pertumbuhan dipertahankan pada tingkat 5 % rata-rata setahun, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai pendapatan per kapita sebesar $ 1600,- per kapita/setahun adalah - + 30 tahun.

Kedua, dalam sektor industri peng-

Industri pengolahan perlu ditingkatkan

Digitized by Google

olahan dalam PDB yang dewasa ini berada sekitar 15 % perlu ditingkatkan menjadi 25 %, sehingga pertumbuhan rata-rata sektor ini harus mencapai -+ 15 % setahun, jika laju pertumbuhan PDB diproyeksikan pada 10 % rata-rata setahun untuk periode 15 tahun mendatang. Sektor industri pengolahan harus tumbuh dengan -+ 10 % rata-rata setahun apabila proyek pertumbuhan rata-rata PDB adalah 6 % setahun untuk jangka waktu 28 tahun mendatang.

Ketiga, penyerapan angkatan kerja sektor industri pengolahan perlu ditingkatkan dari -+ 8 % dewasa ini menjadi 25 %. Dewasa ini diperkirakan terdapat -+ 6 juta orang tenaga kerja yang bekerja di sektor pengolahan. Dari jumlah inipun bagian terbesar diserap oleh sektor informal dan tradisional. Jika angkatan kerja bertumbuh dengan 2,8 % setahun maka dalam 15 tahun mendatang jumlah angkatan kerja Indonesia akan meningkat dari 73 juta orang (sekarang) menjadi 98 juta orang.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam 15 tahun mendatang sektor industri pengolahan harus mampu menyerap angkatan kerja 25 juta orang. Untuk itu pertambahan lapangan kerja di sektor industri pengolahan sedikitnya harus mencapai sekitar 13 %.

Dengan lain perkataan apabila sektor industri pengolahan meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 15 % setahun, maka besaran Elastisitas Penyerapan Angkatan Kerja (EPAK) berada sekitar 0,87%. Artinya sekitar 1 % peningkatan output sektor industri pengolahan harus diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja sebesar -+ 0,87 %.

Menurut perkiraan EPAK dari sektor industri pengolahan sekarang berada sekitar 0,5 %, tetapi untuk sektor industri pengolahan modern hanya -+ 0,2 % saja. Periode 1970-1980 EPAK ekonomi secara keseluruhan adalah 0.39 %. Dengan demikian tuntutan perluasan kesempatan kerja hanya mungkin dapat dipenuhi dengan upaya besar besaran dalam semua sektor perekonomian secara terpadu dan terarah untuk menciptakan kesempatan kerja.

Keempat, untuk mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata PDB sebesar 10 %, laju pertumbuhan investasi diperkirakan sebesar sekitar 45 %. Hal ini mengandung makna bahwa penerimaan negara berupa rupiah dan devisa harus ditingkatkan dengan jumlah yang luar biasa besarnya. Tantangan ini tidak mudah diatasi karena adanya kemerosotan dan ketidakpastian dalam penerimaan minyak dan gas bumi.

Kelima, melengkapi dana pembiayaan kegiatan pertumbuhan di muka, pinjaman luar negeri sudah tentu harus disesuaikan pula dengan kebutuhan dana yang terus meningkat. Hal ini akan menambah beban pembayaran hutang dan bunganya di masa mendatang. Apabila kecenderungan depresiasi dollar terus berkelanjutan maka beban pelunasan hutang dan bunganya semakin berat pula.

Ilustrasi dan perbandingan di muka jelas menunjukkan betapa besarnya tantangan yang harus dihadapi bukan hanya untuk mengejar lepas landas tetapi juga untuk melanjutkan pembangunan ekonomi pada tingkat pertumbuhan yang wajar. Tantangan-tantangan besar hanya mungkin dapat diatasi dengan kekuatan bersama bangsa (Pemerintah, kekuatan sospol, pimpinan Dunia Usaha, kaum pekerja dan seluruh golongan dan lapisan masyarakat lainnya) secara terpadu, efektif dan tepat arah. Oleh sebab itu masalah koordinasi substansial harus mendapat perhatian yang sungguh untuk ditingkatkan.

Atas dasar penalaran di muka dan tetap berpijak pada susunan kelembagaan pemerintahan yang berlaku dewasa ini, perlu dipertimbangkan adanya peningkatan fungsi dan peran para Menteri pembimbing administeratif bagi departemen departemen teknis, yang berada dalam lingkup koordinasinya dan sekaligus mempunyai tanggung jawab menentukan terhadap suatu kebijakan pelaksanaan pembangunan proyek proyek. Diharapkan dengan peningkatan peran dan fungsi para Menko, koordinasi lebih dapat ditingkatkan dan dengan demikian kemampuan untuk menjabarkan kebijaksanaan Presiden secara lebih efektif dan terarah dapat pula lebih ditingkatkan.

Disiplin & Etos Kerja

FKP beranggapan bahwa modal yang sangat penting di dalam peningkatan pembangunan adalah pendayagunaan seluruh potensi yang ada. Hal ini sangat berkaitan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan wawasan seluruh masyarakat kita dalam segala tingkah lakunya termasuk disiplin untuk melaksanakan tugasnya apakah itu warga masyarakat biasa, aparat pemerintah ataupun mereka yang ada dalam bidang usaha sendiri. Dalam hal ini yang menjadi kunci adalah kesadarannya bahwa segala tindak tanduknya mempunyai fungsi sosial dalam pembangunan kita sebagai bangsa. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah tetapi juga menyumbang kepada usaha pembangunan pada umumnya. Para aparat pemerintah bukan sekedar menyandang jabatan yang mempunyai wewenang tertentu tetapi sangat menentukan dalam membuka kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi.

Dengan disiplin dan tertib administrasi yang baik, timbul pelayanan yang baik, meningkatkan kredibilitasnya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena memberikan iklim yang sehat kepada usaha-usaha masyarakat.

Dalam hal ini FKP menandaskan bahwa sungguh penting adanya iklim dan etos kerja ini dan menyerukan agar setiap warga masyarakat sadar akan hal ini. FKP selalu mendukung setiap usaha pemerintah untuk menjamin bahwa iklim ini tercipta.

Melihat gejala-gejala masyarakat akhir-akhir ini FKP prihatin bahwa suasana kerja tersebut sedikit terganggu dengan keterlibatan banyak warga masyarakat kita dalam membeli kupon-kupon KSOB dan TSSB. Kita ketahui bahwa maksud dari pada kupon-kupon ini adalah untuk menggalang dana untuk peningkatan olah raga.

Kita memahami perlu dana untuk peningkatan olah raga. Kita juga mendukung sepenuhnya penggalangan dana dari masyarakat, tetapi adalah sungguh tidak bijaksana ditempuh cara-cara yang menimbulkan peluang untuk timbulnya kemerosotan yang lebih esensial, terlebih bila kemerosotan ini membudaya terhadap kalangan masyarakat yang tidak terbatas, "kami menyimak bahwa pelaksanaan KOSB dan TSSB telah memberikan peluang yang tidak sehat di kalangan masyarakat."

Pelaksanaan KSOB dan TSSB telah menumbuh-suburkan nilai-nilai yang cenderung anti disiplin nasional, anti etos kerja keras serta anti semangat berkorban di kalangan masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk kerikil tajam yang menghambat alih generasi.

"Oleh karena itu kami menyarankan dan menyerukan untuk menijau kembali ijin pelaksanaan KSOB dan TSSB."

Bagi tergalangnya dana bagi prestasi olah raga kami menyarankan agar meningkatkan sedikit cukai rokok khusus untuk dana olah raga. Mendagri agar menginstruksikan kepada PEMDA I dan PEMDA II untuk membuat PERDA atau bentuk lainnya untuk penggalangan dana olah raga.□

Digitized by Google

Mereka Yang Menggondol Kalpataru dan Adipura

Setiap menjelang peringatan hari lingkungan hidup, pemerintah memberikan penghargaan kepada instansi, lembaga, kelompok dan perorangan yang telah berprestasi. Belum lama ini, sebelas kota berhasil meraih penghargaan Adipura, dua orang dan dua kelompok meraih penghargaan Kalpataru serta tiga propinsi dinilai terbaik dalam penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup.

Penghargaan Adipura ini dibagi dalam tiga katagori. Pertama, katagori kelompok kota raya yang berpenduduk 500 ribu sampai 1 juta orang. Pemenang dalam hal ini, adalah Kodya Surabaya dengan memperoleh 737,36. Kedua, Kodya Bandung dengan nilai 693,26 dan ketiga, Kodya Semarang dengan nilai 590,51. Sedangkan untuk kelompok kota dengan penduduk sekitar 1 juta orang dimenangkan Kodya Surakarta dengan nilai 682,20 dan Kodya Padang dengan memperoleh nilai 676,91.

Untuk kelompok kota sedang dengan jumlah penduduk antara 250 sampai 500 ribu orang, pemenang pertama diraih oleh Kodya Jambi, dengan memperoleh nilai 700,40. Kedua, Kodya Bogor dengan nilai 694,10 dan ketiga Manado dengan memperoleh nilai 619,85.

Sedangkan dalam kelompok kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 250 orang, penghargaan Adipura diraih oleh Kodya Bukittinggi dengan memperoleh nilai 757,58. Kedua, Kodya Magelang dengan niiai 735,53, ketiga Kodya Temanggung dengan nilai 658,85, keempat Kodya Situbondo dengan nilai 646,79 dan kelima diraih oleh Kodya Magetan.

Kemudian dalam kelompok perintis lingkungan, penghargaan Kalpataru diraih oleh Ny. Eroh, asal kampung Pasirkadu, desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong Tasik Malaya, Jawa Barat dan Ni Wayan Wiratni, asal desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali.

Sementara dalam katagori penyelamat lingkungan, hadiah Kalpataru diraih oleh kelompok Mapalus Sulu "Serikat Lopa di Pandos", desa Sulu, Kecamatan Tumpaan, Minahasa, Sulawesi Utara dan kelompok tani Gunung Mere, desa Kombangan, Kecamatan Geger, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Presiden, kerangka landasan dalam pembangunan lingkungan hidup telah cukup berhasil.

Sedangkan hadiah Kalpataru untuk katagori pengabdi lingkungan diraih almarhum Ismail, asal desa Spontan Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Hadiah dan penghargaan diterima oleh adik almarhum. Hadiah kedua, diterima oleh Robi'ah, asal desa Titian Teras, Kecamatan Bangko, Jambi. Untuk propinsi yang dinilai terbaik dalam penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup, adalah Timor-Timur dengan mendapat nilai tertinggi yaitu 158,5 dari nilai maksimum 177 dan kemudian disusul oleh Pemda Sulawesi Selatan dengan nilai 140 dan ketiga Pemda Jatim dengan nilai 128,5.

Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah peraih hadiah Kalpataru. Ny. Eroh, wanita asal kampung Pasirkadu, desa Sentana Mekar, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya itu berjasa bagi masyarakatnya dalam soal air. Berkat keuletan serta ketabahannya itu — Ny Eroh, mengupayakan agar air di balik gunung Galunggung itu dapat mengairi sawah-sawah yang kesulitan air. Dan yang menarik dari pekerjaan ini adalah, semua itu dirancang sendiri oleh Ny Eroh yang perempuan itu.

Dengan upaya ini, Ny. Eroh dan yang lainnya itu seperti Ny. Ni Wayan Wiratni, asal desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali serta yang lainnya itu telah dapat merobah lingkungannya menjadi berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga orang lain. Dari upaya itulah Ny Eroh serta yang lainnya mendapat penghargaan dari pemerintah berupa Kalpataru, yang langsung disampaikan oleh Presiden Soeharto, di Jakarta, belum lama ini.

Presiden Soeharto dalam kaitan ini mengatakan, menilai langkah-langkah yang telah diambil untuk meletakkan kerangka landasan dalam pembangunan lingkungan hidup, di tanah air, telah cukup berhasil dan boleh membesarkan hati. Tetapi, kata Presiden, hal ini supaya terus disadari bahwa pekerjaan yang dihadapi sesungguhnya masih banyak dan berat. Karena pembangunan yang dicita-citakan itu membawa kewajiban untuk setiap langkah harus mengamankan kemampuan dalam menunjang langkah berikutnya. Kemampuan, modal dan sumber daya yang ada tidak boleh dipakai habis pada suatu kurun waktu.□ (DT/BM)

Digitized by Google

Mendagri Lantik Sejumlah Gubernur

Menteri Dalam Negeri, Rudini, beberapa waktu yang lalu melantik sejumlah gubernur. Ada beberapa hal menarik yang terungkap dalam setiap kesempatan pelantikan pemimpin tertinggi di daerah. Pertama, penegasan menteri bahwa jabatan gubernur tidak bisa diperpanjang untuk periode lima tahun ketiga. Ini berarti seorang gubernur paling lama memangku jabatan tersebut 10 tahun. Hal lain yang menarik juga adalah penegasan Rudini bahwa untuk masa mendatang jabatan gubernur sebaiknya dipangku oleh tokoh yang tidak berusia di atas 51 tahun.

Bila seorang gubernur yang dipilih kembali untuk masa jabatan kedua, dia harus didukung oleh DPRD setempat, lolos pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Depdagri, memenuhi kriteria akseptabilitas dan tentu saja tergantung pula pada hak prerogatif Presiden.

Sebagai kepala daerah, gubernur adalah figur puncak di daerahnya. Gaya dan kepemimpinannya dalam mewujudkan kebijaksanaan daerah, memberikan warna arah perkembangan masyarakat di daerah bersangkutan. "Dengan demikian seorang gubernur adalah tumpuan harapan masyarakatnya," ujar Rudini.

Pokok-pokok pikiran ini ditekankan Mendagri ketika melantik, Hendrikus Fernandez (56) menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur, menggantikan pejabat lama dr Aloyisius Benediktus Mboi yang telah menjadi gubernur daerah itu selama dua periode. Dalam bulan Juni, Rudini juga melantik Prof Dr Achmad Amirudin menjadi gubernur Sulawesi Selatan untuk masa jabatan kedua. Pada bulan yang sama Mayjen TNI Raja Inal Siregar juga dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara menggantikan pejabat lama Kaharudin Nasution, yang ikut mencalonkan diri untuk periode kedua, tapi kalah dalam pemilihan di tingkat DPRD I. Sebelumnya Rudini juga melantik HM Ardans menjadi Gubernur Kalimantan Timur.

Hendrikus Fernandez yang menggantikan pejabat lama dr. A.B. Mboi, sebelumnya adalah Ketua DPD I Golkar NTT. Dia dengan demikian menjadi orang kedua yang menjadi gubernur dari jabatan Ketua DPD Golkar.

Rudini

Pejabat lain adalah Barnabas Suebu, SH, Gubernur Irian Jaya.

Ketika melantik Fernandez, Rudini menekankan selaku pimpinan daerah, harus dapat menyatu dengan masyarakat dan mewujudkan kepemimpinan Pancasila, yaitu di depan memberikan keteladanan, di tengah membangun kehendak dan di belakang mendorong serta memberi semangat. Untuk pola kepemimpinan yang terakhir ini, agar ada tekanan tuntunan yang diletakkan sebagai wujud peningkatan partisipasi dan peranan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, Gubernur mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berat.

Kepemimpinan pemerintahan di NTT bukan tugas dan kewajiban yang ringan. Lokasi daerah ini masih sering diklasifikasi sebagai daerah periferi, geografi yang terdiri dari pulau dan laut luas, komunikasi serta transportasi yang masih sangat minim, sehingga banyak wilayah yang terisolasi secara geografis maupun kultural. Tentunya, ini mengakibatkan kesatuan regional dalam artian ekonomi, sosial dan budaya di daerah ini, masih mengandung kerawanan. Akan tetapi, hasil pembangunan dibawah pimpinan dr. A.B. Mboi secara bertahap telah memperkecil kendala-kendala itu. Antara lain melalui pembangunan jalan lintas Flores dan Timor, yang bisa memberi prospek cerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat daerah ini.

Handal

Pada kesempatan melantik Prof. Dr. Achmad Amiruddin sebagai Gubernur/Kdh Tk. I Sulawesi Selatan

Melantik Gubernur Sulawesi Selatan

Digitized by Google

Gubernur mendapatkan kepercayaan dan dukungan rakyat.

untuk masa bakti yang kedua kali, Menteri Rudini menegaskan, bahwa semua pihak di daerah termasuk kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan sekaligus segenap lapisan masyarakat ingin meletakkan harapan terhadap kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan hidup mereka pada Gubernur. Gubernur harus merupakan figur yang responsif dan efektif, dengan didukung manajemen pemerintahan yang handal, karya administrasi yang bermutu tinggi serta karya-karya teknis yang berkeahlian.

Dalam pelayanan terhadap warga masyarakat, efektivitas manajemen pemerintahan berarti pula terlaksananya pelayanan secara cepat, tepat, adil dan merata dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, dimana hasilnya akan memperbesar dukungan rakyat kepada pemerintah. Juga, efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan terus ditingkatkan, sehingga hasil-hasil pembangunan dan kemajuan yang dicapai selama ini dapat lebih dikembangkan dan dimantapkan dalam Pelita V nanti. Dengan demikian, semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus tercermin dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebab banyak petunjuk serta kebijaksanaan pemerintah dan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, pelaksanaannya masih perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

"Untuk itu, agar Gubernur mendapatkan kepercayaan dan dukungan rakyat yang semakin meningkat. Gubernur harus mampu menampilkan olah kridanya Pemerintah Daerah secara jujur, adil dan bersih," katanya.

Penegasan serupa juga dilontarkan Rudini ketika melantik Mayjen TNI Raja Inal Siregar menjadi Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara menggantikan Kaharudin Nasution.

Penetapan Raja Inal Siregar sebagai Gubernur ini berdasarkan Keppres Nomor 132/M/1988 tanggal 1 Juni 1988. Gubernur baru ini adalah mantan Pangdam III Siliwangi dan termasuk perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1961. Selama meniti karier di kemiliteran, Raja Inal Siregar telah memperoleh berbagai bintang/tanda jasa seperti Wira Dharma, Satya Lencana Kesetiaan serta Grand Officers of The Order of Istiqlal dari pemerintah Jordania.

Dari 'safari' pelantikan Gubernur yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Rudini ini, proses pemilihan atau pencalonan Gubernur untuk satu daerah dengan daerah yang lain tidak jauh berbeda. Karena, pada prinsipnya melalui Undang-Undang dan jalur yang sama. Seperti halnya pelantikan H.M. Ardans, SH, sebagai Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur menggantikan pejabat lama Kol. (purn) H. Soewandi untuk periode 1988-1993, adalah berdasarkan Keppres Nomor 81/M/1988.

Pengangkatan H.M. Ardans, SH, didasarkan hasil Sidang DPRD Tk. I setempat dan sekaligus tercatat sebagai Gubernur kedelapan. Dia merupakan putera daerah Kalimantan Timur, lahir di kota minyak Sanga-Sanga 25 kilometer timur Samarinda, 50 tahun lalu. Dia diharap mampu membangun semangat putera-putera daerah untuk lebih meningkatkan prestasi diri, sebagai pencerminan pmbangunan nasional di daerah.

Adapun pidato Menteri Rudini dalam setiap pelantikan Gubernur itu nadanya hampir sama, yaitu penekanan pada pola pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga secara keseluruhan akan mampu mewujudkan negara Indonesia sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Sementara pelantikan Gubernur untuk daerah lain akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. DPRD Tk.I Jawa Tengah telah menunjuk kembali Gubernur Ismail untuk memangku jabatannya dalam masa bakti berikutnya. Sedangkan, Gubernur Jawa Timur Wahono telah menyatakan mengundurkan diri kendati dalam Sidang DPRD Jawa Timur, nama Wahono dicalonkan kembali sebagai Gubernur. Pengunduran diri Wahono ini menyebabkan nama Soelarso disebut-sebut sebagai calon gubernur Jatim untuk masa bhakti 1988-1993.□

(DT)

Digitized by Google

AMPI Bukan Hanya Meminta Tapi Harus Memberi Arti

Di hadapan sekitar lima ratus kader Golkar yang berseragam AMPI, Ketua Umum AMPI, Agung Laksono menyampaikan pengarahannya. Hari itu, akhir Juni, adalah ulang tahun ke-X AMPI.

Dalam peringatan ulang tahun yang juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga Ir. Akbar Tanjung, suasana nampak hangat dan penuh kekeluargaan, berlangsung dari pagi hingga sore di sebuah hotel berbintang di Medan. Selain memberikan sambutan Ulang Tahun Agung Laksono juga memberikan pengarahan terbatas pada jajaran pengurus AMPI dari tingkat II se Sumatera Utara dan segenap pengurus AMPI TK.I Sumatra Utara di tempat yang sama.

Baik dalam sambutan ulang tahun maupun dalam pengarahan terbatasnya Agung Laksono yang mantan Ketua HIPMI, menekankan perlunya AMPI menyadari keberadaannya sejak dini. Memang, lanjut Agung, usia sepuluh tahun bagi suatu organisasi kader merupakan usia yang relatif muda. Walaupun begitu, kita semua harus yakin, bukan usia yang menentukan bobot, ciri dan citra suatu organisasi. Bobot dan kualitas organisasi akan dikembalikan kepada manusia-manusia yang ada didalamnya.

Karena itu menurut Agung AMPI perlu secara terus menerus meningkatkan kualitas dirinya. "Ada baiknya kita menyadari belum banyak yang diberikan AMPI kepada pembangunan nasional baik yang langsung atau tidak langsung. Namun kesadaran itu bukan lantas memperkecil semangat juang di dalam rangka semakin meningkatkan keberadaan, di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara yang sedang giat-giatnya membangun," ujarnya.

Segenap pimpinan dan anggota AMPI diharapkan untuk secara terus-menerus meningkatkan rasa kesetiakawanan, dengan tidak lagi membicarakan siapa dan dari mana seseorang itu datang untuk dibantu. Kesetiakawanan tadi merupakan modal dasar AMPI menuju ke arah profesionalisme, baik di dalam bekerja, berfikir, dan berkonsep. Karena dengan

Agung Laksono

modal setia, saling menolong, rasa bersatu, kesatuan makin menonjol. "Dengan kesatuan yang menonjol, maka kita bisa dengan cepat menyerap segala permasalahan zaman".

Kerja keras tanpa program, katanya akan sia-sia, Program akan lahir dengan baik bila orang-orang yang menciptakan program memiliki jangkauan pemikiran yang jauh ke depan.

Berbuatlah

AMPI harus menjadikan dirinya bukan hanya sekedar organisasi kader bagi Golkar, tapi juga sebagai wahana penggodogan untuk menyadarkan setiap orang muda agar sadar selain juga berpolitik ia juga adalah pekerja-pekerja profesional di bidangnya.

Untuk itulah momentum ulang tahun yang kesepuluh AMPI sekarang ini, dimanfaatkan untuk meningkatkan konsolidasi organisasi secara maksimal. Dalam konsolidasi, yang terpenting adalah memadukan semangat sebagai warga AMPI yang berjiwa pembaharuan, baik dalam berpikir maupun bertindak, agar pada akhirnya Golkar semakin yakin bahwa dari AMPI lah akan lahir kader-kader Golkar yang berkualitas terampil, dan mampu berkarya nyata.

AMPI harus mampu membuat terobosan, agar lapangan kerja dapat tercipta dimana-mana. Dan hanya kader-kader AMPI yang profesional di bidangnya lah yang mampu menularkan kemampuannya untuk orang muda lainnya, dan itu merupakan langkah konkrit yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Tidak dilarang, kader-kader Golkar yang berada di AMPI berharap untuk mendapatkan suatu posisi, bagi jabatan politis atau peningkatan karier di eksekutif. "Tapi apalah arti suatu harapan kalau kemudian dirinya tidak memenuhi kreteria yang ditawarkan?"

Bagi kita yang terpenting adalah berbuat sebanyak mungkin untuk AMPI, untuk masyarakat, untuk generasi muda, dan tidak usah senang diberi janji "tapi raihlah cita-cita itu dengan perjuangan yang keras serta realistis". AMPI juga tidak hendak mencetak kader-kader yang arogan yang hanya suka pada pesta hura-hura, tapi AMPI ingin menjadikan dirinya sebagai media berekspresi dalam ikut serta mengemban amanat Golkar juga sekaligus amanat bangsa.

Selain meningkatkan diri dalam wawasan politiknya, warga AMPI juga harus terus-menerus membuat dirinya berarti bagi masyarakat lingkungannya. Dan AMPI yang berorientasi pada karya dan kekaryaan, sudah tentu bukan menunggu dalam mengemban amanat perjuangan yang disandang oleh Golkar tapi selalu siap kapan dan dimanapun bila tugas itu datang kepadanya, malah selalu dengan gigih memberikan masukan yang positif kepada Golkar agar kelangsungan perjuangan Golkar yang juga merupakan kelangsungan perjuangan bangsa sebagai pengamalan Pancasila, tidak berhenti.

Dengan tetap tajam dan jeli serta berdiri di depan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap usaha-usaha bahaya laten komunis yang bisa saja menyusup ke berbagai sektor, AMPI harus mampu menangkalnya. "Kesimpulannya bukan hanya meminta tapi berbuatlah sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang memadai," katanya. □ RENDY.MS

Digitized by Google

AMPI, Tuntutan Sebuah Ulang Tahun

Sepuluh tahun sudah AMPI ada dan, sepuluh kali juga setiap tahun selalu diperingati hari lahirnya yang jatuh pada tanggal 28 Juni 1978 di Pandaan.

Kelahirannya melampaui proses yang cukup panjang dan rumit. Karena itu memperingati kelahirannya setiap tahun, tidak hanya sekedar membuat perayaan seremoni belaka. Yang terpenting adalah mempelajari kembali telah seberapa jauh peranan keberadaan AMPI terhadap masyarakat kepemudaan secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya "Dan apakah memperingati hari lahir AMPI hanya tindakan rutin sebagaimana layaknya memperingati arti suatu kelahiran" tanya Anton Lesiangi SE, anggota MPR.RI dan A.H. Sazili M, anggota DPR.RI.

Anton berpendapat, peringatan ulang tahun AMPI merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan sikap menghadapi problema bangsa di masa mendatang, dan yang lebih penting adalah persoalan yang menyangkut generasi muda dengan segala tantangannya.

Melalui ulang tahun yang kesepuluh kali ini AMPI ingin menawarkan konsepsi kepada masyarakat luas, bahwa ada suatu persoalan yang sangat prinsipil yang harus mendapat prioritas, ialah masalah ketenagakerjaan dan kepemimpinan.

Anton Lesiangi

Tenaga kerja yang juga adalah masalah bangsa, sangat penting untuk diperhatikan secara dini, karena persoalan tenaga kerja ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya orang-orang muda, potensi utama dalam melanjutkan pembangunan bangsa.

Nuansa Zaman

Karena itu baik A.H. Sazili M maupun Anton Lesiangi mempertegas bahwa HUT AMPI kali ini tidak hanya sekedar upacara bendera dan berhura-hura. "Kita sudah harus segera sadar dan bergegas dalam menangkap nuansa zaman. Untuk itulah HUT yang sekarang ini ingin membangkitkan motivasi generasi muda agar semakin meningkatkan wawasan kebangsaannya dan menumbuhkan dinamika berpikirnya secara kritis sehingga pada masanya siap melanjutkan perjuangan yang dicita-citakan Bangsa Indonesia dengan landasan Pancasila. Karena di tangan kaum mudalah masa depan bangsa dipertaruhkan" kata Anton.

Hal-hal seperti ini perlu selalu dikumandangkan agar tidak ada lagi generasi muda yang lari meninggalkan kenyataan. AMPI melalui momentum ulang tahun yang kesepuluh sekarang ini ingin mengajak kaum muda untuk segera beradaptasi dengan perkembangan tehnologi modern.

Untuk menjangkau semua itu tadi, perlu setiap orang muda menyadari bahwa dirinya adalah aset pembangunan. Kesadaran itu baru akan muncul bila setiap generasi muda mempunyai persepsi dan visi yang sama dalam membangun bangsa dan negaranya. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan didapat oleh generasi muda yang tidak pernah berhenti belajar, baik secara formal maupun nonformal, seperti misalnya melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Orang muda agar tidak berfantasi tentang hidup enak tanpa ada perjuangan, kerja keras yang konkrit. Anton Lesiangi selaku Ketua Panitia Ultah X AMPI, mengatakan merasa terpanggil dan mempunyai beban moral kepada masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta secara bersama-sama memecahkan segala persoalan yang menghambat jalannya pembangunan. "Apalagi kita keluarga besar AMPI di seluruh pelosok tanah air adalah pasti kader-kader Golkar. Baik langsung ataupun tidak langsung kader-kader Golkar yang berada dalam panji-panji AMPI mulai saat ini agar bangkit, baik dalam cara pikir, cara tindak dan perilaku. Setiap perbuatan kader Golkar dari AMPI dituntut menampilkan manfaat langsung terhadap masyarakat."

Kini tidak zamannya lagi orang sekedar bernostalgia. Kita semua secara jujur butuh tindakan yang konkrit. Generasi muda, kata Sazili, bersama

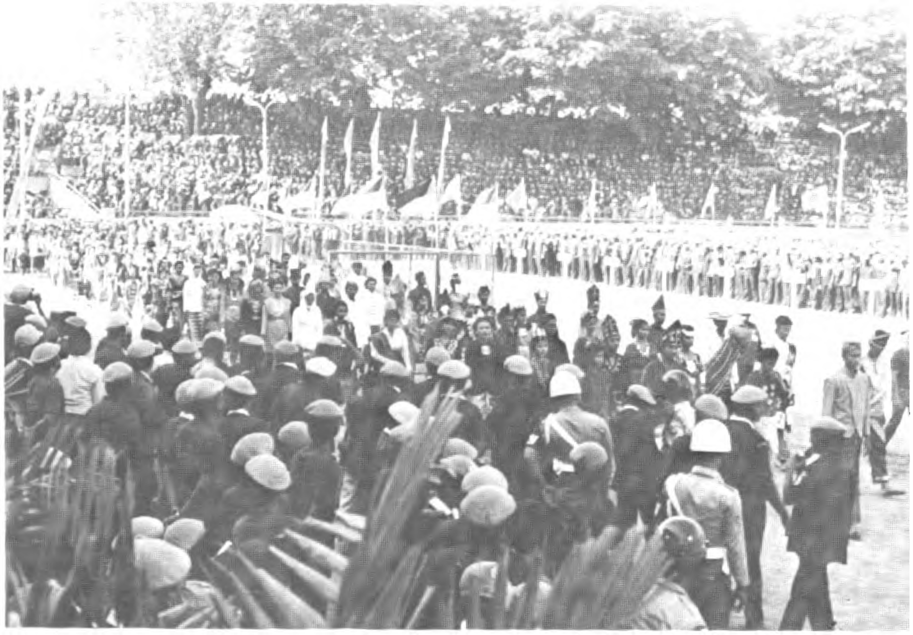

Yang terpenting mempelajari kembali keberadaan AMPI terhadap masyarakat luas.

Digitized by Google

AMPI agar berpikir realistis dan berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat.

Dari pengamatan A.H. Sazili, AMPI kini bukan hanya sekedar sebuah merk yang hanya diagung-agungkan, tapi AMPI harus berwujud dalam bentuk tindakan sesuai dengan pengertian sebagai angkatan muda pembaharuan Indonesia. Sudah tibalah saatnya pada Ulang tahun yang ke-

Bukan sekedar berhura-hura, tapi harus bergegas menangkap nuansa zaman.

AH Sazili M

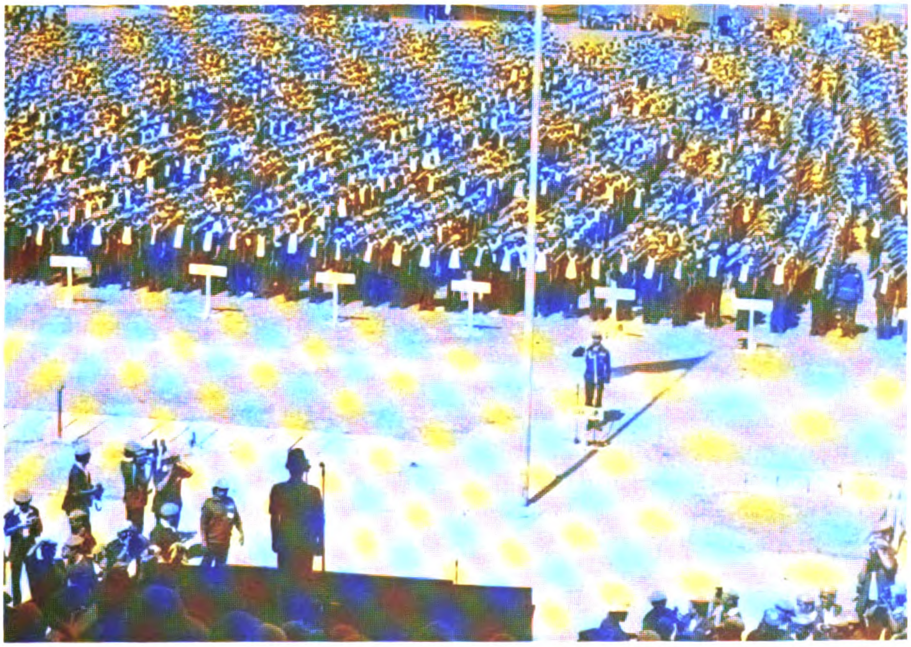

AMPI mengaktualisasikan diri dalam masyarakat secara konkrit.

sepuluh sekarang ini kita semua menyadari AMPI sebagai wadah berhimpunnya orang muda yang menaruh aspirasi politiknya pada Golkar tidak perlu setengah hati untuk menyingsingkan lengan baju dalam merampungkan tugas-tugas pembangunan. Pembangunan akan berjalan baik dan berbobot bila manusia-manusia yang membangun juga memiliki ketrampilan yang memadai dengan kualitas yang handal. Dengan lancarnya pembangunan berarti akan terciptalah lapangan kerja seluas-luasnya.

Kita semua harus optimis bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda dalam arti seluas-luasnya. Pandanglah pemuda jangan dalam arti yang sempit, sebagai sekumpulan orang-orang muda yang hanya patut bicara masalah-masalah pemuda. Pemuda juga sudah harus bicara masalah-masalah kebangsaan. Hendaknya jangan mempersempit diri karena pemuda maka yang dibicarakan, diseminarkan dan didiskusikan hanya soal-soal kepemudaan.

Pemuda harus betul-betul menyadari bahwa saatnya nanti memikul tanggung jawab dalam melanjutkan cita-cita perjuangan Bangsa. Karena itu lanjut, Anton Lesiangi, jangan bicara pemuda hanya untuk pemuda, "tapi marilah kita sadar bahwa pemuda merupakan bagian Bangsa yang sangat potensial."

AMPI juga harus menguasai aspek-aspek kepemimpinan, bukan hanya memikirkan problema kaum muda saja tapi juga "pikirkanlah problema bangsa secara nasional." A.H. Sazili menekankan, bahwa pendidikan sangat penting, karena dengan pendidikan yang cukup semua dapat berkomunikasi dengan baik dan komunikasi yang baik bisa ditingkatkan dalam bentuk dialog, bukan perintah.

Keduanya sependapat ulang tahun AMPI kali ini bukan aspek seremoninya yang akan dibesar-besarkan, tapi AMPI mengaktualisasi diri dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara secara konkrit. "Sudah saatnya kita sekarang berbicara sedikit, banyak konsep dan banyak kerja, itulah yang dibutuhkan baik oleh generasi muda dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga AMPI bukan sekedar klise tapi bingkai perjuangan dari kaum muda Indonesia," ujar Anton.

Rendy.MS

Digitized by Google

Perjudian Dan Penyelundupan

Sekurang-kurangnya ada dua berita tentang pelaksanaan penegakan hukum di hari-hari terakhir ini yang patut diperhatikan.

Pertama, turun tangannya Markas Besar Polri dalam suatu operasi penumpasan perjudian gelap di ibukota, dengan hasil yang cukup kolosal. Hanya di dua Lokasi kasino gelap, tertangkap lebih dari lima ratus tersangka penjudi. Gebrakan ini berlangsung tak beberapa lama setelah Kapolri sendiri memberi peringatan bahwa Polri akan bertindak tegas seraya melontarkan semacam seruan agar Polri jangan diganggu dalam pemberantasan perjudian.

Kedua, ada berita tentang terjadinya berbagai bentuk teror terhadap aparat Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun. Teror ini justru terjadi setelah operasi penahanan dan penyitaan lebih 1000 ton barang yang diduga selundupan di Priok dari beberapa kapal antar pulau yang berasal dari pelabuhan Tanjung Pinang Riau. Maka Jaksa Agung lalu memberikan pernyataan agar aparat tak perlu gentar terhadap teror, tak perlu pula takut terhadap backing dibelakang penyelundupan itu.

Dua berita tadi menunjukkan hal-hal yang menarik. Sejalan dengan apa yang menjadi asumsi umum di kalangan masyarakat, baik di belakang perjudian gelap maupun di belakang penyelundupan terlihat indikasi pola backing-backingan. Terhadap gejala itu, baik Kapolri maupun Jaksa Agung memberi reaksi yang 'pantas'.

Adalah istimewa bahwa untuk operasi judi di ibukota itu, Mabes Polri turun tangan langsung. Turunnya Mabes Polri memang jelas besar artinya, karena kalau memang ada backing kuat di belakang perjudian gelap itu pastilah Mabes Polri lebih sulit digertak. Sementara itu, pernyataan tegas Jaksa Agung di Riau, merupakan dukungan mental bagi Bea Cukai untuk menghadapi teror dan gertakan. Jelas, Jaksa Agung dan aparatnya akan siap menghadapi segala sesuatunya bila backing para penyelundup berani muncul.

Ketegasan aparat pasti disambut dengan lega oleh masyarakat. Diharapkan para penegak hukum akan menampilkan lagi lebih banyak bukti ketegasan di masa-masa mendatang ini! □ (Rum Aly)

Berita Nyonya Indah

Pemberitaan tentang seorang nyonya yang mengalami keadaan coma berkepanjangan sejak suatu operasi tubektomi — sesuatu yang tergolong operasi kecil — di sebuah rumah sakit di Solo, dipersalahkan oleh pihak pengelola RS berdampak negatif.

Pemberitaan-pemberitaan itu, dituding membuat keluarga Nyonya Indah seperti diteror. Bersumber pada seorang dokter dari yayasan yang membawahi RS tersebut, Harian Kompas, mengutip keterangan bahwa dua anak nyonya itu yang bersekolah di TK dan kelas I SD, menangis dan takut masuk sekolah. Anak (anak) itu "tahu keadaan ibunya dari berita di koran" dan "mereka juga mendengar kabar tentang ibunya dari teman-temannya, mungkin menjadi malu".

Maka sang dokter menghimbau pihak pers agar lebih proporsional dalam pemberitaan, seraya mengakui pula bahwa pemberitaan pers itu pada sisi lain mampu memobilisasi solidaritas sosial.

Beberapa hari kemudian (11/6) diberitakan pula bahwa anak kelas I SD itu tidak masuk sekolah karena sakit dan 'memang libur sekolah'. Sedang adiknya, tak mau masuk sekolah karena kakaknya tak sekolah. Tetapi kini giliran ayah kedua anak itu yang bersikeras tetap mempersalahkan pemberitaan pers.

Mungkin saja, ada satu dua pemberitaan pers mengenai kasus Nyonya Indah bisa terasa berlebih-lebihan, terutama bila pemberita yang bersangkutan memberi bumbu yang berlebihan dalam penyajian. Untuk ini, memang ada baiknya pihak pers mawas diri. Akan tetapi, sebaliknya gegabah dan tak terpuji untuk begitu saja menjadikan pers sebagai sekedar keranjang sampah kesalahan.

Esensi utama kasus Nyonya Indah adalah: Ada seorang manusia yang mengalami penderitaan oleh akibat samping dari suatu penanganan medis. Akibat samping ini bisa terjadi mungkin karena "sesuatu yang diluar kemampuan kedokteran", sebagaimana mungkin pula karena "keteledoran pelaksanaan". Jadi, kasus Nyonya Indah terutama adalah masalah medis.

Masalah ilmu kedokteran dan teknis pelaksanaannya memang adalah kompetensi mereka yang dididik untuk profesi itu. Tetapi apa dan bagaimana profesi itu dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai kode etik profesi itu sendiri, tidaklah berdiri sendiri. Masyarakat berhak dan berkepentingan tahu segala sesuatunya, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Hak hidup dan tujuan hidup profesi kedokteran bersumber dan tertuju kepada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pers akan menjadi jembatan informasi dan aspirasi masyarakat. Suatu kejadian di dunia kedokteran yang pada saat tertentu dirasakan 'luar biasa', perlu dan harus disampaikan kepada masyarakat. Bukan hanya keberhasilan operasi kembar Siam atau sukses bayi tabung atau penanganan gejala gigantisme, tetapi juga hal-hal yang sebaliknya seperti misalnya kasus Nyonya Indah.

Maka, mengapa harus terusik dengan pemberitaan kasus Nyonya Indah? Mengetahui sesuatu yang tidak menggembirakan, juga perlu. Tak perlu jengkel bahwa peristiwa yang sebenarnya sudah berlangsung berbulan-bulan ini akhirnya terpublikasikan. Memang publikasi kasus Nyonya Indah ini jadinya tak begitu menguntungkan bagi RS tempat kejadian. Tapi kalau kejadiannya memang begitu, apa mau dikata? Namun lebih penting dari segalanya adalah memusatkan perhatian kepada penyelamatan Nyonya Indah. Dan suami Nyonya Indah, kiranya lebih baik memilih peran untuk memberi pengertian kepada kedua anaknya daripada berprasangka pers melakukan teror. Pemberitaan pers, setidaknya telah membantu mobilisasi perhatian dan simpati berbagai pihak sehingga lebih kuatlah dorongan bagi usaha penyelamatan Nyonya Indah. Percayalah bahwa secara umum pers tahu diri dan akan bersikap positif....

Digitized by Google

Diklat Kader Fungsional Golkar Tahap Terakhir

Pendidikan dan latihan kader fungsional (Diklat Karsinal) Golkar merupakan salah satu program yang sangat penting dari tujuan perjuangan Golongan Karya dalam lima tahun terakhir ini. Setelah sukses Pemilu 1987 dan setelah diadakan evaluasi secara mendalam, DPP Golkar dan bahkan seluruh jajaran keluarga besar Golongan Karya menganggap perlu diadakan diklat kader fungsional pengusaha dan pekerja. Diklat kader fungsional pengusaha telah dilaksanakan dua bulan lalu, dan ini yang terakhir diselenggarakan diklat kader fungsional pekerja. Sebagai tindak lanjut diklat-diklat sebelum pemilu 87 yaitu diklat karsinal Pemuda, Wanita, Pendidik dan Ulama. Diklat Karsinal pekerja dilaksanakan di Jakarta pertengahan Juni lalu, diikuti 270 peserta dari 27 propinsi, dan berlangsung tiga hari.

Mengapa diklat kader fungsional pekerja perlu diadakan, tentu ada alasannya. Menurut Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH, dalam amanat pembukaan mengatakan, "tentu peranan pekerja dalam negara yang sedang membangun ini sangatlah penting dan vital, apalagi negara yang sedang membangun menuju negara industri", yang didukung oleh pertanian yang kokoh. Golkar telah mengambil kebijaksanaan untuk tidak mengadakan kader fungsional petani, mengingat sebagian besar petani tinggal di desa, sedang kader penggerak teritorial desa itu sebagian besar kader-kader petani.

Lain dengan kader fungsional pekerja yang tidak semuanya tinggal di desa, dan bahkan sebagian besar pekerja tinggal di daerah industri, proyek-proyek industri, ataupun di kota-kota besar, yang jumlahnya tentu saja cukup besar. Mungkin setelah petani, pekerjalah yang paling besar di antara penduduk bangsa Indonesia.

Itulah alasan mendasar yang dikemukakan Ketua Umum tentang perlunya diadakan pendidikan dan latihan untuk melanjutkan, menggerakkan secara fungsional pekerja ini. Sudharmono yakin, meskipun diklat kader fungsional pekerja ini dilakukan dalam tahap yang terakhir, menurutnya justru yang terakhir itu yang akan menjadi kader-kader yang dapat diandalkan dalam menggerakkan program-program Golkar dan bahkan program-program pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Dalam kesempatan itu dijelaskan pula oleh Ketua Umum Golkar, tentang tujuan kader fungsional yang adalah untuk mendewasakan Golkar, memperkuat dan memperkokoh Golkar di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu kegiatan kaderisasi ini bukan semata-mata untuk kepentingan Golkar, tapi justru untuk meningkatkan pengabdian Golkar untuk disumbangkan kepada negara dan bangsa yang sedang membangun yang penuh tantangan.

Sumbangan Nyata

Lebih jauh dikemukakan oleh Ketua Umum, bahwa gerakan kaderisasi yang dilaksanakan oleh Golkar selama ini sekaligus merupakan sumbangan nyata Golkar untuk mewujudkan partisipasi organisasi politik dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang politik. Hal ini sangat penting, karena pembangunan ekonomi yang dijalankan sekarang tak mungkin berhasil meraih kemajuan tanpa adanya stabilitas politik. Stabilitas politik tidak mungkin mantap, kalau tidak didukung oleh suatu organisasi kekuatan sosial politik yang memahami tujuan pembangunan dalam Orde Baru. Disinilah pentingnya pendidikan politik dalam program kaderisasi ini yang mempunyai peranan penting untuk mendidik rakyat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Oleh sebab itu ia mengharapkan agar kader-kader Golkar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dapat menyebarluaskan pengertian partisipasi politik melalui organisasi politik. Partisipasi politik harus ditingkatkan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam GBHN 1988.

Sudharmono pada acara diklat kader fungsional pengusaha dan pekerja

Digitized by Google

Setiap kader Golkar, baik itu kader teritorial maupun kader fungsional, diharapkan mampu menjadi pelopor dan penggerak terlaksananya pendidikan politik rakyat ini agar semakin banyak rakyat sadar politik, artinya sadar akan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kaderisasi Golkar, kata Sudharmono, bukanlah program yang berdiri sendiri, tetapi merupakan program penting dari program Tri Sukses Golkar, terutama yang menyangkut konsolidasi, baik itu konsolidasi wawasan, idiil maupun konsolidasi organisasi. Karena itu Tri Sukses masih harus diteruskan dalam masa yang akan datang, karena program ini telah terbukti menjadikan organisasi menjadi bertambah kuat dan besar. Dengan program ini Golkar telah turut meningkatkan kemampuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan, baik untuk mendukung pemerintah maupun menciptakan swadaya masyarakat, untuk menyelenggarakan pembangunan.

Dalam kaitan dengan pembangunan sistim politik di negeri ini Sudharmono menguraikan secara panjang lebar perkembangan historis sistim kepartaian di Indonesia sejak jaman kemerdekaan dulu hingga sampai pada pengambilan keputusan dalam sidang umum MPR 1988 yang baru lalu. Ia menguraikan bagaimana negara kita pada waktu menganut sistim mono partai, yaitu Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan, juga bagaimana sistim multi partai yang hampir memecah belah persatuan dan kesatuan, juga bagaimana proses keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959, termasuk pengkhianatan PKI 1965, lalu Orde Baru lahir hingga terbentuknya Undang Undang Parpol dan Golkar dan berakhir pada uraian bagaimana Golkar mempertahankan konsep struktur organisasi hanya sampai daerah tingkat II pada SU MPR 88, bahwa struktur organisasi itu harus disederhanakan, agar lebih efektif dan efisien berpartisipasi dalam pembangunan, struktur organisasi itu hanya sampai di daerah tingkat II, kalau sebelumnya tidak terbatas pada anak cabang dan ranting di desa-desa. Tapi sekarang, organisasi itu disederhanakan sampai organisasi kepengurusan di tingkat II. Dasar pemikirannya adalah, bahwa organisasi itu harus merupakan cerminan dari kepemimpinan masyarakat yang akan turut dalam pemilihan umum untuk mewakili daerahnya, daerah otonom. Negara kita menganut daerah pusat, daerah otonom tingkat I, daerah otonom tingkat II.

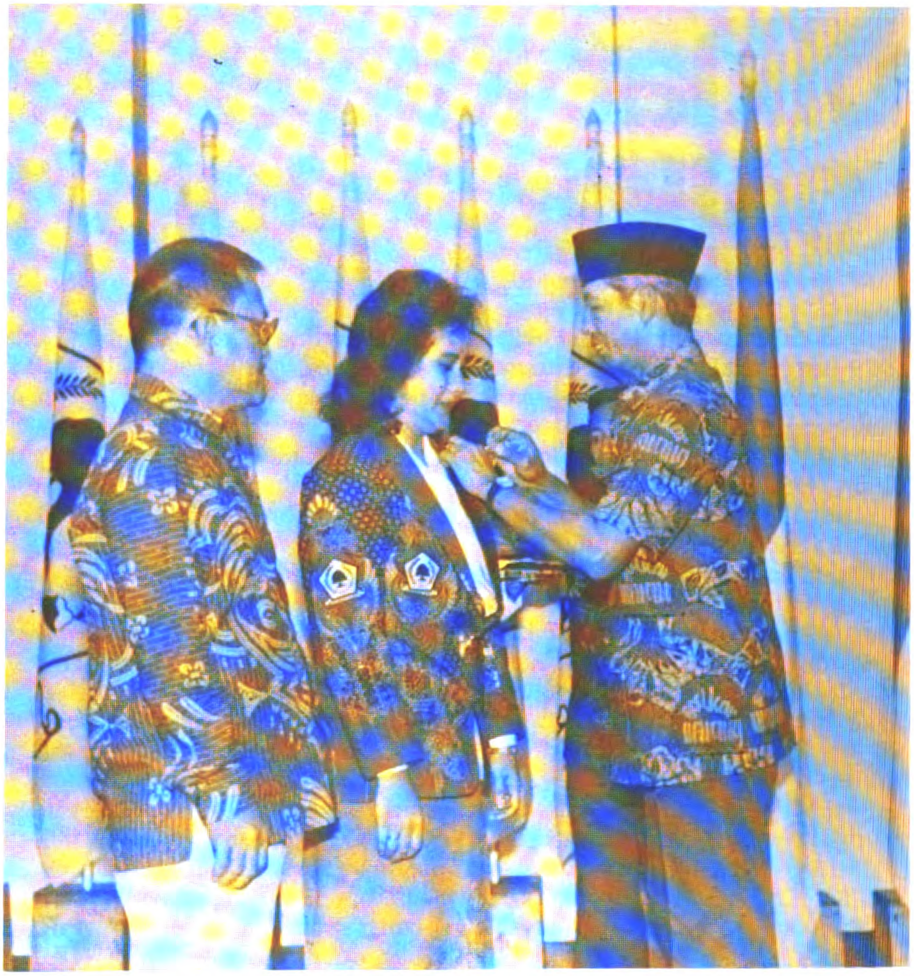

Kader fungsional mendewasakan Golkar

Apabila SU MPR yang lewat Golkar mempertahankan konsep undang undang, konsep yang diatur dalam undang undang parpol dan Golkar, "Ini berarti Golkar konsekwen pada konsep Orde Baru" bukan soal lain-lain.

Meskipun kepengurusan organisasi politik hanya sampai di tingkat II tidak berarti organisasi politik yang bersangkutan dibatasi kegiatan politiknya. Kegiatan setiap organisasi politik justru harus menjangkau dasar-dasar ke dalam diri masyarakat kita.

Peserta diklat selain mendapatkan pengarahan dari Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono, SH, juga memperoleh pengarahan dari Menteri Tenaga Kerja Drs Cosmas Batubara, Ketua Golkar AE Manihuruk, Ketua Lemhanas Subiyakto, Oetoyo Oesman SH, Sukarno MPA, Rachmat Witular dan Yacob Tobing. Peserta selanjutnya membahas dan mendiskusikan secara mendalam masalah-masalah dari topik yang bersangkutan, agar mampu menyumbangkan gagasan-gagasannya secara konstruktif dan inovatif sebagai tindak lanjut diklat karsinal pekerja Golkar untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah ketenagakerjaan tingkat nasional, baik yang bersifat konsepsional maupun terhadap penanggulangan masalah-masalah mendesak (burning issues).

Peserta diklat karsinal pekerja Golkar yang terdiri dari 270 orang itu membentuk tiga komisi, masing-masing Komisi A, membahas Peranan Kader Fungsional Pekerja Golkar Sebagai Pendorong ke Arah Terciptanya Kesempatan Kerja Menuju Suksesnya Trilogi Pembangunan, Komisi B, membahas Peranan Kader Fungsional Pekerja Dalam Mempelopori Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila Sebagai Penerapan Pancasila Di Bidang Ketenagakerjaan, dan Komisi C, membahas masalah Peranan Kader Fungsional Pekerja Golkar Sebagai Pendorong Terwujudnya Jaminan Sosial Yang Menyeluruh Bagi Pekerja Untuk Mewujudkan Pembangunan Manusia Seutuhnya.☐ (WT)

Digitized by Google

Gairah Dari Bawah Ke Atas Di Jateng, DIY dan Sumut

Antara bulan Juni sampai September Golkar melaksanakan Musda I dan II yang nantinya akan bermuara pada Munas bulan Oktober mendatang. Peristiwa ini cukup fenomenal, karena Musda-Musda kali ini menandai arus baru proses demokratisasi organisasi dari bawah ke atas, yang dikenal dengan istilah *bottom-up System*. Sebelum ini, Musda diselenggarakan setelah Munas.

Media Karya yang memantau persiapan Musda di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Utara memperoleh kesan bahwa pengurus Golkar di daerah umumnya bergairah menyambut sistim dari bawah ke atas ini. Karena sistim tersebut akan membawa angin baru dalam rangka meningkatkan demokratisasi dalam tubuh Golkar sendiri, seperti yang diungkapkan dua tokoh Golkar Jateng drs Soeparto, pejabat Ketua DPD Tk.I Jateng yang juga Wakil Gubernur, dan Ir. Sukoharjo salah satu Ketua DPD Golkar Jateng yang juga adalah Ketua DPRD Tk.I propinsi tersebut.

Musda yang mendahului Munas, oleh keduanya dianggap bukan hanya realistis, tapi semakin memberi peluang dan tempat bagi kader-kader Golkar di berbagai jajaran baik yang fungsional maupun yang teritorial untuk lebih memacu diri dalam pengabdiannya terhadap organisasi, bangsa dan negara. Keduanya mengungkapkan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan bottom-up system, kendati sistim ini relatif baru. Sebagai contoh, ditunjukkan pelaksanaan beberapa Musda yang telah berlangsung lancar penuh semangat demokratis dan mengacu pada peningkatan kualitas.

Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Musda di Jateng, ungkap Suko, tiga bulan sekali diselenggarakan pertemuan di tiap Karesidenan antara tingkat satu dengan tingkat dua, agar terjalin suasana dialog antara DPD I dan II. "Kalau ini dapat diupayakan secara konsisten, rasanya kok tidak akan ada kendala yang menghambat," ujar Suko.

Dua fungsionaris Golkar Jateng ini

Soeparto

menganggap komunikasi terus-menerus dalam jajaran Golkar perlu ditingkatkan lebih intensif lagi, baik antara tingkat pusat dengan daerah tingkat satu dan tingkat dua, maupun antara jalur A, B dan G. "Karena tanpa informasi yang lancar dan mantap, sulit rasanya untuk mempercepat proses peningkatan kualitas diri baik Golkar secara keseluruhan maupun kader-kadernya," kata Parto. Karena itu menurut Parto, pengurus Golkar Jateng selalu menggunakan cara rembug atau musyawarah, di dalam menentukan kebijakan dan keputusan-keputusan organisasi, sambil berupaya tidak menyimpang dari peraturan maupun petunjuk DPP. Hanya, dalam menjalankan roda organisasi di daerah mereka tidak terlalu kaku dalam menjatuhkan keputusan, termasuk soal regenerasi. "Kan sudah ada patokan kriteria PDLT."

Ketentuan tentang enam puluh persen (60%) pengurus Golkar mendatang harus dari kalangan generasi muda, ternyata tidak terlalu mudah dalam pelaksanaannya, karena terbentur lagi pada masalah kriteria organisasi PDLT itu tadi. Tambahan lagi, selain masalah PDLT, calon pengurus harus memiliki kharisma dan pengaruh dalam rangka menjangkau Pemilu tahun 1992, karena pengurus di tingkat terbawah akan berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih. Namun demikian prinsip regenerasi dan kesinambungan adalah kriteria yang harus dihormati dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam pelaksanaannya tidak terlalu mudah. Apalagi

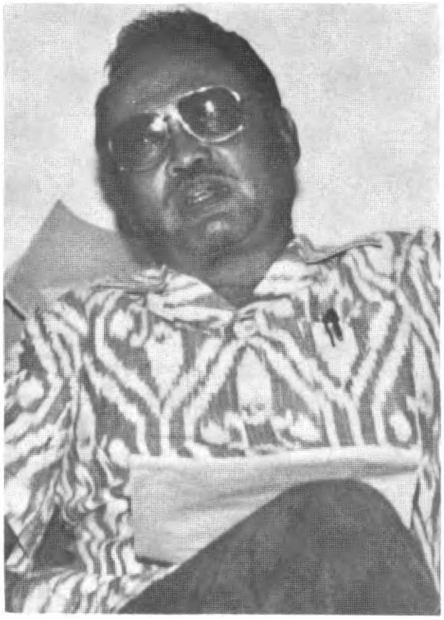

Sukoharjo

sekarang ini keanggotaan Golkar adalah perorangan, maka secara formal tidak ada lagi prioritas bagi kader yang berasal dari organisasi yang beraspirasi pada Golkar, seperti AMPI misalnya. Jadi yang dituntut oleh Golkar dari seorang kader AMPI adalah bobot kualitas dirinya, bukan AMPI-nya.

Di Jateng menurut pengakuan Parto dan Suko sumber kader Golkar yang handal, ya AMPI. Karena hampir sebagian besar komposisi kepengurusan di tiap-tiap tingkat dua pasti ada kader-kader Golkar yang adalah pengurus AMPI. Namun agar tetap memperoleh kepercayaan dari Golkar, tergantung pada kemampuan AMPI meningkatkan kadar kualitas diri anggotanya, sehingga organisasi kaum muda terus menjadi tumpuan harapan Golkar di masa mendatang.

Digitized by Google

Dalam pelaksanaannya di Jawa Tengah, bottom-up system ini, menurut Parto dan Suko, dijabarkan dalam pengertian profesionalisme kader. Artinya pengurus Golkar di Jawa Tengah nanti, tidak mempertimbangkan dari mana seorang kader itu datang, tetapi, apakah sang kader memenuhi standar kriteria yang ditawarkan atau tidak. Masalah kualitas ini penting, karena di masa yang akan datang, Golkar tidak bakal mampu menjawab tantangan bersama pemerintah, di bidang ketenagakerjaan misalnya, kalau para kadernya tidak memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional.

Tentu saja penerapannya tidak mungkin seragam untuk tiap daerah, karena masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Brebes beda dari Magelang, dan Tegal tentu lain dari Salatiga. Ini sekedar contoh. Berpegang pada prinsip-prinsip seperti ini, maka Parto dan Suko yakin Musda-Musda Golkar di Jawa Tengah nanti akan menelorkan hasil yang optimal sesuai dengan harapan organisasi.

Menyinggung hubungan Golkar dengan jalur A dan B, dikatakan cukup hangat dan dinamis karena masing-masing saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak. Jalur A dan B selalu mendengar terlebih dahulu konsepsi yang ditawarkan oleh Golkar sebelum mengambil keputusan. "Dengan cara inilah musyawarah dan mufakat diterapkan dalam hubungan tiga jalur di Jawa Tengah" tandas Suko.

Tuntutan Masa Kini

Soetrisno Setjodipuro SH dan Adi Sutrisno yang masing-masing adalah Wakil Sekretaris DPD. Golkar DIY dan Wakil Bendahara Golkar TK.I DIY, juga menyambut baik diselenggarakan Musda-Musda II mendahului Musda I dan Munas. Terlepas dari persoalan bisa secara paripurna atau belum, sistim dari bawah ke atas ini sungguh memberikan kesempatan bagi kader-kader Golkar yang potensial untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang dan profesinya. Golkar dengan demikian akan jadi wadah perjuangan yang tidak membuka peluang bagi orang-orang yang loncat pagar. "Kapan lagi Golkar menata diri kalau tidak dari sekarang," kata Soetrisno dan Adi.

Pertumbuhan serta dinamika yang dicapai Golkar pada Pemilu 1987 nampaknya menghendaki agar sistim dan kriteria harus lebih ditegakkan secara konsiten. Karena harus diingat, tahun 1992 setiap kekuatan politik berdiri di hadapan pemlih yang lebih rasional dan lebih kritis dibanding tahun 1987. Untuk Golkar kelak harus mampu berdialog dengan warga Golkar yang juga semakin rasional dan semakin kritis. "Tanpa itu rasanya kita semakin mundur," kata mereka.

HR Sjahnan

Baik Adi maupun Soetrisno, beranggapan bahwa untuk menyambut sebuah sistim yang bila dilaksanakan sebaik-baiknya akan menyegarkan semua organ Golkar, hendaknya juga mulai lebih rasional dalam menata terutama dalam mengusulkan orang-orang yang kelak akan diberi kepercayaan untuk memimpin lajunya organisasi terbesar kita ini. Kriteria PDLT harus benar-benar diterapkan sebagai dasar pemikiran dalam mengambil langkah-langkah untuk suatu keputusan.

Ketika ditanyakan pendapatnya tentang kompisi generasi muda yang mendapatkan porsi enam puluh persen kedua tokoh Golkar dari kota Gudeg ini menjawab, diplomatis, "yah boleh saja tapi janganlah dipaksakan atau memaksakan. Biarlah itu berjalan secara wajar." Namun demikian prosentase itu bisa saja dipenuhi sepanjang tokoh-tokoh muda Golkar memang patut merebut porsi itu.

Soal bottom up system, tidak ada kendala yang terlalu sulit. Yang menjadi harapan dan perhatian semua pihak, justru dipertegasnya pelaksanaan PDLT yang telah dikumandangkan jauh hari sebelum Musda-Musda tingkat dua ini berlangsung.

Mengenai hubungan Golkar dengan jalur A, B dan G di DIY, dikatakan telah terjalin dalam mekanisme kerja yang sangat baik.

Sedangkan Ketua DPD. Golkar Sumatra Utara, Mayjen Purnawirawan H.R.Sjahnan, SH, yang juga adalah Ketua DPRD I Sumatra Utara, menerima dengan sepenuh hati kepengurusan Golkar di masa yang akan datang harus memenuhi kriteria PDLT yang ditawarkan. Kriteria itu bukan saja penting di tingkat dua tapi juga tingkat satu dan bahkan pusat. Untuk itu menurut Sjahnan kepengurusan yang akan datang diusahakan mencerminkan keterpaduan, antara Generasi muda dan generasi tua yang masih di anggap mampu bekerja sama dalam mengemban dan mengamalkan amanat organisasi.

Bukan hanya generasi muda saja yang harus berkualitas, berbobot, bermental baik atau katakanlah dapat memenuhi kriteria PDLT tapi generasi tua pun yang nantinya dipercaya untuk duduk kembali dalam kepengurusan Golkar mendatang, harus memenuhi kriteria tadi, bahkan harus lebih baik karena harus memberi cermin kepada yang muda bahwa yang lebih tua itu lebih baik.

Itu baru mencerminkan pengertian kesinambungan dalam arti yang luwes dan berkualitas. Kepada calon pengurus yang akan datang di Sumatra Utara bukan hanya mau, tapi yang bersangkutan juga harus mampu, dan tentu ada waktu untuk organisasi. Porsi 60 persen bagi Generasi Muda tidak harus kaku dalam pratek, "Tapi salah besar kalau kepengurusan Golkar di masa mendatang tidak memperhatikan Unsur kaum muda. Tentu yang dipakai adalah kaum muda yang berbobot," katanya.

Kepada AMPI misalnya, yang diakui sebagai salah satu sumber kader Golkar terbesar baik ditingkat desa, daerah ataupun pusat, tentu akan diberi kesempatan sebaik-baiknya, bila orang-orang yang bersangkutan memang dianggap mampu. Dan karena peserta Musda adalah perorangan tidak mewakili organisasi dan keanggotaan Golkar juga adalah perorangan, kita berkewajiban merekomindir untuk duduk dalam kepengurusan Golkar sepanjang yang bersangkutan dianggap memang telah memenuhi standar. AMPI tentu diharap memberikan masukan kepada Golkar. Artinya AMPI harus semakin menunjukkan dharma baktinya pada

Digitized by Google

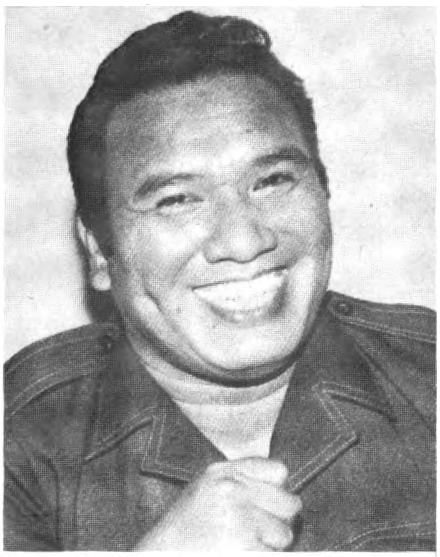

FJ Pinem

Golkar. Karena kepemimpinan menyangkut kualitas perorangan, wajar juga bila Golkar berharap kepada AMPI untuk mengajukan figur-figur yang benar-benar berkualitas, baik dalam berfikir maupun bertingkah laku.

Sjahnan berkeyakinan, apa-apa saja yang telah jadi garis organisasi dan semua pedoman yang datang dari DPP, daerah wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang boleh ingin menjadi pengurus tapi Musda lah yang kita serahkan untuk memutuskannya.

Sejalan dengan pendapat dan pandangan Ketua Golkar Sumatra utara Drs. F.J. Pinem (Ketua AMPI Sumut) mempertegas, bahwa di masa yang akan datang Golkar butuh orang-orang muda yang benar-benar berkualitas, bukan generasi muda yang hanya bisa berjaket dan menjilat, tapi kader muda yang mempunyai kapasitas dalam profesinya. Golkar memerlukan orang-orang muda yang kreatif dan kritis serta mempunyai daya serap yang tajam dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang muncul. Karena di masa mendatang tidak hanya problema intern organisasi yang muncul tapi akan terbentang luas tantangan bangsa yang harus dijawab. Dan kepada Golkar persoalan tersebut dialamatkan.

Karena itulah dengan Musda-Musda yang mendahului Munas Golkar, perlu kiranya semua pihak secara selektif dan kreatif menempatkan orang-orang yang akan menduduki komposisi kepengurusan Golkar untuk periode lima tahun mendatang. Sebagai Ketua AMPI, Pinem merasa punya tanggung jawab moral terhadap terselenggaranya Musda, baik di Tingkat Dua seluruh SUMUT maupun di Tingkat Satu Sumatra Utara.

Akhirnya baik Jateng, DIY dan Sumatera Utara, bottom up system adalah sebuah kesegaran, sebuah kegairahan, terlebih bila kriteria PDLT benar-benar dapat diterapkan secara konsekuen dan konsisten. Harapan Golkar menjadi milik rakyat akan dapat tercapai.

Memang ada kegairahan menyambut Musda dalam semangat bottom up system. Terlepas dari kekurangan yang menyembul di sana-sini, namun demokratisasi dari bawah ke atas sudah selayaknya digalakkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? □ **Rendy MS**

UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN ANDA PERUMTEL MENAWARKAN KOMUNIKASI MASA KINI

UNTUK KETERANGAN SELANJUTNYA
HUBUNGI BAGIAN PEMASARAN KAMI DENGAN ALAMAT :
BAGIAN PEMASARAN PERUMTEL, JL. BANDA NO. 41
BANDUNG, TELEPON : (002) : 56977 ; 55235

Digitized by Google

Sejumlah Daerah Rampungkan Musda

Selama bulan Juni sejumlah DPD Golkar menyelenggarakan Musyawarah Daerah Tingkat II (Musda II), dalam rangka memilih kepengurusan baru di daerah masing-masing dan dalam rangka menetapkan program perjuangan Golkar untuk lima tahun mendatang. Musda II ini merupakan peristiwa organisasi yang cukup menarik dalam tubuh Golkar, karena peristiwa itu sendiri menandai era baru pemilihan kepengurusan Golkar dengan mekanisme dari bawah ke atas.

Sampai dengan bulan Agustus 1988, diharapkan 298 DPP II Golkar seluruh Indonesia telah merapungkan penyelenggaraan Musda II, disusul kemudian dengan Musda I, baru yang terakhir Munas Golkar yang diselenggarakan pada bulan Oktober nanti.

Sistim Prestasi

Menurut Wakil Sekjen DPP Golkar Oka Mahendra, SH, ukuran objektif yang diletakkan Golkar dalam rekrutmen kepemimpinan organisasinya didasarkan pada kombinasi sistem prestasi kerja dan karier dengan komitmen yang tegas, sebagai pengembangan hakekat Orde Baru. Dengan sistem prestasi kerja ini, setiap kader Golkar diseleksi kecakapan dan prestasi kerjanya. Yang dibuktikan dengan kemampuan kepemimpinan dan karya nyata di dalam perjuangan organisasi. Apalagi, sistem itu dikombinasikan dengan sistem karier. Sehingga, selain kecakapan seorang kader, faktor masa pengabdian dan kesetiaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.

Itu sebabnya, kepemimpinan organisasi adalah kepemimpinan politik. Komitmen ideologis merupakan syarat penting yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, karena itu komitmen seorang kader terhadap Pancasila tidak bisa ditawar lagi. Seorang kader Golkar yang akan dipilih menduduki kepemimpinan organisasi harus terjamin kesetiaannya terhadap Pancasila. Dia harus seorang kader secara sadar, tulus dan ikhlas mempunyai komitmen yang kuat, sebagai pengemban hakekat Orde Baru. Artinya, kader kepemimpinan Golkar harus memiliki tekad, jiwa dan semangat yang tinggi untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945, demokrasi serta

AA Oka Mahendra

hukum.

Dari pengamatan Media Karya di lapangan menunjukkan, bahwa mekanisme pelaksanaan Musda dalam memilih komposisi pengurus DPD II Golkar berjalan secara tertib dan lancar dengan didahului pra musyawarah yang dilakukan tiga jalur, yaitu jalur ABRI, Beringin dan Golkar. Tapi, kedaulatan anggota sepenuhnya ada di forum Musda.

Mulai tanggal 12 sampai 14 Juni 1988, Golkar Kotamadya Palembang telah mencapai kesepakatan memilih pengurus baru melalui Musda II. Bahkan, lebih dari itu jajaran anggota Golkar Palembang merasakan bahwa organisasi Golkar, setidaknya sejak lima tahun terakhir ini makin menunjukkan kemajuan untuk mendorong dan menggerakkan pembangunan di wilayahnya. Mereka juga merasakan, bahwa Golkar selama ini bukan hanya tumbuh dan berkembang di Sumsel, tapi ikut membangun dan menumbuhkan kesadaran berpolitik yang sehat dan dinamis di kalangan generasi muda. Itu dibuktikan dengan hasil Pemilu 1987, dimana Golkar mampu menarik simpati dan menggerakkan gairah pembangunan di tengah masyarakat secara luas.

Dalam Musda sendiri, suasana demokratis tampak terpelihara oleh para peserta, sehingga suasana musyawarah mufakat dan demokratis.

Pada kesempatan itu, Musda telah memilih dan menetapkan sejumlah pengurus baru **DPD Golkar Kotamadya Palembang** sebagai berikut; Ketua H. Achmad Chori, Wakil Ketua Drs. Muad Asmani dan HM. Hunsi Chori, Sekretaris A. Masri Bastian, Wakil Sekretaris Ir. Alex Nurdin, SH dan Drs. Amir Ibrahim serta Bendahara HM. Idris Ali BSc, dengan dua Wakil Bendahara masing-masing Karim Bay Ali dan Nasib Mcan BSc.

Suasana demokratis tampak terpelihara dalam Musda DPD Golkar.

Digitized by Google

Musda berhasil memilih pengurus.

Sementara itu penyelenggaraan Musda Golkar Kodya/Kabupaten se-Jawa Timur sejak awal Juni lalu berlangsung dan menurut rencana berakhir Juli mendatang, ada beberapa DPD Golkar yang telah menyelesaikan Musda sekaligus berhasil memilih susunan pengurus untuk masa bakti 1988-1993 serta program kerja.

Para pengurus DPD Golkar Tingkat II hasil Musda ini telah dilantik oleh Ketua DPD Golkar Jatim Moh. Said dan yang mewakilinya. Berikut susunan DPD II Golkar beberapa daerah Kodya/Kabupaten se-Jatim hasil Musda; Kabupaten **Pasuruan,** Ketua HM. Kasim Prawirodihardjo, Wakil Ketua H. Basuni BA dan Soepangkat Adji, Sekretaris Yusbakir Aldjufri, SH, Wakil Sekretaris Chozin Budi Santoso dan Soehartomo, Bendahara Drs. Mudjiono serta Wakil Bendahara H. Ruslan.

Kotamadya **Probolinggo,** Ketua Maksum, Wakil Ketua Koentjoro Soehadi dan Soeradji, Sekretaris Soemarmo, SH, Wakil Sekretaris Eko Wahjono, SH, dan Bambang Soebagyo serta Wakil Bendahara Drs. Prayogo.

Kabupaten **Madiun,** Ketua HR. Soewojo, Wakil Ketua Sadji Sastrodihardjo dan Imam Sjafi'ie, SH, Sekretaris Soehardi BA, Wakil Sekretaris Kencono Indriatno, SH, dan Drs. Ibnu Chozin, Bendhara Ajivanto dan Wakil Bendahara Ir. Eddy Soegiarto.

Kabupaten **Jember,** Ketua H. Moch. Sjari'in, Wakil Ketua Abdul Bahar BA dan Drs. HA. Fatah Mustafa, Sekretaris Ali Syamsuddin BA, Wakil Sekretaris Machmud Sardjujono dan Ir. MZA Djalal, Bendahara Drs. Baharudin Rosyid serta Wakil Bendahara Dra. Any Indah Wahyuni.

Kabupaten **Sumenep,** Ketua H. Munawar BA, Wakil Ketua Abdoel Hamid dan Abd Said, Sekretaris Drs. Cahyono, Wakil Sekretaris Drs. A Martin dan Ir. Sudarto, Bendahara A Turmidzi Adfa serta Wakil Bendahara Ibnu Madjar BSc.

Kabupaten **Mojokerto,** Ketua Ismail, Wakil Ketua Drs. Jamhuri dan Poespito, Sekretaris Drs. Avan Danudi, Wakil Sekretaris Drs. Tarman dan Tjahjo Adji AR, Bendahara Soekarno, SH, serta Wakil Bendahara Ny. Siti Noorhayati.

Kabupaten **Gresik,** Ketua Matahir, Wakil Ketua Amin Prasodjo dan Drs. H. Sumari Sastrosiswojo, Sekretaris Kafan Arifin, Wakil Sekretaris Koes Moleyanto, SH dan Burhanuddin Ikhsan, SH, Bendahara Drs. Yahya Hariyanto dan Wakil Bendahara Heru Soeharto.

Kabupaten **Ponorogo,** Ketua Ngadino, Wakil Ketua Abdul Chamid BcHK dan Drs. H. Irwan Masrur Hadiputranto, Sekretaris Bambang Edianto, SH, Wakil Sekretaris Drs. Islam Iskandar dan Soeprapto BcHK, Bendahara PA Rijono dan Wakil Bendahara Muhadi Suyono, SH.

Kotamadya Surabaya, Ketua H. Adam Maiman, Wakil Ketua H. Soenaryo dan Soetrisno BA, Sekretaris Gembong Soeprodjo, Wakil Sekretaris Drs. Slamet dan Ny. Moe'anah Moestafa, Bendahara Ismanoe serta Wakil Sekretaris Drs. Slamet Wartono.

Kabupaten **Bangkalan,** Ketua Sukarmin, Wakil Ketua Drs. Abd Muin dan KH Mahfudz Hadi BA, Sekretaris Drs. Noor Mahfud, Wakil Sekretaris Drs. Wahad Abdinegoro dan R. Soenarto, Bendahara H. RP. Zainal Abidin serta Wakil Bendahara Fuad Toifi.

Kabupaten **Tulungagung,** Ketua Soekari, Wakil Ketua Isnaeni dan Drs. H. Moetadho, Sekretaris Drs. Soehadio Misdipramodjo, Wakil Sekretaris Soelihno BA dan Roedyanto, Bendahara Soegeng Rahardjo serta Wakil Bendahara Soeparyitno.

Kotamadya **Pasuruan,** Ketua Drs. Bambang Sakri, Wakil Ketua Sugito BA dan Trisman Soejono, Sekretaris Suhendro Wignyopranoto BA, Wakil Sekretaris Drs. Budi Halawa dan Prawito, Bendahara Bangunkartiko, SH serta Wakil Bendahara Sri Indayani.

Kabupaten **Sidoarjo,** Ketua Warimin, Wakil Ketua Miadi Hadiwiyono dan Drs. H. Noerachim, Sekretaris Dra. Hernani Hurustiati Subiyanto, Wakil Sekretaris Drs. Boimin dan Maksum Markan, Bendahara Drs. Soegiman serta Wakil Bendahara Soemardi.

Suasana musyawarah mufakat dan demokratis tidak hanya mewarnai pelaksanaan Musda di daerah Jatim maupun Kotamadya Palembang saja. Daerah lain pun mampu mewujudkan suasana sedemikian rupa, dalam memilih dan menetapkan pengurus DPD Golkar-nya. Seperti halnya di Kabupaten Banyumas, unsur kader-kader muda dalam kepengurusan DPD Golkar baru cukup dominan. Dimana hampir 60 persen pengurus yang terpilih, adalah dari kalangan generasi muda. Ini berarti peranan kader-kader muda mulai tampil di permukaan dalam mengisi pembangunan nasional.

Susunan lengkap pengurus DPD Golkar Tingkat II **Banyumas** yang baru, yaitu Ketua Warsono, Wakil Ketua Ir. Soehadi dan Drs. Soediman, Sekretaris Ir. Munadi, Wakil Sekretaris Marseno, Bendahara Drs. R. Soenardi serta Wakil Bendahara Ny. Sri Kuntarmi.

"Kami tetap berjuang bersama pengurus baru, meskipun kami tidak menjadi pengurus Golkar lagi. Karena, hati nurani kami tetap berada di tengah-tengah keluarga Golkar," demikian mantan Ketua DPD II Golkar Banyumas.

Sedangkan Musda Golkar Kabupaten **Wonogiri,** Jawa Tengah, telah

Digitized by Google

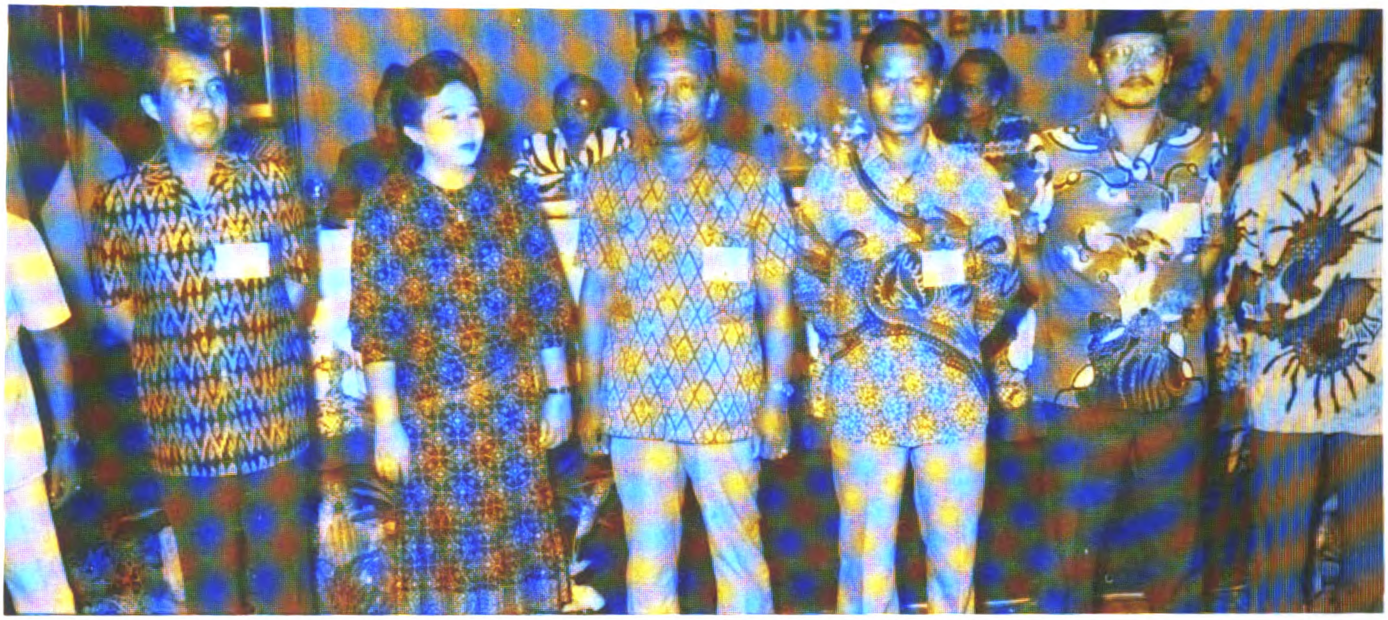

Susunan Pengurus DPD Golkar Jakbar.

menetapkan Ketua DPD Masduki Wijaya kembali untuk kedua kalinya. Yang dibantu oleh Wakil Ketua M. Mukri BA dan dr. Y. Sumarmo, Sekretaris Drs. Sugito HS, Wakil Sekretaris Drs. Sakiran dan Aris Sulardi, Bendahara Sriyono, SH, dan Wakil Bendahara Drs. Mulyadi.

Di Kabupaten **Brebes,** dua tokoh senior mencalonkan untuk menduduki kursi jabatan Ketua DPD setempat. Ketua tokoh itu, adalah Bupati Brebes H. Saiful Supardi serta Letkol (purn) H. Nor Qodim sekaligus sebagai Ketua DPRD Brebes dan Ketua DPD II Golkar pra Musda di samping Imam Yahya mantan Sekwilda, yang muncul sebagai Ketua DPD Golkar Tingkat II Brebes periode 1988-1993.

Demikian pula untuk Musda di Kotamadya **Tegal,** proses pemilihan komposisi struktur DPD Golkar-nya menunjukkan nilai-nilai demokratis yang tinggi. Karena ada kesepakatan kata dan sikap dalam menetapkan komposisi struktur itu, antara jalur ABRI, Beringin dan Golkar. Sehingga, dalam susunan komposisi struktur DPD Golkar Tingkat II Kotamadya Tegal, ketiga jalur itu telah menempatkan wakil-wakilnya. Susunan itu sebagai berikut, Ketua Letkol Dawawi, SH, Wakil Ketua Drs. Soekanto dan Mayor (Laut) Mohammad Tohir, Sekretaris Rahardjo, Wakil Sekretaris Rachmat BSc, Bendahara SWR Sari BA dan Wakil Bendahara Mohammad Ali Afiff.

Proses pemilihan komposisi struktur DPD Golkar.

Untuk pengurus harian DPD Golkar Tingkat II **Lampung Utara** terpilih Ketua M. Arfah, Wakil Ketua R. Gunawan Mega dan K. Mega Ali BA, Sekretaris Ruhiyat Sumadipura, Wakil Sekretaris Sunarto BA dan M. Toib Husin, Bendahara Faisol Jausal, Wakil Bendahara Yonizar BSc dan Syukri Asril.

Sementara itu susunan pengurus DPD Golkar **Kodya Banjarmasin** adalah Ketua Basri Masri Thoher, Wakil Ketua Dauddini BA dan H. Hasbullah Nasar, Sekretaris H. Harunnurrasyid, Wakil Sekretaris Ny. Bahjatan Noor dan Thamrin Sadek, Bendahara Cahya Khairani, Wakil Bendahara Ir. Syarifuddin Basri dan Ny. Mahillah HA.

Dalam Musda DPD Golkar Tingkat II **Jakarta Pusat,** dengan tim formatur 7 anggota yang diketuai Drs. HR. Agung Laksono, telah memilih A.R. Maulana Kusuma Wijaya sebagai Ketua DPD Golkar Tingkat II Jakarta Pusat. Dan pengurus lainnya, adalah Wakil Ketua Drs. H. Husni Zini dan Drs. H.N. Efendy Daulay, Sekretaris Unggul Budi Santoso, Wakil Sekretaris H. Nursani Asmara dan Alamsyah Wilman Pardede, Bendahara Ir. Maruli Tua Simamora, Wakil Bendahara H. Ny. Rasyidi Somad dan Ridwan Gade.

Sedangkan dalam Musda DPD Tk. II **Jakarta Barat,** Saamin terpilih menjadi Ketua dengan dibantu dua wakilnya, masing-masing Alung Djaharun BA dan Drs. H. Hasanuddin, Sekretaris Drs. (MED) H. Nasrun Najid serta Bendahara Drs. H. Musa Abdullah. □ (DT)

Digitized by Google

Optimisme Sumbar Menghadapi Musda

Memasuki kota Padang, pusat pemerintahan propinsi Sumatera Barat, kesan paling kentara adalah keteraturan. Kesan ini mungkin tidak berlebihan karena kota dengan penduduk mendekati 800.000 jiwa ini pernah mendapat hadiah Adipura karena prestasi di bidang kebersihan lingkungan. Dan untuk tahun ini, prestasi masyarakat Minang sebagai insan penyayang kebersihan mendapat pengukuhan baru lagi, karena Bukit Tinggi, sebuah kota madya di lingkungan administratif propinsi Sumatera Barat, menggondol Adipura pula.

Geografi yang garang tetapi berwatak romantis, mungkin ikut mempengaruhi perilaku masyarakat Minang dalam berbagai aspek kehidupannya. Mereka agamis, patuh pada norma adat, tetapi ngotot bila ada kontroversi. Seorang aktivis organisasi Golkar, dr Alis Marajo, yang sehari-hari adalah Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sumbar menyebut watak seperti ini dengan istilah egaliter. Alis mungkin benar.

Kalau di bidang kebersihan lingkungan, Sumatera Barat menampilkan Padang dan Bukit Tinggi sebagai referensi, maka di bidang politik pun masyarakat Minang mampu menciptakan ''keramaian'' yang spesifik. Beberapa ''berita politik'' yang sempat menghangat secara nasional, mengacu pada kasus yang terjadi di Sumatera Barat. ''Namun apabila sebuah ke-

Alis Marajo

putusan ditetapkan atas suatu peristiwa atau kontroversi, masyarakat

Djohari Kahar

Minang akan menghargai itu secara utuh. Mungkin ini karakter demokrasi orang Minang,'' ujar Alis. ''Orang Minang tidak begitu saja menerima perubahan, tanpa ikut terlibat dalam proses kelahiran perubahan itu, termasuk di bidang keputusan politik.''

Karena karakter seperti itu, ditambah dengan berita-berita hangat dari daerah ini yang diramaikan surat khabar, maka pelaksanaan Musda II Golkar di Sumatera Barat coba dipantau oleh Media Karya. Musda II kali ini memang agak fenomenal, karena dia diadakan mendahului Musda I dan Munas. Bagi masyarakat Sumatera Barat yang tidak menerima begitu saja perubahan-perubahan menyangkut dirinya, Musda II bisa jadi ''ramai''.

''Tapi Insyaallah, persiapan Musda di 14 DPD II Golkar Sumatera Barat berjalan sesuai rencana,'' ujar Djohari Kahar SH, Ketua DPD I Golkar propinsi tersebut.

Menurutnya, kendati Musda II kali ini dilaksanakan dalam semangat demokrasi dari bawah ke atas — satu praktek yang relatif baru dalam tubuh Golkar —, namun karena persiapan dilaksanakan sesuai dengan juklak No 9/1987 dari DPP, maka semuanya diharap akan berjalan sesuai dengan kehendak organisasi.

Karena Musda II kali ini dilaksanakan dalam semangat demokrasi dari bawah ke atas, maka jauh-jauh hari DPD I Golkar Sumbar mengadakan persiapan, termasuk penjelasan tentang apa hakekat semangat demokratisasi dengan sistim *bottom-up* itu. Dan optimisme Djohari Kahar terbukti ketika Musda II Golkar Kodya Solok yang berlangsung tanggal 3 dan 4 Juli lalu, berjalan dalam semangat demokrasi yang bercirikan musyawarah dan mufakat.

Otpimisme bahwa pelaksanaan Musda II di Sumbar bakal berjalan lancar, juga terlontar dari drs Mizwar, Wakil Ketua DPD I Sumbar yang juga adalah Wakil Ketua DPRD I propinsi ini. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Musda, tokoh PGRI Sumatera Barat ini menilai semua persiapan telah usai dan umumnya tidak ada kesulitan yang menghambat. ''Pentingnya sejauh yang menyangkut persiapan Musda di Sumatera Barat ini, semua-

Mizwar

nya telah berjalan sesuai rencana untuk meningkatkan kader demokrasi dalam tubuh Golkar,'' ujarnya.

Memang persiapan Musda telah mencapai kondisi yang matang. Panitia yang lengkap dengan pembidangan tugas dan tanggungjawab pun telah terbentuk. Demikian pula jadwal pelaksanaan Musda itu sendiri yang semuanya berlangsung dalam bulan Juli.

Bukan hanya Mizwar dan Djohari Kahar yang optimis. Rustam Kanin dan Tarmizi Hosen SH, yang masing-masing adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPD II Kodya Padang, pun sama yakin bahwa pelaksanaan Musda II di Sumatera Barat, khususnya di Kodya Padang sendiri bakal berjalan tertib dan sesuai rencana organisasi.

Digitized by Google

Sesuai dengan petunjuk dari DPD I, Kodya Padang menjadwalkan Musda II pada tanggal 13 dan 14 Juli. Semua persiapan yang perlu untuk Musda telah dirampungkan, termasuk penyegaran para komisaris kecamatan. "Pentingnya Golkar Kodya Padang, siap melaksanakan Musda," tegas Rustam. Dan Tarmizi Hosen menambahkan, dalam rangka persiapan Musda tersebut, pihaknya telah pula

Tarmizi Hosen

mengadakan konsolidasi dengan pimpinan tiga jalur untuk memperoleh kesamaan sikap organisasi dalam hal pelaksanaannya.

Nada serupa (optimis) juga terungkap dari Ketua DPD II Golkar Kodya Bukit Tinggi, H Abdul Madjid. Dia yakin pelaksanaan Musda di wilayah-

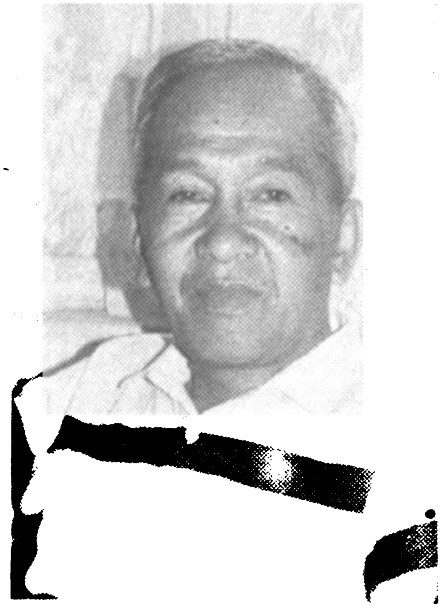

Abdul Madjid

nya berjalan lancar sesuai rencana dan aspirasi para anggota. Semua komisaris kecamatan diharap hadir dalam Musda tersebut. "Pentingnya sesuai dengan tata kerja organisasi dan petunjuk dari Pusat maupun Propinsi, telah kami laksanakan, tinggal tunggu tanggal main," ujar pensiunan ABRI yang kini menjadi Ketua DPRD Kodya Dati II Bukit Tinggi itu.

Sedangkan Kodya Payakumbuh pun tidak ketinggalan optimismenya. Drs Nasrun Handri, Wakil Ketua DPD II dan drs M Nashir Kepala Biro OKK, mengungkapkan, untuk Kodya Payakumbuh, tinggal menunggu pelaksanaan Musda-nya saja. "Semua persiapan sudah matang," kata Nasrun. Kepanitiaan yang menggabungkan ketiga unsur keluarga besar Golkar setempat pun telah terbentuk. "Kita berharap

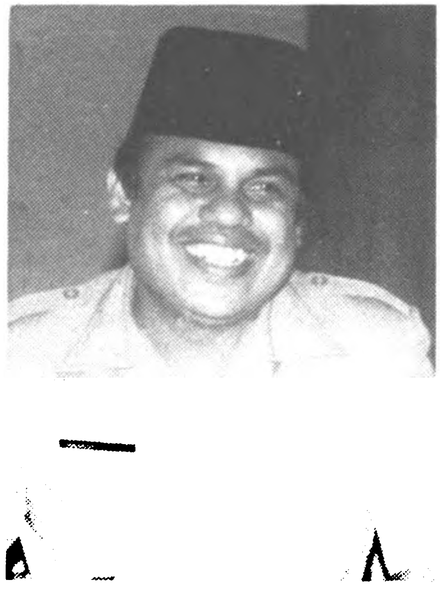

Nasrun Handri

pada pelaksanaan Musda nanti Payakumbuh membuktikan sukses yang membanggakan," ujar Nashir.

Janji dan Tantangan

Bagi Golkar di Sumatera Barat, janji dan tantangan membentang di depan mata. Janji yang prospektif memang ada, karena dalam pemilu yang lalu propinsi ini berhasil memperoleh 78,12 persen suara pemilih. Kodya Padang yang tidak pernah menang selama tiga pemilu terdahulu, pada pemilu 1987 yang lalu berhasil meraih kemenangan untuk Golkar sebanyak 67 persen. Bukit Tinggi juga demikian. Golkar yang kalah dalam tiga pemilu sebelumnya, akhirnya unggul dalam pemilu 1987. Sedangkan Kodya Payakumbuh pun mencatat sukses yang selalu melambung dari pemilu ke pemilu.

Tapi tantangan pun tidak sedikit. Djohari Kahar mengungkit tantangan dalam ungkapan klasik, tapi aktual, bahwa mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada meraihnya. Tantangan juga bakal muncul dari pemilih yang pada tahun 1992 nanti merupakan kaum muda yang semakin terdidik dan kritis. "Tuntutan kita dikemudian hari adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pemilih yang semakin imateriel," tutur Ketua DPD I Golkar Sumbar yang kini menjadi anggota DPR pusat itu.

Generasi muda yang kini berada di perguruan tinggi, seperti kata Tarmizi Hosen, memang perlu mendapat porsi

M Nashir

perhatian di masa mendatang. "Tampilnya beberapa tenaga perguruan tinggi di jajaran kepengurusan Golkar Sumbar, adalah faktor positif yang semakin membangun citra Golkar di lingkungan akademi," ujar dosen FH Universitas Andalas ini.

Sedangkan Mizwar menilai proses demokratisasi dari bawah ke atas yang dirintis Golkar, merupakan kontribusi penting bagi kehidupan demokrasi bangsa ini. "Bagaimana pun juga kita selalu menginginkan bobot demokrasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Golkar sebagai kekuatan sosial politik paling berpengaruh selama Orde Baru, harus berani memeloporinya," ujar tokoh PGRI ini.

Musda II yang mendahului Musda I dan Munas, memang merupakan gejala baru dalam mekanisme kepengurusan Golkar. Tapi bagi para pengurus Golkar di Sumatera Barat, pembalikan mekanisme dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas ini, tidak terlalu mempengaruhi pola pikir dan sikap dalam berorganisasi. Karena, seperti dikatakan Djohari, Golkar sejak lama telah menyandang

Digitized by Google

Sumbar optimis, Musda yang kini berlangsung akan semakin memantapkan kharisma.

karakter demokrasi dalam dirinya. "Karena demokrasi yang meningkat menuntut perubahan mekanisme, ya kita harus memulainya," kata Mizwar.

Konsep regenerasi pun memperoleh porsi tersendiri dalam pelaksanaan Musda di propinsi ini. Kata Djohari, regenerasi, atau penyegaran, memang tidak bisa dihindari. "Kita memang menginginkan tampilnya tokoh-tokoh muda kader Golkar untuk memimpin upaya pembangunan di daerah ini," ujarnya. Namun dalam pelaksanaannya, regenerasi harus juga memperhatikan aspek kesinambungan seperti yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Dengan demikian, kader Golkar yang terus meningkat dari waktu ke waktu, selain berharap tampil ke permukaan dalam setiap jajaran organisasi maupun lingkup profesi, juga jangan lupa meningkatkan kualitas diri. Karena, seperti diungkapkan oleh Mizwar, antara regenerasi dan kualitas ada hubungan yang sangat erat.

Komponen potensi masyarakat jangan diabaikan.

Sumatera Barat, seperti daerah lain juga, memang tidak selamanya mulus dalam pengelolaan organisasi. Sejumlah masalah, sengaja atau tidak, muncul ke permukaan mengundang reaksi dan tanggapan. "Tapi itu semua adalah dinamika yang wajar dari sebuah organisasi besar seperti Golkar ini," kata Djohari. Terlepas dari itu semua, Golkar Sumatera Barat optimis bahwa Musda-Musda yang kini sedang dan sudah dilaksanakan akan semakin memantapkan akar dan kharisma organisasi.

Setiap daerah mempunyai karakter peluang dan tantangan yang berbeda. Untuk Sumatera Barat, apapun tantangannya, Djohari mempunyai resep yang tumbuh dari kultur Minang yaitu apa yang disebut dengan *Tungku Tigo Sajarang,* atau *Tali Tigo Sapilin.* Artinya, dalam menghadapi setiap permasalahan, hendaknya musyawarah dan mufakat yang melibatkan semua komponen potensi masyarakat jangan diabaikan.

Untuk intern Golkar, prinsip Tali Tigo Sapilin sebenarnya terakomodasi dalam kelengkapan tiga jalur. Tinggal pandai-pandai memanfaatkannya saja. Dan mengenai hubungan tiga jalur ini, baik Djohari, Mizwar maupun pengurus-pengurus DPD II disana menegaskan, "tidak ada masalah." □

(LT)

Digitized by Google

Oleh: Drs Cosmas Batubara

Kebijaksanaan Pemerintah Di Bidang Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia berkaitan erat dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Disatu pihak penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, apabila dapat dibina dan didayagunakan dengan baik, akan dapat menjadi modal dasar yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Di lain pihak, terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan masalah, antara lain bila daya dukung ekonomi terbatas, tingkat pendidikan dan produktivitas rendah, penyebaran penduduk dan angkatan kerja tidak merata baik secara regional maupun sektoral.

Dengan demikian, tantangan yang kita hadapi dewasa ini adalah bagaimana membina dan mendayagunakan tenaga kerja yang begitu banyak supaya menjadi modal dasar yang efektif dalam pembangunan. Untuk itu, kebijaksanaan yang strategis perlu diletakkan dan program-program yang pragmatis perlu dikembangkan.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan". Jadi harus diusahakan agar setiap orang yang mampu dan mau bekerja memperoleh pekerjaan sesuai yang diinginkan dan setiap orang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak.

Dalam pembahasan ini pertama-tama akan digambarkan masalah ketenagakerjaan yang kita hadapi dewasa ini serta kecenderungannya di masa yang akan datang. Bertitik tolak pada masalah tersebut, akan diuraikan mengenai kebijaksanaan yang ditempuh secara nasional dan peranan Departemen Tenaga Kerja dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan diuraikan program-program pembinaan dan penempatan tenaga kerja serta kebijaksanaan operasionalnya.

Cosmas Batubara

Perkembangan Penduduk

Masalah pertama yang kita hadapi adalah bahwa penduduk Indonesia bertambah cukup pesat dengan laju pertumbuhan sebesar 2,1 persen setahun dalam periode 1961-1971 dan 2,3 persen setahun dalam periode 1971-1980. Dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2 persen, dan pada periode 1990-2000 diperkirakan 1,9 persen setahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut penduduk Indonesia akan bertambah dari 146, 8 juta tahun 1980 menjadi 183,5 juta tahun 1990 dan 222,8 juta tahun 2000.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di atas, angkatan kerja juga akan bertambah dari 52,4 juta tahun 1980 menjadi 77 juta tahun 1990 dan 101,6 juta tahun 2000. Hal ini berarti pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9 persen selama periode 1980-1990 dan 3,8 persen pada periode 1990-2000. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tersebut menghasilkan struktur penduduk Indonesia dalam usia muda, dan menuntut tersedianya lapangan kerja yang layak.

Selama Pelita IV, angkatan kerja bertambah dengan 9,3 juta orang dan selama Pelita V diperkirakan akan bertambah dengan 11,2 juta orang atau sekitar 2,25 juta orang setahun.

Masalah kedua yang kita hadapi dalam Pelita IV dan dalam Pelita V yang akan datang adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi kita selama periode 1971-1980 cukup tinggi, yaitu 7,9 persen per tahun. Namun daya serapnya terhadap kesempatan kerja ternyata relatif kecil, yaitu hanya 0,38 persen. Hal ini berarti selama periode 1971-1980, walaupun ekonomi tumbuh dengan 7,9 persen, kesempatan kerja yang diciptakannya hanya bertambah dengan 3 persen setahun. Sehingga pada tahun 1980, jumlah kesempatan kerja seluruhnya diperkirakan hanya 51,6 juta.

Dengan terjadinya resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan sejak akhir Repelita III hingga sekarang, perkembangan ekonomi kita juga mengalami penurunan menjadi 6,5 persen setahun pada Repelita III dan 3,8 persen setahun dalam Repelita IV. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pertambahan kesempatan kerja baru akan berkurang dari 6 juta selama Repelita IV. Demikian juga dalam Pelita V, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sekitar 5 persen setahun dan mampu menyerap tambahan tenaga kerja kurang dari 7 juta. Dengan demikian, penganggur potensial akan membengkak yang sebagian besar dari mereka akan lari ke sektor informal.

Masalah ketiga adalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang mempengaruhi rendahnya produktivitas kerja. Data tahun 1980 menunjukkan bahwa dari 52,1 juta angkatan kerja, sebanyak 88,2 persen berpendidikan maksimum S.D.; 5,2 persen tamat SLTP, 5,7 persen tamat SLTA dan 0,9 persen tamat Sarjana Muda dan Sarjana. Keadaan ini hanya sedikit lebih baik dibanding keadaan tahun 1971.

Tingkat Pendidikan angkatan kerja

Digitized by Google

TABEL I
PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA INDONESIA

Tahun	Penduduk	Angkatan Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	jumlah
1961	97.019	25.193	9.641	34.834
1971	119.233	27.009	13.360	40.369
1976	131.797	33.537	17.477	51.014
1980	146.77	35.099	17.322	52.421
1985	165.154	42.541	24.501	67.042
1990	183.457	47.725	29.227	76.952
1995	202.746	53.681	34.815	88.496
2000	222.753	60.269	41.357	101.627

TABEL 2
PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PEKERJA MENURUT SEKTOR
(persen)

Sektor	Produk Domestik Bruto			Pekerja		
	1987	1980	1985	1970	1980	1985
Pertanian	44,8	24,8	23,7	67,3	56,3	54,7
Pertambangan	8,0	25,7	16,3	0,2	0,8	0,7
Industri	8,4	11,6	14,1	6,8	9,1	9,3
Listrik	0,5	0,5	0,9	0,1	0,1	0,1
Bangunan	3,5	5,6	5,4	1,7	3,2	3,4
Komunikasi	4,4	4,3	6,6	2,4	2,9	3,1
Jasa-jasa	30,4	27,5	33,0	21,5	27,6	28,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ini, untuk masa-masa yang akan datang, diperkirakan relatif akan lebih baik, khususnya bagi angkatan kerja baru. Berdasarkan proyeksi dari DEPDIKBUD, selama Repelita IV diperkirakan akan terdapat 12,6 juta lulusan dan putus sekolah SD, SLTP dan SLTA yang tidak melanjutkan sekolah. Dari jumlah tersebut sebesar 38,9 persen dari SD, sebesar 27,8 persen SLTP dan sebesar 33,3 persen dari SLTA.

Meningkatnya pendidikan angkatan kerja ini di satu pihak sangat menggembirakan, namun di lain pihak menimbulkan masalah baru di pasar kerja. Dengan meningkatnya pendidikan pencari kerja, meningkat pula persepsi mereka akan pekerjaan yang diinginkan. Namun peningkatan pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan keterampilan kerja, sehingga sulit menempatkan mereka. Data dari Bursa Kesempatan Kerja menunjukkan bahwa penempatan lulusan SLTA hanya sekitar 15 persen dari yang terdaftar, sementara penempatan SLTP sebesar 20 persen dari pencari kerja terdaftar.

Intensitas Masalah

Sebagaimana dikemukakan di atas, masalah utama yang kita hadapi sekarang ini adalah keterbatasan kesempatan kerja dibandingkan dengan arus angkatan kerja yang baru yang bertambah setiap tahun. Di samping jumlah penganggur akan bertambah, maka lamanya penganggur juga akan bertambah. Hal ini di satu pihak akan mengakibatkan kompetisi memperoleh lapangan kerja yang terbatas akan menjadi semakin tajam, dan cenderung untuk menimbulkan hubungan-hubungan yang semakin keras dan keresahan sosial.

Pendidikan para penganggur juga relatif semakin tinggi, harapan-harapan mereka mengenai kesempatan kerja dan penghasilan juga menjadi semakin sukar dipenuhi. Gap antara harapan dan kenyataan semakin lebar dan dapat menimbulkan frustasi bagi pencari kerja dan kecemburuan sosial. Kriminalitas cenderung akan meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, yang menjadi tantangan besar bagi POLRI dan petugas keamanan lainnya.

Sebab utama pengangguran dan setengah pengangguran adalah keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia. Sebab itu perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong perluasan kesempatan kerja. Dalam GBHN 1988, Repelita IV dan berbagai Pidato Presiden, telah dinyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hal ini mengingat kesempatan kerja tidak hanya mempunyai arti ekonomis, tetapi juga mempunyai arti kemanusiaan, yaitu menumbuhkan harga diri.

Kebijaksanaan umum perluasan kesempatan kerja adalah dengan memperluas kesempatan berusaha dan mendorong setiap usaha masyarakat dapat berkembang dengan sehat. Untuk itu perlu dukungan berbagai kebijaksanaan di bidang moneter, fiskal, ekspor-impor, investasi, teknologi dan lain-lain. Termasuk di dalamnya kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, mengurangi atau menghilangkan pungutan liar dan, yang juga sangat penting, keamanan untuk berusaha, baik dari pada oknum maupun dari petugas keamanan sendiri.

Dalam GBHN telah ditegaskan bahwa perluasan kesempatan kerja ditempatkan sebagai salah satu tujuan dari setiap program pembangunan sektoral. Dengan demikian, di setiap instansi, kebijaksanaan yang diambil haruslah juga mempertimbangkan atau mengacu kepada perluasan kesempatan kerja. Jaminan ketertiban dan keamanan bukan hanya sekedar menjaga keamanan sosial, akan tetapi juga supaya para karyawan dapat bekerja dengan tenang dan pada para pengusaha dapat melakukan tugasnya dengan aman pula.

Upaya perluasan kesempatan kerja di lakukan juga melalui pemerataan pembangunan di daerah. Kondisi antar berbagai daerah di Indonesia tidak sama, baik dari segi potensi penduduk dan sumber alamnya, maupun dari segi kemampuannya. Sebab itu pembangunan daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan pemerataan pembangunan masing-masing daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, sehingga dapat pula dicapai perluasan dan pemerataan kesempatan kerja di daerah.

Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan juga melalui program-program khusus untuk kelompok angkat-

Digitized by Google

an kerja tertentu, seperti penganggur dan setengah penganggur di desa, golongan ekonomi lemah, pemuda, wanita, tenaga kerja penyandang cacad, pengganti tenaga asing, pengusaha kecil, tani dan nelayan miskin, dan sebagainya. Ujud kegiatannya antara lain berupa Proyek Padat Karya, Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Penghijauan, Inpres Kesehatan, Inpres Pasar, Inpres Sekolah Dasar, Transmigrasi, ABRI Masuk Desa, Listrik Masuk Desa dan sebagainya.

Disamping itu sektor informal terus dikembangkan karena ternyata mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja Indonesia.

Kebijaksanaan Latihan

Rendahnya mutu tenaga kerja tidak hanya mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja dan penghasilan, tetapi juga menyulitkan pengolahan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan komparatif di bidang sumber daya alam dan jumlah tenaga kerja. Sayang, mutu tenaga kerja kita relatif masih rendah. Sebab itu mutu tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan supaya tenaga kerja yang besar tersebut benar-benar dapat menjadi kekuatan efektif dalam pembangunan.

Peningkatan mutu tenaga kerja memang dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu jalur pendidikan formal, jalur latihan kerja dan jalur pengembangan di tempat kerja.

Pendidikan formal sangat efektif untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian, bakat, sikap mental, pengetahuan dan kecerdasan termasuk kreativitas dan daya analisa. Aspek-aspek tersebut merupakan bahan baku dan modal dasar yang sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut peningkatan mutu tenaga kerja.

Latihan kerja merupakan jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Latihan kerja lebih menekankan pada keterampilan yang sering disebut profesionalisme. Latihan memang harus selalu berkait dengan dunia kerja dan persyaratan kerja. Oleh karenanya, latihan kerja akan lebih bersifat fleksibel dibandingkan pendidikan formal.

Latihan kerja akan terus perlukan karena dunia kerja dan persyaratan kerja terus berkembang dan berubah dengan cepat, sedang pendidikan formal tidak mungkin dapat dirubah dengan cepat. Dengan demikian, latihan kerja ini sebenarnya dapat dianggap sebagai pengganti atau sebagai pelengkap pendidikan formal. Latihan kerja dapat dilaksanakan baik secara institusional di lembaga latihan maupun secara "on-the-job" di perusahaan.

Disamping untuk mengisi lowongan di perusahaan-perusahaan, program latihan perlu juga diarahkan kepada penyiapan tenaga kerja mandiri atau yang dapat berusaha sendiri.

Kebijaksanaan Penyebaran

Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat pendayagunaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti program transmigrasi, AKAL, AKAD dan AKAN.

Antar Kerja Lokal atau AKAL, merupakan usaha mempertemukan lowongan kesempatan kerja dan pencari kerja melalui Bursa Kesempatan Kerja atau BKK.

Antar Kerja Antar Daerah atau AKAD, adalah mekanisme penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja dari satu Propinsi ke Propinsi lain, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan bersifat sementara. Sistem AKAD akan lebih efektif lagi apabila dapat dikaitkan dengan program transmigrasi. Dengan demikian penyebaran tenaga kerja melalui AKAD tersebut tidak lagi bersifat sementara, tetapi untuk seterusnya.

Antar Kerja Antar Negara atau AKAN dilakukan atas dasar adanya kebutuhan tenaga di luar negeri terutama di Timur Tengah. Kesempatan ini kita manfaatkan karena keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka mutu tenaga kerja yang akan dikerahkan melalui mekanisme AKAN ini perlu ditingkatkan. Berbagai keuntungan akan diperoleh melalui peningkatan program AKAN. Disamping meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja yang ada, juga untuk menambah pengalaman dan ketrampilan serta memperoleh devisa. Namun demikian, peningkatan program AKAN ini harus pula sejalan dengan peningkatan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang dikerahkan.

Faktor keamanan merupakan faktor penting untuk mendorong mobilisasi angkatan kerja tersebut, baik dalam rangka AKAD maupun dalam rangka AKAN.

Bagi yang sudah bekerja perlu dijamin kepastian pekerjaannya, penghasilannya, kesehatan dan keselamatannya dan hubungan kerja antara Pengusaha dan Karyawan. Sebab itu di tiap-tiap perusahaan telah dikembangkan hubungan industrial yang didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Hubungan Industrial Pancasila atau HIP pada dasarnya menekankan hubungan kekeluargaan dan partnership antara pengusaha dan karyawan. Implementasi HIP adalah dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Lembaga Bipartit dan Tripartit, serta Penyelesaian Perselisihan. Kesepakatan Kerja Bersama atau KKB antara lain memuat hak dan kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban karyawan.

Setiap perbedaan pada dasarnya harus dapat dimusyawarahkan antara Pengusaha dan Karyawan dalam Forum Bipartit, atau dengan unsur Pemerintah dalam Forum Tripartit. Dengan demikian ketenangan dan ketenteraman bekerja dapat diciptakan yang selanjutnya mendorong peningkatan produktivitas kerja di perusahaan.

Dengan penerapan prinsip kekeluargaan dan musyawarah, diharapkan dapat mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, sehingga tidak menambah penganggur yang sudah ada.

Masalah utama yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan sekarang ini adalah keterbatasan kesempatan kerja untuk menampung angkatan kerja baru yang bertambah memasuki pasar kerja setiap tahun. Untuk ktu, semua program pembangunan sektoral dan regional diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya.

Disamping itu, diusahakan penciptaan kesempatan kerja melalui Proyek-proyek Padat Karya dan pengembangan sektor informal. Penempatan dan penyebaran tenaga kerja ditingkatkan melalui Bursa Kesempatan Kerja, program AKAL, AKAD dan AKAN.

Program latihan diarahkan bukan saja pada peningkatan keterampilan teknis, akan tetapi juga untuk mampu berusaha sendiri. Pembinaan hubungan industrial berdasarkan Pancasila bermanfaat bukan saja untuk meningkatkan produktivitas kerja akan tetapi juga untuk mengurangi kemungkinan PHK.

Namun disadari bahwa walaupun usaha-usaha tersebut telah dilakukan dan akan diteruskan, masalah penganggur dan setengah penganggur diperkirakan akan tetap menuntut perhatian dan bila tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan sosial. Ini menjadi tantangan bagi petugas keamanan.□

Digitized by Google

Oleh: SOEKARNO D.

Kedudukan Wanita dan Wanita Pekerja Dalam Negara Pancasila

Secara eksplisit, tiada satu kalimatpun dalam UUD 1945 mengatur kedudukan wanita. Namun secara implisit dan tersirat hal tersebut telah terumuskan pula antara lain dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang mengatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dengan adanya rumusan "segala warga negara" di dalam rumusan itu sudah termasuk pengertian warga negara pria maupun wanita. Pria dan wanita tidak dibedakan dalam hukum dan pemerintahan, dengan demikian memiliki kesempatan yang sama dalam segenap kegiatan pembangunan.

Sebenarnya kedudukan wanita yang secara tersirat tercantum dalam UUD 1945 itu secara tak langsung berkaitan pula dengan hasil-hasil perjuangan Gerakan Wanita yang telah berlangsung berabad-abad lamanya yang di dalamnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa stadium. Stadium pertama dari Gerakan Wanita sekedar menghendaki adanya perubahan-perubahan terbatas di antara kaum wanita seperti peningkatan keterampilan, perbaikan dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, yang kesemuanya masih terbatas pada lingkungan kecil, sedang stadium ke dua dari evolusi Gerakan Wanita memperjuangkan adanya persamaan hak dan kewajiban dengan kaum pria. Programnya yang terpenting pada stadium kedua ini ialah persamaan dalam pekerjaan dan persamaan dalam hak memilih dan dipilih menjadi anggota parlemen. Pola gerakan stadium kedua ini disebut gerakan feminisme atau gerakan emansipasi wanita. Adapun stadium ketiga ialah gerakan dimana perjuangan wanita dilakukan bersama-sama dengan kaum pria, bergandengan tangan dan saling bahu membahu untuk mewujudkan Dunia Baru yang bisa menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang termasuk kaum wanita dan pria.

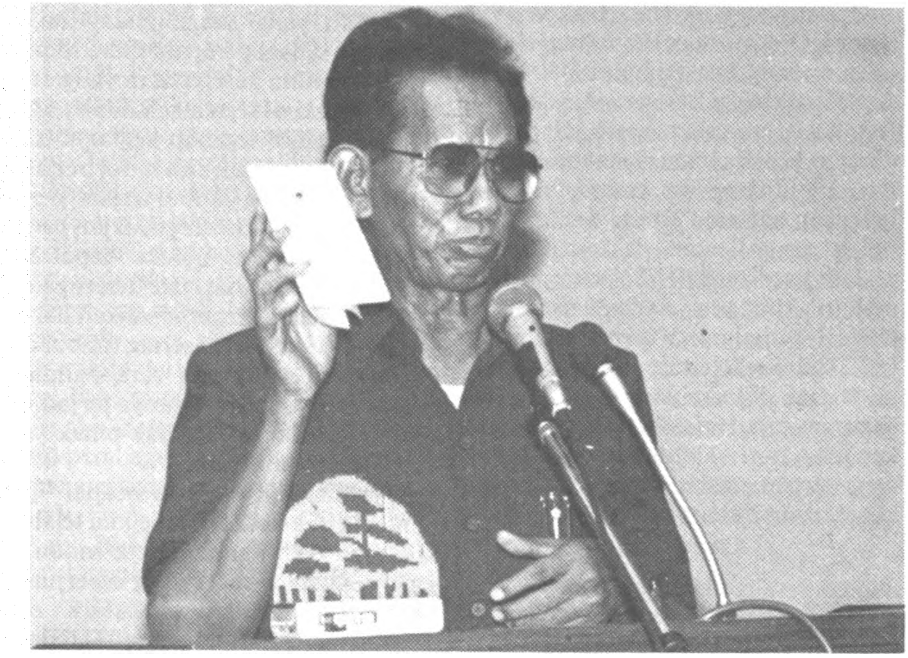

Soekarno D.

Kedudukan Wanita menurut UUD 1945

UUD 1945 yang lahir pada tahun 1945 itu tentunya mendapat hikmah pula dari perjuangan kaum wanita yang pada waktu itu di negara-negara Barat sudah berada pada stadium ketiga. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tidak mengadakan perbedaan antara wanita dengan pria. Wanita dan pria tidak dibedakan, dan dirumuskan sebagai "semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan . . . dan sebagainya", jelas menunjukkan bahwa kedudukan wanita Indonesia menurut UUD 1945 senafas dengan apa yang diperjuangkan oleh gerakan wanita pada stadium ketiga itu. Dengan demikian negara kita yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 ini tidak mengenal diskriminasi antara kaum wanita dan kaum pria. Jika dalam kehidupan sehari-hari, di permukaan tampak ada perbedaan, hal itu disebabkan karena menurut kodratnya wanita sejak lahirnya memang ditakdirkan berbeda dengan pria, baik secara fisik maupun emosional, yang dalam pelaksanaannya harus diterjemahkan dengan benar, tidak menggeser posisi "persamaan" dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan bangsa dan negara.

Garis-garis Besar Haluan Negara kita misalnya, telah memberi penegasan mengenai kedudukan wanita itu, ialah bahwa mereka itu bukan saja memiliki persamaan dalam hukum dan pemerintahan, akan tetapi wanita sebagai warganegara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segala kegiatan pembangunan.

Jika dalam GBHN peranan wanita diatur secara khusus, ini bukan karena kita mengadakan diskriminasi di dalamnya, akan tetapi semata-mata adalah untuk meningkatkan peranan wanita itu sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita, tetapi tetap dalam kerangka persamaan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segenap kehidupan bangsa dan kegiatan pembangunan. Beberapa contoh kegiatan pembangunan yang disebut-sebut dalam GBHN antara lain ialah: upaya untuk mewujudkan keluarga, sehat, sejahtera dan bahagia termasuk pengembangan generasi muda dan re-

Digitized by Google

maja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, berbagai pengembangan aspek kehidupan anak dan remaja seperti peningkatan gizi dan kesehatan, pendidikan termasuk pendidikan rohani, agama dan jasmani, kecerdasan dan kepribadian serta kekeserasian dalam hidup bermasyarakat, dan sebagainya. Diketengahkan fungsi-fungsi di atas oleh GBHN bagi wanita, adalah untuk menunjukkan bahwa kaum wanita sesungguhnya memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dalam beberapa bidang pekerjaan dibanding kaum pria dalam memikul tanggung jawab dan mengembangkan peranannya dalam pembangunan.

Dari apa yang tersirat dalam UUD 1945 maupun yang dicanangkan dalam GBHN, kita dapat menangkap bahwa posisi dan kedudukan wanita Indonesia adalah sama dengan posisi dan kedudukan wanita seperti yang dicitacitakan oleh gerakan wanita pada stadium ketiga, karena menurut UUD 1945 dan GBHN tersebut wanita Indonesia memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan pembangunan bangsanya, bahkan mereka sesuai dengan kodratnya juga memiliki keunggulankeunggulan tertentu dibanding dengan kaum pria. Sebaliknya untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai wanita merekapun memerlukan perlindungan-perlindungan tertentu pula.

Kedudukan Wanita sebagai Tenaga Kerja

Perjuangan kaum wanita di samping untuk mencapai persamaan hak dan kewajiban dengan kaum pria, juga untuk bersama-sama dengan kaum pria memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan bahagia bagi semuanya baik wanita maupun pria. Karena itu segala macam bentuk perlakuan yang bertentangan dengan harkat dan martabat wanita haruslah dihindari, maka segala langkah perlu diambil untuk keperluan ini.

Di dunia internasional upaya-upaya demikian telah diambil, dengan dikembangkannya kesepakatan antar bangsa dan kemudian dicantumkan sebagai dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk Konvensi dari International Labour Organization (ILO) seperti misalnya:Konvensi mengenai Maternity Protection Convention tahun 1919; Night Work (Women) Convention tahun 1919 dan sebagainya. Maksud diadakannya konvensikonvensi tersebut tidak lain ialah untuk melindungi kaum wanita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat kaum wanita, dan sama sekali jauh dari maksud-maksud untuk mengadakan diskriminasi antara kaum wanita dan kaum pria.

Negara kita yang berdasarkan Pancasila itu pada dasarnya menerima pula kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk Konvensi-konvensi tersebut yang isinya dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan Indonesia telah menerima beberapa konvensi secara utuh dan meratifikasinya dalam bentuk Undangundang misalnya konvensi no. 100 tahun 1951 tentang "Equal Remunaration for Men and Women Workers for Work of Equal Value" (Upah yang Sama bagi Pekerja Pria dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya).

Konvensi ini kita terima oleh karena isinya kita anggap sesuai dengan dasar negara Pancasila, UUD 1945 dan haluan negara yang tercantum dalam GBHN. Isi konvensi ini jelas memberi hak dan kedudukan yang sama bagi kaum wanita dan pria, memberi balas jasa yang sama pula bagi kedua jenis seks itu untuk hasil karya yang sama. Jika dalam praktek terjadi hal-hal yang tidak demikian, itu adalah merupakan bentuk hambatan yang sekaligus merupakan tantangan bagi kita untuk bersama-sama kita tanggulangi, baik oleh Pemerintah karena hal itu menyangkut pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, maupun oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai ujud partisipasi mereka dalam pembangunan.

Undang-undang No. 1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 No. 18 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, memuat berbagai perlindungan kepada wanita maupun anak. Undang-undang itu antara lain mengatakan bahwa: "Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jika pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita". Tidak sekelumitpun isi ketentuan ini berbau diskriminasi, melainkan tegas-tegas untuk memberi perlindungan kepada kaum wanita terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Ketentuan lain dalam Undang-undang ini mengatakan bahwa: "Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah". "Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya". Ketentuan ini bukan saja bertujuan melindungi wanita dari bahayabahaya yang sifatnya fisik, akan tetapi juga terhadap bahaya-bahaya yang sifatnya moral dan kesusilaan. Ketentuan ini sesuai dengan cita-cita pembangunan kita yang ingin membangun manusia seutuhnya, baik lahir maupun bathin, materiil maupun spiritual, dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya.

Ketentuan-ketentuan lain yang maksudnya sama ialah bahwa: "Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. "Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak, dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandung". Ketentuan-ketentuan itu semua yang menyangkut pekerja wanita adalah bersifat "perlindungan keibuan" atau "maternity protection", ialah perlindungan terhadap kenyataan adanya perbedaan kodrati, sehingga perlu juga untuk mengadakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta kesejahteraan kaum wanita tersebut.

Kedudukan serta peranan wanita dalam Negara Pancasila itu dari segi dasar konstitusional maupun hukum boleh dikatakan telah secara memadai terumuskan. Mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama dengan pria di segala kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Bahkan perbedaanperbedaan yang timbul akibat perbedaan kodrati itu diupayakan perlindungannya agar mereka dapat menikmati harkat dan martabatnya itu. Namun dalam menerjemahkan hal-hal tersebut secara rinci sering timbul perbedaan persepsi dan cara pandang. Atau memang ada kalanya terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan.

Perjuangan untuk mencapai "perlindungan keibuan" yang kini telah dinikmati oleh kaum wanita Indonesia merupakan cita-cita yang diperjuangkan berpuluh-puluh tahun oleh pendahulu-pendahulu kita. Tetapi dalam praktek sering timbul masalah.

Digitized by Google

Dalam UUD '45 & Pancasila, tidak mengenal diskriminasi antara pria dan wanita.

Misalnya dalam penerimaan pekerja baru untuk mengisi lowongan kerja, sering ada keluhan bahwa para pengusaha lebih mengutamakan menerima pekerja pria dibanding wanita karna bagi pekerja pria, pengusaha tidak harus berkorban untuk melindungi mereka dari "perlindungan keibuan". Ironisnya lagi ialah, kadang-kadang timbul suara-suara dari kalangan kaum wanita sendiri agar supaya "perlindungan keibuan" yang diberikan kepada kaum wanita itu dihapuskan saja, karena berakibat sulitnya kaum wanita mencari pekerjaan karena alasan yang sama tadi. Pemikiran semacam ini tumbul karena orang hanya melihat masalah hambatan yang ditimbulkan akibat adanya perlindungan tersebut hanya dari cara pandangan sesaat saja, dan kurang melihat masalahnya dari segi yang lebih fundamental. Kesulitan sesaat mestinya dicarikan pemecahannya, tetapi tidak dengan cara menghapuskan hak-hak fundamental yang telah dimiliki oleh kaum wanita berkat perjuangan yang berabad-abad. Banyak keunggulan-keunggulan komparatif terdapat pada pekerja wanita, yang pada profesi serta jenis-jenis pekerjaan tertentu. Inilah yang harus dikembangkan. Profesi mendidik anak-anak, sekretaris, pekerjaan-pekerjaan di bidang garment, kearsipan, peneliti, kedokteran, berbagai pekerjaan di laboratorium, dan masih banyak lagi, ternyata lebih cocok dikerjakan oleh kaum wanita dari pada kaum pria. Jika hal-hal semacam itu dikembangkan, maka di dalam masyarakat akan timbul pembagian pekerjaan yang saling menunjang satu dengan yang lain, saling bahu membahu dan saling melengkapi. Hal-hal semacam inilah yang harus dikembangkan, dan tidak dengan cara menghapuskan hak-hak fundamental yang telah dimiliki. Apa lagi hak-hak tersebut adalah hasil perjuangan kaum wanita yang telah berlangsung berabad-abad. Bukankah Tuhan telah menciptakan manusia menjadi laki-laki dan wanita, agar keduanya saling mengenal, saling mencintai, saling kerjasama untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan dunia yang lebih baik?

Masalah lain timbul karena adanya ekses, suatu bentuk penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan perlindungan yang diberikan kepada kaum wanita itu lalu menjadi tercemar. Misalnya kaum wanita dilarang bekerja di waktu malam antara jam sepuluh malam sampai jam lima pagi. Kekecualian diadakan kalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaannya memang memerlukan pekerja wanita tersebut. Dan wewenang memberi kekecualian ini diberikan kepada pejabat tertentu. Pemberian izin/kekecualian oleh pejabat tertentu tersebut jika dipergunakan dengan semestinya tentu memenuhi sasaran perlindungan kaum wanita tersebut. Tetapi jika ada unsur penyalahgunaan, akibatnya akan timbul ekses-ekses. Di sini kita melihat perlunya ada pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan asas-asas perlindungan tersebut. Di sini kita tidak berbicara soal tepat tidaknya asas perlindungan, tetapi kita menghadapi penyimpangan terhadap pelaksanaan asas perlindungan oleh pihak-pihak yang sengaja atau tidak akan mengurangi atau menghapuskan efektivitas pelaksanaan asas perlindungan terhadap kaum wanita tersebut. Banyak kasus lain serupa yang bersumber pada kurang benarnya pelaksanaan asas-asas perlindungan, tetapi bukan karena tidak tepatnya eksistensi asas perlindungan itu sendiri. Kedua hal itu memang harus kita bedakan secara tajam, agar kita mempunyai persepsi dan pola pikir yang sama dalam melihat masalah perlindungan kaum wanita, peranan serta hak dan kewajiban mereka, demikian pula hak dan kesempatan yang sama dengan kaum pria di segala bidang kehidupan bangsa serta dalam segenap kegiatan pembangunan.

Kesimpulan

Secara eksplisit kedudukan wanita maupun wanita pekerja tidak kita jumpai dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun dalam Penjelasan UUD 1945, namun secara implisit dan yang tersirat, sudah tercampur antara lain dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Perjuangan wanita sepanjang sejarah melalui tahapan-tahapan. Undang-undang Dasar 1945 yang dibentuk pada tahun 1945 berada dalam kurun waktu tahapan terakhir dari perjuangan wanita. Karena itu kedudukan wanita menurut yang tersirat dalam UUD 1945 mengandung makna dan cita-cita yang serupa dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh pakar-pakar Pergerakan Wanita dalam tahapan yang mutakhir, ialah adanya kerjasama dan saling melengkapi antara pria dan wanita menuju ke arah masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang bisa membahagiakan semua orang, termasuk pria dan wanita.

Persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria tidak menghilangkan kenyataan, bahwa secara kodrati wanita dilahirkan berbeda dengan pria, sehingga untuk mempertahankan harkat dan martabatnya mereka perlu mendapat perlindungan, baik secara fisik maupun moral, salah satunya ialah "perlindungan keibuan" atau "maternity protection".

Jika pada suatu saat "perlindungan keibuan" itu menimbulkan masalah, misalnya lebih sulitnya mencari pekerjaan karena pengusaha enggan berkorban untuk perlindungan keibuan itu, maka kesulitan sesaat itulah yang harus diatasi, tetapi bukan dengan cara meniadakan eksistensi perlindungan terhadap kaum wanita itu sendiri, sebab ini adalah hasil dari perjuangan kaum wanita berabad-abad, dan hasil perjuangan wanita Indonesia juga.

Kedudukan wanita Indonesia telah memperoleh landasan, baik dalam UUD 1945, GBHN maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan mencakup bukan saja persamaan hak dan kewajiban dengan kaum pria, tetapi juga bersama-sama dengan kaum pria bergandengan tangan dan bahu-membahu membangun masyarakat yang sejahtera, adil makmur yang di dalamnya setiap orang mendapat kebahagiaan lahir bathin, baik wanita maupun pria. □

Digitized by Google

Oleh: Djoko Mulyono

Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dengan Sistim Bagi Hasil Perikanan

Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata yang selaras antara kemajuan lahir dan kebahagiaan bathin, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, dinyatakan "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Oleh karena itu maka masyarakat nelayan yang merupakan salah satu anggota dari himpunan besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya juga mempunyai hak ikut menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; yaitu dengan mendapat perlindungan dan jaminan sosial dengan sepenuhnya.

Memasuki tahun ke-5 Pelita IV ini, kiranya tidak berlebihan apabila terhadap sasaran-sasaran pembangunan yang harus dicapai, perlu dievaluasi guna mengetahui sejauh mana hasil-hasil pembangunan dapat diterapkan, khususnya terhadap pembangunan masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang: "Bagi Hasil Perikanan" yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor: 97), diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menciptakan mekanisme kerja yang baik, guna melindungi dan menjamin keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan, baik nelayan juragan (nelayan pemilik alat) maupun nelayan pendega (nelayan pekerja), yang sesuai dengan kebijaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja, yaitu pengawasan dan pemeliharaan terhadap syarat-syarat kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja serta perbaikan upah.

Tiga Kategori

Di Indonesia pada umumnya, dan di Jawa Tengah pada khususnya, status/

kedudukan nelayan dapat dibagi dalam beberapa kategori:

(1) *Nelayan Juragan:* yaitu Nelayan yang mempunyai kapal/perahu perikanan dan alat penangkap ikan; dan nelayan juragan itu sendiri dapat digolongkan menjadi Juragan Kaya; yaitu nelayan yang mempunyai kapal perikanan yang berbobot minimal 5 - 7 ton, dan Juragan Sedang; yaitu nelayan yang mempunyai kapal/perahu perikanan yang rata-rata berbobot minimal 1½ - 2 ton.

(2) *Nelayan Kecil (Nelayan Perorangan):* yaitu nelayan yang hanya mempunyai sebuah perahu kecil saja yang dapat memuat pekerja sebanyak 1 - 3 orang, dan di dalam operasi pemilik perahu ikut terjun/bekerja sendiri.

(3) *Nelayan Pendega (Nelayan Pekerja):* yaitu Nelayan yang tidak mempunyai alat penangkap ikan, kecuali tenaga dan keahliannya yang diperuntukan untuk bekerja dengan menggunakan alat penangkap ikan milik nelayan juragan, dengan mengharap imbalan upah/bagian.

Seperti kita ketahui pekerjaan nelayan, terutama nelayan pendega dan nelayan kecil, adalah di laut. Oleh sebab itu banyak waktu mereka yang dihabiskan di laut. Dan hampir menjadi tradisi, mereka umumnya tidak tahu bagaimana menggunakan waktu-waktu di darat dengan baik. Sebagai kompensasi tidak hanya waktunya saja yang disia-siakan, akan tetapi hasil kerja/pendapatannya pun mereka gunakan untuk keperluan hidup yang konsumtip (hura-hura).

Gejala demikian, menumbuhkan karakter, budaya tersendiri dibanding dengan kelompok profesi lainnya di darat. Dari gejala tersebut dapat diambil beberapa asumsi bahwa, banyaknya waktu yang tersita untuk bekerja di tengah laut menyebabkan (a) terbatasnya komunikasi/kontak langsung dengan masyarakat luas, sehingga mengakibatkan terlambatnya perkembangan budaya, sosial dan ekonominya serta susah mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada mereka.

(b) Kurangnya perhatian kepada keluarganya, terutama pada pendidikan anak-anaknya; oleh karena itu tidak mengherankan bila taraf pendidikan masyarakat nelayan umumnya rendah.

(c). Adanya ketegangan jiwa karena kurangnya hiburan, yang akhirnya dapat menimbulkan sifat-sifat keras, tegas dan kasar serta sifat masa-bodoh (tidak mau tahu) terhadap lingkungan.

Karena nelayan kecil yang mayoritas hanya memiliki alat-alat penangkap ikan dan perahu yang sederhana, sehingga daerah operasinya sangat terbatas, maka tingkat penghasilan mereka rendah. Sebab di samping hasil tangkapannya sedikit karena alat yang sederhana, faktor musim dan pemasaran, juga karena kebanyakan mereka telah terjerat dalam ikatan hutang dari para pelepas uang/tengkulak/juragan. Dan akhirnya mereka sulit menyisihkan dana untuk jaminan upah selama sakit; jaminan bagi keluarga; jaminan hari tua dan jaminan kerja lembur.

Bagi nelayan pendega, masalahnya identik dengan masalah para nelayan kecil, hanya bedanya, nelayan pendega tidak mempunyai beban materiil yang

Digitized by Google

Nelayan waktunya dihabiskan di laut

berkaitan dengan alat tangkap dan perahu yang digunakan untuk bekerja. Jadi mereka hanya mengharapkan imbalan upah/bagian dari hasil tangkapan.

Hubungan Kerja

Ada 2 (dua) sistim hubungan kerja nelayan yang lazim digunakan dalam pengelolaan alat tangkap dan kapal/perahu perikanan.

Sistem Bagi Hasil; yaitu suatu bentuk hubungan/ikatan kerja di bidang pengelolaan alat tangkap dan kapal/perahu perikanan, antara nelayan juragan yang bermodal alat tangkap, dengan nelayan pendega yang bermodal keahlian dan tenaga.

Selanjutnya di dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak selain mempunyai hak pendapatan/bagian penghasilan, juga mempunyai kewajiban/tanggung-jawab terhadap beban biaya operasional yang besar kecilnya sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Jadi kalau di dalam operasinya kapal/perahu mengalami ''blong'' (tidak mendapat hasil), maka para nelayan pendega diwajibkan ikut menanggung beban operasional yang telah digunakan; dan sebaliknya apabila kapal/perahu dalam operasinya dapat menghasilkan jumlah besar (Along), maka para nelayan pendega juga akan memperoleh bagian penghasilan yang besar pula.

Akan tetapi sistim bagi hasil perikanan yang dilaksanakan di Jawa Tengah sekarang ini, kebanyakan belum memenuhi apa yang diharapkan dari Undang-Undang Nomor; 16 Tahun 1964, sebab di dalam hubungan/ikatan dengan sistem bagi hasil yang ada, di dalam perinciannya, belum menyebutkan ketentuan tentang jaminan/tunjangan bagi para nelayan pendega dan keluarganya secara jelas. Dan seandainya ada, itu hanya bersifat kebijaksanaan yang timbul dari nelayan juragan secara pribadi saja.

Selain itu, biasanya di dalam hubungan/ikatan kerja ini, terhadap nelayan juragan para nelayan pendega hanya diwakili oleh seorang nahkoda (untuk pengelolaan kapal/perahu yang besar) atau oleh seorang juru mudi (untuk pengelolaan perahu-perahu yang sedang atau yang kecil). Jadi antara nelayan juragan dengan nelayan pendega tidak ada hubungan/ikatan kerja langsung di dalam pengelolaan alat tangkap.

Dengan demikian di dalam tugasnya nelayan pendega hanya bertanggungjawab kepada nahkoda atau juru mudi; dan bentuk hubungan/ikatan kerja antara nahkoda/juru mudi dengan nelayan pendega ini, biasanya hanya dilaksanakan secara lisan atau tunjukan, oleh karena itu sifatnya kurang jelas dan kuat, sehingga sering terjadi kerawanan berupa penyelewengan tugas dan tanggungjawab yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sewenang-wenang.

Nahkoda atau juru mudi di dalam tugasnya, bertanggungjawab kepada nelayan juragan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Nelayan juragan mengatasnamakan diri sendiri, sedangkan nahkoda selain atas nama diri sendiri sekaligus mewakili seluruh nelayan pendega yang dipimpinnya.

Nelayan juragan tidak tahu menahu tentang keadaan para nelayan pendega yang ikut mengelola kapal/perahu perikanan miliknya, kecuali nahkoda. Akibatnya, para nelayan pendega bersikap masa-bodoh, mereka hanya mengurusi hak pendapatan/bagian hasilnya saja, dan sering mengingkari pembayaran beban biaya operasional. Dengan adanya peristiwa tersebut di atas, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap hubungan/ikatan kerja antara nelayan juragan dengan nahkoda atau juru mudinya, dan sebagai akibat selanjutnya sering terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) baik terhadap nelayan pendega maupun terhadap nahkoda/juru mudi, yang akhirnya nelayan juragan harus menanggung beban hutang atas biaya operasionil yang telah digunakan.

Sistim Upah: yaitu bentuk hubungan kerja di bidang pengelolaan alat tangkap dan kapal/perahu perikanan, antara nelayan juragan yang bermodal alat tangkap, dengan nelayan pendega yang bermodal keahlian dan tenaganya; Di dalam pelaksanaannya, nelayan pendega termasuk nahkoda dan juru mudinya hanya mempunyai kewajiban melaksanakan tugas mengelola kapal/perahu dan alat tangkap milik nelayan juragan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan yang maximal, dan sebagai imbalan jasa atas jerih payahnya, mereka berhak mendapat upah yang besar kecilnya sudah ditetapkan dari pihak nelayan juragan. Dalam praktek hal ini dikenal dengan istilah Morodung.

Jadi mereka tidak ikut bertanggungjawab atas beban biaya operasional yang digunakan di dalam pengelolaan kapal/perahu perikanan tersebut, walaupun toh kapal/perahu perikanan yang mereka kelola sedang mengalami ''blong'' (tidak mendapatkan hasil). Namun sebaliknya, apabila kapal/perahu perikanan yang mereka kelola itu mengalami ''along'' (hasil yang besar), mereka mendapat upah sebesar yang telah ditentukan tadi. Tapi tetap tidak ada dana atau jaminan kesejahteraan bagi para nelayan pendega dan keluarganya, kecuali tambahan bonus yang timbul dari kebijaksanaan pribadi nelayan juragan. Sistim upah dahulu sering digunakan pada pengelolaan kapal-kapal Trawl, yang sifat dari bentuk hubungan/ikatan kerjanya

Digitized by Google

tidak jauh berbeda dengan sifat hubungan/ikatan kerja dengan sistem bagi hasil; akan tetapi sekarang hampir tidak ada yang menggunakan sistim tersebut.

Untuk menjaga likuiditas usaha, maka para nelayan juragan di samping membuat ketentuan tentang upah yang sangat rendah, juga meniadakan jaminan/tunjangan kesejahteraan bagi nelayan pendega dan keluarganya. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi bila di dalam operasinya, kapal/perahu perikanan tersebut mengalami "blong" (tidak mendapat hasil). Karena semua beban biaya operasional sudah menjadi tanggungjawab nelayan juragan dan besarnya upah untuk para nelayan pendega sudah ditentukan, apalagi usaha penangkapan ikan itu adalah dunia yang spekulatif, maka dapat menyebabkan cara kerja para nelayan pendega beserta nahkoda kurang intensif; bahkan kadang-kadang ada yang menyelewengkan tugas dan tanggungjawabnya, misalnya menggunakan kapal/perahu perikanan yang sudah lengkap dengan perbekalannya itu untuk rekreasi sambil mancing, dan hasilnya mereka jual sendiri di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah lain.

Realisasinya

Pedoman tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 yang perlu untuk diperhatikan: adalah, minimum 75 persen hasil bersih diperuntukkan bagi nelayan pendega (nelayan pekerja) yang mempergunakan perahu layar. Minimum 40 persen hasil bersih diperuntukan bagi nelayan pendega (nelayan pekerja) yang mempergunakan perahu motor. Hasil bersih yaitu hasil penangkapan dikurangi dengan Lawuhan bagi para nelayan, dikurangi beban-beban biaya yang menjadi tanggungjawab bersama antara nelayan juragan dengan nelayan pendega.

Beban biaya bersama, antara lain, ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan selama di laut, biaya untuk sedekah laut, iuran yang disyahkan oleh pemerintah, seperti untuk koperasi, rehabilitasi kapal/perahu, dana/tunjangan kesejahteraan dan dana kematian dan lain-lain.

Beban biaya nelayan juragan, antara lain, biaya perawatan dan perbaikan kapal/perahu; biaya perawatan dan perbaikan perlengkapan; penyusutan kapal/perahu dan perlengkapan, dan biaya exploitasi.

Pelaksanaan sistim bagi hasil perikanan ini, tidak mutlak berdasarkan Undang-Undang, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara nelayan juragan dengan nelayan pendega (nelayan pekerja) yang sifatnya saling menguntungkan.

Dari uraian singkat ini agaknya terungkap beberapa kesimpulan; Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemerintah telah berupaya memberikan pembinaan; dan salah satunya telah dituangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964, yaitu tentang Pedoman Bagi Hasil Perikanan yang sesuai dengan kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja, guna menciptakan suatu mekanisme kerja yang baik dan melindungi serta menjamin keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Pada umumnya tingkat perkembangan budaya, sosial dan ekonomi masyarakat nelayan, terutama lingkungan nelayan kecil dan nelayan pendega sangat lamban dan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya sifat para nelayan yang masa bodoh dan taraf pendidikan yang sangat rendah karena kurangnya perhatian sejak dini serta susahnya untuk mengadakan pembinaan/penyuluhan, karena waktunya banyak tersita untuk bekerja di tengah laut.

Tingkat kesejahteraan hidup khususnya bagi para nelayan kecil, nelayan pendega dan keluarganya kurang terjamin. Hal ini disebabkan karena pekerjaan menangkap ikan sifatnya adalah spekulatif sehingga pendapatannya sehari-hari tidak dapat dipastikan dan tidak menentu; apalagi belum adanya pelaksanaan peraturan yang menunjang terhadap jaminan sosial secara nyata, kecuali jaminan sosial dari asuransi dan dari KUD "Mina" setempat sesuai dengan ketentuan.

Secara yuridis, hubungan kerja nelayan baik itu dengan sistim bagi hasil maupun dengan sistim upah yang ada di Jawa Tengah, masih kurang sehat, sebab di samping adanya hubungan/ikatan kerja yang kurang jelas dan kuat antara nelayan juragan dengan nelayan pendega atau antara nelayan pendega dengan nahkoda/juru mudi, juga di dalam hubungan/ikatan kerja tersebut, belum dicantumkan syarat-syarat kerja yang termasuk di dalamnya adalah tentang tanggungjawab jaminan sosial bagi para nelayan pendega beserta keluarganya, apabila mereka sedang sakit, kecelakaan, kerja lembur dan jaminan hari tua. Oleh karena itulah, maka sering terjadi penyelewengan tugas dan tanggungjawab dari kedua belah pihak yang tidak dijamin oleh hukum.

Guna melindungi dan menjamin keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan kecil dan nelayan pendega, maka perlu diciptakan suatu bentuk pedoman pelaksanaan hubungan/ikatan kerja nelayan yang sifatnya saling menguntungkan nelayan juragan dan nelayan kecil dan nelayan pendega baik yang berbentuk Surat Keputusan atau Peraturan Daerah yang sekaligus merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor: 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang digunakan untuk Daerah Jawa Tengah.

Searah dengan hakekat pembangunan nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, maka pembinaan dan penyuluhan tentang perkembangan pembangunan kepada masyarakat nelayan, perlu ditingkatkan baik melalui mass media dan sarana penerangan yang lain, maupun melalui lembaga/instansi dan pemuka masyarakat yang terkait. Dengan demikian akan lebih memacu tingkat perkembangan sosial dan ekonominya yang merupakan salah satu faktor/sasaran Pembangunan Nasional yang akan dicapai.

Terlaksananya jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, ketentraman, keselamatan dan kesehatan kerja serta keadilan khususnya bagi tenaga kerja nelayan, bukan semata-mata tergantung pada peraturan perundangan yang ada, tetapi mutlak diperlukan kesadaran dari masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat nelayan itu sendiri di dalam partisipasinya membantu usaha pemerintah dalam pembangunan. Oleh karena itu maka perlu adanya perhatian dan pengawasan yang sungguh-sungguh di dalam memelihara pelaksanaan mekanisme kerja yang sudah diciptakan.

Ditinjau dari status nelayan, mereka merupakan suatu masyarakat tenaga kerja dengan kedudukan yang relatif lemah apabila dibanding dengan tenaga kerja sektor lain. Hal ini disebabkan belum adanya ikatan-ikatan atau status yang pasti bagi mereka di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Akan tetapi kalau ditinjau dari segi sosial, politik dan ekonomi, mereka adalah sumber daya manusia yang sangat potensial dan merupakan faktor yang berguna bagi pembangunan nasional yang perlu dibina dan dikembangkan ketrampilannya, serta harus dilindungi statusnya secara manusiawi maupun secara hukum. □

Digitized by Google

Jusuf Wanandi

Perkembangan Strategis Kawasan Pasifik-Asia Menjelang Abad Ke-21

Suatu Pandangan Regional

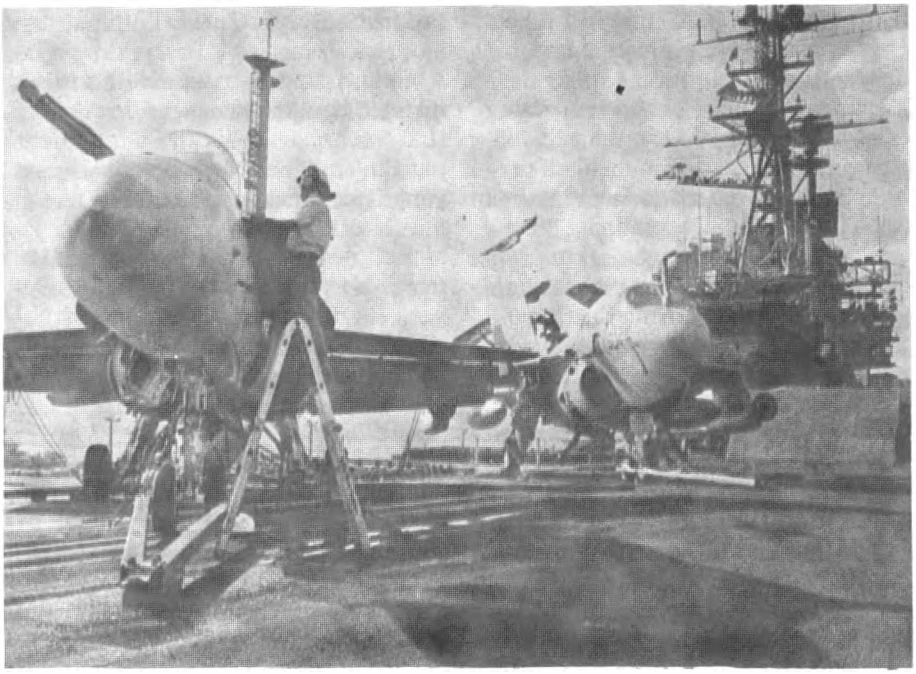

Kebijaksanaan AS di Asia Pasifik cukup memadai

Kalau kebijakan Amerika Serikat di kawasan Pasifik-Asia dewasa ini cukup memadai seperti diuraikan di atas, maka bagaimana perkembangan yang diperkirakan di masa yang akan datang? Seperti diuraikan di atas, maka data perkembangan ekonomi Amerika Serikat menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan untuk tetap melaksanakan kehadirannya di kawasan ini memang riil, dan karenanya Amerika Serikat akan mencari cara-cara dan pendekatan-pendekatan baru untuk tetap mempertahankan keseimbangan yang menguntungkan baginya di kawasan ini. Hal ini dapat dimengerti karena keterbatasan-keterbatasan yang mulai dirasakan pada anggaran pertahanannya semenjak tahun 1988 ini dan yang akan berlanjut di masa yang akan datang. Perlu dicatat bahwa semua calon presiden Amerika Serikat dari kedua partai, telah menyatakan keinginan untuk memotong anggaran pertahanan Amerika Serikat. Di samping itu perhatian Amerika Serikat di masa-masa mendatang akan terpusat pada Eropa Barat, Teluk Parsi dan Amerika Tengah, baik untuk menghadapi pengaruh Uni Soviet, maupun karena merupakan *"flash-points"* bagi kepentingan Amerika Serikat sendiri. Sebaliknya, kawasan Pasifik-Asia relatif stabil dan ekonominya berkembang dengan baik.

Cara pendekatan pertama bagi Amerika Serikat ialah berbagi beban dengan sekutu-sekutu dan teman-temannya di kawasan ini, terutama dengan Jepang, tetapi juga dengan Korea Selatan dan Australia. Cara pendekatan kedua ialah bagaimana diplomasi dan hubungan politik dipergunakan untuk mempererat hubungan dengan teman-teman dan sekutunya di kawasan, baik untuk menghadapi masalah-masalah keamanan, maupun persoalan-persoalan ekonomi. Masalah keamanan menyangkut penyelesaian perjanjian tentang pangkalan-pangkalan di Filipina misalnya, atau menjaga hubungan yang seimbang antara Amerika Serikat-Cina di satu pihak dan Amerika Serikat-ASEAN di pihak lain demi keseimbangan strategis yang menguntungkan Amerika Serikat. Persoalan-persoalan ekonomi meliputi penyelesaian masalah-masalah perdagangan dengan Jepang dan NICs atau perlindungan *"intelectual property rights"* oleh negara-negara berkembang di kawasan ini.

Masalah pokok yang akan dihadapi Amerika Serikat di kawasan dalam rangka berbagi beban ialah bagaimana mengatur hubungannya dengan Jepang untuk jangka waktu yang panjang di masa mendatang. Di satu pihak Jepang merupakan sekutu terpenting Amerika Serikat di kawasan, tetapi juga sekaligus merupakan saingan terkuat di bidang ekonomi.

Untuk jangka pendek, hubungan Amerika Serikat-Jepang akan mengalami berbagai macam ketegangan dan konfrontasi yang sangat emosional sifatnya. Hal ini disebabkan karena perdagangan yang tidak seimbang, keterbukaan pasar Jepang bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kesempatan perusahaan konstruksi Amerika Serikat menangani proyek-proyek besar pemerintah Jepang, persaingan dalam super-conductors dan high tech lainnya, soal embargo teknologi canggih untuk blok Uni Soviet, dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas telah menjadi sangat emosional, sehingga ditakutkan akan merusak hubungan yang ada antara Amerika Serikat dan Jepang, termasuk di bidang pertahanan. Padahal penyatuan antara ekonomi Jepang dan Amerika Serikat sudah cukup kuat, sehingga keduanya akan rugi besar jika ketegangan dan persaingan yang demikian emosionalnya itu akan merusak hubungan yang terpenting di Pasifik. Dalam perkara Toshiba, misalnya, tindakan balasan Amerika Serikat untuk tidak membeli produk-produk Toshiba malahan merugikan sendiri pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sehingga diusulkan untuk dihapuskan. Begitu pula pada tahun 1987, pembelian surat-surat berharga Amerika Serikat tidak lagi dilakukan oleh

Digitized by Google

swasta Jepang, tetapi dilakukan oleh pemerintah Jepang (dan pemerintah negara-negara MEE) dengan maksud untuk mendukung kestabilan ekonomi Amerika Serikat.

Kerjasama yang erat atau penyatuan tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga terjadi di berbagai bidang lain, termasuk di bidang politik dan pertahanan. Kerjasama di bidang pertahanan sebenarnya berjalan cukup baik, karena sama sekali tidak dipengaruhi oleh ketegangan di bidang ekonomi. Malahan tampaknya pihak Jepang meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan ini untuk mengatasi ketegangan di bidang ekonomi. Karena itu peningkatan kerjasama di bidang pertahanan ini akan menjadi perhatian utama di masa mendatang. Usaha ini jelas tidak akan dapat mengatasi seluruh ketegangan ekonomi, yang pada dasarnya harus diselesaikan secara tersendiri oleh Amerika Serikat dan Jepang. Pada akhirnya kerjasama pertahanan itu sendiri dapat rusak kalau dicoba untuk menjadi pengganti atau untuk mengkompensasi ketegangan di bidang ekonomi.

Jepang kini telah meningkatkan anggaran pertahanannya melebihi 1 persen dari GNP, yaitu 1,01 persen atau US$ 28 milyar. Menurut perhitungan NATO sebenarnya anggaran pertahanan Jepang sudah mencapai 1,5 persen dari GNP, atau meliputi ± US$ 40 milyar, kalau termasuk pensiun dan fringe benefits untuk SDE (Self Defense Forces). Ini berarti melebihi pengeluaran Inggris, Perancis, atau Jerman Barat masing-masing. Selain itu SDF juga telah mengawasi "sea lanes" sampai 1000 mil ke selatan dan tenggara dari kepulauan Jepang dan mungkin juga ke timur pada masa mendatang. Latihan-latihan bersama telah diadakan secara intensif dengan Amerika Serikat, peningkatan angkatan laut dan udara sedang dilakukan, alih teknologi kepada Amerika Serikat juga telah ditandatangani, termasuk keikutsertaan dalam SDI (Strategic Defense Initiative). Kontribusi Jepang dalam membiayai kehadiran pasukan-pasukan Amerika Serikat kini juga paling besar, yaitu sebanyak US$ 2,5 milyar per tahun (atau US$ 45.000 subsidi per kapita) termasuk untuk fasilitas tempat dan gaji pegawai lokal. Jepang juga akan melakukan ko-produksi F-16 dengan Amerika Serikat dan membatalkan rencana memproduksi kapal terbangnya sendiri.

Dalam tugas berbagi beban di masa yang akan datang tekanan bagi Jepang akan lebih besar lagi untuk meningkatkan anggaran pertahanannya. Tetapi sulit untuk diperkirakan apalagi yang dapat dilakukan, setelah kemampuan SDF Darat di Kepulauan Hokkaido akan ditingkatkan untuk menghadapi serangan dari Uni Soviet. Kemungkinannya adalah peningkatan bantuan keuangan Jepang berupa "security supporting assistance" seperti yang sudah dilakukan untuk kawasan dan negara-negara yang berada dalam keadaan keamanan yang rawan, seperti Thailand, Pakistan, Mesir, Turki, Filipina, dan akhir-akhir ini Teluk Parsi. Yang kiranya akan dipersiapkan dalam rangka ini ialah bantuan keuangan Jepang untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Filipina yang penggunaannya terutama adalah untuk keamanan Jepang. Dalam keadaan perang pangkalan-pangkalan tersebut akan menjadi fasilitas pendukung utama bagi pasukan Amerika Serikat dan SDF Jepang yang bertugas menghancurkan pangkalan-pangkalan dan kapal-kapal selam strategis Uni Soviet di laut Okhotsk di sekitar Jepang (sebagai teater konflik utama), dan juga sekaligus menjaga kebebasan serta keamanan SLOC (sea lines of communication) di seluruh kawasan Pasifik-Asia, Lautan Hindia, dan Teluk Parsi terhadap serangan-serangan kapal selam Uni Soviet.

Dalam masa damai pangkalan-pangkalan tersebut terutama adalah untuk menunjang kehadiran politik Amerika Serikat di kawasan Asia dan Pasifik dalam rangka menjaga keseimbangan kekuatan yang menguntungkan baik demi Jepang maupun negara-negara Pasifik-Asia lainnya karena dapat menjamin hubungan ekonomi dan merupakan penangkal terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain terhadap SLOC, terutama karena adanya pangkalan-pangkalan Uni Soviet di Cam Ranh dan Danang.

Peran pertahanan yang lebih meningkat untuk Jepang di kawasan Pasifik-Asia daripada yang ada sekarang, dikhawatirkan masih akan membangkitkan momok Perang Dunia ke II kembali, seperti terlihat tiga tahun terakhir ini. Hal ini diperkuat oleh perkembangan politik dalam negeri di Jepang, di mana kelompok-kelompok ekstrim kanan sedang mencoba untuk mulai membangkitkan nasionalisme sempit, yang usaha mengubah buku sejarah Jepang, kunjungan resmi pemerintah ke *Yasukuni Shrine* untuk menghormati arwah para serdadu yang gugur selama Perang Dunia ke II, pengajuan teori-teori yang berbau nasionalisme ekstrim, dan menakuti, bahkan membunuh para wartawan yang dianggap kiri.

Peran pertahanan Jepang yang ada sekarang sudah dianggap cukup oleh negara-negara lain kawasan. Peran ini meliputi pertahanan Kepulauan Jepang, menjaga tiga selat di sekitar kepulauannya untuk ASW (anti-submarine warfare), yang meliputi sampai 1000 mil ke selatan dan tenggara (mungkin ditambah ke timur pula). Peningkatannya pasti harus meliputi kemampuan ofensif berupa kemampuan laut dan udara strategis, yang justru akan meniadakan kestabilan yang mau dicapai.

Yang dapat dilakukan Jepang dalam berbagi beban dan, yang sesuai dengan ide "comprehensive security" Jepang sendiri, ialah, menjalankan peran politik dan peran ekonominya secara lebih mantap, luas dan imaginatif. Bantuan ekonomi Jepang kepada negara-negara berkembang, terutama di kawasan ini, jelas merupakan peran politik yang pokok untuk Jepang karena ketidakmampuan Amerika Serikat untuk melakukannya seperti dahulu.

Di samping itu konsultasi dan program bersama yang saling mengisi di antara Amerika Serikat dan Jepang dalam pelaksanaan peran politik ini juga penting di masa datang, misalnya untuk melihat kerawanan di kawasan atau di suatu negara tertentu, dan menentukan apa yang dapat diperbuat bersama atau masing-masing. Konsultasi ini akan menyangkut masalah bagaimana menjaga "viability" dari negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan atau bagaimana membantu kestabilan politik dan perkembangan demokrasi di Filipina dan Korea Selatan atau bagaimana mendukung kerja sama regional ASEAN.

Proses penyatuan antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkembang dengan pesat dan meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan keamanan, dalam jangka panjang dapat membantu stabilitas seluruh kawasan sebagai akibat stabilnya hubungan bilateral itu sendiri. Namun untuk jangka pendek emosi masih sangat tinggi di kedua belah pihak yang saling menyalahkan pihak yang lain sebagai sumber ketimpangan yang terjadi. Dalam proses pengambilan putusan di kedua negara dan pemerintahan memang tidak ada aparat koordinasi dan tidak terdapat konsistensi dalam menentukan maupun melaksanakan kebijakan tentang hubungan tersebut, sehingga

Digitized by Google

hubungan tersebut dapat menjadi eksplosif dan rusak. Padahal hubungan tersebut sangat vital bagi kedua negara dan kawasan.

Berhubung dengan itu, dikhawatirkan bahwa Jepang akan dirangsang untuk berjalan sendiri di segala bidang aktivitasnya, termasuk di bidang pertahanan. Ini merupakan suatu mimpi buruk bagi kawasan seperti digambarkan oleh PM Lee Kuan Yew baru-baru ini. Menurut PM Lee alasan untuk Jepang bertindak sendiri di masa depan ialah kalau Amerika Serikat meninggalkan kawasan secara sepihak karena opini rakyat Amerika Serikat tidak lagi mendukung kehadiran pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang dan armadanya di Pasifik-Asia karena ongkos-ongkos yang dirasakan terlalu besar, sedangkan usaha berbagi beban dianggap tidak memadai. Ini juga bisa terjadi bila opini rakyat Amerika Serikat mendapat aba-aba yang salah seperti misalnya kalau dikeluarkan dari pangkalan-pangkalan di Filipina, yang dapat ditafsirkan bahwa bangsa-bangsa di kawasan Pasifik-Asia, khususnya di Asia Tenggara, tidak lagi menghendaki kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Suasana dan emosi rakyat Amerika Serikat pada dewasa ini sangat cenderung untuk mendukung pengunduran diri tersebut dan tidak lagi mau membayar anggaran untuk pangkalan-pangkalan alternatif lain (baru) yang pada hakikatnya tidak akan bisa menyamai pangkalan-pangkalan yang ada.

Hal itu berarti bahwa Amerika Serikat akan mengundurkan dirinya ke Hawaii atau Pantai Barat kontinen Amerika Serikat dan mempercepat proses pengunduran diri dari seluruh kawasan. Hal yang serupa telah terjadi dengan skuadron F-16 di pangkalan Angkatan Udara di Madrid yang mau ditarik ke Amerika Serikat kembali kalau sekutu-sekutunya di NATO tidak mau membayar ongkos-ongkos pemindahan dan penempatannya di Pulau Sicilia, Italia.

Pengunduran diri Amerika Serikat secara militer dari kawasan Pasifik-Asia dapat berarti pengunduran diri atau pengurangan kehadirannya secara politik dan ekonomi dari kawasan Asia Tenggara, karena pada umumnya kehadiran mereka di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai bagian dari kehadiran mereka di seluruh kawasan Pasifik-Asia. Ada kemungkinan pengurangan kehadirannya dari sub-kawasan Asia Tenggara akan dibarengi dengan peningkatan kehadirannya di Asia Timur karena sub kawasan tersebut lebih penting bagi Amerika Serikat baik dari segi keamanan maupun dari segi ekonomi.

Alasan kedua untuk Jepang mengadakan "rearmament" total ialah kalau rakyatnya, terutama generasi mudanya di masa datang, tidak lagi dapat menerima tuduhan-tuduhan bahwa tiap-tiap kali terjadi ketegangan ekonomi dengan Amerika Serikat atau MEE, selalu mereka yang disalahkan. Mereka akan melihat alasan tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang dasarnya rasialistis, yaitu bahwa pada dasarnya orang-orang Amerika atau Eropa yang berkulit putih tidak dapat menerima kenyataan bahwa bangsa Jepang yang berkulit kuning bisa menjadi bangsa nomor 1 di dunia di berbagai bidang ekonomi, termasuk *high tech* (teknologi tinggi).

Meskipun kemungkinan terjadinya tindakan sepihak dari Jepang sangat tipis, tetapi kemungkinan ini tidak dapat diabaikan sama sekali karena hubungan Amerika Serikat dengan Jepang sedang menghadapi krisis yang cukup mendalam. Ini dipersulit berhubung kedua negara sedang melakukan perubahan-perubahan struktur ekonomi dan sistem pendidikannya untuk menyesuaikan terhadap perkembangan 5—6 tahun yang lalu ini, dan periode transisi semacam itu selalu sulit dan penuh risiko bagi hubungan kedua belah pihak.

Untuk tubuh politik Jepang sendiri, mengambil tindakan unilateralis di atas, termasuk untuk persenjataan kembali dirinya secara lengkap dengan senjata-senjata strategis dan nuklir, akan merupakan suatu pengalaman yang sangat traumatis karena sebenarnya rakyat Jepang tidak siap untuk mengambil alternatif ekstrim ini. Mereka baru saja dapat menerima kenyataan untuk ikut meningkatkan kemampuan pertahanan dirinya dalam berbagi beban dengan Amerika Serikat, karena baru saja dapat menerima kenyataan bahwa Uni Soviet dengan

P.T. INDRA KARYA
CONSULTING ENGINEERS

JAKARTA : JL. DR. SAHARJO NO. 204 A PHONE : (021) 8292824 & 8298346 TELEX : 48336 IKA IA
MALANG : JL. SURABAYA NO. 3 A PHONE : (0341) 51311 & 51463 TELEX : 31083 IKA ML

BIDANG USAHA.

JASA TEKNIK (ENGINEERING).
SISTEM KETENAGAAN LISTRIK (PEMBANGKITAN TRANSMISI DISTRIBUSI)
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR (BENDUNGAN IRIGASI PERBAIKAN SUNGAI)
BANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN (JALAN . JEMBATAN PELABUHAN)
BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT & PABRIK
PERTAMBANGAN DAN INDUSTRI

MANAJEMEN.
MANAJEMEN PROYEK MANAJEMEN UMUM SISTEM INFORMASI SISTEM KEARSIPAN

LINGKUNGAN / PENGAMATAN PROYEK.
ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN . PENGAMATAN LINGKUNGAN PENGAMATAN & EVALUASI - MANFAAT PROYEK

Digitized by Google

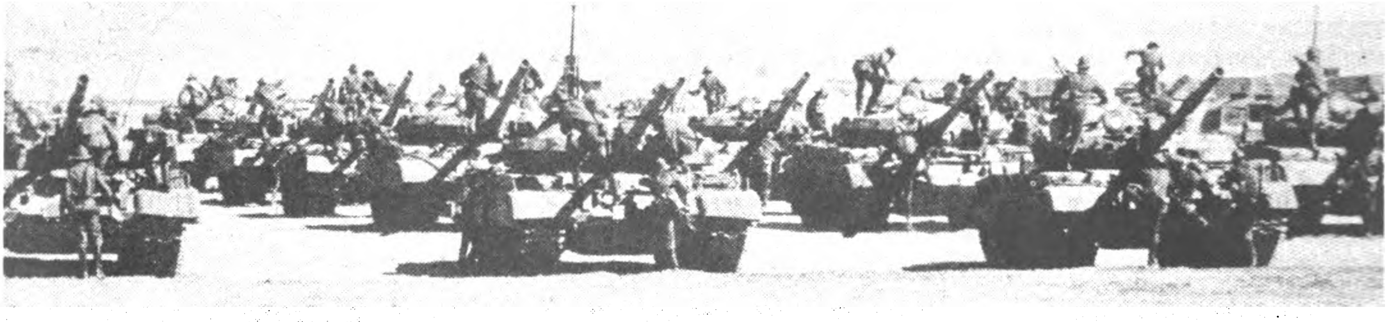

USSR harus kompromi dalam peningkatan persenjataan dengan AS

peningkatan kehadiran militernya di pasifik dapat menjadi ancaman riil bagi Jepang.

Perubahan ini akan sangat fundamental artinya untuk perimbangan kekuatan di kawasan Pasifik-Asia, karena Jepang yang dalam waktu dekat akan menjadi kekuatan ekonomi terkuat di dunia akan meningkatkan pula kemampuan militernya. Hal ini akan mengubah seluruh sistem keamanan, politik dan ekonomi di kawasan yang telah berlaku lebih dari 40 tahun di kawasan ini. Dalam hubungan ini muncul usul-usul untuk membentuk suatu *"wise-men committee"* Amerika Serikat-Jepang yang permanen dengan staf yang cukup, dengan orang-orang dari segala lapisan masyarakat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali, dengan tugas mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta memikirkan kerja sama maupun masalah-masalah bersama untuk masa depan seperti "trade agreement" Amerika Serikat-Jepang untuk menciptakan "free trade zone" seperti antara Amerika Serikat dan Kanada.

Akhirnya agar kerja sama antar Amerika Serikat-Jepang ini menjadi efektif dan positif bagi kawasan Pasifik-Asia di masa yang akan datang, maka Jepang juga harus membuka diri bagi negara berkembang dikawasan, karena di samping Amerika Serikat, Jepang merupakan salah satu dari dua tonggak bagi kemajuan ekonomi, dan karenanya bagi stabilitas politik negara-negara tersebut. Dan untuk itu, Jepang harus menginternasionalkan dirinya dalam arti harus membuka dirinya demi kewajiban-kewajibannya sebagai negara besar di masa mendatang, terutama di kawasan. Jepang merupakan partner ekonomi terpenting untuk negara-negara berkembang di kawasan, termasuk ASEAN, dan karenanya perkembangan, kebijakan dan perannya sebagai negara besar yang bertanggung jawab makin diharapkan di masa mendatang di kawasan Pasifik-Asia.

Peranan Soviet

Sekarang mari kita tinjau peranan Uni Soviet di kawasan Pasifik-Asia. Walaupun titik berat dari perbaikan ekonomi Uni Soviet ialah di bagian Eropa, tetapi Uni Soviet ingin mengambil bagian dalam kawasan Pasifik-Asia yang sangat dinamis, demi perbaikan ekonominya.

Perlucutan senjata dan peredaan ketegangan untuk kawasan sesuai dengan pidato Vladivostok a ala Konperensi Helsinki masih terlalu jauh karena situasi di Asia jauh lebih kompleks. Namun usaha perlucutan senjata antar kedua kekuatan adikuasa memang tetap perlu diusahakan di kawasan. Usaha ini dapat mencapai kemajuan dalam perimbangan kekuatan dan perlucutan senjata di Eropa, yaitu INF (intermediate nuclear forces), penghapusan senjata kimia, pengurangan persenjataan konvensional dan yang berkenan dengan persenjataan strategis (START). Usaha ini dapat pula meliputi perlucutan senjata konvensional di masa yang akan datang untuk kawasan ini, di samping usaha-usaha regional seperti NWFZ untuk kawasan Asia Tenggara yang diusulkan oleh ASEAN pada KTT ASEAN yang lalu.

Desakan perbaikan ekonomi dalam negeri Uni Soviet memang sungguh-sungguh, dan sedang membawa perbaikan-perbaikan tertentu di Uni Soviet sendiri, termasuk di bidang politik. Oleh karena itu Uni Soviet harus mengadakan kompromi dalam hal peningkatan persenjataan dan kompetisi dengan Amerika Serikat, termasuk di dalamnya kompetisi perluasan daerah pengaruh di kawasan Pasifik-Asia, terutama karena keterbatasan kemampuan ekonominya. Karena itu diperkirakan bahwa kesediaan Uni Soviet untuk membantu Vietnam terus-menerus atau keinginan mencari sekutu lain yang akan menggantungkan diri pada Uni Soviet akan lebih terbatas dan selektif. Usaha tersebut akan dilanjutkan hanya jika ongkos-ongkosnya tidak mahal, baik dilihat dari segi politis dan lebih-lebih lagi dari segi ekonomis.

Usaha-usaha diplomatik Uni Soviet tampaknya akan terus ditingkatkan, dan dalam hal ini dirasakan sudah jauh lebih maju daripada dahulu, karena cara-cara pendekatan yang lebih terbuka dan personil diplomatiknya yang jauh lebih lincah, serta mempunyai fleksibilitas untuk mencari cara-cara yang lebih efektif. Namun karena cara-cara diplomasi dahulu serta kekurangmampuan dalam bidang ekonomi, maka diplomasi baru ini akan memakan waktu dan umumnya negara-negara di kawasan Pasifik-Asia menunggu bukti-bukti perubahan sebelum dapat mempercayai arah baru kebijaksanaan pemerintah Uni Soviet.

Hubungan Uni Soviet dengan Cina masih berada dalam proses normalisasi. Hubungan antar pemerintah telah pulih seperti dapat terlihat dari perjanjian-perjanjian kerja sama ekonomi dan teknik serta di bidang kebudayaan, dengan pelaksanaan-pelaksanaan-

Digitized by Google

nya yang cukup memuaskan. Begitu pula perundingan-perundingan mengenai perbatasan antar kedua negara yang berjalan lambat tetapi tanpa ketegangan. Hubungan antar partai tampaknya masih dipengaruhi oleh persoalan Kampuchea. Hubungan antar partai ini diperkirakan akan dinormalisir sepenuhnya dan karena itu hubungan RRC-Uni Soviet akan menjadi relatif stabil. Tetapi Cina tampaknya menolak terjadinya kembali suatu persekutuan a ala tahun 1950-an, dan kenyataan kedua negara besar ini mempunyai perbatasan lebih dari 7500 kilometer, pasti selalu mengganggu hubungan mereka di masa yang akan datang.

Hubungan Uni Soviet dengan Jepang juga masih penuh kesulitan, terutama karena peningkatan kekuatan militer mereka yang besar di kawasan dalam 15 tahun terakhir, dan karena persoalan empat pulau di utara Jepang yang masih menjadi sengketa antara kedua negara. Daya tarik ekonomi Uni Soviet bagi Jepang, terutama bahan-bahan mentah di Siberia, tidak lagi sepenting dahulu. Suasana "detente" Uni Soviet-Amerika Serikat, yang pulih kembali dengan INF dapat mempengaruhi hubungan Jepang dengan Uni Soviet ke arah yang lebih baik dan produktif di masa depan demi kebaikan dan kestabilan di kawasan Pasifik-Asia.

Kehadiran Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara terutama adalah di bidang militer, yang diperkuat oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan Vietnam di Cam Ranh dan Danang. Meskipun kemampuan militer Uni Soviet di sana bukan merupakan tandingan bagi kemampuan militer di Subic dan Clark, tetapi fasilitas-fasilitas tersebut memberikan kemampuan Uni Soviet untuk memproyeksikan diri ke Lautan Hindia, mengganggu SLOC dalam keadaan konflik, melakukan "surveillance" dan intelijen di kawasan Asia Tenggara, dan sebagai fasilitas peristirahatan untuk angkatan lautnya di kawasan Asia Tenggara. Karena itu Uni Soviet tetap akan berperan di kawasan Asia Tenggara, meskipun sifatnya untuk sementara negatif karena tergantung pada kehadiran militer di Cam Ranh dan Danang saja.

Persoalan masa depan bagi Uni Soviet dan negara-negara Asia Tenggara ialah bagaimana mungkin menjalin hubungan yang lebih baik. Peningkatan hubungan ekonomi dan keterlibatan dalam membantu mencari penyelesaian konflik di Kampuchea akan sangat membantu ke arah itu. Perkembangan Cina juga perlu diikuti dengan saksama karena pengaruhnya terhadap kawasan Pasifik-Asia juga semakin dirasakan sejak negara ini membuka diri dan melakukan modernisasi. Kongres PKC ke-13, November 1987 yang lalu, menegaskan bahwa strategi modernisasi Cina yang diletakkan semenjak Desember 1978 oleh Deng Xiao-ping akan dilanjutkan. Pada awal 1987 terjadi ketidakpastian sewaktu Hu Yaobang dicopot selaku sekretaris jenderal PKC karena demonstrasid para mahasiswa yang menuntut hak-hak demokrasi yang lebih besar.

Dengan penegasan baru ini dapat diharapkan bahwa untuk 10-15 tahun mendatang Cina akan terus melakukan pendekatan-pendekatan positif kepada negara-negara di Pasifik-Asia untuk menunjang modernisasi, memperoleh modal dan teknologi dari negara Barat, termasuk Jepang, dan mengimbangi hubungan dengan Uni Soviet melalui peningkatan hubungan dengan Amerika Serikat.

Masalah RRC

Masalah strategis yang timbul bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ialah apakah RRC yang modern nanti akan tetap mencoba untuk melaksanakan hegemoninya di kawasan Asia Tenggara, karena Cina merupakan negara besar satu-satunya yang berdekatan dengan kawasan Asia Tenggara ini. Alasan bagi kekhawatiran ini cukup, karena masih adanya claim territorial yang bertumpangtindih atas Kepulauan Paracels (antara RRC dan Vietnam), dan Kepulauan Spratleys (antara RRC, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Filipina). Dalam menghadapi claim atas Kepulauan Spratleys baru-baru ini ditunjukkan bahwa Cina tidak enggan untuk mempergunakan kekuatan militer (angkatan lautnya). Alat untuk intervensi, berupa hubungan dan solidaritas dengan partai komunis lokal, juga masih dipertahankan meskipun makin lama makin tidak ampuh karena ketahanan nasional dan perkembangan masing-masing negara di Asia Tenggara, dan juga karena ideologi komunis makin lama makin pudar daya tarik ideologisnya bagi rakyat di kawasan.

Di samping itu, masalah warga negara setempat yang berketurunan Cina masih menjadi persoalan di beberapa negara Asia Tenggara, sehingga dapat merupakan alasan lain untuk menjalankan intervensi di masa yang akan datang, karena beberapa kebijakan Cina di bidang ini masih tidak jelas dan saling bertentangan. Tetapi dalam bidang ini pun kemungkinan intervensi juga sudah sangat berkurang karena proses nation building yang telah maju, terutama di Indonesia. Untuk sementara negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Vietnam, beranggapan bahwa RRC dalam 10-15 tahun mendatang berniat menjalani hubungan baik demi strategi modernisasinya dan karena itu akan menahan diri, dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara-negara di kawasan. Sementara itu di bidang ekonomi di satu pihak Cina dapat merupakan kompetitor ekonomi utama bagi ASEAN, tetapi juga dapat menjadi partner perdagangan dan partner politik di fora ekonomi internasional sebagai sesama anggota Dunia Ketiga.

Kalau Cina telah modern dan mempunyai kekuatan militer, terbuka kemungkinan Cina akan membawakan diri kembali sebagai suatu negara besar, di mana Asia Tenggara dilihat sebagai salah satu kawasan di mana mereka mempunyai kepentingan baik secara langsung (Kepulauan Paracels dan Spratleys) maupun secara tidak langsung. Tetapi modernisasi yang dilandaskan hubungan dengan negara-negara Barat dan dengan tetangganya diharapkan mendorong Cina untuk menjalankan pengaruhnya itu sebagai negara besar yang ikut memperhatikan hubungan dengan dunia internasional dan regional. Artinya, Cina bukan lagi merupakan suatu negara revolusioner yang secara liar mau memaksakan kehendaknya di kawasan sekitarnya dengan cara-cara apa saja (subversi, tekanan-tekanan politik, ancaman penyerbuan dan sebagainya). Di samping itu negara-negara di kawasan sendiri sudah akan lebih siap karena berkesempatan menciptakan ketahanan nasional masing-masing, dan ketahanan regional, serta pengaturan hubungan yang seimbang dengan empat negara besar di kawasan yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang dan dengan Cina sendiri, agar dapat menghadapi tekanan-tekanan yang bagaimanapun juga dimasa depan dari Cina atau negara besar lainnya. Yang dapat pula diusahakan adalah suatu penegasan dari RRC di masa depan mengenai hubungan antar partai komunis dan masalah kehadiran warga negara keturunan Cina di kawasan.

Dilihat dari segi ekonomi, RRC akan berkembang terus dalam usaha modernisasi mereka, dan karena itu perlu diperhatikan apa pengaruhnya di

Digitized by Google

Ada pendapat RRC segera menjadi satu NIC

masa yang akan datang untuk kawasan.

Ada yang berpendapat bahwa RRC akan segera menjadi suatu NIC (negara industri baru) karena perdagangan luar negerinya sudah mencapai lebih dari US$ 75 milyar, dan laju pertumbuhannya sangat tinggi selama tahun 1980-an ini (antara 7-10%).

Ada pula yang melihat bahwa keberhasilan yang mereka capai di bidang pertanian seperti terlihat dalam fase 1979-1985 tidak akan berlanjut, sementara kemacematan-kemacetan masih akan dialami di bidang industri dan di kota-kota karena persoalan harga, gaji, inflasi dan pengangguran, yaitu persoalan-persoalan yang pada dasarnya adalah bagaimana mencari campuran yang tepat antara suatu ekonomi yang direncanakan secara sentral dan kekuatan pasar yang tidak mudah diatasi dalam usaha pembangunan fase berikut ini. Kesulitan ini ditambah pula karena adanya keperluan untuk melakukan perombakan-perombakan di bidang politik, terutama dalam soal mengurangi intervensi partai ke dalam aparat pemerintahan dan birokrasi serta penentuan bilamana dan bagaimana partisipasi rakyat benar-benar dilaksanakan.

Bagaimanapun perkembangannya, yang jelas ekonomi RRC mulai terbuka dan karenanya akan menjadi lebih internasional sifatnya. Dengan ekonomi yang besar karena besarnya negara dan jumlah rakyatnya, maka pasti ekonomi RRC akan mempengaruhi ekonomi internasional dan regional. Yang telah dirasakan ialah bahwa dalam berbagai bidang industri ringan, terutama dalam tekstil dan pakaian jadi, persaingan dari RRC cukup besar. Tetapi yang juga terjadi ialah perdagangan antar negara-negara kawasan dengan Cina dengan potensi yang bertambah besar di masa yang akan datang. Ekonomi RRC juga dapat menggairahkan ekonomi regional bila usaha modernisasi mereka berhasil.

Bidang hankam, yang merupakan bidang terakhir dari usaha modernisasi Cina, tetap menjadi pokok perhatian negara-negara di kawasan, karena keberhasilan pembangunan angkatan udara dan angkatan laut bisa menjadi sarana untuk mempengaruhi kawasan di masa yang akan datang, seperti yang telah terjadi dengan penggunaan Angkatan Laut Cina Kepulauan Spratleys terhadap Vietnam baru-baru ini. Peningkatan dan modernisasi PLA (People's Liberation Army) dilakukan secara kualitatif, dan karena itu akan mengarah pada peningkatan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang justru dapat menjadi ancaman yang lebih nyata di masa mendatang daripada hubungan antar partai komunis dan masalah warga negara keturunan Cina di negara-negara di Asia Tenggara.

Peran Cina dalam penyelesaian Kampuchea sangat penting, karena dukungannya terhadap Khmer Rouge sebagai kekuatan pokok dalam CGDK yang melawan pendudukan Vietnam di Kampuchea, dan karena tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap Vietnam di perbatasannya. Dalam rangka normalisasi hubungan dengan Uni Soviet mungkin Cina bersedia melakukan kompromi tertentu dalam soal Kampuchea yang akan merupakan tekanan terhadap Vietnam ataupun Khmer Merah Rouge.

Penyelesaian Hongkong, Macau dan Taiwan yang aman dan korek akan sangat menentukan garis kebijakan RRC dan pandangan kawasan/dunia tentang RRC di masa mendatang. Perkembangan RRC, dengan Hongkong dan Taiwan sebagai bagiannya, di abad ke-21 akan merupakan suatu kekuatan yang harus diperhitungkan untuk masa depan oleh negara-negara di kawasan, dan baru pada saat itu dapat menjadi imbangan yang riil terhadap kekuatan-kekuatan besar lainnya di kawasan.

Hubungan RRC dengan Jepang akan tetap bersifat ambivalen karena Jepang dibutuhkan oleh mereka sebagai sumber modal dan teknologi, tetapi sekaligus Jepang masih sangat dicurigai karena sejarah dan rivalitas antar negara besar tersebut di Asia. Karena itu hubungan ekonomi akan meningkat terus, tetapi reserve dalam hubungan keamanan dan politik masih akan tetap berlangsung untuk waktu yang lama.

Kalaupun Cina dianggap ancaman di abad ke-21, diperkirakan kedudukannya dan cara-caranya akan lebih mirip dengan negara-negara besar lainnya dengan satu kecualian, ialah letaknya yang begitu berdekatan dengan kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya karena RRC telah modern dan karena itu merasa adanya keterikatan pada orde internasional dan regional saja, tetapi juga karena peralatan-peralatan dahulu untuk melakukan ancaman seperti "party to party relations" dan kehadiran warga negara keturunan Cina di negara-negara Asia Tenggara bukan lagi senjata ampuh berhubung negara-negara di kawasan sudah mapan dalam "nation building"-nya masing-masing.

Ancaman dari RRC yang main menonjol untuk masa depan ialah cara-cara konvensional yang hendak dilakukan RRC untuk melaksanakan hegemoninya di kawasan Asia Tenggara, seperti penyerbuannya ada tahun 1979 ke Vietnam, dan pendudukan militer terhadap klaimnya di Kepulauan Spratleys baru-baru ini. Di masa mendatang dengan berhasilnya modernisasi angkatan laut dan angkatan udaranya,

Digitized by Google

maka kenyataan-kenyataan ini perlu diingat dan dicatat oleh negara-negara Asia Tenggara, sehingga sedini mungkin diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

Untuk kini dan masa depan maka cara-cara intervensi ataupun tekanan-tekanan politik dan militer dari negara-negara besar akan berkurang efeknya karena ditentang oleh opini dunia seperti terlihat dalam konflik-konflik di Kampuchea, Afghanistan maupun di Amerika Tengah.

Harapan Baik

Jelas dari uraian di atas bahwa perkembangan kawasan Pasifik-Asia di masa yang akan datang akan cukup memberikan harapan-harapan baik, karena : Kemungkinan terjadinya perang atau konflik besar yang akan meliputi negara-negara adikuasi atau negara-negara besar secara langsung sudah jauh berkurang. Pertama, karena persenjataan nuklir akan tetap menjadi penangkal untuk itu. Kedua karena peredaan ketegangan dan perlucutan senjata yang terutama disebabkan oleh keterbatasan perkembangan ekonomi masing-masing negara besar akan mengurangi kesempatan untuk itu (kecuali Jepang). Sebaliknya Jepang di masa mendatang akan ditekan terus untuk meningkatkan kemampuan militernya dalam rangka berbagi beban dengan Amerika Serikat. Meskipun kemampuan militer itu masih akan terbatas sifatnya. Kemungkinan Jepang sendiri terpaksa mempersenjatai dirinya secara mutlak sangat kecil, tetapi tetap harus diusahakan bersama supaya tidak sampai terjadi.

Perkembangan ekonomi telah menjadi masalah utama di kawasan di antara semua negara-negara, baik yang berdasarkan sistem perencanaan terpusat ataupun yang berlandaskan sistem pasar. Tantangan-tantangan di bidang ini besar sekali dan banyak yang hanya dapat diselesaikan secara global. Namun kawasan ini mempunyai harapan terbaik untuk dapat mengatasinya karena dinamis, fleksibel dan pragmatis, juga di berbagai negara-negara sosialis. Memang dalam hal Korea Utara dan Vietnam hambatan-hambatan masih sangat besar dan hasil-hasilnya masih diragukan untuk masa depan.

Tantangan untuk melakukan keterbukaan dalam sistem politik makin mendesak karena hasil-hasil dalam perkembangan ekonomi sangat membutuhkannya. Hal ini tidak hanya terjadi dalam sistem semi atau "soft-authoritarian" seperti di Thailand, Korea Selatan, Taiwan, tetapi juga di negara-negara sosialis seperti RRC, Uni Soviet, Vietnam, meskipun cara dan intensitas serta hasilnya berbeda-beda karena perbedaan sistem dan situasi.

Kerjasama regional makin menjadi relevan dan berkembang. Dimulai dengan ASEAN, kini telah berkembang pula SAARC, South Pacific Forum dan alignment ekonomi di Asia Timur.

Seperti dikatakan di atas, kerjasama semacam ini kini mendapat kesempatan yang luas dengan terjadinya kembali detente antara negara-negara adikuasa dan karena trend multipolarisasi akan berkembang lebih lanjut. Karena itu ide ZOPFAN dari ASEAN akan mendapat kesempatan bagi terselenggaranya suatu orde regional di kawasan Asia Tenggara baik antara ASEAN dengan negara-negara di kawasan dengan negara-negara besar.

Dalam rangka ini penyelesaian konflik Kampuchea telah mendapat dorongan ke arah penyelesaian bukan saja karena inisiatif tokoh-tokoh Kampuchea, yaitu Pangeran Sihanouk dan Hun Sen, tetapi juga karena keinginan negara-negara besar, terutama antara Uni Soviet dan RRC untuk mendorong para pelaku menyelesaikannya. Begitu pula Vietnam yang tersangkut dalam konflik tersebut, secara bertahap semakin menyadari bahwa demi pembangunan ekonomi Vietnam, mereka harus pula berkompromi dalam konflik Kampuchea dan akhirnya menarik pasukan-pasukannya dari sana.

Dalam rangka ZOPFAN ini pula harus dilihat usaha ASEAN untuk menciptakan NWFZ di kawasan Asia Tenggara. Usaha ini merupakan pengisian ide ZOPFAN dan adalah usaha regional dalam perlucutan senjata. Karena pendekatan regional semacam ini baru bisa berhasil kalau perlucutan senjata sentral antara kekuatan adikuasa sudah maju secara sungguh-sungguh (baik INF, START, persenjataan kimia dan konvensional) sehingga menciptakan saling percaya, maka usaha ASEAN ini merupakan usaha yang bersifat jangka menengah.

Meskipun terdapat segi-segi positif di atas, perkembangan kawasan Pasifik-Asia di masa depan juga penuh dengan ketidakpastian karena situasi keamanan masih bergeser (fluid), "alignments" yang ada masih bisa berubah-ubah, perimbangan kekuatan juga masih bergeser, dan ekonomi internasional penuh dengan ketidakpastian serta kesulitan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang mendalam dan fundamental terhadap perkembangan-perkembangan dekade ke-80-an ini. Dalam keadaan ini, bagi negara-negara ASEAN, ketahanan nasional merupakan syarat utama untuk survial dan sekaligus merupakan sumbangan negara-negara berkembang untuk stabilitas, perkembangan dan keamanan kawasan di masa yang akan datang. Terutama pengendalian ekonomi yang sehat penting sekali, sedangkan pembangunan dan pelembagaan politik makin lama makin mendesak pula. Di dalam hal ini persoalan regenerasi sedang dialami di tiap-tiap negara ASEAN. Pelaksanaan pergantian pimpinan pemerintahan yang lancar di masa mendatang akan menandakan suatu kematangan politik yang sangat penting di dalam membuka sistem politik yang berlaku untuk masa depan.

Ketahanan regional, terutama di negara-negara ASEAN, penting bagi terselenggaranya orde regional yang akan mendapat pula dukungan dari negara-negara Indocina lainnya. KTT ASEAN di Manila pada bulan Desember 1987 juga telah mampu meletakkan dasar kerjasama baru, terutama di bidang ekonomi yang memungkinkan ASEAN dan karena itu pula akan tetap berkelanjutan atau "viable" di masa yang akan datang. Orde regional itu hendaknya dapat pula mengatur hubungan dengan negara-negara besar sedemikian rupa sehingga terdapat suatu keseimbangan dari kehadiran negara-negara besar di kawasan, yang positif bagi negara-negara ASEAN. Hal ini berarti bahwa tidak ada suatu negara besarpun, termasuk Cina, yang dapat menjalankan hegemoninya di kawasan kelak di kemudian hari. Dalam kerangka inilah perlu dinilai peranan dan ongkos pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Philipina untuk masa depan. sampai saat ini pangkalan-pangkalan tersebut merupakan pengimbang bagi pangkalan Uni Soviet di Cam Ranh dan Danang, dan juga dilihat sebagai jaminan kehadiran Amerika Serikat di seluruh kawasan Pasifik-Asia, baik di bidang militer, maupun di bidang politik dan ekonomi.

Tampaknya tidak dapat dihindari bahwa untuk mempertahankan kehadiran Amerika Serikat itu, Jepang harus bersedia berbagi beban dengan ikut membiayai pangkalan-pangkalan tersebut. Skema ini telah diusulkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Carlucci, di bulan Maret 1988 ini di depan Kongres Amerika Serikat, dan mungkin perlu dipertimbangkan serius oleh Jepang, Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya.□

Digitized by Google

Maria Sugiharto

MARCEL MARCEAU YANG PANTOMIME

Pantomime, sebuah drama yang diekspresikan dengan gerak tari

Awal bulan Juni 1988 ini, di Jakarta kedatangan seorang seniman pantomime dari Perancis yang sudah cukup lanjut usia (hampir 70 tahun), tetapi kemahirannya tak pelak lagi sejajar dengan seorang *Empu,* dan memang pada hakekatnya dia adalah EMPU dari seni ekspresi gerak, yang dinamakan PANTOMIME.

Apakah Pantomime itu, dan mengapa Marcel Marceau seperti berarti Pantomime. Pantomime adalah sebuah drama yang diekspresikan dengan gerak dan tari. Nama pantomime berasal dari jaman Yunani kuno, dan telah berkembang di Afrika dan Asia. Jenis kesenian yang sifatnya teater ini diciptakan mula-mula oleh seorang penyair Yunani *Sophron de Syracuse* pada abad ke V. Semula gerakan-gerakannya berupa sketsa-sketsa pendek yang menggambarkan tipe-tipe tingkatan sosial masyarakat, dimana pemain pantomime menyindir kelakuan mereka.

Di Roma, dibawah Pemerintah Republik, sindiran-sindiran ini berkembang sampai ke ekspresi dan mimik yang menunjukkan orang sedang jatuh cinta, yang kikir, sampai kepada tipe-tipe populer pada waktu itu seperti misalnya Gladiator, Serdadu, Penyair dan sebagainya. Pantomime tidak dapat begitu berkembang di Roma dibawah Pemerintahan Kerajaan, bahkan popularitasnya menurun karena peraturan-peraturan yang ketat, dan para pemain tidak akan dapat berkomentar serta berimprovisasi kalau tidak ingin diasingkan atau disiksa. Namun demikian kolonisasi Romawi toh membawai perkembangan baru bagi kesenian Pantomime, karena pantomime berkembang di negara-negara pantai, bahkan seni pantomime membentuk suatu masyarakat budaya antar bangsa yang berbeda-beda, dibawah pemerintahan Romawi.

Setelah kerajaan jatuh, para pemain pantomime kembali menemukan kebebasannya berekspresi dan bermain, terutama pada pesta-pesta rakyat. Pantomime dapat hidup pada jaman itu, karena tradisi, dan tidak mengenal tema-tema baru. Selama beberapa abad, seni gerak (mimik) ini berkembang di sana-sini berkat para *Troubadour* — penyair lyrik dari abad ke XII dan XIII yang menciptakan hasil karyanya dalam salah satu bahasa yang disebut bahasa Occitanie ialah bahasa Perancis Selatan.

Pada abad ke-16, pantomime di Prancis berkembang dibawah pemerintah Raja Henri III, karena kedatangan para seniman dari Itali dan Spanyol. Karena para seniman lawak banyak berdatangan dari negeri di Selatan itu dan tidak menguasai bahasa Perancis, maka mereka menggunakan gerak dan mimik untuk berekspresi. Pada waktu itu muncul tokoh-tokoh seperti *Arleauin, Poli-*

Digitized by Google

chinelle, Cassandre, dan lain-lainnya, yang masing-masing merupakan tokoh tertentu dengan pembawaan serta keahlian berperan tertentu.

Pada tahun 1807, *Napoleon Bonaparte* yang di dalam pemerintahannya ikut mengatur gerakan teater, menghapus teater akrobat dan teater jalanan. Beberapa ijin teater diberikan, antara lain pertunjukan dengan peranan Arleauin. Pada waktu itu, muncul tokoh *Pierrot* yang diperkenalkan oleh *Jean Baptise Caspard Debureau* dan *Phillipe Laurent*. Debureau dengan perannya sebagai Pierrot, seperti telah menjadi satu dalam tokoh yang disegani itu selama 20 tahun, dan merupakan pemain pantomime yang paling disegani.

Etienne Decroux, pada masa peran Dunia I dan II membawa angin baru di dalam seni gerak ini, dengan teknik-teknik gerak yang baru. *Marcel Marceau,* adalah murid Decroux yang berbakat, dan dia sendiri menciptakan tokoh yang bernama BIP — yang dianggap sebagai saudara kandung *Pierrot*. Pada abad 20, pantomime dikembangkan lagi dengan seni gerak ballet.

Marcel Marceau, Empu Pantomime

Beberapa seniman pantomime pernah datang di Jakarta. Dan, pada masa *kejayaan* seni pantomime di Jakarta, ialah tahun 1970-an, TIM kedatangan beberapa seniman pantomime internasional, seperti Rolf Schaerer dari Jerman, kemudian disusul dengan biang pantomime modern Marcel Marceau, juga grup Moving picture dari Inggris, Pradel dari Perancis, Milan Sladek dari Jerman. Negara yang terkenal memiliki seniman pantomime antara lain Polandia, belum pernah mengirimkan pakarnya, dan tentu saja Amerika yang adikuasa dan memiliki segala macam seniman, belum pernah tampak mengirimkan seniman dalam bidang ini.

Dari sekian seniman pantomime, *Marcel Marceau* bisa dikatakan yang terpenting di dunia pantomime. Dia genius. Dari masa kecilnya dia memang sudah tertarik kepada benda-benda yang diam. Tetapi, dari *kediaman* obyek itu, dia mampu menghubungkan penampilan antara manusia dan obyek atau benda disekitarnya. Tubuh Marceau yang plastis, dapat mengungkapkan hubungan itu, serta merupakan media utama dalam pengungkapan serta mewakili watak atau ciri-ciri dari benda tersebut, bahkan dia mampu mencerminkan hubungan yang *emosional* dari manusia yang berelasi dengan benda tersebut. Marcel Marceau berhasil di dalam mengacu interelasi antara subyek dan obyek sehingga melahirkan makna dari bahasa gerak yang disuguhkan. Bila Debureau melahirkan tokoh *Pierrot* nya, Marceau juga melahirkan suatu karakter yang dia sebut BIP, dan di alam dunia seni pantomime BIP ini merupakan adik kandung Pierrot.

Gaya baru BIP yang disuguhkan tanpa set dan musik, sungguh merupakan gerakan yang cukup reaksioner di dalam seni pantomime yang biasa dipertunjukkan dalam teater kaya, seperti comedia *de l' art de Pari* yang penuh dengan set-set yang spektakuler serta musik symponi. Dengan Marceau, publik dicekam dengan gerakan-gerakan yang lentur, plastis, komunikatif, dengan gerakan yang bermakna serta ekpresif, hanya ditenggang oleh pencahayaan sederhana.

Digitized by Google

yat Bali pada umumnya. Namun demikian, lanjut Wapres, ternyata dapat berkembang dan menyegarkan dirinya dengan jalan menyempurnakan unsur-unsur yang sudah ada disertai dengan penumbuhan kreasi-kreasi baru. Kebudayaan Bali ternyata adalah kebudayaan yang hidup dengan dinamika yang selalu mengarah kepada penyempurnaan dan pembaharuan. Dinamika semacam itulah yang dibutuhkan bagi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebudayaan dan kesenian yang diungkapkan dalam setiap pesta kesenian Bali merupakan bukti nyata adanya dinamika tadi. Wapres yang bagi keluarga besar Golkar dipanggil Pak Dhar lebih jauh menilai, bahwa pesta kesenian yang diadakan setiap tahun ini telah amat berhasil sebagai forum untuk menumbuhkan dan menampung daya cipta para seniman dalam meningkatkan apresiasi seni masyarakat dan memperluas kesempatan masyarakat Bali, masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional untuk menikmati seni budaya Bangsa Indonesia, serta dapat membangkitkan semangat dan gairah membangun. Wapres juga menganjurkan gagasan dan pola yang serupa kiranya perlu disebarluaskan ke seluruh wilayah tanah air agar kekayaan dan keanekaragaman budaya Indonesia dapat terus dikembangkan dan dilestarikan sejajar dan sebagai unsur yang sama mutlaknya dengan pembangunan di bidang-bidang lain.

Hal yang lebih menggembirakan adalah unsur modernisasi dan unsur kreatif tumbuh dari kalangan masyarakat sendiri baik dari kota maupun dari desa-desa. Semua itu, lanjut Wapres, memperlihatkan peran serta yang aktif dari masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam setiap segi pembangunan bangsa.

Betapapun penting pengembangan kebudayaan dengan segala wujud seninya, bagi bangsa yang sedang membangun tidaklah dimaksudkan untuk sekedar dinikmati saja, tapi harus merupakan wahana untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih mulia, yaitu meningkatkan, memeratakan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan masyarakat dan bangsa baik jasmani maupun rohani.

Budaya dan seni harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pengembangan budaya harus ditujukan kepada cita rasa masyarakat, penajaman persepsi,

Fuad Hasan diantara pesta seni

mengenai baik dan buruk, bertumbuh dan lestarinya norma-norma budi yang luhur, kesetiakawanan nasional yang mendalam, disiplin nasional yang kuat, kejujuran yang tinggi, kebiasaan kerja keras yang sungguh-sungguh, untuk diterapkan di segala bidang dan pada akhirnya ke seluruh spektrum manusia Indonesia.

Wapres berharap, kebudayaan dan kesenian harus dikembangkan sebagai sarana komunikasi yang ampuh baik intern, antara lapisan golongan bangsa sendiri maupun ekstern dengan dunia internasional. Secara intern kebudayaan masing-masing golongan harus menjadi bagian dari perbendaharaan nasional yang dapat menjadi alat pemersatu bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika dengan tetap memelihara keanekaragaman budaya sebagai pencerminan budaya Bangsa. Kebudayaan dan kesenian juga harus dapat dikembangkan menjadi sarana ekonomi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain sebagai wahana untuk memajukan pariwisata yang dewasa ini sedang kita galakkan.

Di Bali dapat disaksikan betapa budaya dan seni aslinya dapat menarik peminat dan pengagum dari seluruh dunia, yang mengakibatkan tumbuhnya kegiatan usaha di berbagai bidang disertai pembukaan kesempatan kerja yang makin meluas. Namun lebih jauh Wapres mengingatkan dimana-mana selalu terdapat kecenderungan — kadang-kadang justru sebagai akibat keberhasilannya —, untuk selekas mungkin meraih sebanyak mungkin keuntungan materi kalau perlu dengan menurunkan mutu serta keaslian budaya dan seni, apa yang lazim disebut komersialisasi. Segala apa yang telah kita capai, perlu dipelihara dan ditingkatkan, terutama kualitasnya. Karena itu di dalam pengerahan segala dinamika kreativitas, hendaknya tetap dipertahankan unsur-unsur pokok yang bersifat khas dan murni Bali, agar daya tariknya tetap terpelihara dan tidak luntur. Hanya dengan demikianlah dapat dicapai suatu kelestarian budaya dan seni yang dalam jangka panjang dapat tetap menjamin berfungsinya kebudayaan dan kesenian sebagai penunjang kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa.

Salah satu atraksi kebudayaan yang disuguhkan

"Apabila yang saya kemukakan di atas tadi dapat dipegang sebagai pedoman maka, Pesta Kesenian yang kesepuluh kali ini akan merupakan kemajuan selangkah lagi ke arah penggenapan cita-cita," ujarnya. Gong dipukul tiga kali. Secara resmi pesta kesenian Bali dibuka, dan bertebaranlah wajah-wajah pilihan dengan berbagai kreasi seni pentasnya. Bali sore itu benar-benar hangat, indah dan penuh warna, layaknya sebagai sebuah pesta raksasa.□ RENDY.MS

Digitized by Google

Hari-hari penuh kepastian...

baca saja

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya no. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 Sal), 797020
Teleks 47459 Eska JKT.
Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat III Telp. 621691 - 646146 Jakarta Barat.
Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta no. 13 Telp 56213 Bandung.
Perwakilan Jawa Tengah & D.I.Y. Jl. Lamper Sari 12A Telp. 313113, Semarang.
Perwakilan Sumatera Utara Jl. Timor 14C Telp. 515089 Medan
Perwakilan Jawa Timur & Bali Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 814329, Surabaya
Sub. Perwakilan Bali Jl. Imam Bonjol 99 Telp. 3317 Denpasar

Digitized by Google

SUNTER AGUNG

pemukiman nyaman ditengah kota

PETA LOKASI

Fasilitas Lingkungan

- o Pertokoan, Pasar & Supermarket
- o Sekolah TK, SD, SMP.
- o Tempat Ibadah (Mesjid, Gereja, Vihara)
- o Puskesmas & Apotik
- o Taman-taman dan Danau Rekreasi
- o Pos Pemadam Kebakaran
- o Pos Polisi
- o Lapangan Olahraga (Tennis Indoor & Out Door Court)
- o Arena Ski-air dan Memancing.

Sarana-sarana Yang Tersedia

- o Jalan beraspal hot mix lebar 6—36 m. (Jalan-jalan utama telah serah terima kepada DKI)
- o Lampu penerangan jalan.
- o Sambungan telpon
- o Air minum dari PAM—DKI. (Ditambah dari Miniplant dan Buster Pump)
- o Bebas banjir

''Sunter Agung Sport & Recreation Centre'' yang terdiri daru 7 In-door Tennis Court + Tribune, Sport-Hall, Swimming-Pool (Olimpic size), Golf Driving Range, Club House, Multipurpose Hall, Restaurant, Amusement, Rekreasi Danau.

- Dapat diangsur 20 bulan tanpa bunga.
- Kredit jangka panjang melalui P.T. Papan Sejahtera/Citi Bank.
- Kantor pemasaran di lokasi proyek, hari Minggu/libur tetap buka.

P.T. AGUNG PODOMORO

REAL ESTATE DEVELOPERS & CONSTRUCTORS

Jl. Agung Tengah II No. 15-17, Sunter, Jakarta Utara

Phone: 490346 • 491768 • 495629 • 494733 • 680670

Telex : 49426 MORO IA (Anggota REI No. 57)

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 03[illegible] 0134
Digitized by Google

Digitized by Google